

# SAMBUTAN

Dr. CHAIRIL FAIF PASANI, M.Si. & Drs. RUSDI EFFENDI, M.Pd.



## LINTASAN SEJARAH MARITIM KALIMANTAN SELATAN

Awal Mula dan Perkembangannya Sampai  
Masa Kerajaan



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



# **LINTASAN SEJARAH MARITIM KALIMANTAN SELATAN**

**(AWAL MULA DAN PERKEMBANGANNYA SAMPAI MASA KERAJAAN)**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan Pidana**

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Gambar Sampul Depan:**

Peta Rute dan Penemuan Penjelajah Portugis Abad ke 15 dan 16 (Atas)

(Sumber: Loja do Museu de Marinha-Portugal)

Lukisan Kapal Jung Jawa: Kapal Besar Nusantara (Bawah)

(Sumber: Akhiyari Hananto, GoodNews Form-Indonesia)

### **Gambar Sampul Dalam:**

Pemandangan Pasar Terapun Banjarmasin Perkiraan Abad ke 20

(Sumber: Collectie Tropenmuseum, Amsterdam-Belanda)

Sambutan:  
Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.  
Drs. Rusdi Effendi, M.Pd.

# **LINTASAN SEJARAH MARITIM KALIMANTAN SELATAN**

(AWAL MULA DAN PERKEMBANGANNYA SAMPAI MASA KERAJAAN)

Penerbit  
Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin

# **LINTASAN SEJARAH MARITIM KALIMANTAN SELATAN**

## **(Awal Mula dan Perkembangannya sampai Masa Kerajaan)**

Copyright © Tim Penulis, Banjarmasin 2020  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xiv + 264 halaman; 17,6 x 25 cm  
ISBN : 978-602-74307-9-2

Editor:  
Hairiyadi  
Helmi Akmal

Penata Isi dan Desain Cover:  
Helmi Akmal  
Muhamad Meidy Syurbakti

Penerbit:  
Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin

Redaksi:  
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry  
Kayutangi – Banjarmasin  
Telp/Fax +625113304914  
E-mail: [pendidikan.sejarah@ulm.ac.id](mailto:pendidikan.sejarah@ulm.ac.id)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagai atau seluruhnya dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain sebagainya tanpa seizin penerbit

## SAMBUTAN DEKAN FKIP ULM



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Dekan FKIP ULM menyambut gembira terbitnya buku (prosiding) berjudul **“Lintasan Sejarah Maritim Kalimantan Selatan: Awal Mula dan Perkembangannya sampai Masa Kerajaan”**. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah hasil presentasi para pembicara utama dan pendamping dalam Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, dilaksanakan secara rutin mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Terbit atas inisiatif Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah yang menyampaikan kepada saya pentingnya menilik kembali masa lampau Indonesia bidang kemaritiman yang pernah menunjukkan “taringnya” kepada dunia.

Memang benar, secara historis bangsa kita dan maritimnya tidak terpisah satu sama lain. Nenek moyang kita dikenal sebagai seorang “pelaut”, artinya hidup mereka selalu terhubung dengan laut. Begitulah yang kita kenang sampai hari ini, hanya kata tanpa tahu akan makna. Padahal semestinya memberi inspirasi bagi bangsa kita sekarang untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tak dapat dipungkiri, kejayaan maritim dahulu menggema dan membumi seantero jagat raya. Wilayah-wilayah di Nusantara (Indonesia) menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dunia, kala itu “selangit” harganya bahkan mengalahkan besaran harga emas. Benar adanya jika dikatakan dulu Indonesia, sebut saja Nusantara, menjadi jalur transportasi laut perdagangan dunia. Melihat dari sisi geografis, letak Indonesia begitu strategis, diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Cukup menegaskan jika negara kita memiliki potensi berdaya saing dengan mengunggulkan bidang kelautan. Segera saja Indonesia memperkuat maritim, dalam arti benar-benar sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemisah antar pulau.

Semangat kejayaan maritim nenek moyang seyogyanya dapat kita warisi dalam rangka membangun Indonesia, mulai dari wilayah terluar yakni pesisir laut. Semangat tersebut dapat dipupuk dengan belajar sejarah. Sejarah bukan sekadar masa lampau, lebih dari itu, sejarah memberikan kita pelajaran “makna” hidup untuk menjadi bagian kemajuan bangsa di masa depan. Keberadaan buku ini sangat mendukung bagi pembelajar untuk memahami kondisi maritim masa lampau, bagaimana masyarakat membangun sektor kelautan, menapaki setiap anak tangga menuju kejayaan. Melalui buku yang digagas oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, para penulis mengupas dengan lugas dan tegas sejarah maritim Indonesia, utamanya Kalimantan Selatan, sesuai bidang kajiannya masing-masing.

Sebagai Dekan FKIP ULM, saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Tentu akan semakin menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang kemaritiman sebagai salah satu warisan sejarah bangsa. Kepada kolega saya, Drs. Rusdi Effendi, M.Pd. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, sekali lagi saya berucap, “selamat atas terbitnya buku ini”. Semoga memberi manfaat dan inspirasi bagi khalayak pembaca. Akhir kata, teriring doa. Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, 13 April 2020  
Dekan FKIP ULM,

**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.**

## SAMBUTAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH



Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, ucapan syukur yang mendalam terpanjat ke hadirat Allah SWT karena seizin-Nya jualah tim editor diberikan kesehatan, akal dan pikiran, serta gagasan untuk menyelesaikan penyusunan buku (prosiding) bertitel "**Lintasan Sejarah Maritim Kalimantan Selatan: Awal dan Perkembangannya Sampai Masa Kerajaan**".

Buku ini merupakan kumpulan makalah ilmiah dari narasumber utama maupun pendamping yang dihimpun tim editor seminar nasional yang telah diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2016-2019.

Rangkaian seminar nasional Program Studi Pendidikan Sejarah tersebut antara lain (1) Seminar Nasional bertema "Urang Banjar dalam Lintasan Sejarah (Eksistensi, Legitemasi Politik, Pelayaran dan Perdagangan dalam Perspektif Sejarah Lokal dan Nasional)" 5 November 2016; (2) Seminar Nasional dengan tema "Ibnu Hadjar dalam Perspektif Sejarah Sosial: Peranan dan Pejuang dalam Revolusi Fisik 1945-1949 di Kalimantan Selatan" 26 Oktober 2017; (3) Seminar Nasional bertema "Menyusuri Asal-Usul Kerajaan Negara Dipa di Kalimantan Selatan (Eksistensi dan Legitimasi Politik dalam Perspektif Sejarah versi Kerajaan-Kerajaan Jawa Timur)" 27 Oktober 2018; dan (4) Seminar Nasional bertema "Pasang-Surut Kawasan Kalimantan Selatan dalam Lintasan Sejarah Kemaritiman", 21 Oktober 2019. Kesemuanya dilaksanakan di Banjarmasin.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. (Rektor ULM) yang selalu membantu kelancaran seminar. Terima kasih pula disampaikan kepada Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si. (Dekan FKIP ULM) yang banyak memberi bantuan dana melaksanakan seminar nasional sampai penerbitan buku (prosiding) ini. Semoga Allah SWT meridhai dan perbuatan beliau berdua selalu dicatat sebagai amal ibadah. Selanjutnya kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas



Indonesia), Prof. Dr. Anhar Gonggong (Guru Besar Ilmu Sejarah dan pengajar di Lembaga Pertahanan Nasional), Devan Firmansyah, S.Pd (Edukator Museum Mpu Purwa Kota Malang, Peneliti dan Penggiat Sejarah yang tergabung dalam Komunitas Jelajah Jejak Malang), dan Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si (Guru Besar Sosiologi dan Sejarah Maritim Universitas Diponegoro), terima kasih telah bersedia menjadi narasumber utama dan memberikan ilmunya dalam seminar nasional yang kami selenggarakan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen *homebase* Program Studi Pendidikan Sejarah, yaitu Drs. Hairiyadi, M.Hum., Dra. Hj. Rochgiyanti, M.Si., M.Pd., Drs. Yusliani Noor, M.Pd., Wisnu Subroto, S.S., M.A., Mansyur, S.Pd., M.Hum., Heri Susanto, M.Pd., Melisa Prawitasari, M.Pd., Sriwati, M.Pd., dan Fitri Mardiani, M.Pd. yang selalu berpartisipasi dalam sukseksi setiap kegiatan ilmiah pada Program Studi Pendidikan Sejarah.

Pengakhiran. Kepada Mansyur, S.Pd., M.Hum. (Sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah), Drs. Hairiyadi, M.Hum. selaku Kepala Editor, dan Helmi Akmal (Staf Program Studi Pendidikan Sejarah) yang diberikan tugas mengumpulkan dan mengedit makalah, hingga mendesain sampai buku (prosiding) ini terbit, tiada kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih tiada tara. Saya menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, tapi inilah karya yang bisa kami sumbangkan dari sebagian kecil karya ilmiah kesejarahan. Semoga memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Saya berharap buku ini mampu menjadi bacaan atau referensi tambahan bagi para akademisi baik dosen, mahasiswa dan lain sebagainya, maupun pemerhati sejarah lokal/daerah utamanya yang pernah terjadi di kawasan Kalimantan Selatan maupun sejarah nasional. Wassalam.

Banjarmasin, 13 April 2020  
Koordinator Program Studi,

**Drs. Rusdi Effendi, M.Pd.**

## PENGANTAR PENYUNTING

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, buku (prosiding) yang telah dirancang jauh hari dapat diterbitkan, berjudul "**Lintasan Sejarah Maritim Kalimantan Selatan: Awal Mula dan Perkembangannya sampai Masa Kerajaan**". Tema mengenai kemaritiman sengaja dipilih guna mengingatkan kembali kepada khalayak, khususnya generasi muda, bahwa Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan terbesar di dunia yang pada masa lampau memiliki kejayaan maritim luar biasa.

Budaya maritim yang dirintis oleh Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi 'pemantik' semangat bahari masyarakat. Renungkan, pada masa lampau pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Nusantara berkembang sangat pesat hingga berhasil menjadi salah satu tempat paling ramai di kawasan Asia. Para saudagar, pelancong, bahkan penjelajah Eropa datang ke Nusantara baik sekadar menjajakan dagangan maupun bermaksud membentuk koloni. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di daerah-daerah Nusantara, masa Hindu-Budha sampai Islam, menjadikan pesisir sebagai basis kekuatan. Mendirikan pusat militer yang bahkan pada masa revolusi fisik Indonesia (1945-1949) tetap digunakan sebagai 'jalan' memobilisasi pejuang ke daerah-daerah untuk menggempur penjajah. Ini tanda bahwa laut begitu penting. Meskipun demikian, bak uap air yang hilang ditelan udara. Memoar akan kejayaan maritim kita tak terdengar lagi. Segalanya telah dialihkan ke jalur darat dan udara. Keromantisan masa lalu akan jayanya maritim tidak dielukan, membuat generasi penerus kurang mengenal seluk-beluk kemaritiman. Padahal, walaupun waktu terus berubah, laut akan tetap menjadi laut yang menyimpan kekayaan alam melimpah, perlu dimanfaatkan juga dijaga dengan membangun kembali semangat maritim. Hadirnya buku ini diharapkan mampu menjadi 'vitamin' bagi masyarakat dalam mengenal kembali maritim utamanya kedaerahan di Indonesia.

Terbitnya buku ini tentu berkat kerjasama pihak panitia dan dukungan dari pihak lainnya. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr.

Chairil Faif Pasani, M.Si. selaku Dekan FKIP ULM yang telah memberi bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Drs. Rusdi Effendi, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, para pembicara utama seminar antara lain Prof. Susanto Zuhdi, Prof. Anhar Gonggong, Prof. Yety Rochwulaningsih, dan Devan Firmansyah, S.Pd. yang memperbolehkan makalahnya 'diotak-atik' lalu disatukan menjadi sebuah buku (prosiding). Sedapat mungkin, selaku penyunting, kami melakukan edit makalah dengan hati-hati demi menjaga "keorisinilan" isi atau makna yang terkandung dalam makalah.

Berikutnya, terima kasih kepada para penulis pendamping, Dosen-Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, mahasiswa, alumni, dan khalayak umum yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar nasional. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pembicara utama memberi manfaat menambah khazanah pengetahuan, ibarat pepatah "mengisi gelas yang gelap dengan secercah cahaya yang terang-benderang". Akhir kata, permohonan maaf menjadi 'pamungkas' mengintrospeksi apabila terdapat kekurangan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Wassalam.

Banjarmasin, 13 April 2020

**Tim Penyunting**

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FKIP ULM .....	vii
SAMBUTAN KOORDINATOR PRODI .....	ix
PENGANTAR PENYUNTING .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I SEKILAS TENTANG KEMARITIMAN**

Budaya Bahari dan Negara Maritim dalam Perspektif Sejarah Indonesia ....	1
--	---

**Susanto Zuhdi**

Melacak Kejayaan Maritim dan Terbentuknya Masyarakat Kosmopolitan Kalimantan Selatan .....	21
--	----

**Yety Rochwulaningsih**

Perang Ganter dan Kemungkinan Hubungan Jawa dan Kalimantan Selatan Abad ke XIII sampai XVI .....	35
--	----

**Devan Firmansyah**

Sekilas tentang Kerajaan Negara Dipa di Kalimantan Selatan (Sebuah Analisis Antara Mitologi dan Realitas Sejarah) .....	68
---	----

**Rusdi Effendi**

### **BAB II PERKEMBANGAN MARITIM MASA KERAJAAN**

Pelabuhan Sungai dan Laut di Kalimantan Selatan dari Era Kerajaan Suku Hingga Kesultanan Banjarmasin .....	86
--	----

**Yusliani Noor**

Pelayaran dan Perdagangan dalam Dinamika Politik Kesultanan Banjar Abad ke 17/18 .....	96
--	----

**Hairiyadi**

Mengenal Kerajaan Tanah Bumbu: Berporos Maritim (Sejarah Perkembangan Politik Wilayah Kesultanan Banjar di Tenggara Kalimantan Selatan Abad 17 Sampai 18) .....	105
---	-----

**Rusdi Effendi**

Dinamika Kerajaan Bugis Pagatan di <i>Landschap</i> Tanah Bumbu Tahun 1842-1900 .....	210
<b>Mansyur</b>	
<b>BAB III KAJIAN SEJARAH LOKAL LAINNYA</b>	
Ratu Zaleha: Simbol Pejuang Perempuan Banjar dalam Menghadapi <i>Kumpeni</i> Belanda Tahun 1900-1906 .....	237
<b>Helmi Akmal</b>	
Mereka Nasionalis, Patriotis, Sekaligus Pemberontak (Menyoroti Persoalan Para Pemimpin Laskar Darul Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia) .....	243
<b>Anhar Gonggong</b>	
Hassan Basry-Ibnu Hadjar dan Mitos Harta Karun Ibnu Hadjar .....	251
<b>Yusliani Noor</b>	
<b>PENYUNTING</b> .....	263



**BAB I**  
**SEKILAS TENTANG KEMARITIMAN**

# **BUDAYA BAHARI DAN NEGARA MARITIM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA**

**Susanto Zuhdi**

susanto\_zuhdi@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Kata bahari dan maritim, sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun kedua kata itu pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Kata maritim memiliki arti selain tentang laut. Begitu pula pada kata bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi. Secara konseptual dan makna substansialnya, bahari lebih tepat dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim).

Pada karya tulis "Nusantara: Silang Bahari" untuk buku mengenang Denys Lombard, A.B. Lopian menyebut istilah "kebudayaan bahari" dan "negara maritim" (Lopian dalam Chambert-Loir dan Ambary, 1999:86-87). Namun Prof. Lopian tidak memberikan ciri-ciri yang membedakan kedua makna kata tersebut. Dalam buku kumpulan tulisan persembahan 75 Tahun Prof. Hasjim Djalal, pakar hukum laut ini bercita-cita "menjadikan Indonesia yang tadinya Negara Kepulauan berubah menjadi Indonesia Negara Maritim". Ungkapan itu disitir dalam Sekapur Sirih oleh Ketua Lembaga Laut Indonesia (Yusuf, 2010:vi). Namun Prof. Djalal di dalam karyanya sendiri tidak menyebut "negara maritim" untuk Indonesia kecuali justru menyebut negara-negara maritim di seluruh dunia dan sama sekali juga tidak menyinggung kata "bahari". Prof. Djalal menyebut Indonesia sebagai "Negara Kepulauan" dan "Negara Nusantara".

Adapun Dr. Daud Tanudirdjo dalam pengantar sebuah buku mengenai *Perahu layar tradisional Nusantara* (Horridge, terjemahan 2015) menyebut beberapa istilah mengenai kebudayaan, tetapi tidak menggunakan kata bahari.

---

\* Disampaikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Pakar Arkeologi dari UGM itu menyebut beberapa istilah kebudayaan kelautan (*maritime*), peradaban kelautan, peradaban kepulauan, dan budaya kepulauan (*archipelagic culture*).

Kata bahari dan maritim terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI (1996), kata bahari memiliki beberapa arti: Pertama, dahulu kala, kuno, tua sekali. Dalam kaitan ini ada ungkapan "adat yang bahari", atau sebagai verba bahari juga bermakna "bertuah", maka boleh ada ungkapan "keris bahari". Begitu KBBI mencontohkan. Kedua, indah atau elok sekali. Ketiga, mengenai laut. Jika ketiga kata itu dirangkaikan akan berbunyi "dahulu kala (yang) indah sekali (di) laut".

Istilah bahari dianggap lebih cocok dikaitkan dengan budaya karena beberapa argumentasi berikut ini. Pertama, kata "bahari" merupakan lema yang sudah dulu masuk ke dalam kamus, jauh sebelum orang Eropa memperkenalkan kata maritim, yang berasal dari "*mare*". Kedua, bahari dalam arti masa lampau tentu berkaitan dengan sejarah, dalam hal ini menunjuk khususnya pada dua kerajaan yang jaya: Sriwijaya dan Majapahit. Ketiga, jika dilacak lebih ke belakang lagi keulungan pelaut-pelaut Austronesia yang mendiami kepulauan ini, sesungguhnya telah memperlihatkan "adat bahari", dalam milenium pertama Masehi. Adat sebagai arti kebiasaan merupakan tradisi bahari yang menunjuk pada kemampuan suku-suku bangsa di Nusantara dalam aspek pengetahuan dan teknologi pelayaran serta perkapalan.

Dalam KBBI, selain lema maritim terdapat pula kata *marine*, yang artinya berhubungan dengan laut dan angkatan laut. Sedangkan kata *marinir* adalah pengertian militer atau tentara yang menjadi bagian dari angkatan laut. Kata maritim agaknya diserap ke dalam masyarakat kepulauan, ketika orang Eropa menyebut laut dengan "*mare*".

Selain kata "*sea*" dalam bahasa Inggris dijumpai "*maritime*", yang akar katanya adalah "*mare*" berasal dari bahasa Latin. Dalam *Webster's New College Dictionary* (third edition 2008) terdapat kata *marine* adj Latin *marinus* < *mare*, *sea*; sebagai kata benda (*noun*): *The naval or mercantile ships or shipping fleet of*



*a country; a soldier serving on a ship or at a naval installation; the government department in charge of naval affairs in some nations.*

Lema *maritime* sebagai ajektif dalam kamus itu menunjuk pada: 1. *Located on or close to the sea; 2. of or connected with shipping or navigation; 3. or suggesting a mariner, Latin maritimus.* Jadi sesungguhnya berasal juga untuk membedakan "*sea culture*", dalam hal ini "budaya bahari", dan "*maritime state*" untuk "negara maritim". Perlu ditekankan bahwa substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada "lokasi yang dekat dengan laut". Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Tambahan pula makna maritim memperlihatkan pengertian unsur-unsur yang menjadi syarat tegaknya kedaulatan teritorial, khususnya bagi sebuah negara bercorak kelautan seperti Indonesia yang sudah seharusnya memiliki kekuatan di laut (*sea power*) dan didukung oleh angkatan laut (*naval power*).

Kembali pada makna indah atau elok sekali di laut pada masa bahari, sebagaimana disinggung di atas dapat juga berarti kejayaan kerajaan-kerajaan maritim. Jadi merupakan argumen yang mudah diterima ketika Ir. Joko Widodo dalam pidato pelantikan sebagai Presiden ke-7, bertekad mengembalikan bangsa (Indonesia) jaya di laut dan membangun Indonesia sebagai negara maritim dan menjadikan poros maritim dunia. Maksud pidato itu adalah agar masa kejayaan di laut jangan hanya berlangsung pada masa dahulu atau zaman bahari saja, tetapi untuk mampu menjawab permasalahan kini dan masa depan sesuai dengan tantangan zaman.

Makalah ini memaparkan kaitan antara budaya bahari dengan konsep negara maritim dalam perspektif historis, yang diharapkan dapat menjadi kajian dan analisis perbandingan baik dalam meningkatkan metodologi maupun untuk diambil manfaatnya sebagai pelajaran sejarah (*lesson learned*).

## **PERSPEKTIF HISTORIS**

Zaman bahari dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia umumnya dikaitkan dengan masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Menurut George Mc Turnan Kahin kedua kerajaan itu telah memberi rasa kebanggaan

sehingga menjadi faktor pembentukan nasionalisme Indonesia (Kahin, 1952). Ini relevan dengan pendapat sejarawan Peter Munz bahwa masa lampau meskipun samar-samar dapat menjadi modal mewujudkan perasaan bersama suatu komunitas (*a sense of community*) dan faktor membentuk identitas bangsa (Munz dalam Bentley, 1997:851).

Pendekatan bahari maupun maritim dalam pembentukan bangsa melalui sejarah pada umumnya belum banyak dilakukan. Munculnya tema sejarah maritim terutama setelah A.B. Lopian merintis setidaknya pada tahun 1980-an. Rupanya mengubah pola pikir (*mindset*) dan membentuk sikap melalui pendidikan memerlukan waktu satu generasi. Umum didengar bahwa negara Indonesia merupakan "laut yang ditaburi pulau-pulau" bukan "pulau-pulau yang di kelilingi laut". Ungkapan tsb merupakan pernyataan A.B. Lopian dalam disertasi yang dipertahankan di UGM pada 1987. Kini pemikiran dan pernyataan akademis Prof. A. B. Lopian telah membuahkan hasil dalam pembentukan karakter, dalam hal ini cara dan sikap pandang bangsa pada kenyataan geografis suatu negara dengan duapertiga laut dan belasan ribu pulau bernama Indonesia.

Bukti sejarah Indonesia sebagai bangsa bahari diperlihatkan dari tradisi suku laut yang telah melakukan pelayaran dalam abad yang lalu. Menurut catatan Nooteboom bahwa pelaut-pelaut dari Sumatera barat telah mengarungi Samudera Hindia hingga ke pantai timur Afrika dan Madagaskar secara tetap. Bukti-bukti somatik, bahasa, tradisi menanam, bahkan musik terdapat kesamaan (Nooteboom, 1972:11).

Adapun pelayaran dan adanya pengaruh kebudayaan Makassa-Bugis di Pantai Utara Australia menurut A.A. Cense dan Heeren merupakan bukti bahwa pelaut-pelaut Indonesia sudah lebih dahulu tiba di benua itu daripada bangsa Eropa kemudian. Pada awalnya memang masih diperkirakan dalam abad ke-16 sampai terdapat catatan dari para pengembara Belanda dalam abad ke-17 dan ke-18 yang menyebut tentang adanya bekas-bekas perahu atau kolonisasi Melayu (Cense dan Heeren, 1972:36).

Dalam perjalanan waktu yang panjang penggambaran mengenai pelaut-pelaut Nusantara tiba pada kisah-kisah suku Bajo. Suatu catatan tertulis

tertua mengenai orang laut ini dibuat oleh Tome Pires (Pires, 1944: 226-227). Dalam perkembangan kemudian tradisi pelayaran itu memengaruhi orang Melayu dalam cakupan rumpun yang luas besar yang mewarisi keulungan suku Bajo. Suku Bugis yang kemudian mengambil porsi yang lebih besar dalam kepiawaian di laut ini, menurut A.B. Lopian mungkin sekali mewarisi tradisi Bajo. Begitulah bahwa ternyata tidak hanya Bugis, yang dapat dilukiskan sebagai pelaut andal, melainkan juga terdapat orang Makassar, Mandar, Buton, untuk menyebut beberapa saja (Lopian, 1999:91).

Suatu catatan penting selain mengenai tradisi keulungan suku Bugis dalam melakukan pelayaran dengan jaringan yang luas adalah juga karena kemampuannya menyusun hukum dan aturan-aturannya. Suku Bugis dari Wajo telah membuat sistem hukum pelayaran dan perdagangan dalam *Lontara*. Usaha yang tidak mengenal lelah dari seorang bernama Amanna Gappa inilah lahir buku sistem hukum dimaksud (Tobing cs, 1960).

### **SRIWIJAYA: MODEL NEGARA MARITIM AWAL**

Di atas telah dikemukakan bahwa dua kerajaan pada masa bahari: Sriwijaya dan Majapahit yang disebut oleh Mr (*Meester in Rechten*) Muhammad Yamin sebagai bentuk negara republik yang pertama dan kedua, sedangkan Indonesia yang diproklamasikan 1945 adalah republik ketiga (Yamin, 1951:137). Rentang kehidupan negara Sriwijaya kurang lebih 5 abad, Majapahit kira-kira 3 abad; sedangkan NKRI 'baru' 70 tahun. Pertanyaannya akan kuat bertahan berapa lama lagi NKRI?

Sriwijaya merupakan satu di antara emporium besar di Asia, karena produk dari wilayahnya mencapai pasar-pasar di bagian barat Asia, India, dan Cina. Keinginannya untuk menjadi sebuah emporium di bagian barat Indonesia berkurang hanya karena kehadiran kapal dagang Cina pada abad ke-12 (Wolters, 1999:32).

Setelah berjaya selama 6 abad, Sriwijaya pun jatuh. Penjelasan dari aspek geografis/ekologis menunjukkan terjadinya sedimentasi sehingga pelabuhan berada jauh di pedalaman. Kota-kota Sriwijaya tidak di kelilingi komunitas pertanian; dan merosotnya jumlah penduduk; menyebabkan

kedatangan pedagang asing semakin berkurang, terutama karena ketergantungan pada hanya produk hutan. Penjelasan aspek politik karena perseteruan internal -antar penguasa lokal pembentuk federasi Sriwijaya, khususnya Palembang dan Jambi-dan faktor eksternal karena setidaknya 5 kali ibukota Palembang diserang secara fisik militer dari luar Raja Jawa dan Cola India karena tidak lagi didukung oleh angkatan laut. Sriwijaya tak mampu lagi mengendalikan armada angkatan laut yang bertumpu pada Suku atau Orang laut yang tercerai berai (Munoz, 2006).

### **MAJAPAHIT: NEGARA PERPADUAN AGRARIS DAN MARITIM?**

Berbeda dari Sriwijaya, Majapahit bahkan melampaui wilayah kekuasaan Sriwijaya, meskipun masa hidupnya lebih singkat. Memang tidak diragukan lagi bahwa kebesaran Majapahit diakui di kepulauan (Nusantara). Jika Sriwijaya bercorak maritim, Majapahit merupakan negara agraris semikomersial (Djafar cet. Pertama 1978; 2010). Dengan hasil pertanian dari pedalaman kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini Sriwijaya mengeksplor komoditas tsb melalui sejumlah pelabuhan di pantai utara Jawa. Dengan ciri seperti ini maka Majapahit juga mengendalikan aspek kemaritiman di Nusantara. Penjelasan mengenai keruntuhan Majapahit lebih banyak diberikan dari aspek politik, tidak sekomprensif Sriwijaya yang multisebab. Konflik internal berupa perang-perang saudara memuncak dalam perang Paregreg (peristiwa huru-hara) dianggap menjadi sebab utama dibanding dengan kemerosotan maritim sebagai aspek eksternal.

Dalam karyanya, Hasan Djafar hanya menyinggung sedikit mengenai ketidakmampuan Majapahit merespon perkembangan perdagangan di Laut Jawa dan pembangkangan penguasa-penguasa pesisir utara Jawa yang pada akhirnya melepaskan diri. Itu dapat dimengerti karena Djafar mengutip pendapat Sartono Kartodirdjo bahwa Majapahit merupakan kerajaan agraris semi-komersial. Dalam konteks itu Majapahit berhasil menjalin kerjasama regional dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang didukung oleh pelayaran antarpulau (Djafar, 2010:54). Dengan fakta sejarah seperti itu mungkin Majapahit dapat disebut sebagai negara semi-maritim.

Majapahit tidak mampu merespon perubahan ketika para pedagang Islam menguasai jalur-jalur perdagangan regional itu diiringi munculnya kekuatan baru di kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa. Faktor ini merupakan ancaman eksternal yang turut mempercepat kejatuhan Majapahit. Jika Berg meragukan akan luasnya Majapahit dengan berargumen wilayah kekuasaan itu hanya penggambaran Prapanca saja, maka sanggahan datang dari S. Supomo yang mengatakan bahwa kebesaran Majapahit lebih banyak diingat orang masyarakat di luar Jawa dibanding Jawa sendiri (Wolters, 1999:35).

Dalam lawatan kami tahun 2005, orang di Sanggau Kalimantan Barat masih mengingat Majapahit melalui instrumen musik gong, yang dipercaya sebagai "gong Majapahit". Di Pulau Buton bahkan ada kelurahan bernama Majapahit dan "kuburan Gajah Mada" di sebuah bukit di Batauga, kira-kira 20 kilometer ke arah selatan dari Kota Baubau. Tampaknya suatu penggalian sejarah lokal dengan sumber arkeologis maupun tradisi lisan perlu dilakukan untuk membuktikan mengenai "kebesaran" Majapahit.

## **NUSANTARA SILANG BAHARI DAN NEGARA MARITIM INDONESIA**

Bertolak dari geografi budaya -gambaran mengenai masyarakat kepulauan dengan keragaman etnisitasnya- masa lalu Indonesia memperlihatkan beberapa "gugusan" sosial-budaya, seperti tampak dalam tiga kesatuan otonom: gugusan Barat, gugusan jaringan perniagaan Asia, dan gugusan kerajaan agraris. Gugusan pertama dan kedua dapat dilihat pada dasarnya sama yakni berkaitan dengan "masyarakat yang terbuka pada angin lepas dan tercangkok pada sejumlah kota pelabuhan yang hampir sama satu sama lain" (Lombard, 1996:170).

Berbicara tentang gejala pertama modernitas menurut Denys Lombard di kepulauan tidak bersama dengan bangsa Portugis ataupun Belanda, tetapi sudah masuk sebelumnya melalui para pedagang Islam dan pembentukan secara pesat kesultanan-kesultanan pertama. Lombard menekankan sesungguhnya Islamlah yang pertama mempunyai andil besar dalam penyebaran gagasan tentang waktu yang linear dan tentang ruang geografis yang sebenarnya (Lombard, 1996:170).

Meskipun tidak diingkari ada peran bangsa Barat, tetapi menurut Lombard, Islam hampir tidak terguncang oleh modernitas Barat dan tetap mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap mentalitas masyarakat. Bertolak dari kajian Lombard, maka pupuslah gagasan bahwa dunia Barat sebagai satu-satunya perintis "zaman modern". Sejumlah kesultanan dari Pasai abad ke-13 sampai Brunei, maupun munculnya kota niaga Cina, mulai dari Gresik pada abad ke-14 sampai Singapura, menunjukkan dengan jelas bahwa kawasan Nusantara, seperti halnya Italia atau Vlaanderen di Eropa, pernah lama mengenal pola kota niaga yang terbuka untuk perdagangan internasional besar dan relatif bebas dari kebekuan pola agraris (Lombard, 1996:171).

Sesungguhnya ada gugusan keempat yang menarik diamati namun menurut Lombard belum banyak dikaji. Gugusan ini berasal dari zaman proto-sejarah yang paling kuno dan sisa-sisa masyarakat fase pra-negara yang masih tetap bertahan, di luar Jawa bahkan di dalam Jawa sendiri seperti pada masyarakat Baduy. Gugusan keempat ini mencakupi wilayah pulau-pulau di sebelah timur, yang kurang dipengaruhi budaya Asia daratan. Melalui kajian dengan menggunakan metode perbandingan dengan Melanesia, Rasser berpendapat bahwa surau di Sumatera dan pondok di Jawa meniru "rumah bujangan" dari Papua (Lombard, 1999:169-170).

Tampak di sini bahwa kawasan Indonesia timur yang terabaikan dalam arti politik, sesungguhnya tidak dalam makna budaya karena justru melalui jaringan pelayaran Nusantara itulah yang menunjukkan adanya keterikatan, dengan kata lain, tidak bisa dipisahkan dari proses Keindonesiaan.

## **NEGARA MARITIM NUSANTARA DAN PERANG LAUT**

Perspektif sejarah maritim masa kerajaan di Nusantara dari abad ke-17 setidaknya sampai akhir abad ke-19 menggambarkan upaya untuk memelihara kedaulatan untuk mendukung melakukan pelayaran dan perdagangannya. Suatu wilayah yang menarik dan penting dikaji adalah Pesisir Timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan Selat Malaka. Dalam periode yang dibicarakan ini wilayah kesultanan Riau-Johor menghadapi monopoli perdagangan VOC dalam persaingannya dengan EIC-Inggris. Peperangan laut yang hebat meletus pada

tahun 1783-1784 antara Raja Haji versus VOC. Setelah gugurnya Raja Haji *fi Sabilillah* -diangkat sebagai pahlawan nasional- perlawanan rakyat Riau terhadap VOC tidak pernah surut. Bekerjasama dengan suku perompak Iranun dari Philipina selatan, Sultan Mahmud Riayat Syah melanjutkan perjuangan untuk membebaskan monopoli VOC dan untuk menegakkan (kembali) kedaulatan wilayah kesultanan Riau yang terpasung oleh kontrak 1785 yang mengakui kekuasaan VOC.

Ekspedisi serangan laut Iranun terutama ke arah barat mulai dari sepanjang pesisir Borneo dan wilayah pulau-pulau serta delta di pesisir timur Sumatera dari pusatnya di Jolo (Zulu), suku Iranun memiliki komunitas-komunitas satelit di Tempasuk dan Reteh. Secara sistematis Iranun menyerang Selat Melaka pada akhir abad ke-18. Iranun dilukiskan oleh Belanda sebagai marinir penyergap cepat (*sea raiders*) ketika armada berjumlah kecil menyerang kapal Belanda, seperti dilaporkan kejadian di Selat Bangka 1873.

Sultan Mahmud meminta bantuan Iranun dari Tempasuk daerah di bagian barat laut Borneo untuk mengusir Belanda dari Riau. Sultan Mahmud mengirim Talib ke Tempasuk membawa surat untuk Raja Tempasuk. Dalam bulan Mei 1787 dipimpin Raja Ismail, armada penyergap laut ini melintasi Laut Cina Selatan dalam jumlah besar perahu bersenjata dengan panjang kira-kira 30 meter, berhasil mengusir pasukan Belanda dari benteng.

VOC masih mendapat peluang dengan mendatangkan bantuan dari Melaka, menyebabkan Sultan Mahmud mengundurkan diri ke Lingga. Namun Iranun masih menguasai perairan Riau dengan strategi bergerilya di laut dengan memusatkan basis kekuatannya pada tahun 1790 di tiga tempat Riau dan Jambi: Pulau Berhala, Tungkal, dan Air Hitam. Tekad Iranun untuk melakukan eksploitasi dengan perahu dan aktivitas perdagangannya kemudian meluas sampai ke Laut Cina Selatan yang merupakan dunia kehidupan utama dengan membangun komunitas-komunitas pendukungnya (Warren, 2002:58-59).

Reteh menjadi tumpuan paling awal yang dibangun Iranun di bagian barat Nusantara, tepat sekali karena situasinya di pesisir Sumatera di sepanjang Selat Melaka di ujung jalan masuk Laut Cina Selatan. Daerah tanpa kehadiran

negara ini kemudian menjadi wilayah pesisir yang dikuasai Iranun (*Iranun coast*). Jumlah besar pulau kecil di Selat Melaka kemudian menjadi rumah tempat generasi pertama tentara bayaran Iranun (*mercenary*) dan sebagai penduduk perintis (Warren, 2002:138).

Meskipun dalam sejarah maritim dikenal meningkatnya bajak laut dalam abad ke-19, tetapi gejalanya sesungguhnya sudah tampak pada akhir abad ke-18. Dalam periode meluasnya bajak laut akhir abad ke-18 dan abad ke-19 sejalan dengan ekspansi kolonial di perairan Nusantara. Dalam proses dekolonisasi penulisan sejarah Indonesia melihat pemberontak itu sebagai pahlawan nasional yang melawan kolonialisme Belanda.

Ada kecenderungan untuk melihat gejala bajak laut itu sebagai suatu perang gerilya bahari (Lapian, 1999:4). Dengan demikian maka persepsi atau interpretasi terhadap bajak laut berbeda dari cara pandang Belanda. Lapian dalam melakukan studi disertasi mengenai bajak laut mengelaborasi salah satu dalil disertasi promotornya, Sartono Kartodirdjo yang mengatakan bahwa "suatu studi yang kritis tentang berbagai aspek dari fenomena sejarah [yang disebut] 'bajak laut' pada abad XIX di Indonesia akan mengoreksi citra keliru yang menggambarkan gejala tersebut sebagai suatu gejala kriminal" (Lapian, 1999:3).

## **KEDAULATAN MARITIM DAN MASALAH PERBATASAN**

Konsepsi negara maritim yang diperjuangkan dalam mencapai kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari Muhammad Yamin, yang pertama mengemukakan konsep *mare* dalam substansi maritim di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertengahan 1945.

Ketika sampai pada pembahasan wilayah negara dan batas-batasnya dalam sidang BPUPKI istilah Tanah Air menjadi suatu konsep yang kemudian diterima untuk menyebut wilayah kepulauan Indonesia. Anggota Badan Penyelidik, Abdul Kahar Muzakkir mengingatkan dalam soal Indonesia merdeka adalah mengenai bagaimana "kelak menetapkan halaman rumah kemudian memagari, menjaga halaman rumahnya". Menurut Muzakkir "janganlah



didasarkan pada soal, apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak" (Risalah BPUPKI, 1995:152-153).

Kemudian Muhammad Yamin memberi penjelasan mengenai Tanah Air sebagai konsep tunggal, tidak memisahkan "tanah" dan "air", dengan menegaskan "membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau atau daratan, sesungguhnya adalah berlawanan dengan keadaan sebenarnya". Lebih lanjut Yamin mengemukakan bahwa Tanah Air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka semboyan "*mare liberum*" (laut merdeka) menurut ajaran Hugo Grotius "tidak dapat dilaksanakan begitu saja, haruslah pula ditentukan daerah, air lautan manakah yang masuk menjadi daerah kita dan air laut manakah yang masuk lautan lepas" (Risalah, h. 75).

Kriteria negara dalam pendekatan arkeologis dikaitkan dengan "sistem politik" menarik dicermati. Dengan metode tertentu dapat digunakan untuk mempertimbangkan fenomena kultural, seperti halnya aspek keagamaan dan perilaku sosial yang memengaruhi aktivitas politik dan ekonomi, baik pada masa pra dan protohistori. Salah satu fenomena kultural adalah konsep *mandala* (*circles of kings*). Setiap raja menyatakan bahwa negerinya diklaim secara unik sebagai suatu kedaulatan "universal", yang berasal dari sifat-sifat kekuasaan Tuhan (*divine authority*). Jika ditempatkan ke dalam peta masa awal Asia Tenggara akan tampak sering terjadi ketumpangtindihan *mandala*. Dalam praktiknya, *mandala* kata Sankrit ini memperlihatkan sesuatu yang khusus dan sering menunjukkan pada situasi politik yang labil dan merupakan definisi wilayah geografi yang tidak jelas tanpa batas-batas yang tegas; suatu wilayah kekuasaan dengan batas-batas yang kabur dan tumpang tindih. Dalam konteks itulah klaim hegemoni personal dari setiap raja terhadap raja-raja yang lain yang berada di dalam *mandala*-nya, secara teoretis merupakan sekutu atau vasal yang patuh terhadapnya (Wolters, 1999:28).

## **KEERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA MODEL NEGARA MARITIM**

Tampaknya semakin disadari bahwa pendekatan maritim dapat menjadi strategi untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa dalam bentuk separatisme daerah. Dalam kaitan ini integrasi nasional bagi proses menjadi "Indonesia" sesungguhnya kurang tajam menangkap masalah prinsip kesatuan dalam NKRI, kecuali dikerangkai dengan konsep integrasi politik. Menurut Sjamsuddin, integrasi politik lebih jelas digunakan untuk proses membangun dan memperkuat keindonesiaan. Integrasi politik penting karena merupakan bagian dari integrasi nasional (Sjamsuddin, 1989:2).

Dalam ruang lingkup integrasi politik dalam analisis Sjamsuddin adalah mengenai dimensi vertikal elite-massa dan horizontal (teritorial). Aspek teritorial berbicara mengenai suatu wilayah geografis negara. Dimensi elite-massa menjadi potensi kekuatan apabila elite memiliki integritas sehingga massa dengan mudah dipengaruhi untuk tujuan menjadikan Indonesia "rumah bersama". Namun dapat pula elit memanfaatkan massa untuk tujuan yang sebaliknya. Kekecewaan para elit dapat melahirkan gejolak daerah dan pemberontakan kedaerahan atau ideologis dalam periode 1950-an hingga 1965.

Dalam pandangan Lopian, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sesungguhnya sudah melepaskan konsepsi konsentris, konsep negara yang melekat pada corak agraris, ketika Wawasan Nusantara telah diakui. Konsepsi Wawasan Nusantara menganggap setiap jengkal wilayah Republik Indonesia sama penting sehingga -secara teoretis-tidak perlu dipertentangkan antara pusat dan periferi. Begitu pula anggapan yang sama pentingnya antara wilayah daratan dan wilayah lautan sesuai sebutan "tanah air". Persoalannya penerimaan Wawasan Nusantara sebagai prinsip belum berarti penerapan dalam praktek (Lopian, 1999:86).

Wawasan Nusantara, yang bertolak dari dan oleh sebab itu juga mengandung wawasan bahari, dalam pandangan kami fungsinya sudah sebagai konsep politik dalam arti negara. Di dalam kaitan inilah kemudian bagaimana kerajaan-kerajaan masa lampau memberi inspirasi atau bahkan menjadi acuan perbandingan model negara mana yang dianggap tepat untuk

NKRI. Seperti disarankan Lopian, oleh karena Wawasan Nusantara juga mengandung wawasan bahari maka lebih mencari referensi ke konsep yang dianut oleh kerajaan-kerajaan bahari daripada prinsip kerajaan konsentris (Lopian 1999:86).

Kerajaan Ternate dan Tidore menganut prinsip perahu sebagai konsep untuk memelihara keseimbangan keberlangsungan sebuah negara. Demikian pula dengan kerajaan Buton (Butun) yang menggunakan *barata* sebagai konsep "*state of ship*" (Schoorl, 1986; Zuhdi, 1999; 2010) yang pada prinsipnya juga mengenai keseimbangan. *Barata* dalam bahasa Wolio (Butun) artinya kekuatan pengikat pada perahu bercadik ganda dua di kanan dan dua di kiri. Pengejawantahan konsep itu menggambarkan 'perahu' Kesultanan Buton yang diperkuat oleh dua *barata* di timur yaitu Kulisusu dan Kaledupa; sedangkan dua di barat yaitu Tiworo dan Muna (Zuhdi, 2010). Empat kekuatan yang merupakan kesatuan politik vasal Buton itu berperan menjaga keamanan pusat dari ancaman luar.

Schoorl menggambarkan Buton "yang terombang ambing" seperti "bulu ayam"—*shuttle cock* dalam olahraga bulu tangkis-- yang dipukul oleh Gowa dan Ternate secara bergantian (Schoorl, 1984). Terbuktilah melalui sumber sejarah lokal *kabanti* (syair) mengenai bagaimana Buton harus dapat bertahan dan tetap eksis. Pelukisan itu dapat dibaca dalam *kabanti Ajonga Inda Malusa* karya Abdul Ganiyu, pujangga terkemuka Kesultanan Buton abad ke-19, dengan kata-kata di bawah ini (Zuhdi, 2010):

<i>Kaapaaka karana tongko indapo</i>	Sebab karena waktu belum ada
<i>Tee Walanda ipiya malona yitu</i>	Dengan Belanda beberapa waktu lalu
<i>Adika timbu tajagani Taranate</i>	Musim timur kita menjaga Ternate
<i>Tajagani Gowa tongkona adika bara</i>	Menjaga Gowa waktunya musim barat

Seperti terungkap dalam bait-bait *kabanti* di bawah ini, maka setelah kuat benteng-benteng di timur dan di barat, dan karena persekutuannya dengan VOC, maka posisi perahu Buton dapat berlabuh tenang ke arah haluan

(*labu rope*, maksudnya Gowa) dan berlabuh ke arah buritan (*labu wana*, maksudnya Ternate).

<i>Samatangkana loji imataneyo</i>	Setelah kuat benteng di timur
<i>Amarosomo kota isukanao</i>	Teguh tertiblah benteng di barat
<i>Amatangkamo mboorena lipu siy</i>	Sudah kuat kedudukan negeri ini
<i>Akosaromo labu rope labu wana</i>	Bernamalah labuh haluan labuh buritan

Dalam makna kebudayaan bahari, perahu merupakan simbol dan metafora yang menggambarkan suatu kehidupan sosial-budaya masyarakat kepulauan. Di masyarakat Lampung terdapat tenun kain bermotif jong sarat, yaitu penggambaran perahu yang karena sarat muatan komoditas lalu terdampar. Selain itu ada keyakinan roh orang yang meninggal dunia akan dibawa dengan “perahu kematian” menuju alam akhirat (Manguin, 1984:190). Pengalaman kami dalam penelitian tradisi lisan di Pulau Yamdena 2014 - Kabupaten Kepulauan Tanimbar Propinsi Maluku Tenggara- masyarakat Sangliat- Dol masih memelihara tradisi bahari melalui pembuatan “perahu batu” di di desanya. Perahu Batu itu dipelihara karena memiliki fungsi sebagai “peringat” akan asal usul mereka dari suatu pulau yang tenggelam.

Juga diyakini suatu waktu akan menjadi “perahu penyelamat” yang akan membawa warga desa itu berlayar (kembali) ke tujuan tertentu. Dari informan kami terungkap pula bahwa ketika remaja desa membuat lapangan olahraga bola voli tepat di berada di depan haluan kapal batu itu, roh nenek moyang mereka datang dalam mimpi kepala desa meminta agar dipindah (wawancara dengan Kepala Desa, 31 Mei 2014).

Nilai simbolik lainnya dari seputar perahu adalah dalam kaitannya dengan nakhoda. Dalam kendali seorang nakhoda yang andal maka pelayaran sebuah perahu yang jika diperluas, seorang nakhoda dalam sebuah pemerintahan/negara yakni presiden akan berhasil menuju pantai cita-cita. Maka pantun populer masyarakat Riau “Lancang Kuning” melukiskannya begini:

“Lancang kuning berlayar malam//Haluannya menuju ke laut dalam//Kalau nakhoda kurang paham//Alamat kapal akan tenggelam”.

## **MENERAWANG MASA DEPAN INDONESIA**

Pendapat Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengenai masa depan Indonesia memiliki tiga aspek dasar sebagai modal menentukan nasib masa depannya itu yakni: Geografi, Demografi, dan Histori.

Geografi Indonesia bukanlah “nasib” (*destiny*) ketika geostrategis yang melekat pada Indonesia dibiarkan berhadapan pada ancaman dari pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang luar biasa kayanya. Dalam perlombaan angkatan laut jenis samudera atau “*blue water navy*” semakin memanas antara India dan Cina di Samudera Hindia (Kuntjoro-Jakti, 2012:51), yang *nota bene* mengambil sebagian besar hadapan kepulauan Indonesia mulai pantai barat ujung utara Sumatera turun ke selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara Timur-Maluku.

Menurut Prof. Dorodjatun perumusan geostrategi merupakan pemikiran pada tingkat nasional yang tertinggi dengan mengangkat hal ikhwal strategi nasional yang berkaitan dengan pemanfaatan dalam jangka waktu sangat lama ke depan dari posisi geografis yang dimiliki suatu negara-bangsa. Bertolak dari sini kemudian diturunkan ke geopolitik mengenai postur politik luar negeri dan geoekonomi yang berkaitan dengan kehidupan dan kekayaan alam, keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan bentangan wilayah udara dan lain sebagainya (Kuntjoro-Jakti, 2012:51-52).

Dibandingkan dengan faktor geografi dan demografi, maka sejarah merupakan faktor yang paling sulit dijadikan sebagai landasan yang kokoh untuk melakukan penerawangan yang dapat diandalkan penuh. Secara metodologis Prof. Dorodjatun menunjukkan pergelutan terus menerus untuk menemukenali apa yang disebut sebagai fakta sejarah -apalagi dalam hal interpretasi- dalam kehidupan negara-bangsa. Perdebatan sejarawan sudah pasti terjadi di dalam menafsirkan dan memahami masa lalu, dengan teori dan kerangka konseptual mana yang dianggap sesuai.

Menuju negara maritim yang kuat perlu diberi latar belakang sejarah. Menurut Prof. Hasim Djalal ada tiga peristiwa “proklamasi” penting dalam sejarah Indonesia: Sumpah Pemuda 1928 suatu pernyataan sikap sebagai satu bangsa; Proklamasi 1945 sebagai suatu negara; dan Deklarasi Djuanda 1957 menyatakan Indonesia sebagai negara dengan satuan wilayah laut yang mencakupi perairan pulau-pulau yang terhubung melalui titik-titik terluar. Dengan pengakuan UNCLOS bahwa NKRI sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) pada 1982, maka bertambah wilayah kedaulatan dari sekitar 3 juta pada saat proklamasi 1945 menjadi kira-kira 5 juta kilometer persegi (Djalal, 2010). Yang membanggakan dari perjuangan itu adalah tidak sebutir peluru pun harus dimuntahkan dari laras senjata untuk memperolehnya.

Ujian pertama untuk menegakkan kedaulatan laut negara maritim Indonesia setelah Proklamasi 1945 terjadi pada waktu perundingan Linggarjati tahun 1946. Suatu insiden yang nyaris mengakibatkan perang laut di perairan Pelabuhan Cirebon terjadi ketika delegasi Belanda awalnya menolak tawaran untuk dijemput oleh angkatan laut Indonesia. Rupanya delegasi Belanda masih menunggu kapal pemburu torpedo H.M. Banckert yang masih berada di luar pelabuhan. Sesudah terjadi “manuver yang tidak dapat dimengerti”, tercapailah kompromi kapal Republik dapat membawa dua orang Belanda, memasuki pelabuhan Cirebon diikuti kapal patroli Belanda yang mengangkut delegasinya, kemudian disambut pembesar Indonesia di pelabuhan (Lapian, 1992: 304-305). Dalam kamus perang barangkali ini dapat disebut sebagai *smart power*.

Ekor peristiwa protokol yang tampak kecil itu rupanya berlanjut. Sebagaimana dikisahkan kembali oleh Prof. Dr. Ir. Schermerhorn sebagai ketua komisi jenderal untuk pemerintah Hindia Belanda, dalam perundingan Linggarjati, Ia mendapat murka dari Ratu Belanda. Kejadian itu dirasakan sebagai penghinaan pahit terhadap Angkatan Laut Belanda (Lapian, 1992: 304-305). Inilah barangkali yang disebut *smart power* bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh yang lebih kuat yang pernah dicatat dalam sejarah.

Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, maka perlu ditetapkan definisi atau pengertian itu. Dari tiga kelompok dalam memaknai poros maritim

dunia: pertama, kelompok yang memaknai poros sebagai pusat atau sumbu, dalam kaitan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Kelompok ketiga, memberi arti poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah *Global Maritime Nexus* (Yani dan Montratama, 2015:35-36). Pendapat kelompok ketiga tampaknya yang paling cocok dengan makna 'benang merah' sejarah nusantara sebagaimana dikemukakan A.B. Lopian tentang peran aktif suku-suku bahari dalam mengarungi dan menciptakan jalur-jalur pelayaran, dalam karyanya "Nusantara Silang bahari".

Pada bagian akhir ini dapat dikemukakan untuk menjadi negara maritim perlu dilandasi budaya bahari. Perwujudan *hard power* pada negara maritim seharusnya diiringi oleh dimensi *soft power*, suatu kekuatan yang berasal dari modal budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Mengambil pelajaran (*lesson learned*) dari Sriwijaya dan Majapahit misalnya, adalah merupakan metode analisis yang tepat meskipun Indonesia tidak serta merta merupakan kelanjutan dari kedua kerajaan itu, tetapi substansi dan unsur-unsur pengalaman masa lalu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Dari analisis historis itulah didapatkan kemampuan intelektual bangsa dalam melahirkan *smart power*.

Dalam pemaknaan integrasi nasional yang wujud konkretnya berupa integrasi politik sebagaimana dikemukakan Prof. Sjamsuddin, pendekatan sejarah maritim turut berperan penting dalam memandang Indonesia secara komprehensif yakni konsep "tanah air". Dalam perspektif sejarah maritim, Indonesia sesungguhnya merupakan memori kolektif bangsa yang merajut pulau-pulaunya, namun masih banyak 'pulau sejarah' dan sejarah pulau yang terabaikan (Zuhdi, 2010). Dengan landasan sekaligus kerangka budaya bahari, bangsa Indonesia memiliki orientasi yang kuat untuk membangun negara maritim yang tangguh. Dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi yang mampu mengawal wilayah kepulauan terluas di dunia ini maka mewujudkan negara maritim Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Taufik. 1971. "Kata Pengantar" dalam O.P. de Roo Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terjemahan. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2005. *Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan Bahari Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman*. Jakarta: KPG.
- Bellwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*, terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cense, A. A. dan H. J. Heeren. 1972. *Pelajaran dan Pengaruh Kebudayaan Makasar-Bugis di Pantai Utara Australia*, terjemahan. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Cortesao, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires: an Account of the East, From the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515*. London: The Halkyut Society.
- Djafar, Hasan. 2012. *Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Horridge, Adrian. 2015. *Perahu Layar Tradisional Nusantara*, terjemahan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kahin, George Mc. Turnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21*. Jakarta: Penerbit Alvabet.
- Lapian, A. B. 1974. "Kata Pengantar" dalam J. C. van Leur dan F. R. J. Verhoeven. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Lapian, A. B. 1992. "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Lapian, A. B. 1999. "Nusantara Silang Bahari" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Ed.). *Panggung Sejarah Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: EFEO dan Yayasan Obor.
- Lapian, A. B. 1999. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu.
- Lombard, Denys. 1995. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manguin, Pierre-Yves. 1986. "Shipshape Societies: Boats Symbolism and Political Systems in Insular Southeast Asia" dalam David G. Marr and A.C. Milner eds. *Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries*. Singapore, ISEAS and RSPS ANU.



- Matheson, Virginia (Ed.). 1982. *Tuhfat Al-Nafis Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bhakti Sd. Bhd.
- Munoz, Paul Michel. 2006. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and The Malay Peninsula*. Singapore: Tanpa Penerbit.
- Munz, Peter. 1997. "Historiography" dalam Michael Bentley (Ed.). *Companion to Historiography*. London dan New York: Routledge.
- Nooteboom, C. 1972. *Sumatera dan Pelajaran di Samudera Hindia*, terjemahan. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Rose, Lisle A. 2007. *Power at the Sea the Age of Navalism, 1890-1918*. Columbia and London: University of Missouri Press.
- Schoolr, J.W. "Power, Ideology and Change in the Early State of Buton", *Fifth Dutch-Indonesia Historical Congress, the Netherlands, 23-27 June 1986*.
- Sjamsuddin, Nazarudin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tobing Cs. Prof. Dr. Ph. O.L. 1960. *Hukum Pelajaran dan Perdagangan Amanna Gappa*. Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi-Selatan dan Tenggara.
- Vos, Reinout. 1993. *Gentle Janus Merchant Prince: The VOC and the Tightrope of Diplomacy in The Malay World, 1740-1800*. Leiden: KITLV Press.
- Warren, James Francis. 2002. *Iranun and Balangingi Globalization, Maritime Raiding and the Birth Ethnicity*. Singapore: ANU Press.
- Wolters, O.W. 1970. *The Fall of Sriwijaya in Malay History*. Kualalumpur & Singapore: Oxford University Press
- Yamin, Muhammad. Tanpa Tahun. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih jaitu hasil penjelidikan sedjarah dan arti jang dikandung Sang Merah-Putih sebagai warna kebangsaan dan bendera negara Republik Indonesia*. Tanpa penerbit.
- Yani, Yan Yan M. dan Ian Montratama. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geo-politik" dalam *Jurnal Pertahanan*, Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Agustus 2015, Volume 5, No. 2 hlm 25-51.
- Yusuf, Motik Chandra. Dr (Ed.). 2010. *75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia Kerjasama dengan IND Hill Co.
- Zacot, Francois-Robert. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut Pengalaman Seorang Antropolog*, terjemahan. Jakarta: KPG & EFEO.
- Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton Yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Grafindo.

Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu.

# MELACAK KEJAYAAN MARITIM DAN TERBENTUKNYA MASYARAKAT KOSMOPOLITAN KALIMANTAN SELATAN

**Yety Rochwulaningsih**

wulan@undip.ac.id

## PENDAHULUAN

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki masa lalu panjang dengan kejayaan dunia kemaritimannya yang secara signifikan mengkonstruksi terbentuknya masyarakat kosmopolitan. Ditandai dengan julukan pulau "seribu sungai" yang menjadikan perahu sebagai sarana strategis mobilitas barang dan orang, jauh sebelum kedatangan bangsa asing (Susilowati, 2004). Kemudian kemunculan pelabuhan Banjarmasin sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan Selatan, telah mengantarkan Banjarmasin menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi moderen yang responsif terhadap kebutuhan pasar global (Hall, 2014). Meskipun sebelumnya Banjarmasin merupakan salah satu emporium di kawasan Nusantara yang memiliki pusat kraton yang terletak di pedalaman wilayah selatan/tenggara, tetapi kemudian menggeser pusat kekuasaan ke wilayah pesisir dengan orientasi kemaritiman.

Perubahan orientasi dari pedalaman agraris ke pesisir dan laut atau maritim antara lain dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal terkait dengan tumbuhnya visi baru dari penguasa lokal untuk membuka akses eksternal lebih luas dan adanya konflik internal di lingkaran dalam Kerajaan Martapura antara Sultan Banjar dengan pamannya yang mengundang masuknya kekuatan Kasultanan Demak/Islam (Sjamsuddin, 1991). Eksternal, yaitu maraknya aktivitas perdagangan dengan pedagang dari Timur Asing (India, Persia, Cina, Arab) maupun Eropa (Inggris dan Belanda). Misalnya pada akhir abad ke-13, terjadi gelombang kedatangan pedagang dari India muslim (Tamil Keling) yang kemudian menetap di daerah sekitar aliran Sungai Banjarmasin atau Sungai Banjar Besar atau Sungai Barito dan disusul bangsa-

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Guru Besar Sosiologi dan Sejarah Maritim Universitas Diponegoro.

bangsa lain yang juga datang dan menetap di daerah sekitar aliran sungai maupun daerah pesisir yang kemudian memperkuat konstruksi masyarakat kosmopolitan di Kalimantan Selatan (Steinberg 1987). Terbentuknya masyarakat kosmopolitan terkait dengan adanya mobilitas bangsa-bangsa dari berbagai tempat (mis. Negara-bangsa) yang kemudian hidup bersama dan terjadi atas dasar hubungan saling menghormati (Appiah, 1997). Dalam banyak hal, kosmopolitanisme terkonstruksi sebagai hasil dari diaspora perdagangan dan ini sangat lekat dengan dunia kemaritiman.

Dalam konteks dunia kemaritiman, masyarakat Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi objek dari masuknya pedagang dengan latar belakang Negara-bangsa dan etnik yang beragam tersebut, melainkan juga menjadi subjek. Hal itu ditunjukkan di mana pada tahun 1628 pedagang dari Banjarmasin mampu mengirim lada ke Jepara, Makassar, Batavia, wilayah selatan Vietnam, dll yang berarti Banjarmasin sangat dinamis dan telah berhasil membuka akses eksternal secara luas. Banjarmasin pada abad ke-16 dan 17 telah dikenal sebagai kota perdagangan rempah, khususnya lada. Sebagai kota modern pada eranya, Banjarmasin pada masa itu telah menghasilkan aturan-aturan hukum yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali kegiatan perdagangan dan kemasyarakatan. Bahkan Banjarmasin yang masyarakatnya multietnik tersebut menumpukan kekuatannya kepada perdagangan dan pelayaran (Young, 1991). Makalah ini akan membahas lebih lanjut bagaimana kejayaan dunia kemaritiman Kalimantan Selatan dan konstruksi masyarakat kosmopolitan sebagai hasil dari dinamisnya aktivitas kemaritiman di Kalimantan Selatan? Hal ini penting, karena belajar dari sejarah adalah problem solving actual dan melakukan ikhtiar untuk masa depan.

## **MEMBANGUN EMPORIUM MARITIM**

Salah satu saluran untuk membangun emporium maritim di Kalimantan Selatan adalah masuknya Islam. Hall (2014) menyebutkan bahwa ekspansi Islam di Asia Tenggara berdampak pada penguatan eksistensi emporium yang telah ada. Bahkan secara spesifik, ia menyebut kasus Banjarmasin merupakan emporium yang tumbuh sebagai akibat ekspansi Islam pada abad ke-16 hingga 17 dan sukses melakukan kontak eksternal dalam rangka membangun

emporium maritim. Kondisi awal Banjarmasin pada awal abad ke-16 tidak dapat dilepaskan dari pusat emporium lainnya di Kalimantan. Islamisasi yang berlangsung melalui Jawa ke Banjarmasin terus terjadi pada abad-abad berikutnya dengan pendirian kesultanan di Kalimantan Barat (Tanjung Pura di Pontianak) dan Kalimantan Timur (Kutai). Pada era ini rupanya juga telah terjadi pertukaran ide dan pemikiran intelektual Islam diantara tokoh-tokoh Islam dari berbagai daerah. Disebutkan bahwa terdapat seorang ulama Patani Thailand bernama Sheikh Da'ud ibn Abd Allah al-Fatani yang bermukim di Mekkah yang kemudian kembali ke Asia Tenggara, tercatat pernah berguru kepada Sheikh Muhammad Nafis al-Banjari dari Banjarmasin (Bradley, 2013).

Terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa pada paruh kedua abad ke-16, Islam masuk di Kalimantan Selatan melalui tokoh-tokoh Islam dari Jawa ketika di daerah ini terjadi perselisihan keluarga (Sjamsuddin, 1991). Tokoh-tokoh Islam dari Jawa dalam hal ini adalah yang berasal dari Kasultanan Demak, mereka ditugaskan oleh Sultan Demak untuk membantu Pangeran Samudera sebagai Sultan Banjar dari Kerajaan Martapura agar dapat mengalahkan pamannya yaitu Pangeran Temenggung. Sultan Banjar bermaksud untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke daerah baru bernama Banjarmasin dalam rangka membuka akses eksternal lebih luas untuk membangun emporium maritim. Proses Islamisasi yang diduga sekaligus menjadi saluran untuk membangun emporium maritim di Kalimantan Selatan ini mulanya terjadi di kalangan bangsawan istana dan pejabat kerajaan. Dalam beberapa dekade berikutnya agama baru tersebut secara bertahap diadopsi oleh masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai, pesisir dan laut yang menjadi pusat perdagangan (Chalmers, 2006). Masyarakat secara bertahap berinteraksi dengan para tokoh ulama, pedagang, dan kelompok lainnya yang dapat meningkatkan status sosial mereka.

Dalam konteks instrumen identitas, terdapat aturan pada saat itu terkait penggunaan pakaian oleh orang-orang Banjar (khususnya bangsawan) yang layak dan sesuai seperti orang Jawa. Para bangsawan kerajaan Banjar dilarang untuk berpakaian seperti orang-orang Cina, Melayu, Siam, Aceh atau bahkan Belanda. Mereka harus mengikuti cara berpakaian pendahulunya yaitu dari Majapahit (Jawa), sehingga hal ini menyebabkan gaya berpakaian mereka mirip

seperti orang Jawa. Beberapa studi tentang perdagangan tekstil regional Asia Tenggara, bahkan mampu menyoroiti pada pola transisi penggunaan tekstil di Banjarmasin pada abad keenam belas dan ketujuh belas (Hall, 1996). Dalam hal ini, pakaian telah menjadi komoditas yang penggunaannya memiliki multi-tujuan dan mengandung warisan asli masyarakat dan menjadi salah satu komoditas untuk transaksi politik, ekonomi, dan budaya. Pada masa kekuasaan setelah itu, industri tekstil yang berada di kawasan hulu dan hilir mengatur interaksi masyarakat dalam ikatan budayanya. Kondisi ini merepresentasikan bahwa keadaan ekonomi yang diaktori oleh penduduk lokal pada abad ketujuh belas mulai berkembang dinamis, meskipun sudah muncul pengaruh dari Eropa di wilayah Indonesia bagian timur.

Sementara itu, berdasar pada Hikayat Banjar, diketahui terjadi konversi secara gradual orang-orang Banjar menjadi Islam selama abad ke-15 hingga 17. Salah satu representasi Islam dalam kehidupan kemasyarakatan di Banjar adalah penggunaan busana. Hikayat Banjar sendiri merupakan representasi dari kronik Melayu yang menggambarkan fungsi seremonial dari busana. Hampir sebagian besar kisah menyebutkan tentang upaya pewarisan kekuasaan, yang diselipkan tatacara aturan bagaimana orang Banjar dalam berbusana. Di dalam hikayat tersebut dilaporkan bahwa busana yang digunakan oleh orang Banjar memiliki sepuluh ragam/ jenis. Ada busana khusus untuk orang-orang yang baru sembuh dari wabah penyakit dan mereka yang terkena dampaknya, pemberian busana ini dilakukan menggunakan ritual-ritual khusus. Ada pula busana yang dipergunakan khusus para diplomat-diplomat kerajaan yang dikirim ke Cina dan Jawa. Upacara seremonial pemberian busana ini melibatkan diplomat senior dari Cina (Dinasti Ming), Jawa (Majapahit), dan kerajaan Banjar sendiri. Bahkan, ada busana yang khusus digunakan untuk memperingati pergantian rezim, khususnya ketika rezim Islam. Hikayat Banjar juga mengisahkan konversi Islam di Banjarmasin pada tahun 1550 sebagai konsekuensi kepada pesisir utara Jawa, khususnya Demak, sebagai 'imbalan' proteksi militer yang dilakukan Kasultanan Demak di Laut Jawa.

Tidak banyak sumber yang diperoleh mengenai proses Islamisasi yang berlangsung di Kalimantan Selatan, tetapi sepertinya secara evolusi dan gradual

dalam dua abad berikutnya berbagai kelompok sosial dalam komunitas Banjar memeluk Islam. Proses yang panjang dan bertahap ini tampaknya bersifat sosial, Islamisasi terjadi diakibatkan karena perdagangan dan perkawinan campur yang menyebabkan kontak antara muslim dan non-muslim semakin meningkat. Bahkan diketahui bahwa pada awal abad ke-20, penduduk yang bermukim di wilayah pusat-pusat perdagangan yang dekat sungai hampir seluruhnya Muslim, sehingga sejak itu Islam menjadi elemen penting dari identitas etnis Banjar (Hawkins 2000) maupun etnik dan bangsa lain yang bermukim dekat sungai dan pesisir yang melakukan aktivitas ekonomi kemaritiman. Itu artinya, terdapat proses yang berlangsung secara paralel antara proses Islamisasi sosio keagamaan dan maritimisasi ekonomi politik yang kemudian mengantarkan Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya sehingga menjadi emporium maritim.

### **KEJAYAAN EKONOMI MARITIM KALSEL: INTEGRASI HULU-HILIR**

Sumber-sumber asing melaporkan bahwa kraton Banjarmasin yang menguasai wilayah Kalimantan Selatan pada awalnya berlokasi di daerah hulu (pedalaman) dan mengalami keterbatasan dalam melakukan kontak eksternal. Komoditas yang berasal dari daerah hulu itu antara lain berupa beras dan sagu, yang dibudidayakan secara lokal dan pada gilirannya diperdagangkan untuk ditukarkan dengan rempah-rempah dari wilayah timur. Pertukaran komoditas juga terjadi dengan pedagang-pedagang dari Bugis yang turut menyuplai budak, rotan, lilin, dan tikar. Dalam konteks pertukaran beras dan sagu dari Banjarmasin, Jawa menyuplai bangsawan kraton Banjar dengan barang-barang mewah dari Cina dan India. Selain itu, dikembangkan budidaya lada dan perdagangan lada Banjar pada awalnya didasarkan pada produksi lada lokal dari hulu Sungai Barito dengan imbalan berbagai barang komersial (Groeneveldt, 1960).

Sebagaimana telah disinggung, dalam perkembangannya terdapat fenomena menarik di mana setelah kraton Banjar dipindah ke wilayah pesisir Kesultanan Banjar berkembang dengan pesat. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi yang mengintegrasikan potensi sektor hulu-hilir yang juga didukung oleh faktor eksternal yang kondusif. Faktor jatuhnya

Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang-pedagang Cina pergi dan memilih mengganti lokasi dagangnya di Brunei dan Borneo, menyebabkan kesultanan berjaya pada awal abad ke-16. Ditambah lagi, dengan adanya ekspansi perdagangan rempah yang dimonopoli oleh Aceh, membuat Portugis di Malaka menerapkan kebijakan untuk melaksanakan budidaya lada di Aceh dan Sumatera. Kemudian ketika ekspansi Belanda pada awal abad ke-17 yang melarang pedagang-pedagang Cina mengakses rempah-rempah dari Sumatera, justru menstimulan pedagang-pedagang mencari lokasi baru dan menemukan Banjarmasin yang meresponsif terhadap pemenuhan kebutuhan perdagangan lada tersebut. Kondisi tersebut sekaligus dijadikan momentum Kasultanan Banjarmasin untuk mengembangkan budidaya tanaman lada sebagai komoditi ekspor unggulan. Komoditas lada tidak hanya dibawa oleh kapal-kapal Belanda, tetapi kapal-kapal pedangan Cina yang berkongsi dengan pedagang Inggris. Oleh Inggris, lada Banjarmasin dimasukkan dalam komoditas dagang Cina, sehingga menambah kompetisi pasar lokal.

Sebagai kongsi pedagang Cina, Inggris pada saat itu berperan untuk menentukan komoditas-komoditas yang akan dibawa oleh pedagang-pedagang Cina, baik dari Banjarmasin maupun daerah sekitar. Orang-orang Banjarmasin pada saat itu sangat baik terhadap pedagang-pedagang Inggris. Pedagang-pedagang Inggris di Banjarmasin selalu diberi kelebihan jumlah pemesanan lada. Inggris kemudian membalasnya dengan mengajarkan elite Banjar untuk membentuk armada angkatan laut, tetapi pada saat itu belum direpon baik oleh Kesultanan Banjar (Young, 1991). Abad ke-17 menjadi tonggak perkembangan penting bagi Banjarmasin yang mengklaim menjadi kekuatan maritim yang signifikan, bahkan penduduknya didominasi oleh orang-orang non-lokal/ non-pribumi. Banjarmasin tergantung sekali dengan para pedagang-pedagang Cina dan keberadaan pelabuhan yang memiliki corak multietnik. Etnik Banjar juga terkenal sebagai pelaut ulung, khususnya mereka keturunan Bugis yang telah menjadi penduduk Banjar. Orang Banjar tercatat sukses mengusir armada perompak yang datang di wilayah teritorial Kesultanan Banjar (Young, 1991).



Melihat kronik Banjarmasin abad ketujuh belas yang menegaskan bahwa elite di wilayah pesisir telah menerapkan berbagai aliansi politik dengan para kepala daerah di wilayah pedalaman untuk memastikan aliran produksi lada dari daerah hulu ke wilayah pesisir tetap terjamin -menjadi bukti bahwa kebijakan politik ekonomi Kasultanan Banjarmasin mengintegrasikan potensi hulu-hilir sebagai kekuatan ekonomi maritim. Dengan kebijakan tersebut, kegiatan ekonomi Banjarmasin berkembang dengan sangat dinamis dan hal itu juga mengakibatkan munculnya ancaman-ancaman terlebih dengan adanya komitmen untuk menjadikan Banjarmasin sebagai jalur perdagangan internasional (Groeneveldt, 1960). Juga sebagaimana pernyataan yang tercantum dalam Hikayat Banjar berikut ini.

“...tempat ini [Banjar] seperti halnya sebuah pohon pisang yang matang di depan gerbang: perhatian orang banyak menuju ke arahnya. Karena tempat ini terletak di dekat laut itu adalah mangsa yang mudah bagi musuh. Kami melakukan lebih baik sebelum kami pindah (dari pedalaman ke pesisir)”.

Pedagang-pedagang Inggris yang pernah berada di Banjarmasin pada abad ke-17 telah memproyeksikan Banjarmasin sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang maju dan untuk itu mereka berkongsi dengan pedagang-pedagang Cina. Sebetulnya, Inggris pertama kali mendirikan pabrik di Banjarmasin pada 1615, namun akibat persaingan dengan Belanda dan pabrik ini tidak bisa berkembang. Dalam konteks kongsi dengan pedagang Cina, Inggris memanfaatkan Banjarmasin untuk memasok komoditas yang cocok bagi pasar Cina. Inggris menyuplai lada, jernang (*dragon's blood*), tongkat, dll. Sebagian besar kapal yang menuju Cina harus melalui Banjarmasin terlebih dahulu untuk memuat komoditas tersebut (Suntharalingan, 1963). Kapal-kapal Cina sebagian juga menukar komoditas mereka dengan kain sutera, tembaga, dan teh.

Sebagai emporium perdagangan lada, ancaman terhadap perompakan pernah terjadi pada pada 1856. Saat itu, armada bajak laut pada April 1856 berlayar menuju pantai Kalimantan dan menangkap sekitar 50 orang dari Pulau

Laut. Ekspedisi perompak ini dilakukan secara terorganisir dan masif. Sekitar 40 hingga 50 perahu besar perompak dioperasikan di bawah kepemimpinan dua penduduk asal Sulawesi yang bernama Si Machan dan Sigaroda. Mereka meninggalkan aktivitas perdagangan dan beralih pada pembajakan. Wilayah yang disasar tidak hanya emporium Banjarmasin, tetapi hampir sebagian kota-kota dagang di Kalimantan. Mereka menetap di Teluk Kutai dan menjalin relasi dengan penguasa lokal. Pada 24 Juli 1856, berdasar pada informasi dari Samarinda (ibukota Kutai, bagian dari wilayah kekuasaan Belanda), Sigaroda telah memasuki sungai Berau atau Kurau dengan sebuah perahu dari Bawean. Belanda kemudian melakukan patroli keamanan di wilayah Sungai Berau hingga Banjarmasin menggunakan kapal H M. Schooner Sapparua. Dalam kasus ini pemerintah kolonial Belanda menuduh salah seorang pribumi bernama Sigaroda dan diserahkan kepada Sultan Sambaliung, tetapi Sigaroda berhasil melarikan diri dengan sekunar bersenjata milik Sultan. Dua kapal Belanda berusaha melakukan pengejaran, tetapi setelah pertarungan yang singkat, mereka berhasil dikalahkan.

Pada perkembangan selanjutnya, khususnya pada abad ke-19, Banjarmasin semakin tumbuh menjadi pusat perdagangan di Kalimantan. Khusus untuk perdagangan komoditas lada, Belanda kemudian melakukan monopoli dan menjadikan Banjarmasin sebagai pasar terbuka (*open marketplace*). Pada tahun 1824, pemerintah kolonial bahkan meresmikan pelabuhan Banjarmasin sebagai pelabuhan terbuka, (*open marketplace*) bersama dengan Pontianak, Monapawa, dan Sambas (The Guardian, 16 Oktober 1824). Jalur pelayaran secara resmi dan rutin mulai dibuka. Kapal-kapal KPM melakukan pelayaran menuju Banjarmasin melalui Bawean dan Surabaya. Setiap minggu, sebuah kapal uap berlayar dari Bawean dan Surabaya dengan membawa serta kargo dan penumpang menuju ke Banjarmasin, Pulau Laut, Passir, dan Coti (The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 17 Mei 1892).

Komoditas unggulan Banjarmasin pada saat ini tidak hanya lada, tetapi batubara. Seperti yang dilaporkan bahwa Borneo memiliki sumber daya batubara yang besar. Tambang batubara tersebar di beberapa wilayah, antara lain Labuan, Bintulu, dan Sarawak, di pantai utara, tepi sungai Kapuas di Pantai

barat, Banjarmasin dan tepi Sungai Dyak di pantai selatan, dan Pulo Laut, Pagattan, dan Koti di pantai timur. Tambang batubara yang berada di Banjarmasin digunakan untuk mendukung persenjataan angkatan laut Belanda, misalnya sebagai bahan bakar kapal perang (steam-war). Kapal-kapal perang bertenaga uap tersebut seringkali digunakan untuk melakukan ekspedisi penumpasan bajak laut. Selain itu, juga memantau keamanan wilayah perairan Sulawesi dan Maluku (Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 13 Maret 1856).

Harga batubara yang dikirim dari depot di Banjarmasin sekitar 2 gulden per ton, sedangkan pengiriman batubara yang menuju ke Surabaya sebesar 4 hingga 8 gulden. Biasanya, batubara dengan kualitas ekspor dijual dalam bentuk balok besar berbentuk bujur sangkar, sementara batubara berukuran kecil dibuang atau disimpan untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Armada kapal milik pedagang Arab dan pedagang Surabaya biasanya digunakan sebagai alat transportasi utama pengangkutan. Keberadaan tambang batubara di Banjarmasin juga dilaporkan oleh salah seorang perwira Belanda ketika berada di Pulau Laut, yang terletak tidak jauh dari Banjarmasin, terdapat tambang batubara yang dikelola oleh perusahaan swasta. Nilai ekspor batubara per ton diperkirakan 7 hingga 8 gulden. Kargo batubara telah dikirim ke Jawa dan dipergunakan sebagai bahan bakar kereta api dan lainnya. Batubara tersebut dijual seharga 5 gulden per ton (Straits Times Weekly Issue, 24 April 1886).

Perkembangan selanjutnya yang penting bagi eksistensi Banjarmasin sebagai emporium maritim yaitu ketika Kesultanan Banjar dibubarkan pada 1860 yang berimplikasi pada pengendalian sistem pemerintahan, ekonomi, dan keamanan yang berangsur-angsur menjadi semakin terkontrol secara ketat oleh pemerintah colonial Belanda (Subroto, 2018). Banjarmasin sebagai ibukota Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada masa itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan. Pemerintah dan sektor swasta melakukan eksploitasi komoditas lokal dari pedalaman Banjarmasin. Dengan demikian, pemerintah kolonial melakukan eksploitasi sumberdaya alam, salah satunya bidang pertambangan. Kegiatan ini mulai intensif dilakukan di Kalimantan Timur dan Selatan (Residentie Zuider-en Oosterafdeling van Borneo) sejak

1883. Kalimantan memiliki sumber-daya alam yang melimpah, terutama penambangan minyak bumi, batubara, dan berlian. Selain itu, para peneliti juga melaporkan bahwa Kalimantan juga memiliki kekayaan alam dalam bentuk hasil hutan yang memiliki beberapa jenis kayu yang berpotensi dan sangat baik untuk pengembangan infrastruktur fisik serta yang paling penting sebagai komoditas ekspor.

### **KOSMOPOLITAN SEBAGAI MASYARAKAT MARITIM**

Melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan yang lahir dan berkembang di Nusantara termasuk di Kalimantan Selatan, masyarakat maritim saling berinteraksi bahkan kemudian berintegrasi sebagai entitas sosial yang hidup Bersama dalam suasana saling menghargai dan terbuka, sehingga keberagaman menjadi penciri utama, dari hal ini terbentuk identitas kosmopolitan. Tome Pires bahkan menyaksikan bahwa kosmopolitan terdapat di kota-kota pelabuhan di Nusantara. Di Melaka ditemukan orang asing yang datang dari banyak negara, seperti Gujarat, Bengali Tamil, Pegu, Siam, Cina, Habysi, Armenia, dan lainnya. Mereka berbaur dengan para pedagang Melayu, Jawa, Bugis, Luzon, dan pulau Ryukyu. Pires mencatat ada sekitar 60 etnis. Kondisi kosmopolitan seperti itu salah satunya juga terdapat di Banjarmasin (Hasbullah, 2009).

Kosmopolitan merujuk pada kondisi masyarakat berdasar pada moralitas inklusif, hubungan ekonomi yang resiprokal, atau struktur politik kekuasaan yang dinamis. Kosmopolitanisme juga mendasarkan pada hubungan bangsa-bangsa dari berbagai tempat (mis. Negara-bangsa) terjadi atas dasar hubungan yang saling menghormati. Menurut Appiah (1997) bahwa tempat terjadinya kosmopolitan dikaitkan dengan adanya mobilitas orang-orang di berbagai daerah yang tidak hanya melibatkan pertukaran budaya (yang diakui oleh kosmopolitan), tetapi juga migrasi, nomadisme, dan juga diaspora perdagangan (Appiah 1997). Secara politis, istilah kosmopolitan selalu terkait dengan persoalan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi antarnegara (Waldron 2000). Di sisi lain, menurut Held (2010) pengertian dan ruang lingkup kosmopolitan berangkat dari term yang bersifat filosofis dan institusional. Argumen mengenai kosmopolitan tidak hanya menyebabkan

pada peningkatan dan kemajuan penting dalam politik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meliputi dampak dari globalisasi dan *global governance*.

Interaksi bangsa-bangsa dan entik-entik di Banjarmasin merupakan aktivitas yang timbul karena kegiatan ekonomi maritim dalam hal ini adalah kegiatan pelayaran dan perdagangan yang telah terjadi sejak zaman pra-moderen atau sebelum kedatangan bangsa Eropa. Perpaduan kebudayaan bangsa-bangsa merupakan proses panjang yang dilakukan terutama melalui laut. Pada dasarnya, migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lain membawa teknologi baru, sumber daya atau faktor produksi, kepercayaan, tradisi, dan bahasa. Globalisasi sesungguhnya terjadi dalam rangka membangun masyarakat dengan tingkat kosmopolitanisme yang tinggi dari abad ke 13 hingga abad 19. Kondisi ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap pergeseran wacana dan cara berpikir masyarakat yang lebih moderen (Lieberman 2009). Dengan cara ini, bahkan orang Eropa tidak mampu mengenali jenis orang dan kelompok etnis yang serumit bangsa-bangsa di Nusantara (Asia Tenggara secara umum) yang telah mengakui pluralitas di wilayah tersebut. Terdapat dua hal yang perlu diuraikan, yaitu pusat-pusat pertumbuhan dan mobilitas yang terjadi dari dan menuju ke Banjarmasin akibat aktivitas tertentu, misalnya perdagangan dan persebaran intelektualisme (Steinberg 1987).

Banjarmasin sebagai salah satu daerah perdagangan di Nusantara pada masa awal modern juga merupakan tempat berlangsungnya proses-proses menjadi masyarakat kosmopolitan. Pada saat itu, wilayah Banjarmasin telah dihuni oleh berbagai populasi dan kelompok etnis dan bangsa yang beragam. Ketika hubungan antar kelompok sosial meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi khususnya perdagangan dan dalam hal ini pusat perdagangan menjadi titik pertemuan bagi kelompok sosial yang berbeda dengan budaya mereka masing-masing. Belum lagi, hubungan penaklukan politik dan militer di antara kekuatan politik yang juga menjadi salah satu saluran interaksi bagi kelompok sosial yang berdiaspora. Dengan demikian, untuk waktu yang lama, masyarakat Banjarmasin telah berinteraksi bahkan berintegrasi dengan berbagai jenis orang luar yang datang, misalnya orang-orang Jawa, Melayu, Bugis, India, Cina, Persia, Arab dan Eropa Inggris dan

Belanda. Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih terbuka dan menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat Banjarmasin bercorak kosmopolitan.

## **PENUTUP**

Dari paparan singkat tersebut dapat dibuat catatan, bahwa dari bukti-bukti sejarah menunjukkan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan di Kalimantan Selatan sejak abad 17 hingga abad 19 telah berkembang signifikan menjadi kekuatan maritim yang diperhitungkan di kancah Nusantara maupun internasional. Bahkan eksistensi pelabuhan Banjarmasin sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan Selatan, telah mengantarkan Banjarmasin menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi moderen yang responsif terhadap kebutuhan pasar global di mana lada Banjarmasin menjadi produk unggulan di pasar internasional pada eranya. Demikian juga batubara merupakan hasil tambang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Kejayaan kemaritiman Kalimantan Selatan terletak kepada kemampuan penguasa dalam mengintegrasikan potensi hulu-hilir dalam system ekonomi kemaritiman yang kemudian secara sosiologis juga menciptakan struktur masyarakat kosmopolitan kondusif untuk melakukan perubahan dan kemajuan. Belajar dari fakta sejarah tersebut, maka menjadi penting bagi Kalimantan Selatan untuk melakukan revitalisasi dan reorientasi bagaimana menjadikan ekonomi maritim sebagai pijakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang progresif.

## **DAFTAR BACAAN**

"Advertisements". *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 17 Mei 1892.

"Coal Fields of the Archipelago, Banjarmasin and Koti", *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 13 Maret 1856, h. 2.

"Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotaringin", called Hikayat Lambu Mangkurat, MS 12392, British Library.

"Local and General". *Straits Times Weekly Issue*, 24 April 1886, hlm. 2.

"The Free Press", *Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 24 April 1856, h. 2.

"The Free Press". *Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 22 Januari 1857.

Appiah, K. A. 1997. *Cosmopolitan Patriots. Critical Inquiry*, 23(3), 618.

- Bradley, Francis R. 2013. "Sheikh Da'ud Al-Fatani's Munyat Al-Musalli and the Place of Prayer In 19th-Century Patani Communities", *Indonesia and the Malay World* Vo. 41 (120) 2013: 198-214.
- Chalmers, I. 2006. "The Dynamics of Conversion: the Islamisation of the Dayak peoples of Central Kalimantan". *Paper presented to the 16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA) in Wollongong*, 26-29 June 2006.
- Groenevedt, W. P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Hall, 2014. Kenneth R. "European Southeast Asia encounters with Islamic expansionism, circa 1500–1700: Comparative case studies of Banten, Ayutthaya, and Banjarmasin in the wider Indian Ocean context", *Journal of World History* 25 (2-3): 229-262.
- Hall, Kenneth R. 1996. The Textile Industry in Southeast Asia, 1400-1800, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 39 (2): 87-135.
- Hasbullah, M. 2009. "King, Identity and Islamization: Psycho-social Aspects of Religious Conversion in Southeast Asia in the 15<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> Centuries". *Tawarikh Journal of Historical Studies*, Vol. 1 (1).
- Hawkins, M. "Becoming Banjar: identity and ethnicity in South Kalimantan, Indonesia", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2000; hh. 24-36.
- Held, D. 2010. *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*. Cambridge: Polity Press.
- Ras, J. J. 1968. *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography*. The Hague: Nijhoff.
- Sjamsuddin, H. 1991. "Islam and resistance in South and Central Kalimantan in the nineteenth and early twentieth centuries", in MC Ricklefs (ed.), *Islam in the Indonesian Social Context*, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Melbourne, 7-17.
- Steinberg, D. J. (1987). *In Search of Southeast Asia: A Modern History*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Straits Daily Times*, 23 Mei 1879.
- Straits Times Weekly*, 24 April 1886, hlm. 2.
- Subroto, W. 2018. "Power Shift and Socio-Political Changes on Banjarmasin in 19th-20th Century", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 2 (2) 120-127.
- Suntharalingam, R. 1963. *The British in Banjarmasin: An Abortive Attempt at Settlement 1700–1707*. *Journal of Southeast Asian History*, 4(02), 48.doi:10.1017/s0217781100002799.

- Susilowati, Endang. 2004. *Pasang Surut Pelayaran Perahu Rakyatdi Pelabuhan Banjarmasin 1880 – 1990*. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia
- The Guardian*, 16 Oktober 1824.
- Young, Robert J. 1991. "The English Factory at Banjar on the Island of Borneo, 1699–1707," *Indonesian Circle* 55.



# PERANG GANTER DAN KEMUNGKINAN HUBUNGAN JAWA-KALIMANTAN SELATAN ABAD KE XIII-XVI

Devan Firmansyah

devanfirmansyah@gmail.com

## PENDAHULUAN: PEMICU PERANG GANTER

Wilayah Pulau Jawa sejak dibagi menjadi dua kerajaan yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu oleh Raja Airlangga kepada para putranya pada tahun 1052 M (Hinzler & Schoterman, 1979:483; Kusumadewi, 1988:74 dan Riana, 2009:333), telah mengalami disintegrasi politik yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut berperang bertahun-tahun untuk berebut pengaruh politik guna menguasai wilayah Jawa. Pada awalnya Kerajaan Janggala-lah yang unggul dalam peperangan dan pengaruh politiknya. Namun, sampai saat ini hanya diketahui raja Janggala hanya tiga orang saja yaitu *Mahārāja Mapañji Garasakan*, *Śrī Mahārāja MapañjiAlañjuñ Ahyas Makoputadhaṇu Śrī Ajñājabharitāmāwakana Pasukala Nawanama-nitāniddhita Śasatrahetañjadewati*, dan juga *Śrī Mahārāja Rakai Halu pu Juru Sama-rotsāha Karṇakeśāna Ratnaśaṅkha Kirtisimha Jayāntakutuñ*, setelah itu tidak terdengar lagi berita Kerajaan Janggala (Muljana, 2006:21-25; Suwardono, 2013:126-132).

Setelah masa Kerajaan Janggala dan Panjalu tersebut, terjadilah masa gelap kira-kira selama ± 60 tahun dalam sejarah Jawa periode klasik dikarenakan belum ditemukannya prasasti antar rentan waktu itu sampai awal abad ke-12 M. Kemudian pada tahun 1038 Śaka (11 Januari 1117 M) munculah Kerajaan *Kaḍiri* yang keberadaan awalnya dapat diketahui lewat prasasti Padlëgan sebagai penerus kerajaan Panjalu dan bersama dengan para rajanya menghiasi panggung sejarah Jawa (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:286). Kerajaan *Kaḍiri* menguasai Jawa selama ± 1 abad lamanya. Kemudian kerajaan ini mengalami kemunduran pada masa pemerintahan raja terakhirnya yaitu Kertajaya. Pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan *Kaḍiri* telah mengalami degradasi di dalam berbagai macam bidang.

---

\* Disampaikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Edukator Museum Mpu Purwa Kota Malang Sekaligus Peneliti dan Penulis Buku.

Dalam bidang politik-ekonomi, kekuasaan Kaḍiri terpecah-pecah. Wilayah Wēngkĕr (sekarang wilayah Madiun-Ponorogo, *pen*) memisahkan diri dari wilayah Kaḍiri berdasarkan prasasti Mrwak pada tahun 1108 Śaka (23 Maret 1186 M) dan prasasti Sirah Kĕting pada tahun 1126 Śaka (8 November 1204 M) (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:295; Nasoichah, 2007:101-102). Bahkan pada prasasti Kamulan terdapat sebuah informasi bahwa Raja Kertajaya diserang oleh musuh dari arah sebelah timur sehingga harus mengungsi dari istananya di Katang-Katang (Brandes, 1913:173; Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:293). Hal ini semakin membuat wilayah kekuasaan Kerajaan Kaḍiri semakin menyempit dan mengalami disintegrasi secara politik-ekonomi. Sedangkan dalam bidang sosial-budaya, Kerajaan Kaḍiri juga mengalami disintegrasi yang menyebabkan berpindahnya pusat kegiatan sosial-budaya ke wilayah Tumapĕl, yakni sebuah wilayah di sebelah timur lereng Gunung Kawi. Awal mula penyebabnya ialah Raja Kertajaya yang di dalam *Sĕrat Pararaton* disebut dengan *Dhandhang Gĕndhis*, berbuat kese-wenang-wenangan dengan meminta kepada seluruh pendeta agama Śiwa dan Buddha di seluruh wilayah Daha, ibukota Kaḍiri, untuk menyembahnya sebagai Dewa tertinggi. Akan tetapi kesemua pendeta tersebut menolak menyembah Raja Kertajaya dan kemudian mereka berbondong-bondong mengungsi ke wilayah Tumapĕl (Brandes, 1920:18-20; Hardjowardojo, 1965:29-31; Padmapuspita, 1966:62-64; Kasdi, 2008:92-94; Komandoko, 2008:32-35; Kriswanto, 2009:51-55). Kesewenang-wenangan itu juga tergambar dan tersirat di dalam kitab *Tantu Panggelaran* bahwa Kertajaya yang disebut juga *Śrī Mahārāja Taki*, hendak membunuh para pendeta sakti yang melebihi kesaktian dirinya (Pigeaud, 1924:112; Nurhajarini & Suyami, 1999:121-122 dan Suwardono, 2013:115).

Akhirnya, akibat peristiwa itu terjadi pergeseran pusat sosial-budaya masyarakat dari Daha, Kaḍiri, ke wilayah lereng timur Gunung Kawi yaitu Tumapĕl. Karena para pendeta yang secara stratifikasi sosial pengaruhnya menduduki posisi tertinggi di dalam masyarakat, meminta perlindungan dan merestui penguasa Tumapĕl yang bernama '*Ken Angrok*'<sup>1</sup> untuk menjadi

---

<sup>1</sup> Penulisan yang benar dari tokoh pendiri wangśa Rājasa tersebut adalah "*Ken Angrok*" bukan "*Ken Arok*" seperti yang telah diketahui masyarakat umum selama ini. Dalam naskah transkrip dan terjemahan di kitab *Pararaton* yang berhuruf Bali, ditemukan '*anuswara (ṅ)*' yang dibaca "*ng*" setelah kata "*A*" dan "*Rok*" sehingga tertulis "*Ken Anrok*" yang dibaca "*Ken*

seorang raja di Tumapël. Ken Angrok adalah sesosok pemuda berasal dari Desa *Pangkur* yang berhasil mendapatkan kekuasaannya di Tumapël dengan cara membunuh penguasa Tumapël sebelumnya yang bernama Tunggul Amëtung serta menikahi istrinya (Brandes, 1920:17; Hardjowardojo, 1965:28; Padmapuspita, 1966:61-62; Kasdi, 2008:91-92; Komandoko, 2008b:31-32; Kriswanto, 2009:49).

Asal-usul Ken Angrok sendiri kurang jelas, dalam *Pararaton* disebutkan bahwa Ken Angrok adalah anak Dewa Brahmā dengan ibunya seorang gadis biasa dari Desa Pangkur (Brandes, 1920:4; Hardjowardojo, 1965:14; Padmapuspita, 1966:48; Kasdi, 2008:79; Komandoko, 2008b:12; dan Kriswanto, 2009:13). Sedangkan di dalam *Kakawin Nāgarakṛtāgama* disebutkan bahwa Ken Angrok adalah putra dari Śrī Girinātha (Dewa Śīwa) yang konon kabarnya lahir tanpa ibu (Muljana, 2006:364; Riana, 2009:203). Sehingga karena orang tua tokoh Ken Angrok yang tidak jelas asal-usulnya itu maka, Ken Angrok di dalam *Cerita Rakyat Polowijen* dikenal dengan sebutan Joko Lulo yaitu 'seorang pemuda yang tidak memiliki bapak-ibu atau orangtua' (Suwardono, 2005:81). Karena hal tersebutlah maka untuk mengungkap genealogi Ken Angrok, sumber-sumber data sejarah tersebut harus dikomparasikan dengan sumber sejarah yang lain seperti prasasti untuk mendapat sedikit titik terang mengenainya.

Dalam perjuangannya mendapatkan kekuasaan di Tumapël, Ken Angrok melakukan berbagai macam persiapan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Pertama-tama Ken Angrok belajar segala sesuatu sebagai bekal dirinya, seperti belajar membaca, menulis, ilmu sastra, ilmu perhitungan, ilmu agama, keterampilan membuat emas, dll, kepada pendeta dan pu (mpu) (Brandes, 1920:6-10; Hardjowardojo, 1965:16-21; Padmapuspita, 1966:50-54; Kasdi, 2008:81-85; Komandoko, 2008:16-22; Kriswanto, 2009:21-33). Kemudian Ken Angrok menjalin hubungan dengan beberapa tokoh Tumapël dari berbagai macam kalangan baik dari pencuri, bandar judi, petani, pejabat desa,

---

*Angrok*". Adanya anuswara (ŋ) memang dapat dipahami karena dalam aturan sandi tata bahasa Jawa Kuno yang menentukan bahwa prefiks *a* yang dipakai di muka kata dengan konsonan *g, j, d, dh, r, l*, dan *h* (*ga, ja, da, dha, ra, la*, dan *ha*) akan selalu menggunakan nasal (bunyi sengau, *ng*) sebagai hal lebih dalam menyatakan tindakan, laku, kerja, atau aktivitas (Suwardono, 2013b:62-63).

dll, dalam menjalankan aksinya berbuat kerusuhan sosial di wilayah pedesaan Tumapël, hal tersebut sengaja dilakukan untuk membuat Kerajaan Kaḍiri menjadi tidak aman dan tentram. Berikutnya ketika berhasil menjadi raja di Tumapël, Ken Angrok ingin melebarkan kekuasaannya di Jawa dengan menyerang Kerajaan Kaḍiri. Penyerangan tersebut didukung dan direstui oleh golongan masyarakat tertinggi yaitu para pendeta Śiwa, Wiṣṇu dan Buddha Mahāyana serta didukung oleh para penguasa lokal wilayah timur Gunung Kawi. Sehingga Ken Angrok berhasil menjadi seorang Mahārāja dengan dukungan kuat dari berbagai macam lapisan masyarakat, berkat memanfaatkan situasi kerusuhan ideologi sosial politik pada saat itu. (Warsito, 1966:23-24; Savitri, 2012:107; Suwardono, 2013:159-161).

Setelah keruntuhan Kaḍiri dan juga wangśa Isāna oleh serangan dari *Ken Angrok* yang berasal dari timur Gunung Kawi. Ken Angrok dengan dukungan segenap masyarakat dan juga para pendeta Śiwa dan Buddha dari Kaḍiri yang dikecewakan oleh Kertajaya, segera mendirikan kerajaannya yang bernama kerajaan Tumapël dan juga wangśanya yang disebut wangśa Rājasa atau wangśa Girindra. Ketika menjadi raja Ken Angrok mengambil gelar penobatannya yaitu *Śrī Rājasa Bhaṭāra Sang Amurwabhūmi*. Kemudian *Śrī Rājasa* (=yang merampas) atau *Amurwabhumi* (=yang memberi bentuk kepada dunia) mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang belum takluk. Ken Angrok yang sudah menjadi raja penyatu Tumapël dan Kaḍiri, kerajaannya tetap beribukota di Tumapël atau Singhasāri, yang nama resmi ibukotanya disebut *Kuṭarāja*<sup>2</sup> (Soekmono, 1981:61; Wojowasito, 1957:40-41).

Seperti yang sudah disinggung dalam uraian di atas, pada masa akhir Kerajaan Kaḍiri, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Kertajaya atau Raja Śreṅga.

---

<sup>2</sup> Ada yang berpendapat bahwa lokasi *Kuṭarāja* berada di Dukuh/Dusun/Kampung "Kuto Bedah (Koeto Bedah)" yang sekarang secara administratif masuk Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang. Argumennya adalah pada peta rupabumi tahun 1811 namanya masih "Koetoredjo (Kutorejo)". Kemudian sekitar tahun 1901 berubah menjadi "Kuto Bedah". Kutorejo adalah perubahan bunyi dari *Kuṭarāja* (*Kuṭarāja* [1222 M] → Kutorejo [1811 M] → Kuto Bedah [1901 M]). Argumen tersebut ditambah dengan temuan arkeologis yang melimpah di tempat tersebut sehingga tempat tersebut ditetapkan sebagai lokasi ibukota Ken Angrok saat memerintah kerajaan Tumapël (Tim Hari jadi Kabupaten Malang, 1984:7 dan Cahyono, 2013:171-173). Sementara pendapat lainnya *Kuṭarāja* tak lain adalah Tumapël itu sendiri (Suwardono, 2013b:226).

Raja Kertajaya sendiri memiliki banyak sebutan. Dalam prasasti-prasastinya raja ini gelar lengkapnya yaitu *Śrī Mahārāja Śrī Sarwweśwara Triwikramāwatārānindita Śreṅga-lañchana Digjayotunggadewanāma*. Jika dilihat kembali nama gelar raja Kertajaya sungguh menarik karena mengandung nama *Śrī Sarwweśwara* apakah tidak mungkin jika raja Kertajaya adalah keturunan dari *Śrī Sarwweśwara*<sup>3</sup>? Lagi pula nama Kertajaya juga disebut dalam prasasti Jaring pada masa Śrī Gandra. Seakan-akan tersirat hal bahwa Kertajaya merebut takhta dari Śrī Kāmeśwara. Hal ini semakin menunjukkan bahwa sejak zaman raja Jayabhaya sampai Kertajaya telah terjadi perebutan takhta turun temurun di Kerajaan Kaḍiri sendiri selain diperkeruh dengan peperangan dengan pihak Janggala. Selanjutnya Kertajaya juga mendapat julukan sebagai *Śrī Mahārāja Taki* di dalam kitab *Tantu Panggelaran* dan disebut sebagai raja *Dhañdhang Gēndhis*<sup>4</sup> dalam kitab *Pararaton*. Raja Kertajaya

---

<sup>3</sup> Śrī Sarwweśwara adalah raja pengganti Jayabhaya yang berikutnya. Raja ini memiliki nama gelar (*abhiṣeka*) lengkapnya ialah: *Śrī Mahārāja Rakai Sirikan Śrī Sarwweśwara Janarddhanāwatāra Wijayagrajasama Singhanadaniwāryawiryya Parākrama Digjayotunggadewanāma*. Prasasti yang dikeluarkannya sejauh ini hanya dua buah saja yang baru diketemukan yaitu prasasti Padlĕgan II tahun 1081 Śaka (23 September 1159 M), ditemukan di Desa Pikatan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan juga prasasti Kahyunan tahun 1082 Śaka (23 Februari 1161 M) yang ditemukan di Desa Kahyunan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kedua prasasti tersebut belum diterbitkan (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:290; Suwardono, 2013a:142-143). Jika dilihat gelar dari Śrī Sarwweśwara adalah *Rakai Sirikan*\* bukannya *Rakai Hino*, maka dapat dikatakan Śrī Sarwweśwara merebut takhta dari putra mahkota. Śrī Sarwweśwara sendiri memerintah hanya sekitar ± 10 tahun saja karena tahun 1169 M munculah seorang raja baru penggantinya.

\* Catatan: Jabatan Rakai Sirikan pada masa Kaḍiri adalah jabatan urutan ke tiga yang berada di bawah Rakai Hino dan Rakai Halu (Suwardono, 2013:147). Maka jelaslah bahwa sebelum *Śrī Sarwweśwara* bertakhta ada kandidat yang paling layak yaitu pejabat Rakai Hino yang umumnya dijabat oleh putra atau putri mahkota untuk menggantikan raja sebelumnya. Jadi sangat mungkin jika *Śrī Sarwweśwaratelah* merebut takhta putra atau putri mahkota sebelumnya.

<sup>4</sup> Komandoko (2008:13) memaknai nama *Dhañdhang Gēndhis*, yang bermakna Hitam Manis, Si Pembawa Kesejahteraan. Julukan *Dhañdhang Gēndhis* itu juga merupakan sindiran padanya karena ia suka dan pintar memutarbalikkan kata-kata. Namun, pendapat tersebut dapat disangsikan karena nama *Dhañdhang Gēndhis*, ternyata diambil dari nama tumbuhan yaitu *Dandang Gendis* (*Clinacanthus nutans*), sebuah tumbuhan yang berkhasiat obat yang daunnya berasa pahit dan berbau aromatis. Nama *Dhañdhang Gēndhis* juga digunakan menjadi nama desa yaitu Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (Santosa, 2017:105). Hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat Jawa kuna yang memberi nama *garbhopati* mengandung unsur flora yang biasanya

cukup banyak mengeluarkan prasasti. Prasasti-prasasti tersebut antara lain sebagai berikut: prasasti Sapu Angin tahun 1112 Śaka (1190 atau 1191 M) lokasi ditemukannya di perkebunan Sapu Angin, Desa Geger, Kecamatan Kalangbret, Kabupaten Tulungagung; prasasti Kamulan tahun 1116 Śaka (31 Agustus 1194 M) ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek; prasasti Palah tahun 1119 Śaka (1197 M) ditemukan di pelataran Candi Penataran, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar; kemudian terdapat prasasti yang semasa dengan Kertajaya tetapi tidak dikeluarkan oleh Kertajaya yaitu prasasti Candi Pørtapan (Subhaṣitā) yang dikeluarkan oleh *Kakiri Subhaṣitā* (kakek dari Subhaṣitā) untuk meresmikan sebuah bangunan suci guna menghormati para leluhur di Subhaṣitā (*sang hyang kabuyutan ri Subhaṣitā*). Prasasti itu ditemukannya di Desa Pinggirsari, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kemudian setahun berikutnya dikeluarkanlah prasasti oleh Kertajaya yaitu prasasti Pamotoh tahun 1120 Śaka (6 Desember 1198 M). Prasasti ini dikeluarkan oleh Kertajaya dengan gelar *Śrī Digjayā Rṣi* (Raja Rəsi) untuk memberikan anugerah bagi warga *Wisaya (Watak)* Pamotoh yang bernama Dyah Limpa. Prasasti ini ditemukan di wilayah kompleks Perkebunan Ukir Negara, Desa Sirah Kencong, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tahun 1974. Kini prasasti tersebut telah menjadi koleksi Museum Pu Tantular Sidoarjo. Kemudian prasasti Kertajaya yang berikutnya yaitu prasasti Galunggung dikeluarkan tahun 1122 Śaka (1200 M) dan diketemukan di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Kemudian prasasti berikutnya yaitu prasasti Biri dikeluarkan tahun 1124 Śaka (1202 M). Lalu prasasti berikutnya yaitu prasasti Sumberingin Kidul dikeluarkan tahun 1126 Śaka (1204 M) ditemukan di Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Setahun kemudian dikeluarkanlah prasasti Lawadan yang bertahun 1127 Śaka (1205 M) prasasti ini diketemukan di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dan prasasti terakhir yang

---

dipadukan dengan unsur fauna dalam suatu nama. Misalnya, saja Limwa nama kecil raja Gajayana yang berarti Jeruk Limo atau Jeruk Limau (*Citrus amblycarpa*), kemudian Mahisa Wongatëlëng anak Ken Angrok dan Ken Dëdës juga memiliki unsur nama tumbuhan yaitu Wongatëlëng, yang berarti *Bunga Telang (Clitoria ternatea)*. Dan anak dari Mahisa Wongatëlëng, sendiri yaitu Mahisa Câmpaka yang makna Câmpaka berarti *Bunga Cempaka (Magnolia champaca)*.

dikeluarkan oleh Kertajaya yaitu prasasti Merjosari tahun 1138 Śaka (1216 M) prasasti tersebut diketemukan di Desa Merjosari (kini kelurahan, pen), Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pemerintahan dari Kertajaya berakhir tahun 1222 M karena diserang oleh Ken Angrok raja kerajaan Tumapel dan kemudian berakhirlah pemerintahan kerajaan Kaḍiri (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:292-294; Munib, 2011:166-170; Suwardono, 2013:145-147&159). Berikut dibawah ini akan dijabarkan dua faktor penting penyebab meletusnya Perang Gantĕr.

### **1. Kondisi Politik Masa Kadiri Akhir**

Kondisi politik masa akhir Kerajaan Kaḍiri adalah puncak dari disintegrasi dari masa-masa sebelumnya. Kerajaan Kaḍiri kehilangan negara vassal Wĕngkĕr yang telah melepaskan atau memerdekakan diri dari Kerajaan Kaḍiri. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya dua buah prasasti oleh seorang raja yang bernama *Śrī Jayawarṣa Digjaya Śāstraprabhu*. Dua prasasti tersebut yaitu prasasti Mṛwak pada tahun 1108 Śaka (23 Maret 1186 M) dan prasasti Sirah Kĕting tahun 1126 Śaka (18 Januari 1204 M) (Nasoichah, 2007:107; 2017:9&14). Dalam prasastinya tersebut Śrī Jayawarṣa melegitimasikan dirinya dengan mengaku keturunan dari anak Dharmawangsa Tĕguh sehingga ia merasa berhak atas takhta. Sehingga ketika kerajaan yang dipimpin-nya sudah merasa kuat, ia segera melepaskan wilayah kekuasaannya dari Kaḍiri (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:295; Nasoichah, 2007:101-102; dan Suwardono, 2013:129-130). Dengan kemunculan raja ini dapat disimpulkan telah terjadi persaingan diantara Kaḍiri dengan Wĕngkĕr sehingga membuat posisi Kaḍiri semakin sempit dan melemah.

Peristiwa politik berikutnya disebut di dalam prasasti Kamulan pada tahun 1116 Śaka (31 Agustus 1194 M) mengenai terusirnya Raja Kertajaya dari istananya di *Katang-Katang* karena ada serangan musuh dari arah sebelah timur (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:293). Teks yang menyebutkan serangan dari timur di prasasti Kamulan ada pada baris ke-13 sebagai berikut:

*...tka ni ṣatru wadwā kāla sangke pūrwwa ikā tāngdadyakĕn purwwārṇā  
i śrī mahārāja ri kadaṣabhūtanikang sāmya haji katandān (sakapāt)...*  
(Brandes, 1913:173).

Terjemahan:

...pada waktu datangnya musuh dalam jumlah besar yang berasal dari *daerah timur* itulah yang menjadikan adanya hutang budi *Śrī Mahārāja* kepada pemberi abdi nyata yaitu *Sāmya Haji Kataṇḍan Sakapāt* (empat orang raja bawahan yang memiliki para pejabat bergelar *taṇḍa*)... (Nugroho, 2016:3).

Pada saat serangan itu istana Kertajaya berada di Katang-Katang, hal ini disebut pada prasasti Kamulan baris ke-14: "...*kaḍatwan ring katang-katang*..." (Brandes, 1913:173), yang berarti: "...*kaḍatwan* yang berada di Katang-Katang..." (Nugroho, 2016:3). Lokasi Katang-Katang kini berada di Dukuh Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, disekitar lokasi Kantor Kabupaten Kediri sekarang (Munib, 2011:77). Sangat mungkin musuh yang menyerang dari sebelah timur itu berasal dari wilayah Malang. Hal ini dikarenakan timur Kediri adalah suatu wilayah dibatasi oleh Gunung Kawi yang tak lain adalah wilayah 'Malang'. Nama Malang disebut di dalam prasasti Pamotoh (Ukir Negara) kelompok ke II pada baris ke 3 dan 4 sebagai tempat berburu disebelah timur sekitar Malang: "...*wetaniñ sakrida malañ*..." (Suhadi & Kartakusuma, 1996:9; Siswondo, dkk, 1978:27). Dalam kitab *Pararaton* Gunung Kawi dan wilayah timurnya juga sempat disebutkan: "...*sira titisankĕna ri wetaning Kawi*..." (Brandes, 1920:3-4). Maka, dapatlah dikatakan bahwa serangan itu berasal dari Malang sekaligus juga dapat diperkirakan bahwa musuh tersebut adalah keturunan raja *Śrī Mahārāja Śrī Jayāmṛta* dari Janggala yang wilayah pemerintahannya berpusat di Malang. Hal tersebut menandakan bahwa perang antara Pañjalu dan Janggala belumlah berakhir dan semakin memperlemah keadaan Kaḍiri.

## **2. Kondisi Sosial Masa Kadiri Akhir**

Kondisi sosial masa akhir kerajaan Kaḍiri diwarnai kerusuhan yang disebabkan kese-wenang-wenangan raja Kertajaya terhadap golongan pendeta. Raja Kertajaya berlaku otoriter terhadap para pendeta, peristiwa tersebut terekam dalam kitab *Tantu Panggelaran* dan juga kitab *Pararaton*. Seperti dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa di dalam *Tantu Panggelaran* raja Krtaja disebut juga *Śrī Mahārāja Taki*. Dalam bagian ke VII dari



kitab *Tantu Panggelaran* dikisahkan *Śrī Mahārāja Taki* hendak berambisi membunuh pendeta sakti yang bernama Pu Bharang. Berikut teksnya:

*Ana ta sira ratu siniwing Daha, anak atuhā de haji Bhathati, Śrī Mahārāja Taki ngaranira. Sira ta siniwi ring Daha. Mangrêngê ta yan hana bhujangga mambheraawa matapa rikang sma ring arggha Kal-yāsêm, kunapaning wwang pinanganya. Agila ta manah Śrī Mahārāja mangrêngö, ya ta matus ri sang sogata kalih sanak, mangaran sirā Pu Tapa-Wangkêng mwang Pu Tapa-palet. Kalih pada kinon de sang prabhu hamkahana sirā Pu Bharang* (Pigeaud, 1924:112).

Terjemahan:

Adalah raja dihormati di Daha, anak tertua raja *Bhathati*, *Śrī Mahārāja Taki* namanya. Dia dihormati di Daha, mendengarlah bahwa ada bujangga (pendeta) yang kesaktiaannya mengerikan bertapa di perkuburan (lapangan mayat) di puncak Gunung *Kaliasem*. Mayat manusia yang menjadi (teman dan) makanannya. Merasa ngerilah hati raja mendengarnya. Maka diutuslah dua orang pendeta Buddha bersaudara bernama *Pu Tapa-Wangkeng* dan *Pu Tapa-Palet*. Keduanya disuruh oleh sang Prabhu supaya membunuh *Pu Bharang* (nama pendeta yang bertapa di Gunung Kaliasem) (Nurhajarini & Suyami, 1999:121-122 dan Suwardono, 2013:115).

Dari sedikit cuplikan teks diatas dapat dikatakan bahwa Raja Kertajaya adalah seorang raja yang sewenang-wenang dan mabuk kehebatan dan kekuasaan. Kertajaya tidak ingin ada orang lain melebihi kekuasaan dan kesaktiannya. Dan siapa yang hendak menandinginya, maka ia akan berusaha menyingkirkannya. Kemudian kesewenang-wenangan Kertajaya yang lain yaitu Kertajaya ingin memaksakan kehendak kepada para pendeta di seluruh Daha untuk menyembahnya seperti Dewa. Peristiwa tersebut terekam dalam *Pararaton* berikut ini:

Teks *Pararaton*; Bagian 13:

[15] ...*Katuwon panduluring widhi sang ratu ring Daha siraji Dṅḍṅang gēṅḍis angan dika ring parabhujangga sahaneng Daha, lingira: E, ki para bhujangga çewa-sogata, paran sangkanira nora aněmbah ring insun, apan insun sakṣat bhaṭāra Guru.*" Sumahur parabhujangga

- sakapasuking naga-reng Kaḍiri: Pukulun tan wontën ing kinakina bhujangga aněm-*
- [20] *bahi ratu.* "Mangkana lingira bhujangga kabeh. Lingiraji Ḍangḍang gěḅḅis: Lah manawa kang ring kuna nora aněmbah, kang mangko sunwehi pangawyakti." Mangke ta siraji Ḍangḍang gěḅḅis angadėgakěḅ tumbak, laḅḅeyanipun tinañcěbakěḅ ring lěmah, sira ta alingghih, ring pucuking tumbak, tur angandika: „ Lah pa-
- [10] *rabhujangga dělěngěḅ kaçaktiningsun.* "Sira ta katon acaturbhuja, atrinayana, sakṣat bhaṭāra Guru rupanira, winidhi aněmbaha parabhujangga sakapasuking Daha, sama tan harěp aněmbaha tur měrsah paḍa angungsi maring Tumapěl asewaka ring ken Angrok... (Brandes, 1920:18; Padmapuspita, 1966:21-21; dan Kasdi, 2008:54).

Terjemahan:

Kebetulan dengan kehendak Dewata sang prabu Dhaḅḅhang Gěḅḅhis, raja di Daha bertanya kepada para pendeta yang menghadap di Daha: "Hai, para pendeta Śiwa-Buddha, mengapa kalian tidak menyembah kepadaku, karena aku adalah (bagai) Bhaṭāra Guru". Menjawablah semua pendeta-pendeta semua (seluruh) pendeta yang berdiam di Kaḍiri: "Tanku, dari (zaman) dulu tak ada pendeta menyembah (kepada) raja". Demikianlah kata para pendeta semua. Berkatalah Dhaḅḅhang Gěḅḅhis: "Kalau zaman dahulu tak ada yang menyembah, sekarang kalian harus menyembah kepadaku, kalau kalian tidak tahu akan kesaktianku, maka sekarang aku berikan buktinya". Maka raja Dhaḅḅhang Gěḅḅhis memasang sebuah tombak dengan tangkainya (hulu) ditancapkan kedalam tanah, dia duduk diatas ujung tombak dan berkata: "Hai, para pendeta, lihat kesaktianku!". Maka dia tampak bertangan 4, bermata 3, rupanya seperti Bhaṭāra Guru. Para pendeta di seluruh Daha dipaksa menyembahnya, mereka tidak mau menyembah mereka mengungsi ke Tumapěl dan menghadap (menghamba) kepada Ken Angrok (Hardjowardojo, 1965:29-30; Komandoko, 2008b:33; Kriswanto, 2009:51-53).

Berdasarkan uraian di atas, B. Schrieke mengungkapkan bahwa sikap Kertajaya yang mabuk kekuasaan dengan menyuruh para *bhujangga* (pendeta) untuk menyembahnya, menun-jukkan bahwa ia telah kerasukan Dewi Kali. Dengan perkataan lain bahwa dunia pada masa Kertajaya sudah sampai kepada zaman *Kaliyuga*, yang pasti akan segera disusul dengan keha-ncuran (*pralaya*).

Dengan demikian peristiwa tersebut akan segera disusul dengan timbulnya kerajaan baru dengan *rājakula* baru pula, dalam hal ini adalah kerajaan Tumapel atau Singhasari sampai pada masa Majapahit dengan penguasanya yaitu dari raja-raja wangsa Rājasa (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:298).

### **KEN ANGROK: SANG JURU SELAMAT JAWA**

Dukungan terhadap Ken Angrok yang muncul dari berbagai macam lapisan masyarakat mulai dari perangkat desa, staff pemerintahan, penguasa lokal dan juga golongan agamawan membuat posisi Ken Angrok dalam menyusun kekuatan guna menjadi raja semakin kuat. Pada puncaknya Ken Angrok berencana menyerang Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Hal tersebut merupakan bentuk puncak dari kekacauan situasi sosial masyarakat yang sudah memuncak pada saat tersebut. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kertajaya memberikan gambaran kon-disi masa Kediri akhir yang tampak memasuki zaman Kaliyuga (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:298).

Dalam konsep masyarakat Jawa kuno dipercaya bahwa waktu terbagi menjadi 4 siklus (*caturyuga*), yaitu:

- a. *Kṛtayuga* (zaman emas). Dalam zaman ini tak ada kejahatan sama sekali. Adanya hanya baik saja. Maka manusia tidak memerlukan sesuatu kitab suci;
- b. *Tretayuga* (zaman perak). Manusia sudah kenal baik dan buruk. Kejahatan me-ningkat sampai 25%. Maka manusia memerlukan satu buah kitab suci (*Weda*) sebagai bimbingan dan pegangan hidup;
- c. *Dwāparayuga* (zaman perunggu). Kejahatan meningkat sampai 50%. Maka manusia memerlukan 2 buah *Weda* untuk memimpinnnya kearah kebaikan; dan
- d. *Kaliyuga* (zaman besi). Zaman ini berlangsung sampai hari ini. Kejahatan sudah 75%, dan makin lama makin menghebat. Manusia diberi 3 buah kitab *Weda* untuk dapat mengekang diri, agar jangan terjermus ke dalam kejahatan (Soekmono, 1981:31).

Jika dilihat pada siklus diatas pada masa Kertajaya, kejahatan sudah menjadi-jadi. Golongan agamawan direndahkan oleh Kertajaya yang menganggap dirinya sebagai dewa dan menyuruh para pemuka agama menyembahnya dan tidak segan hendak membunuh siapa saja yang melebihi kesaktiannya. Selain hal tersebut perseteruan antara Kaḍiri (Pañjalu)-Janggala yang sudah terjadi selama ratusan tahun tampak mencapai puncaknya pada medio pertengahan abad ke-13. Segenap elemen masyarakat tampaknya menginginkan sebuah negara yang damai seperti pada masa pemerintahan Airlangga sebelum kerajaannya terbagi.

Kondisi masyarakat saat itu hampir mirip dengan kondisi masyarakat pada masa pen-jajahan Belanda sekitar abad ke-19 dan abad ke-20. Dimana saat itu terjadi ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pemerintah kolonial, sehingga membuat sendi-sendi tatanan ke-hidupan masyarakat yang stabil menjadi terganggu. Sehingga pada masa itu munculah gerakan-gerakan sosial-keagamaan yang dipimpin oleh seorang tokoh yang dianggap suci, sakti dan dapat menjadi penyelamatan masyarakat saat itu dan diharapkan dapat mengembalikan tatanan sosial menjadi sedia kala. Gerakan-gerakan tersebut disebut memiliki beberapa sebutan yaitu: juru selamat (*mesianisme*); Ratu Adil (*millenarianisme*), pribumi (*nativisme*), kenabian (*prophetis-me*), penghidupan kembali (*revitalisasi*) atau menghidupkan kembali (*revivalisme*) (Kartodirdjo, 1992:10). Masyarakat pengikut gerakan tersebut bersikap melankolis dengan berharap kejayaan masyarakat masa lampu kembali terulang dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Masyarakat yang tersebar di berbagai daerah, misalnya di Banten mendambakan kembalinya kerajaan besar Kesultanan Banten. Di daerah Priyangan dalam tradisi populer masa lalu mendambakan kembalinya kejayaan Kerajaan Sunda, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992:18).

Kondisi peristiwa diatas dapat dianalogikan pada kondisi masyarakat medio abad ke-13 saat mendekati keruntuhan kerajaan Kaḍiri. Tampaknya segenap elemen masyarakat saat itu mendambakan kembalinya masa kedamaian dan persatuan seperti pada masa pemerintahan Raja Airlangga sebelum kerajaannya dibagi. Tokoh yang dipercaya sebagai 'Ratu Adil' atau 'Juru Selamat' untuk meredakan kekacauan yang terjadi pada zaman Kaliyuga

di masa Kaḍiri akhir adalah Ken Angrok. Dukungan tersebut di gambarkan di dalam *Pararaton* melalui restu para Brāhmaṇa (golongan agamawan) dan rapat persetujuan 'para dewa' di Gunung Lejar, yang mana hal itu merupakan metafora dari bentuk dukungan para penguasa lokal terhadap keabsahan Ken Angrok guna menjadi raja Jawa berikutnya. Tokoh yang semula dianggap banyak orang sebagai sosok *lêmbu pêtêng* karena dianggap lahir dari istri tidak sah (selir/garwo) namun memiliki potensi sebagai penguasa besar dalam dunia perpolitikan kini Ken Angrok memikul tanggung jawab besar guna menguasai seluruh wilayah Jawa. Karena seperti yang dijelaskan oleh Yanto Dirjosuwondo (1984:125) bahwa Ratu Adil adalah timbul pada masyarakat yang mengalami "kegoncangan sosial politik yang besar".

Berkaitan dengan hal diatas pada abad ke-18 terdapat sebuah mansurskrip yang berjudul "*Pralambang Triwikrama (Ramalan Jayabhaya)*" yang menyebutkan bahwa figur Ratu Adil Jawa adalah sosok dari tokoh "Herucakra". Dalam hubungan ini Drs. Soeroto menafsirkan bahwa sebutan "Herucakra" dalam ramalan Jayabhaya diduga berasal dari Buddha Wairocana, salah satu sebutan Buddha yang juga mengandung sifat "Ratu Adil" yang diharapkan kedatangannya oleh rakyat banyak (Dirjosuwondo, 1984:127). Dalam pembahasan sebelumnya pada konsep *dewarāja* telah dibahas mengenai konsep Ken Angrok sebagai Buddha Wairocana yang bertugas untuk menentramkan dunia. Jika demikian maka konsepsi masyarakat Jawa tersebut terhadap jika dikaitkan dengan diri Ken Angrok sebagai Ratu Adil sebagai perwujudan Herucakra atau Buddha Wairocana dapat diterima. Ken Angrok memiliki misi untuk mengalahkan Kertajaya sebagai simbol zaman Kaliyuga dengan mendirikan wangsa baru dan kerajaan baru. Dalam menjalankan tujuannya tersebut Ken Angrok tidak secara langsung menyerang Kerajaan Kaḍiri, namun ia menguasai terlebih dahulu wilayah terdekat dari Tumapël dan menanamkan pengaruh politiknya disebelah timur wilayah Gunung Kawi seperti yang dalam cuplikan *Pararaton* berikut ini:

Teks *Pararaton*; Bagian 8:

[10] *Têlas purwa wetaning Kawi, kaputër sawetaning Kawi, sama awëdi ring sira Ken Angrok, mahu ariwa ayun angadëga ratu, wong Tumapël sama*

- [15] *suka yen ken Angrok angadëga ratu*(Brandes, 1920:18; Padmapuspita, 1966:21; Kasdi, 2008:54).

Terjemahan:

Demikianlah terjadi perubahan disebelah timur Gunung Kawi, semuanya disebelah timur Gunung Kawi takut kepada Ken Angrok; dia ingin menjadi raja, orang Tumapël semuanya senang (mendukung) kalau Ken Angrok jadi raja (Hardjowardojo, 1965:29; Komandoko, 2008b:32-33; dan Kriswanto, 2009:51).

Kemudian setelah wilayah timur Gunung Kawi telah dikuasai Ken Angrok dan wilayah seberangnya juga takut kepada Ken Angrok, baru Ken Angrok menyerang Kerajaan Kaḍiri seperti yang tertulis dalam *Pararaton* berikut ini:

Teks *Pararaton*; Bagian 14:

- [5] *Alawas karëngö wërtanira ken Angrok yan huwus pangadëg ratu, kahatur ing siraji Daḅḅang gëḅḅis yen sang Amûrwa-bhûmi harëp amërepa maring daha. Andikaniraji Daḅḅang gëḅḅis: "Sapa ta angalahakëna ring nagaraningsun*
- [10] *iki, Manawa kalah lamun bhaḅâra Guru tumurun saking akaca, sugyan kalaha". Ingaturan sira ken Angrok, yan siraji Daḅḅang gëḅḅis angandika mangkana. Lingira sang Amûrwa-bhûmi: "E parabhujangga sewa-sogata kabeh, astokëna ing-sun abhiḅeka bhaḅâra Guru". Samangka ta mulanirâbhiḅeka bhaḅâra Guru, ingastwaning bhujangga brahmana rësi. Tur sira annuli anglurug maring Daha.*
- [15] *Karëngë deniraji Daḅḅang gëḅḅis yen sang Amûrwabhûmi ring Tumapël anëkani andon maring Daha. Lingiraji Daḅḅang gëḅḅis: "Alah ingsun sëḅënge ki Angrok winonging hyang". Sa-mangka ta saḅjata-ing Tumapël acucuh lawan saḅjata daha, aprang loring Gantër, apagut sama prawira, anlongi linongan, katitihan saḅjata Daha. Ariniraji Daḅḅang gëḅḅis maktah bamakrëti ksatriya*

- [20] *raden Mahiṣa walungan, lawan mantrinira prawira aran Gubar balēman; moktahning arinira Daṅḍang gēṅḍis mwah wadwa pinakatihati sira Gubar balēman kalih karēbat dening wado Tumapël, amah gunung denipun aprang. Samangka ta wado Daha kapalayu, apan kang pinakadining prang sampun kawēnang. Irika ta sañjata daha bubar tawon, pungkur wēḍus, dahut paying, tan hana pulih manih. Samangka ta siraji Daṅ-ḍang gēṅḍis murud saking paprangan, angungsi maring dewalaya, gumantung ing awangawang, tēkaning undakan,*
- [5] *pakaṭik, juru paying lawan amawa taḍah sēḍah, taḍah toya, panglante, sama milu angawangawang. Prasiddha kalah ring Daha denira ken Angrok. Lawan sira rayinira (sang Daṅḍang gēṅḍis) dewi Amisani, dewi Hasin, dewi paja, mangkin sama katuran yan siraji Daṅḍang gēṅḍis alah aprang, karēngö wontèn ing dewalaya gumantung ing awangawang, make ta sira twan dewi katiga*
- [10] *mukṣah lawan kaḍaton pisan. Irika ta sira ken Angrok huwus ing jayasatru, mulih maring Tumapël, kaputër bhūmi Jawa denira. Sakakala pañjēṅgira huwus kalah ing Daha 1144(Brandes, 1920:19-20; Padmapuspita, 1966:22-23; Kasdi, 2008:55-56).*

Terjemahan:

Lama terdengar berita bahwa Ken Angrok sudah menjadi raja, dihaturkan kepada raja Dhaṅḍhang Gēndhis bahwa sang Amurwabhūmi bermaksud akan melawan Daha. Berkata Dhaṅḍhang Gēndhis: "Siapa yang dapat mengalahkan kerajaan ini, mungkin kalah kalau *Bhaṭāra Guru* sendiri turun dari langit". Dihaturkan kepada Ken Angrok bahwa raja Dhaṅḍhang Gēndhis berkata demikian. Berkatalah Amurwabhūmi: "Hai para pendeta Śiwa-Buddha semuanya, ijinilah saya memakai nama *Bhaṭāra Guru*". Demikianlah asal mulanya dia bernama *Bhaṭāra Guru*, ditahbiskan oleh para pendeta. Lalu dia pergi memerangi Daha. Terdengar oleh raja Dhaṅḍhang Gēndhis bahwa sang Amurwabhūmi di Tumapël datang menyerbu Daha. Berkatalah Dhaṅḍhang Gēndhis: "Saya akan kalah karena Ken Angrok dilindungi dewa-dewa". Demikianlah pasukan Tumapël bertemu dengan pasukan daha, berperang disebelah utara Gantër, bertempur sama beraninya saling kalah mengalahkan, terdesaklah pasukan Daha. Adik Dhaṅḍhang Gēndhis, seorang kesatria

bernama raden mahisa Walungan mati secara kesatria dengan seorang menterinya bernama Gubar Balëman; adik Dhañdhang Gëndhis dan Gubar Balëman keduanya dikepung oleh tentara Tumapël tetapi mereka bertempur dengan gagah berani. Maka berlarilah tentara daha karena pemimpinnnya sudah meninggal. Maka pasukan daha bercerai-berai seperti lebah yang dipukul sarangnya, tak ada yang kembali. Maka raja Dhañdhang Gëndhis mundur dari medan perang, mengungsi ketempat perdewaan bersama-sama dengan kudanya, hambanya, pembawa payung, beserta pembawa tempat sirih, tempat air, pembawa tikar lenyap diudara. Kerajaan Daha dikalahkan oleh Ken Angrok, Adik Dhañdhang Gëndhis bernama Dewi Amisani, Dewi Hasin, Dewi Paja, setelah diberi kabar bahwa raja Dhañdhang Gëndhis kalah berperang. Lenyap diudara, maka ketiga orang puteri tadi lenyap pula beserta seisi istananya. Demikianlah Ken Angrok mengalahkan musuh; pulang ke Tumapël, Pulau Jawa dikuasainya. Tahun dia menjadi raja dan kalahnya Daha adalah tahun 1144 Śaka (1222 M) (Hardjowardojo, 1965:30-31; Komandoko, 2008b:34-35; Kriswanto, 2009:55-57).

Teks di atas adalah cuplikan pertempuran Ken Angrok dengan Raja Kertajaya dalam *Pararaton*. Namun teks mengenai berita pertempuran tersebut tidak hanya disebut dalam *Pa-raraton* saja tetapi juga disebut di dalam teks *Kakawin Nāgarakṛtāgama* sebagai berikut:

Teks *Nāgarakṛtāgama*, Pupuh 40 Baris 1-5:

150. *Ring śākābdhī kretā śangkara sira tumekē śrī narēndrēng kadhinten, sang wīrānindita śrī Kertajaya nipunēng śāstra tatwopadēśa, śīghrālah göng bhayāmrih malajenganusupā -/- pājaran pārśwa sūnya, sakwēhning bretya mukyang para pajuritasing kāri ring rājya śirṇna.*
151. *Ryyalah sang śrī narēndrēng kadhiri girigirin tang sabhūmi jawāres, prāptā nembah padha wwat sahana wijilning swadēsānpasēwa, tunggal tang janggala mwang kadhiri samasamāngēka nāthāti śantā, ngkā tembēning dhapur mwang kuwu juru tumamēng sāmya mangdē sukēng rāt* (Riana, 2009:205-206).



Terjemahan:

Pada tahun Śaka abdhikṛtāsankara-1144 (1222 Masehi) beliau melawan raja Kediri, Sang adipewira Śrī Kertajaya, terkenal pemberani ahli sastra serta filsafat dan doktrin keagamaan, segera terkalahkan, ketakutan, karena amat berbahaya berusaha melarikan diri menyelip di sebelah pertapaan yang sepi (dalam biara kecil), banyak rakyat pimpinan prajurit (juga pengawal dan perwira tentara) yang masih (tinggal) di ibukota dimusnahkan (mati terbunuh). Setelah *Narapati* (Raja) Kediri kalah, maka Jawa diselimuti ketakutan, semua (raja) datang menghormat (menyembah) serta mempersembahkan (membawa) segala hasil (tanda bakti) tanah didaerahnya sebagai tanda setia, bersatulah Janggala dan Kediri dibawah pimpinan (kuasa) seorang (satu) raja yang bijaksana (dan sakti), (cikal bakal para raja agung yang akan memerintah Pulau Jawa) mulai saat itu kelompok para penguasa wilayah mencapai keseimbangan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. (Muljana, 2006:365; Riana, 2009:205-206, dengan sedikit perubahan).

Di atas telah dijabarkan terkait dua versi pertempuran Ken Angrok menghadapi Kera-jaan Kaḍiri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya baik dari *Pararaton* maupun *Nāgarakṛtāgama*. Namun disini ada suatu hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian, yaitu tempat pertempuran Ken Angrok yang disebut Gantēr. Tempat bernama Gantēr ternyata juga disebut dalam naskah Panji yaitu cerita *Malat* dalam pupuh LXVI, XCIV dan XCV. Diceritakan bahwa tokoh Panji saat menghamba di Kerajaan Gegelang pada suatu hari pergi menuju Gantēr untuk menangkap ikan. Kemudian Gantēr juga disebut sebagai tempat anak laki-laki dari Raja Jagaraga yang bernama *Kuda Ngrimangi* menginap dalam perjalanannya menuju Gegelang (Poerbatjaraka, 1968:337&359-360).

Munib (2011:190-192) berdasarkan cerita *Malat* tersebut mengartikan bahwa Gantēr adalah 'taman' dan melokasikannya di *Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun*. Alasannya karena di tempat tersebut terdapat sebuah situs bernama '*Sendang Gantēr*'. Hal tersebut dikemukakan karena cocok kondisi lingkungan dalam naskah ketika Panji mencari ikan di (Sendang) Gantēr. Bahkan lebih lanjut Munib berpendapat diutara lokasi inilah pertempuran Ken Angrok dan Kertajaya terjadi. Kemudian ada yang melokasikan Gantēr sendiri di dekat daerah Desa Pujon (Brahmantyo, 1995:67

dan Tim Hari jadi Kabupaten Malang, 1984:60). Memang terdapat sebuah tempat yang mirip dengan nama Gantêr di dekat daerah Pujon yaitu Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Tinggalan arkeologis di tempat itu pun cukup banyak. Menurut penulis lokasi Gantêr yang berada di Ngantang-lah yang paling masuk akal. Karena daerah tersebut berada tepat di perbatasan Tumapël dan Kaḍiri<sup>5</sup>.

Dengan demikian kemenangan Ken Angrok atas Raja Kertajaya di wilayah Ngantang, mengingatkan kita akan kemenangan Raja Jayabhaya (*Śrī Warmeśwara*) sebagai pemimpin Kerajaan Kaḍiri (Pañjalu) terhadap saudaranya yaitu *Sang Hemabhūpati* sebagai penguasa Kerajaan Janggala. Dengan kemenangan itu Raja Jayabhaya (*Śrī Warmeśwara*) berhasil me-nyatukan Kaḍiri (Pañjalu)-Janggala. Kejadian tersebut kembali terulang saat Ken Angrok mengalahkan Raja Kertajaya di Ngantang dan menyatukan Kaḍiri (Pañjalu)-Janggala kembali dalam panji-panji Tumapël. Kemenangan Raja Jayabhaya (*Śrī Warmeśwara*) diabadikan dalam prasasti Hantang (Hantañ) tahun 1057 Śaka (7 September 1135 M) dalam prasasti tersebut kita mengetahui bahwa kemenangan Raja Jayabhaya (*Śrī Warmeśwara*) adalah berkat bantuan dari Desa Hantang beserta 12 *thāni* (desa) di dalamnya yang membantu peperangan (Wardhani, 1980:53-54).

Apakah tidak mungkin jika kemenangan Ken Angrok di Gantêr, Ngantang tersebut juga dibantu oleh Desa Hantang beserta 12 *thāni* (desa) di dalamnya juga? Hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun yang jelas disini Ken Angrok berhasil melaksanakan tugasnya untuk 'menentramkan dunia dan mempersatukan dunia' seperti yang disebut Raja Wiṣṇuwardhana dalam prasasti prasasti Maribong (Trawulan II), baris ke 4-5 (Bosch, 1918:169; Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:425; Suwardono, 2013a:155-156) dengan cara mempersatukan Janggala dan Kaḍiri (Pañjalu) sehingga kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Jika lokasi Gantêr berada di wilayah Madiun, maka penyerangan Ken Angrok kuranglah bijak dari segi strategi politik. Hal ini dikarenakan wilayah Madiun, saat itu masih dalam pengaruh kuat Krtajaya dengan *Sāmya Haji Kataṇḍan Sakapāt*-nya yang sangat kuat dan loyal. Jika Ken Angrok yang mendirikan kerajaannya baru seumur jagung itu, nekat untuk menyerang pusat kekuatan Krtajaya, maka tentu itu adalah suatu tindakan sia-sia yang kemungkinan besar berujung pada kekalahan. Besar kemungkinan Ken Angrok sudah mengkalkulasi hal itu.

masyarakat tercapai seperti yang disebut dalam teks *Nāgarakṛtāgama*, pupuh 40, baris ke-4 (Muljana, 2006:365; Riana, 2009:206). Yanto Dirjosuwondo (1984:135) memiliki kesimpulan bahwa figur awal sosok Ratu Adil dalam naskah "*Pralambang Triwikrama (Ramalan Jayabhaya)*" adalah tokoh hitoris, yakni raja Airlangga (1019-1049 M). Mitos Ratu Adil Jawa bertujuan politik praktis untuk (a) Penyatuan dan persatuan kembali kerajaan "kembar", yakni Janggala dan Kaḍiri; (b) Berisi usaha peningkatan kesejahteraan rakyat Kaḍiri (dan Janggala) untuk meningkatkan martabat "bangsa" terhadap "dunia luar"; dan (c) Berisi usaha peningkatan kehidupan agama dan kepercayaan demi tercapainya tingkat stabilisasi mental tertentu dalam masyarakat Jawa ketika itu dan selanjutnya (pemikiran filosofis sang raja, tentunya). Dengan menyematkan keberhasilan 'politik praktis' yang sudah disebutkan sebelumnya dalam segala keberhasilan Ken Angrok, maka sosok Ken Angrok dapat dikatakan berhasil menjadi sosok "Airlangga kedua". Dengan demikian misi yang diemban oleh Ken Angrok sebagai "Ratu Adil" atau "Juru Selamat" masyarakat Jawa pada pertengahan medio abad ke-13 M untuk menyatukan Janggala dan Kaḍiri (Pañjalu) telah berhasil dilaksanakan oleh Ken Angrok. Dan akhirnya Ken Angrok menjadi raja baru serta sebagai pendiri dinasti baru di Jawa.

Dukungan dari segenap lapisan kalangan membuktikan bahwa Ken Angrok bukanlah golongan dari rakyat biasa. Ia adalah golongan dari kasta kesatria yang memiliki kekerabatan dengan golongan bangsawan/kasta kesatria. Suwardono (2013a:152-153 dan 2013b:101-145) berpendapat bahwa ayah Ken Angrok adalah seorang pejabat dari kerajaan Kaḍiri yang jelas memiliki sebuah kedudukan, yang memungkinkan keturunannya dapat duduk di dalam pemerintahan. Ayah Ken Angrok tersebut adalah anak seorang janda dari Jiput yang tinggal di sebelah barat Gunung Kawi dalam teks pembukaan kitab *Pararaton*. Orang tersebut diketahui sangat suka memutuskan ikatan-ikatan kesusilaan dan ingin dipindahkan ke lereng timur Gunung Kawi. Jabatan dari Ayah Ken Angrok adalah *Pangkur* yaitu salah satu dari tiga jabatan (bersama Tawan dan Tirip) yang disebut dengan "*Winawa Sañ Māna Katrini*". *Winawa Sañ Māna Katrini* adalah salah satu dari tiga golongan dibawah keluarga raja (yaitu *rakarayān mapatih ihino*, *rakarayān ihalu*, dan *rakarayān*

*isirikan*) yang disebut "*taṇḍarakrayān ring pakira-kiran*". Jabatan Pangkur<sup>6</sup> adalah salah satu dari jabatan tinggi pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang kebanyakan diberi tugas untuk ditempatkan di daerah. Maka dalam hal ini desa tempat tinggal dari pejabat Pangkur tersebut dinamakan sesuai nama jabatannya yaitu *Desa Pangkur*. Kasus ini sama dengan kasus zaman kerajaan Islam dimana tempat tinggal pejabat Mangkubumi bernama Mangkubumen, tempat tinggal Yudonegoro menjadi Yudonegaran, tempat tinggal Mangkunegoro menjadi Mangkunegaran, dll. Ayah Ken Angrok bukanlah pejabat Pangkur biasa karena dia memiliki "hak istimewa" untuk kebal dari hukum negara dan bebas dari jeratan undang-undang *kutaramanawadharmasastra* pasal "paradara (perbuatan mesum)" guna melakukan "*wnaṅ katêmon iṅ strī laraṅan*" (berhak hubungan badan dengan seorang gadis yang sudah diikat lamaran atau dengan seorang wanita yang telah bersuami) dan "*wnaṅ unsirên iṅ strī laraṅan*" (berhak mendatangi atau memperoleh seorang gadis yang sudah diikat lamaran, atau seorang wanita yang sudah bersuami). Hak istimewa tersebut didapat karena yang bersangkutan rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam membela sang raja ketika ada peperangan, sehingga raja berkenan dan memberikan hak-hak tersebut kepadanya. Hak tersebut diberikan juga karena yang bersangkutan adalah seorang maniak seksual. Maka wajarlah jika pejabat Pangkur ini dengan hak istimewa tersebut leluasa meniduri Ken Êṇdok bahkan sampai membuat suaminya yaitu Gajah Para tewas. Suwardono juga menolak dan menyangsikan pendapat M. Boechari (1975, dalam Boechari, 2012:268-269) bahwa pejabat yang menjadi ayah Ken Angrok adalah Tunggul Amëtung. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan naskah *Pararaton* yang berkali-kali mengisahkan bahwa Tunggul Amëtung ingin melenyapkan Ken Angrok si pembuat kerusuhan.

---

<sup>6</sup> Tugas pejabat Pangkur di daerah bersama dengan bersama dengan Tawān dan Tirip adalah bertugas untuk mengurus pajak-pajak yang masuk ke perbendaharaan kerajaan. Adakalanya tiga jabatan tersebut karena tidak memiliki daerah *lungguh* (apanage) mereka ini dimasukkan ke dalam golongan "*mangilala drwya haji*", yaitu mereka yang menikmati kekayaan raja, dalam arti "mendapat gaji tetap" dari perbendaharaan kerajaan. Kedudukan jabatan Pangkur dalam "*mangilala drwya haji*", setingkat dibawah para putra dan putri raja yang disebut *rakai hino*, *rakai halu*, *rakai sirikan*, *rakai wka* dan *pamgat tiruan* (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:230-231 dan Yogi, 1996:34).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ken Angrok bukanlah anak petani dari golongan masyarakat biasa seperti yang banyak dipercaya orang selama ini. Ken Angrok justru adalah anak seorang bangsawan yang jabatannya adalah Pangkur. Pejabat ini adalah pejabat yang mendapat 'hak istimewa' dari raja Kertajaya karena telah memepertaruhkan nyawanya demi melindungi raja ketika terjadi peperangan. Oleh karena itu Ayah Ken Angrok dapat berhubungan dengan ibu Ken Angrok yaitu Êᅇdok tanpa terkena hukuman. Pejabat Pangkur ini adalah anak janda dari Jiput yang pindah ke wilayah timur Gunung Kawi dan masih memiliki hubungan kerabat dengan raja Kertajaya. Itulah sebabnya ketika Ken Angrok mengalahkan Kertajaya pada tahun 1222 M, Ken Angrok tidak membunuh Jayasabhā dan malah menikahkannya dengan salah satu putri Ken Angrok. Hal ini dikarenakan Ken Angrok bisa jadi sadar akan hubungan kekerabatan tersebut, setelah mengalahkan Kaᅇiri dan mempersatukannya dengan wilayah Janggala. Ken Angrok menjadi Mahārāja di Tumapël dan mendirikan wangśa Rājasa atau Girindra (Kᅇtitidharswarawangśa) (Firmansyah, 2017:84-85).

### **PASCA PERANG GANTER: ADAKAH HUBUNGAN DENGAN KALSEL?**

Pulau Kalimantan adalah salah satu dari beberapa pulau utama di wilayah Nusantara yang memiliki usia yang panjang. Pulau yang memiliki ukuran yang cukup besar ini merupakan awal mula dari pembabakan masa sejarah di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya prasasti tertua di Indonesia yaitu Prasasti Yupa (400 M) sebagai bukti adanya budaya tulis awal di Indonesia. Kembali ke masalah pulau-pulau tertua di Indonesia, pulau-pulau tua tersebut selain Kalimantan adalah Jawa dan Sumatera. Bahkan kisah beberapa pulau itu terekam dalam kisah mitologi dan naskah-naskah kesusastaan<sup>7</sup> kuno jauh sebelum masa pembabakan sejarah di pulau-pulau tersebut dimulai (masa ini dikenal dengan nama *proto-sejarah*<sup>8</sup>). Sebagai

---

<sup>7</sup> Kesusastaan terdiri dari beberapa kata. "Su" artinya indah, baik, lebih berfaedah; "Sastera" artinya huruf atau buku; "Ke-susastra-an" artinya *kumpulan buku-buku yang indah bahasa dan baik isinya* (Simandjuntak, 1958:07).

<sup>8</sup> Suatu masa transisi dari babakan prasejarah ke sejarah disebut dengan masa protosejarah. Protosejarah mempunyai ciri sebagai berikut: 1) Jika berita tentang suatu bangsa di suatu wilayah telah dicatat oleh bangsa lain yang telah mengenal tulisan, sedangkan bangsa yang

contoh, salah satu kitab yang sering disebut oleh para peneliti adalah kitab *Jātaka*. Kitab yang memuat kisah-kisah tentang kehidupan Sang Buddha ini menyebut *Suvarṇabhūmi* (pulau Sumatera, *pen*) sebagai sebuah negeri yang memerlukan perjalanan yang penuh bahaya untuk mencapainya. *Suvarṇabhūmi* berarti negeri emas. Menurut Sylvain Levi, yang dimaksudkan adalah sebuah negeri di sebelah timur Teluk Benggala. Kitab lainnya yang banyak dijadikan sumber adalah kitab *Rāmāyana*. Kitab yang amat terkenal ini menyebut nama *Yāwadwīpa* (Pulau Jawa, *pen*). Dikisahkan bahwa tentara kera yang bertugas mencari Sita di negeri-negeri sebelah timur telah memeriksa *Yāwadwīpa* yang dihias oleh tujuh kerajaan. Pulau ini adalah “pulau emas dan perak”. Kitab ini juga menyebut nama *Suvarṇadwīpa*, sebuah nama yang kemudian memang digunakan untuk menyebut Sumatra. Nama itu sendiri berarti pulau emas (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:09).

Sementara itu untuk Pulau Kalimantan sendiri, disebut didalam mitologi India kuno. Sejarawan dan Budayawan Lesbumi NU, K.H. Ng. Agus Sunyoto di dalam laman Facebook-nya (diakses pada [www.facebook.com](http://www.facebook.com) 23/10/2018, 19:36 WIB) menerangkan bahwa di dalam buku *Indian Myth and Legend*<sup>9</sup>, misalnya, Donald Alexander Mackenzie menemukan mitologi India tertua, menyebut wilayah Nusantara sebagai wilayah Dewa Laut Varuṇa, yang secara mitologis digambarkan tinggal di istana Varunai di *Varuṇadwīpa* (nama purba Pulau Kalimantan yang bermakna pulaunya Sang Baruna, yang dilafalkan keliru oleh lidah Belanda sebagai Borneo-*pen*). Mitologi India menggambarkan Dewa Baruna sebagai *asura* (musuh para sura, dewa) penguasa samudera raya. Anak-anak keturunan Baruna yang menghuni lautan disebut bangsa Kalakeya. Berkali-kali bangsa Kalakeya dari lautan itu naik ke daratan, menyerbu kota-kota dan desa-desa bahkan beberapa kali menggempur Indraloka di Amaravati, demikian mitologi India merekam keberanian sekaligus kebrutalan raksasa-raksasa laut yang disebut Kalakeya. Di samping Kalakeya, muncul pula para Danawa keturunan Danu dan para Daitya keturunan Diti. Pernyataan Agus

---

beritanya dicatat itu masih belum mengenal tulisan; dan 2) Jika di suatu wilayah sudah dikenal peninggalan yang mempunyai bentuk-bentuk seperti “tulisan”, tetapi belum dapat dibaca atau diartikan hingga saat ini (Munandar, 2004).

<sup>9</sup> Mackenzie, D.A dan Goble, W. (Illustrations in Colour). (1913). *Indian Myth and Legend*. London: The Gresham Publishing Company LTD.

Sunyoto tersebut juga diperkuat oleh Mukerjee (1952) dalam bukunya yang berjudul *The Indo-Asian Culture* yang menyatakan bahwa nama Kalimantan awalnya adalah Warunadwipa (Saleh, tt:22).

Sementara itu, ada kemungkinan jika hubungan dari sektor politik-ekonomi antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa sendiri sudah terjalin sejak masa Kerajaan Matarām Kuno masa pemerintahan Raja Airlangga. Hal tersebut disebut dalam Sĕrat Calon Arang Bab X (Santoso, 1975:50) sebagai berikut:

#### SĔRAT CALON ARANG BAB X

...Tidak dikatakan orang asing yang datang dari pulau-pulau lain yang tunduk dan menghambakan dirinya kepada Sri Baginda. Orang-orang dari seberang misalnya, Palembang, Jambi, Malaka, Singapura, Patani, Pahang, Siam, Campa, Cina, Koci, Keling, Tatar, Pego, Kedah, *Kutawaringin*, *Kute*, Bangka, Sunda, Madura, Ka-ngeyan, Makasar, Goron, Wandan, Peleke, Maluku, Bolo, Timor, Dampo, Bi-ma, Sumbawa, Sasak. Sekianlah banyaknya pulau-pulau lain mempersembahkan upeti kepada Baginda. Yang bergelar Maharaja Erlangga (Airlangga, *pen*) Jatiningrat...

Hubungan tersebut kemudian berlanjut pada masa masa akhir Kerajaan Singhasāri, saat dipimpin oleh Raja Kĕrtanāgara yang terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan *cakrawāla maṇḍala* ke luar Pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh *dwĭpāntara*. Wilayah Kalimantan yaitu seluruh Bakulapura atau Tañjungpura (loksi pusatnya terletak di bagian barat daya Kalimantan) masuk dalam kekuasaan Kerajaan Singhasāri (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:436-437). Kemudian, Pulau Kalimantan sendiri juga terkait erat dengan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pada zaman puncak Hindu-Buddha di Nusantara disaat Kerajaan Majapahit berkuasa. Pada masa Kerajaan Majapahit, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera sebagian besar wilayahnya masuk dalam pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit. Khusus untuk Pulau Kalimantan sendiri misalnya, disebutkan dalam *Kakawin Nāgarakṛtāgama*, Pupuh 13, Baris ke-2 dan Pupuh 14, Baris ke-1 (Saktiani, dkk, 2018:56-57, dengan sedikit tambahan dan perubahan) sebagai berikut:

#### PUPUH 13

2. *Hi lwas lāwan samudra mwañ i lamuri batan lāmpuñ mwañ i barus, yekāḍinyan watēm bhūmi malayu satanah kapwāmatēh anūt, len tekañ nūṣa tañjuñ nagara ri kapuhas lāwan ri katiñān, sāmpit mwañ kūṭaliṅga i kuṭawariñin sambas mwañ i lawai.*

Terjemahan:

Bersama dengan samudra yang luas, dan juga Lamur Batam, Lampung, juga barus, itulah wilayah-wilayah terutama di Melayu yang telah tunduk, selain itu, daerah-daerah di Kerajaan Tanjung (sebutan untuk pulau Kalimantan: Nusa Tanjungpura atau Pulau Tanjungpura, *pen*), dan Kapuas sampai dengan Katingan (sekarang Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah, *pen*), dari Sampit (sekarang ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, *pen*) dan juga Kutalingga (artinya, Kota Lingga, (mungkinkah Situs Candi Laras/Kerajaan Negara Dipa), *pen*) sampai dengan Kotawaringin (artinya Kota Beringin, kemungkinan masyarakat pra-Kerajaan Kotawaringin, sekarang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat, *pen*), di Sambas (Kerajaan Sambas Kuno, sekarang Kabupaten Sambas, *pen*) sampai dengan Lawai (wilayah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, *pen*).

#### PUPUH 14

1. *Kadhañdhañan i lañḍa len ri samēdhañ tirēm tan kasha, ri sedhu burunen ri kalka saludhuñ ri solot pasir, baritw i sawakū muwah ri tabaluñ ri tuñjung kute, lawan ri malano maka pramuka tañ ri tañjuñpura.*

Terjemahan:

Kadangdangan (sekarang Kecamatan Kendawangan, Ketapang, *pen*) sampai Landa (Kerajaan Landak, kini menjadi Kabupaten Landak, *pen*), selain itu dari Samedang (Semandang, wilayah Kerajaan Tanjungpura, *pen*) sampai Tirem (Tirun/Kerajaan Tidung, kemungkinan kini menjadi Kota Tarakan, *pen*) tak terlewatkan, dari Sedu (di Serawak, Malaysia, *pen*) Brunai (sekarang Negara Brunei, *pen*), dari Kalka (kemungkinan Sungai Kaluka atau Krian di selatan Sarawak, Malaysia, *pen*), Saludung (Kerajaan Manila, sekarang Kota Manila, Negara Filipina, *pen*), dari Pantai Solot (kerajaan masyarakat suku Buranun, penduduk asli yang mendiami pegunungan di



Kepulauan Sulu cikal bakal suku Suluk/Kesultanan Sulu, *pen*), Barito (sekarang Kabupaten Barito Utara sampai dengan Kabupaten Barito Kuala, *pen*), Sawaku (atau Sawakung di Berau atau kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, *pen*), serta dari Tabalong (sekarang Kabupaten Tabalong dengan kotanya Tanjungpuri di tepi sungai Tabalong, ibukota pertama kesultanan Banjar pada era Hindu, *pen*) dari Tanjung Kutai (Kesultanan Kutai Kartanegara yang beribukota di Desa Kutai Lama, *pen*), bersama dari Malano (kemungkinan wilayah masyarakat suku Melanau di Serawak dan Kalimantan Barat, *pen*) yang terkenal dari wilayah Tanjungpura (sebutan untuk pulau Kalimantan: Nusa Tanjungpura atau Pulau Tanjungpura, *pen*).

Dari keterangan *Kakawin Nāgarakṛtāgama* dapat diperoleh keterangan bahwa wilayah Kerajaan Majapahit didaerah yang kini disebut dengan nama Kalimantan Selatan ialah Barito, Sawaku, dan Tabalong (Saleh, tt:28). Selain itu Kutalingga jika memang benar lokasinya di Situs Candi Laras maka, wilayah tersebut tentu masuk areal Kalimantan Selatan. Dikuasanya wilayah Kalimantan Selatan oleh Kerajaan Majapahit tampaknya diperkuat bukti adanya tradisi lisan yang menyatakan bahwa Suku Maanyan yang mengaku mempunyai sebuah kerajaan besar Kerajaan Nan Sarunai di Kota Raden yang sering dinyanyikan wadian suku itu, menyebutkan bahwa Kerajaan Nan Sarunai hancur karena serangan Majapahit. Jadi, hancurnya Kerajaan Nan Sarunai itu adalah "*Rusak Jawa*" atau serangan Jawa atau Majapahit (Usman, 1989:41). Diperkuat oleh Saleh, dkk (1977/1978:28) bahwa periode Negara Dipa diperkirakan bersamaan dengan periode Majapahit. Bukan mustahil istilah "*Usak Jawa*" dalam Nyanyian Wadian Maanyan tersebut merupakan serbuan Majapahit atas daerah Tabalong ini, karena itu dalam Kanto (Pupuh, *pen*) XIII *Nāgarakṛtāgama* disebut diantara depedensi Majapahit tersebut, daerah Barito, Tabalong dan Hujung tanah atau daerah Pegunungan Meratus.

Kemudian, pada masa-masa berikutnya yaitu masa perkembangan Islam di Nusantara hubungan Kalimantan Selatan dengan Jawa juga terbilang erat. Pemberontakan Raden Samudera terhadap Daha merupakan suatu titik mula zaman baru dalam sejarah banjar. Pemberontakan ini memiliki beberapa segi yang menarik. Ia merupakan pertentangan sosiologis dan juga ekonomis pantai dengan pedalaman, sebagai lanjutan perebutan kekuasaan yang dahulu,

serta merupakan berakhirnya periode Hindu-Buddha dan dimulainya zaman Islam di Kalimantan Selatan. Hal ini merupakan efek perkembangan geomorfologis dan berakibat terhadap perkembangan ekonomi dan pusat politik yang baru. Dengan bantuan Kerajaan Demak, pedalaman dapat ditundukkan, sehingga kesatuan wilayah menjadi utuh kembali. Pangeran Samudera menjadi cikal bakal dinasti Islam Banjar kemudian. Bantuan Demak disertai dengan pemasukan agama Islam ke Kalimantan Selatan (Saleh, dkk, 1977/1978:31).

Kemudian L.C.D. van Dijk dalam buku berjudul *Neerlands vroegste betrekking met Borneo* (1862) menyatakan Kerajaan Sukadana (kini Kalimantan Barat, *pen*) di Kalimantan adalah jajahan Kerajaan Surabaya. Pernyataan Van Dijk itu dikuatkan oleh *Kolonial Archief* no. 695 yang mengungkap perselisihan Sukadana-VOC, dimana raja Sukadana sebagai bawahan raja Surabaya mengadu ke atasannya tentang hal tersebut. Bahkan keberadaan Kampung Sukadana dis ebelah utara Kampung Ampel, tampaknya bukan sebuah kebetulan tetapi memiliki hubungan historis yang panjang dengan masa-masa kebesaran Kerajaan Surabaya di masa silam. Sebuah surat yang dikirim Gubernur Kendal kepada Gubernur General di Batavia pada Maret 1622 menyebutkan negeri-negeri jajahan Kerajaan Surabaya di luar Jawa yang ternyata tidak hanya Sukadana, tetapi pulau Bawean (Bawean), Banjarmasin, Landak dan Lave Kate (Lawe, di Kalimantan Barat daya-*pen*) (Sunyoto, 2004:132-133).

Setelah membahas hubungan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dengan Jawa pada setiap pembabakan zaman diatas lantasterdapat pertanyaan seperti yang tertulis dalam sub-judul adakah hubungan pasca Perang Gantër dengan Kalimantan? A.Gazali Usman (1991:18-19) menjelaskan bahwa hubungan Jawa dan kalimantan memang sudah sejak lama ada. Di dalam *Hikayat Banjar* atau Hikayat Lambung Mangkurat di jelaskan tentang hubungan tersebut. *Empu Jatmika* dan anaknya *Empu Mandastana* serta *Lambung Mangkurat* dikatakan sebagai pelarian dari *Keling*<sup>10</sup> atau Kediri Utara yang bermigrasi ke Nusa Tanjung Negara (kemudian menjadi Negara Dipa).

---

<sup>10</sup> Disebut juga dengan nama "*Keling Kahuripan*" (Saleh, dkk: 17). \*Catatan: Lokasi ibukota Kerajaan Dipa juga bernama Kahuripan yang sekarang berada di kota Amuntai.

Sementara dalam bukunya yang terdahulu yang berjudul "*Urang Banjar dalam Sejarah*", A. Gazali Usman (1989:34) menjelaskan Kata Dipa, dalam Negara Dipa, mungkin berasal dari:

1. Berasal dari Bahasa Sanskrit Dwipa yang berarti pulau yaitu Pulau hujung Tanah.
2. Mungkin dari kata Dipa dalam Bahasa Sanskrit yang berarti lampu. Dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa di puncak Candi Agung itu di pasang kumala besar, sehingga teranglah di seluruh negeri it, karena itulah J.J. Ras menyebutkan Negara Dipa sebagai *Land of Light*.
3. Mungkin dari Bahasa Ngaju atau Bakumpai dari kata *dipahteh* yang artinya *di seberang*. Jadi, Negara Dipa adalah Tanah Seberang seperti dalam sastra Jawa.

Dalam abad ke-13 M terjadi peperangan Gantĕr antara Ken Angrok dengan Raja Kertajaya (tahun 1222 M) Ken Angrok tokoh dalam kalangan dunia bawah yang berhasil membunuh Tunggul Amĕtung dan memperisteri Ken Dĕdĕs, selanjutnya ambisinya diteruskan sehingga mengalahkan Kertajaya. Dalam peperangan itu Kertajaya mati, pengikutnya melarikan diri ke Kalimantan, dan inilah emigrant para bangsawan Jawa yang kemudian mendirikan Kerajaan Negara Dipa di Amuntai sekarang dengan mendirikan sebuah candi yang terkenal sebagai Candi Agung. Inilah suatu pendapat tentang kemungkinan interpretasi historis tentang terbentuknya Negara Dipa (Usman, 1989:35).

Uraian di atas cukup menarik perhatian pertama perlu diluruskan disini dalam bahwa belum tentu Raja Kertajaya tewas terbunuh. *Pararaton* menggambarkan sebagai berikut: *Maka raja Dhañdhang Gĕndhis mundur dari medan perang, mengungsi ketempat perdewaan bersama-sama dengan kudanya, hambanya, pembawa payung, beserta pembawa tempat sirih, tempat air, pembawa tikar lenyap diudara. Kerajaan Daha dikalahkan oleh Ken Angrok, Adik Dhañdhang Gĕndhis bernama Dewi Amisani, Dewi Hasin, Dewi Paja, setelah diberi kabar bahwa raja Dhañdhang Gĕndhis kalah berperang. Lenyap diudara, maka ketiga orang puteri tadi lenyap pula beserta seisi istananya.*

*Demikianlah Ken Angrok mengalahkan musuh; pulang ke Tumapël, Pulau Jawa dikuasainya. Tahun dia menjadi raja dan kalahnya Daha adalah tahun 1144 Śaka (1222 M) (Hardjowardojo, 1965:30-31; Komandoko, 2008:34-35; Kriswanto, 2009:55-57).*

Kisah tersebut jika ditelaah mentah-mentah terkesan *mistis* maka diperlukan penelahan lebih lanjut sesuatu yang tersirat dibalik yang tersurat tersebut. Besar kemungkinan yang dimaksud dari "*Raja Dhandhang Gêndhis (Kertajaya) mundur dari medan perang dan mengungsi ke tempat perdewaan besertapara pembantu, sarana-prasarana dan para saudaranya*" adalah Kertajaya beserta sanak saudara dan penikutnya mengungsi ke *Varunadwîpa* (yaitu Pulau Kalimantan). Pengungsian keluar pulau tersebut tidaklah sulit bagi Kertajaya selepas dikalahkan oleh Ken Angrok, karena Kerajaan Kaḍiri (Daha) sejak abad ke 12 M berdasarkan Prasasti Jaring tahun 1103 Śaka (19 November 1181 M) sudah memiliki kekuatan angkatan laut yang dipimpin oleh *senapati sarwwajala* (=panlima angkatan laut) (Tim Penulisan Sejarah Nasional II, 2010:290-291). Dengan demikian mengikuti analisis dari A. Gazali Usman (1989) pada uraian sebelumnya dapat diduga bahwa Embrio kemunculan Negara Dipa adalah berkat komunitas pengungsi dari Kerajaan Kaḍiri (Daha) tersebut.

Perlu dikalkulasikan juga karena pendangkalan sungai terus berlanjut di wilayah Kerajaan Negara Dipa, Bandar dipindah ke Nagara Daha. Sebuah serangan dari Jawa mengakibatkan kerajaan nagara Dipa jatuh dan dinasti baru muncul. Dinasti baru ini dimulai dengan Maharaja Sari Kaburangan dan memindahkan ibukota ke Nagara Daha. Dan Bandar di pindah lebih dekat dengan laut, yaitu berlokasi di Muhara Rampiau. Nagara Daha sama halnya seperti Negara Dipa. Juga katanya mengembangkan kekuasaan ke luar wilayahnya (Saleh, dkk, 1977/1978:17-18). Apakah bukan suatu kebetulan jika pemakaian dari kata "Daha" (juga kata "Kahuripan" ketika beribukota di wilayah Kota Amuntai sekarang) oleh Kerajaan Negara Dipa atau Nagara Daha merupakan ingatan kolektif leluhurnya yang berasal dari Kerajaan Kaḍiri Jawa Timur yang beribukota di "Daha<sup>11</sup>" dan juga memiliki Ibukota pendahulu semasa masih menjadi Kerajaan Matarām Kuno masa Raja Airlangga di

---

<sup>11</sup> Kini wilayah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur (Munib, 2011:165).

"Kahuripan<sup>12</sup>"? Berikutnya sampai saat ini "belum pernah ditemukan" baik sumber sejarah lisan ataupun tertulis yang menyatakan lokasi candi pendharmaan dari Raja Kertajaya di Jawa. Padahal setiap raja terdahulu jika sudah meninggal maka ia akan didharmakan (dimonumenkan dalam bentuk patung dewa) dalam bangunan suci berupa candi. Hal ini cukup untuk mengindikasikan bahwa Raja Kertajaya tidak meninggal di Jawa.

Sebagai pembanding di daerah lain di wilayah Indonesia juga memiliki banyak cerita rakyat yang menyatakan bahwa raja-raja di wilayah itu bersal dari pengungsi Majapahit. Sebagai contoh di Pulau Ende terdapat kisah bahwa raja-raja mereka terdahulu adalah keturunan orang Majapahit yang datang ke tempat tersebut dengan menaiki paus dan menikahi gadis setempat. Cikal bakal Raja-Raja Ende tersebut bernama *Jari Jawa* yang meninggalkan Majapahit karena bertengkar dengan abangnya (Wouden, 1985:78). Sedangkan dari Pulau Timor dan Pulau Sabu Parera (1994:36) menduga bahwa cikal bakal semua raja-raja dari Timor dan Sabu adalah orang-orang Majapahit yang datang ke Sabu (dan juga di puluau-pulau lainnya) itu berasal dari zaman perpecahan sesudah Hayam Wuruk atau perang Paregreg tahun 1404-1406 M, larena beberapa pulau mengklaim memiliki kisah para leluhurnya yang berasal dari Kerajaan Majapahit melalui cerita rakyat (mitos) dan adat-istiadat serta produk budaya turun temurun.

Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa dahulu selepas pertikaian dan peperangan para raja dan keluarganya yang kalah tersebut biasanya mengungsi ke daerah lain dan membangun kerajaan baru di sana. Hal ini cukup menarik untuk dijadikan penelitian yang lebih serius kedepannya terhadap hubungan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dengan Jawa pada umumnya atau pulau-pulau yang lain. Penelitian itu dapat mencangkup ragam persamaan bahasa, tata pemerintahan, budaya, seni dan tradisi. Dengan demikian maka khazanah penelitian sejarah lokal yang mulai mentransisi menjadi "inter lokal" akan menambah perbendaharaan kekayaan penelitan sejarah di Indonesia kedepannya. Semoga makalah singkat ini menjadi embrio untuk melakukan penelitian-penelitian tersebut khususnya bagi generasi muda.

---

<sup>12</sup> Kini menjadi Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur (Munib, 2011:151).

## DAFTAR BACAAN

- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti (Tracing Ancient Indonesia History through Inscriptions)*. Diterbitkan Atas Kerjasama Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Departemen Arkeologi (FIB UI) dan École française d'Extrême-Orient (EFEO). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brahmantyo, G. 1995. *Perwara Sejarah*. Malang: Penerbit I.K.I.P. Malang.
- Brandes, J.L.A. 1913. 'Oud-Javaansche Oorkonde (O.J.O). Nagelaten Transcripties van wijlen Dr. J.L.A Brandes. Uitgegeven door Dr. N.J. Krom'. *Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (V.B.G) van Kunsten en Wetenschappen deel LX*. Batavia: Albrecht & Co-'S Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Cahyono, M.D. 2013. *Wanwacarita Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang*. Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang.
- Dirjosuwondo, Y. 1984. 'Mitos Ratu Adil Jawa sebagai Usaha Memberikan Motivasi Penyatuan Kembali Kerajaan Janggala dan Kediri'. Dalam *Analisis Kebudayaan, Tahun IV, No. 1*. Hal. 122-135. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Firmansyah, Devan. 2017. "Ken Angrok Pendiri Wangsa Rājasa", *Skripsi*. Malang: Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusan Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Budi Utomo (IBU).
- Hardjowardjojo, R.P. 1965. *Pararaton*. Jakarta: Bhratara.
- Hinzler, H.I.R., dan Schoterman, J.A. 1979. 'A Preliminary Note on Two Recently Discovered MSS of The Nāgarakṛtāgama'. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (B.K.I.) [Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia], Vol. 135, Issue 4*. Hal. 481-484. Leiden: Brill Publishers in collaboration with KITLV.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Ratu Adil*, terjemahan oleh Poeradisastra. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kasdi, A. 2008. *Serat Pararaton, Kajian Historis sebagai Sastra Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Komandoko, G. 2008. *Ken Arok: Banjir Darah di Tumapel*. Yogyakarta: Narasi.
- Komandoko. 2008. *Pararaton Legenda Ken Arok dan Ken Dedes*. Yogyakarta: Narasi.

- Kriswanto, A. 2009. *Pararaton Alih Aksara dan Terjemahan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Kusumadewi, S.A. 1988. *Prasasti Garamán 975 Śaka (1053 Masehi)*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).
- Mackenzie, D.A dan Goble, W. 1913. *Indian Myth and Legend*. London: The Gresham Publishing Company LTD.
- Muljana, S. 2006. *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, A.R. 2004. "Dinamika Kebudayaan Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas", *Jurnal ilmiah Lingua, Vol. III, No. 1, Maret 2004*. Hal. 01-10. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia (STBA LIA).
- Munib, N.B. 2011. *Dinamika Kekuasaan Raja Jayakatyang di Kerajaan Glang-Glang Tahun 1170-1215 Çaka: Tinjauan Geopolitik*. Skripsi belum diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Program Studi Ilmu Sejarah-Universitas Negeri Malang (UM).
- Nasoichah, C. 2007. *Prasasti Mruwak 1108 Śaka (1186 M)*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia (FIB UI).
- Nugroho, A.P. 2016. *Hasil Terjemahan Prasasti Kamulan Tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi*. Kediri: Artikel Terjemahan.
- Nurharjarini, D.R., dan Suyami. 1999. *Kajian Mitos dan Nilai Budaya dalam Tantu Panggelaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Padmapuspita, K.J. 1966. *Pararaton, Teks Bahasa Kawi Terjemahan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa.
- Parera, A.D.M. 1994. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pigeaud, Th.G.Th. 1924. *De Tantu Panggelaran*. Een Oud-Javaansch Prozagéschrift, Uitgegeven, Vertaald en Toegelicht. 's Gravenhage: Nederl. Boek en Steendrukkerij Voorheen H.L. Smits.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1968. *Tjerita Pandji Dalam Perbandingan*, terjemahan oleh Zuber Usman dan H.B. Jassin. Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Riana, I. K. 2009. *Kakawin Dēśa Warṇnana Uthawi Nāgara Kṛtāgama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: PT Gramedia.
- Saktiani, D., Widya, K., Aminullah, Z.P., Marginingrum, N., dan Septi, N. 2018. *Kakawin Nagarakertagama: Teks dan Terjemahan*. Yogyakarta: Narasi.
- Saleh, M.I. Tanpa Tahun. *Kursus BI Tertulis Sedjarah: Sedjarah Bandjarmasin: Seri Monogarfi 3*. Bandung: K.P.P.K. Balai Pendidikan Guru.

- Saleh, M.I., Asnawi, A., Koroh, A.A., Yustian, D., dan Syah, Y. 1977/9178. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santoso, I.B. 2017. *Suta Naya Dhadap Waru: Manusia Jawa dan Tumbuhan*. Yogyakarta: Interlude.
- Santoso, S. 1975. *Calon Arang Si Janda dari Girah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Savitri, M. 2012. 'Ken Arok: Perusuh Pedesaan dengan Mobilitas Vertikal yang Tinggi'. Dalam *Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu*. Hal. 95-108. Pernah disampaikan pada Kongres Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (A.A.E.I) di Malang, 28-30 Mei 2001. Diterbitkan Atas Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (A.A.E.I); Badan Kerjasama Kebudayaan/Kesenian Indonesia (B.K.K.I.), dan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (B.P.K.K.I.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simandjuntak, B.S. 1958. *Kesusastraan Indonesia I*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Siswondo S.P., Somadisastra, M., Gitoasmoro, S., Sundoyo, Heru Sukadri, K., Mustopo, M.H., Anwar, K., dan Rochmat, Ny. U. 1978. *Sejarah Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekmono, R. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Subiyakto, Bambang dan Helmi Akmal (Ed.). 2016. *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Suhadi, M., dan Kartakusuma, R. 1996. *Berita Penelitian Arkeologi No. 47: Laporan Penelitian Epigrafi di Wilayah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunyoto, A. *Sunan Ampel Raja Surabaya: Membaca Kembali Dinamika Perjuangan Dakwah Islam di Jawa Abad XIV-XV M*. Surabaya: Diterbitkan Atas Kerjasama Antara Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren dan lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel (LPBA-MASA) Surabaya.
- Swardono. 2005. *Mutiara Budaya Polowijen Dalam Makna Kajian Sejarah, Cerita Rakyat, dan Nilai Tradisi*. Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang.
- Swardono. 2013. *Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



- Suwardono. 2013. *Tafsir Baru Kesejarahan Ken Angrok*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suyoto. (Online). *Menolak Hipotesis Indonesia Adalah Benua Atlantis (VII): Kulit Putih Jadi Pribumi Orang Jawa Jadi WNA Memahami Nusantara Secara Emic*. Diakses dari laman [www.facebook.com](http://www.facebook.com) pada 23/10/2018, 19:36 WIB.
- Tim Hari Jadi Kabupaten Malang. 1984. *Dari Pura Kāñjuruhan Menuju Kabupaten Malang (Tinjauan Hari Jadi Kabupaten Malang)*. Malang: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia II. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno, Edisi Pemutahiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, A.G. "Tersebarnya Agama Islam di Kalimantan Selatan", *Buletin Kayuh Baimbai: Meneropong Kembali Sejarah dan Kebudayaan Rakyat Banjar*, Nomor 1, Tahun I Februari 1991.
- Usman, A.G. 1989. *Urang Banjar dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Wardhani, D.S.S. 1980. "Prasasti Hantang", *Skripsi*. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).
- Warsito, S. "Benarkah Ken Arok Anak Desa?", *Madjalah Bulanan Pusara, Djilid XXVII No. 3-4, Maret-April, 1966*; hh. 17-32.
- Wojowasito, S. 1957. *Sedjarah Kebudajaan Indonesia II*. Jakarta-Yogyakarta: Penerbit Kalimosodo.
- Wouden, F.A.E. van. 1985. *Klen, Mitos dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustaka Grafiti Perss.
- Yogi, D. 1996. "Mangilala Drwya Haji: Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Pemerintahan", *Skripsi*. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).

# **SEKILAS TENTANG KERAJAAN NEGARA DIPa DI KALIMANTAN SELATAN: SEBUAH ANALISIS ANTARA MITOLOGI DAN REALITAS SEJARAH**

**Rusdi Effendi**

rusdieffendi@ulm.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Sebuah pemikiran mendasar yang perlu disadari oleh siapapun adalah kesulitan awal yang harus diterima apabila ingin mengetahui masa lampau tentang keberadaan kerajaan Negara Dipa. Pertanyaan yang muncul lebih awal dibenak pikiran kita adalah Kapan kerajaan Negara Dipa hadir atau ada di wilayah Kalimantan Selatan? Apakah berkaitan dengan bangunan Candi Agung di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan saat ini? Siapa pendiri kerajaan Negara Dipa? Apakah ada suku lain sebagai penduduk asli sebelum kerajaan Negara Dipa berdiri? Bagaimana proses perkembangannya setelah kerajaan Negara Dipa berdiri? Tentu banyak lagi pertanyaan yang muncul untuk menjawab tentang kerajaan Negara Dipa yang pernah ada dalam catatan sejarah di daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebahagian Urang Banjar sekarang tentu masih mengingat cerita-cerita, bahwa Kesultanan Banjar yang terakhir sebagai penguasa di daerah Kalimantan Selatan dan telah dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda 11 Juni 1860 di sela-sela berkecamuknya Perang Banjar (1859-1865) dan wilayah Kesultanan Banjar dijadikan wilayah jajahan Belanda. Namun sampai saat ini leluhur Urang Banjar masih dikenang dan disebut-sebut dalam lingkungan keluarga Urang Banjar (Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala) tentang moyang leluhurnya di Candi Agung Amuntai, di kala Urang Banjar merasa senang dan berkemampuan ekonomi mereka berkunjung ke Candi Agung, dikala susah dan sakit yang sulit obat medisnya kadang sebahagian Urang Banjar kembali datang berkunjung ke telaga disekitar Candi Agung di Amuntai untuk dimandikan atas bantuan juru kunci. Candi Agung adalah

---

\* Disampaikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

simbol suci Hinduisme di zaman kerajaan Negara Dipa, tetapi secara budaya, adat-istiadat Urang Banjar tetap mengingat moyang leluhur mereka, bahwa cikal-bakal Urang Banjar sebelumnya adalah dibangun oleh kerajaan awal yakni kerajaan Negara Dipa, kemudian Negara Daha dan terakhir adalah kerajaan Banjarmasin, walaupun Urang Banjar di Kalimantan Selatan mayoritas beragama Islam.

Satu hal yang cukup sulit adalah meletakkan angka tahun kronologis tentang berdirinya kerajaan Negara Dipa, karena apabila tergelincir pada ceritera rakyat atau legenda (*folklore*), maka akan muncul cerita dongang-dongeng yang bersimpang siur tanpa angka tahun yang pasti. Bahkan apabila semua cerita sejarah yang semestinya menggambarkan rekonstruksi masa lampau akan kabur kembali ke masa-masa mitologi atau cerita mitos belaka tentang kerajaan Negara Dipa. Untuk itu beberapa penulis yang menuju sejarah objektivitas tentu mengesampingkan mitologi atau meminimalisir hal-hal yang irasional dan mengurangi nilai-nilai sejarah yang serba subjektif. Dalam tulisan ini akan dicoba mengurangi volume mitologi atau hal-hal yang bersifat mistis untuk mengupas tentang kerajaan Negara Dipa yang pernah ada di Kalimantan Selatan.

### **SUMBER SEJARAH LOKAL YANG DIANGGAP MITOLOGI**

Dalam penulisan sejarah tradisional (Historiografi tradisional) tentu mempunyai ciri seperti disebutkan A Gazali Usman (1989) antara lain, bahwa historiografi tradisional tersebut dalam menjelaskan isi umumnya bersifat mencari keterangan di luar sejarah, suasana religio-magis lebih menonjol dan karena itu historiografi tradisional lebih tepat disebut sastra sejarah (Usman, 1989:21-22). Lebih lanjut dijelaskan bahwa historiografi tradisional seperti Babad, Sejarah Melayu, T tutur Candi, Hikayat Lambung Mangkurat, merupakan unsur penting yang tak dapat diabaikan dalam penulisan Sejarah Indonesia, sebab dapat memberikan bahan dan juga contoh historiografi dengan versi Indonesia-Sentris khususnya regio-sentris. Masalahnya ialah bagaimana cara

menafsirkannya sehingga dapat diambil inti historiografi sebagai bahan dari Sejarah Indonesia.<sup>1</sup>

Kerajaan Negara Dipa merupakan kerajaan awal yang ada di Kalimantan Selatan dengan bukti adanya Candi Agung sebagai simbolisme kerajaan Hinduisme tidak bisa di pungkiri bahwa kerajaan ini pernah ada. Namun karena terbatasnya sumber, sering cerita sejarah dikelompokkan sebagai mitos dan biasanya penulis asing mengelompokkan sebagai bagian dari mitologi tentang asal-usul Banjarmasin. Goh Yoon Fong (2013) misalnya, menyebutkan beberapa tulisan yang dianggap non historis atau mitologi yang berkaitan dengan Sejarah lokal atau daerah Banjar tersebut diantaranya J. Hageman "*Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo*", TBG VI, (1857), hh. 25-46; Van der Ben, "*Aanteekeningen*", TBG VI, h. 93; F.S.A, de Clereq, "*De Vroegste Geschiedenis van Bandjarmasin*", TBG XXIV, (1877), hh. 238-66; J.J. Meyer, "*Bijdragen tot de Kennis der Geschiedenis van het voormalig Bandjasinsche Rijk*", De Indische Gids, Volume 1, (1899), hh. 2-91; J.J. Ras, "*Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*", The Hague, (1968), hh.1-4.

Seandainya sumber terakhir yang disebut Hikayat Banjar termasuk kelompok *non- historis* atau mitologi tentunya sumber apa lagi yang bisa dipakai untuk menyambung antara yang *historis* dengan *non historis*? Memang dilematis di dalam penulisan tradisional sejarah Banjar, terutama menyangkut keberadaan kerajaan Negara Dipa yang dianggap antara mitologi dan realitas, tetapi bukti peninggalan Candi Agung di Amuntai merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara telah meninggalkan bukti yang nyata. Tentunya sumber klasik yang dianggap kelompok *non-historis* dan mitologis tersebut janganlah dibuang begitu saja, tetapi tetap dianggap sebagai sumber legenda atau mitologi dalam cerita rakyat (*folklore*). Tentu kita mesti ingat sumber klasik dalam sejarah Eropa tentang sejarah kerajaan Kreta, dimana sumber syair-syair

---

<sup>1</sup> Sebagai bahan pembantu, misalnya H. A. Gazali Usman menambahkan bahwa Hikayat Banjar adalah manuskrip tua yang telah dikenal di daerah Kalimantan Selatan sejak dari jaman Kerajaan Banjar. Nama asli manuskrip tua itu ada beberapa macam seperti Hikayat Lambung Mangkurat, Tuter Candi, Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin, Cerita Lambung Mangkurat Turunan Raja-Raja Banjar dan Kotawaringin. Dalam Hikayat Banjar disebutkan yakni a) Keraton I Sebagai Negara Dipa; b) Keraton II Sebagai Negara Daha; c) Keraton III sebagai Kerajaan Banjarmasin; dan d) Keraton IV sebagai Kerajaan Banjar di Kayu Tangi.

pujangga Homerus terutama dalam kitab "*Illias*" dan "*Odyssae*" berikut cerita-cerita rakyat di Yunani yang lebih bersifat mitologi. Ternyata dari kedua sumber yang dianggap mitologi tersebut dilakukanlah penelitian dan penggalian pakar arkeologi yang membawakan hasil, bahwa ditemukannya sisa-sisa bangunan kota kuno seperti ibukota Cnossus dan yang lainnya. Jadi dengan semangat belajar pada kejadian sumber mitologi Eropa kuno tersebut siapa tahu ilmu arkeologi bisa membantu sejarah lokal/daerah Kalimantan Selatan, khususnya keberadaan Negara Dipa di masa lampunya.

Jika "Hikayat Banjar" atau apapun sebutannya seperti "Hikayat Lambung Mangkurat", "Tutur Candi", "Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin", "Cerita Lambung Mangkurat Turunan Raja-Raja Banjar dan Kotawaringin" dikompaktifkan dengan kitab "Nagarakretagama" gubah Empu Prapanca, dimana pengarangnya hidup dalam zaman yang diuraikan, tentunya sangatlah berbeda dengan sumber klasik Jawa Timur yang satu ini. Oleh karena itu kitab Nagarakretagama merupakan sarana logistik pengetahuan mengenai Majapahit yang terpendam beberapa ratus tahun lamanya. Hikayat Banjar berbeda sekali, perlu kita sadari, bahwa penulis Hikayat Banjar itu tanpa pengarangnya atau tanpa nama penulisnya, tetapi karya tulis itu ada dan menuturkan cerita tentang asal-usul kerajaan Negara Dipa, kerajaan Negara Daha hingga kerajaan Banjarmasin yang semula disebut dengan Kerajaan Bandarmasih.

Sumber klasik sejarah Jawa seperti Nagarakretagama merupakan karya tunggal dilingkungan kesusasteraan Jawa kuno dan di Indonesia umumnya. Menurut Slametmulyana (1979:9) memaparkan, ditinjau dari penilaiannya sebagai sumber sejarah dan karya sastra ini pantas dipelajari. Hingga sekarang sepanjang pengetahuan saya, belum ada pembahasan dan sadurannya dalam bahasa Indonesia/Malaysia. Oleh karena itu kiranya sajian karya ini (Nagarakretagama) masih mempunyai tempat dalam kesusasteraan Indonesia/Malaysia. Sejarah Majapahit saja mulai digali pada akhir abad sembilanbelas berkat usaha Dr. J.L.A. Brandes menerbitkan, menerjemah dan menjelaskan Serat Pararaton dalam VBG XLIX, 1896, kemudian usaha Prof. H. Kern menerjemahkan Nagarakretagama dalam BKI 58 sampai 69, yang kemudian dikumpulkan dalam H Kern V.G. VII dan VIII, 1917, teks dan

terjemahan tersebut diterbitkan lagi dengan sekedar tambahan catatan dan perbaikan oleh Prof. N.J. Krom pada tahun 1919 dibawah judul "*Het Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakretagama van Prapanca (1365 A.D)*" pada tahun 1953 diusahakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh Slametmulyana berjudul "*Nagarakretagama*", diperbaharui kedalam bahasa Indonesia dan pada tahun 1960 terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.<sup>2</sup>

Tanpa merasa kecil hati atau menjadi marginal akan sumber sejarah lokal/daerah Banjar di Kalimantan Selatan yang minim dan rawan tergelincir kepada sumber mitologi dan mistis, kita tetap semangat untuk mencari, menggali dan melestarikan cerita-cerita sejarah dan budaya lokal hingga kapanpun, ibarat semangat Perang Banjar (1859-1865) dan Semangat Urang Banjar dalam Perang Kemedekaan Revolusi fisik (1945-1949) dengan ALRI Divisi IV A Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan, yakni semboyan "*Dalas Jadi Habu, Jadi Harang, Pantang Manyarah, Waja Sampai Kaputing*" (walaupun jadi abu, jadi arang, pantang menyerah, baja sampai ke ujung atau akhir perjuangan). Makna diatas bertujuan, bahwa sekalipun sulitnya untuk mengungkap sejarah (masa lampau) apalagi menyangkut asal-usul kerajaan Negara Dipa karena kekurangan sumber tetap berusaha mencari untuk melihat identitas jatidiri Urang Banjar dalam sejarah lokal/daerah Kalimantan Selatan.

## **HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI MENGENAI CANDI AGUNG**

Bukti yang tidak bisa dipungkiri sebagai awal adanya kekuasaan kerajaan pendahulu Urang Banjar di daerah adalah peninggalan Candi Agung di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap keluarga Urang Banjar yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, apakah Urang Banjar Batang Banyu, Urang Banjar Pahuluan dan Urang Banjar Kuala,

---

<sup>2</sup> Lebih lanjut terjemahan kitab "*Nagarakretagama*" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dr Th. Pigeaud dalam seri "*Java in the 14Th Century, A Cultural Study*", 1960-1963. Naskah Nagarakretagama yang ditemukan di Puri Cakranegara di Lombok tahun 1894 dengan beberapa kakawin lainnya. Naskah ini segera diterbitkan oleh Dr.J.LA Brandes dengan hutuf Bali dengan titel "*Nagarkretagama, lofdicht van Prapanca op koning Rajasanagara, Hayam Wuruk, van Majapahit, uitgegeven naar het eenige daarvan bekende handschrift aangetroffen in de puri te Tjakranegara op Lombok*", VBG LIV,1902. Naskah disimpan di Leiden sampai 1971, sekarang sudah di Jakarta.

sekalipun mereka tinggal di luar pulau Kalimantan akan tetap ingat dengan nama Candi Agung di Amuntai, mereka selalu ingat dengan tokoh-tokoh mitologi Empu Jatmika, Empu Mandastana, Puteri Junjung Buih, Pangeran Suryanata, Lambung Mangkurat, Dayang Diparaja, telaga berdarah Bambang Fatmaraga dan Bambang Sukmaraga, semua nama-nama klasik tersebut adalah bagian cerita seputar Candi Agung dan kerajaan Negara Dipa.

Dalam dekade terdahulu sudah dicoba beberapa penelitian dan penggalian dari pihak arkeologi di sekitar Candi Agung di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, namun belum memberikan kepastian angka-angka tahun pasti tentang hunian manusia terdahulu yang pernah ada di sekitar Candi Agung, sebab Candi Agung merupakan sisa bangunan suci karya peradaban manusia yang pernah tinggal saat itu dan sebelumnya. Pada tahun-tahun terakhir kita bersyukur dengan hadirnya Balai Arkeologi di Kalimantan Selatan, karena hasil-hasil temuan dari penelitian arkeologi akan menentukan analisis lebih lanjut tentang sejarah lokal/daerah Kalimantan Selatan umumnya, khususnya tentang beradaan kerajaan Negara Dipa dengan peninggalan bangunan Candi Agung. Perlu disadari ilmu sejarah bukan berdiri sendiri, salah satu ilmu bantunya adalah hasil penelitian dari ilmu arkeologi yang membantu penulisan sejarah.

Dasar yang diterapkan dalam arkeologi ruang adalah penekanan pada hubungan spasial antara manusia dan lingkungannya, hampir mirip dengan pola kajian pada analisis pemukiman. Pendapat lain, bahwa kajian ilmu arkeologi ruang juga tidak terbatas pada pemukiman saja, tetapi mencakup semua tempat pusat aktivitas dan komunikasi manusia pada masa lalu. Mengenai sebaran situs arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan dari tahun 1993-2015 hasil penelitian arkeologi seperti dikemukakan oleh Fajari (2017:63) bahwa penelitian arkeologi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah menemukan total 43 situs dan 7 kawasan situs. Pengamatan terhadap sejumlah situs arkeologi di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana situs tersebut berada.

Fajari (2017:63) mengelompokkan beberapa satuan lahan di Kalimantan Selatan diantaranya (1) rawa lebak atau zona III berada di daerah

Pegunungan Meratus yang menjadi hulu anak sungai Barito; (2) rawa pasang surut atau zona II berada di cekungan Barito yang merupakan lahan rawa dan gambut; (3) estuary atau zona III yang berada di muara-muara sungai; dan (4) perbukitan karst. Situs-situs di Kalimantan Selatan berdasarkan keletakan geografisnya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu situs yang berada di daerah hulu sungai/rawa lebak, situs di wilayah basin sungai Barito/rawa pasang surut, situs di daerah pesisir atau hilir/*estuary*, dan situs yang terletak diperbukitan karst.<sup>3</sup>

Hasil penelitian khususnya tentang data kronologi situs di daerah rawa pasang surut DAS Barito menunjukkan adanya situs sejarah yang diasumsikan merupakan hunian yang berkelanjutan (masa prasejarah s.d. sejarah). Kronologi penghunian wilayah DAS Barito diakui Fajari (2017:70) telah dikemukakan oleh Sunarningsih (2015). Hasil penelitian arkeologi yang berkaitan dengan hunian di sekitar Candi Agung di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dipaparkan sebagai berikut.

“Pertanggalan situs di kawasan tersebut menunjukkan, bahwa hunian sudah ada sejak masa prasejarah, seperti yang berada di Candi Agung (242 - 226 SM dan 708-745 M). Penghuni di Candi Agung tidak menunjukkan budaya yang berlanjut karena perubahan budaya tidak terjadi secara gradual, melainkan drastis. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan lapisan C yang diidentifikasi sebagai hunian dari masa prasejarah terlihat jelas tanpa ada gradasi sama sekali dengan lapisan B yang memiliki konsentrasi temuan jauh lebih sedikit. Penempatan lokasi tersebut sebagai pemukiman disebut sebagai hunian mendadak karena pada lapisan dibawahnya sama sekali tidak ditemukan data arkeologi.

---

<sup>3</sup> Penelitian arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan dari tahun 1993-2015 menemukan total 43 situs dan 7 kawasan situs seperti dipaparkan Nia Marniati Etie Fajari (2017) diantaranya Awangbangkal, Rantau Balai dan Pulau Sirang (kawasan situs Riam Kanan), Gua Babi, Gua Tengkorak, dan Gua Cupu (kawasan situs Batubuli), Gua Sidabong, Gua Brangin, Gua Batu Batulis, dan Gua Debu (Kawasan situs Balangan), Gua Ultra, Gua Janggawari, Gua Pandalaman I, dan Gua Pandalaman II (kawasan situs Telaga Langsat), Gua Payung, Liang Bangkai, Liang Bangkai 10 dan Liang Ulin 2 (kawasan situs Mantewe), Pangandingan, Bajayau dan Tanjung Selor (kawasan situs Nagara), Jambu Hulu, Jambu Hilir, dan Balanti (kawasan situs Padang Batung) dan Sungai Sipei, Cindai Alus, Lok Udat, Candi Agung, Candi Laras, Pematang Bata, Patih Muhur, Ulu Benteng, Jangkung, Pengaron, Karang Anyar, Pelajau, Pagatan, Sebamban, Sigam, Sungai Tabuk, Tabanio, Maluka dan Sebelimbingan.



Hunian di Candi Agung diasumsikan berasal dari dua periode yang berbeda dan tidak berhubungan (Lihat Kusmartono, Vida Pervaya dan Harry Widiyanto<sup>4</sup>).

Lebih lanjut berkaitan dengan hasil penelitian arkeologi di kawasan Candi Agung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dituangkan pada artikel Hartatik (2017:156) yang memaparkan bahwa:

“Arah hulu dari Pelajau, yaitu di tepi sungai Malang yang merupakan anak sungai Amuntai (wilayah Hulu Sungai Utara), terdapat situs Candi Agung. Berdasarkan pertanggalan relatif dari perbandingan sumber tertulis, mitos, tradisi dan toponim, Candi Agung dibangun sekitar abad ke-14 Masehi. Dari pertanggalan <sup>14</sup>C terhadap sampel kayu ulin yang kontekstual dengan Candi Agung, didapat angka tahun 728 Masehi (abad ke-8 M). Hasil pertanggalan *radiocarbon* (<sup>14</sup>C) terhadap sampel arang dari kotak gali TP7 pada lapisan tanah hitam dibawah lapisan tanah candi menunjukkan masa abad ke-3 SM. Ada rentang waktu yang sangat jauh antara pertanggalan relatif dan absolut.

### **KEBERADAAN CANDI AGUNG DAN REALITAS SEJARAH LOKAL**

Dari paparan diatas menunjukkan, bahwa Candi Agung yang saat ini berada di wilayah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, hanyalah berupa bangunan yang tidak utuh lagi sebagai bagian dari situs cagar budaya, tetapi dimasa lampauya merupakan bangunan suci dalam tatanan religi Hinduisme. Hasil penelitian arkeologi menunjukkan, bahwa Candi Agung dibangun pada abad ke-14 Masehi. Pertanggalan situs di kawasan tersebut menunjukkan, bahwa hunian sudah ada sejak masa prasejarah, seperti yang berada di areal Candi Agung, hunian kelompok manusia prasejarah yang pernah tinggal dikawasan wilayah Candi Agung sekitar 242 -226 Sebelum

---

<sup>4</sup> Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti dan Harry Widiyanto, “Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Berita penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Banjarmasin 2: 1-2, hh. 14-19. Sebelumnya juga oleh Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti, Endang Sri Hardiati, Priyo Panunggul, Agung Sukarjo, Wawan Suhawan, Normalina, Attaberani Kusuma, Harry Widiyanto, Bambang Sulistyanto, dan Siswanto, “Ekskavasi Situs Candi Agung Tahap I, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Laporan Penelitian Arkeologi, Banjarbaru, Balai Arkeologi Banjarmasin.

Masehi, hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai bagian manusia Prasejarah. Diduga kemungkinan kelompok ras ini adalah *Paleo-Mongoloid* dibagian akhir perjalanan rumpun Melayu Tua (*Proto-Melayu*) yang menjadi penghuni bagian awal atau cikal bakal moyangnya Orang Dayak (tetapi perlu penelitian khusus dengan asumsi penulis tersebut).<sup>5</sup>

Dalam disertasi mendiang Noerid Haloe Radam mengenai "*Religi Orang Bukit*" (1987) dikutipkan pengelompokan suku dan orang-orang yang mendiami pulau Kalimantan pada disertasi H.J. Malinckrodt yang berjudul "*Het Adatrecht van Borneo*" (1928), beliau membagi rumpun suku penduduk asli Kalimantan kedalam 6 (enam) kelompok besar yakni (1) Rumpun suku Kenyah-Kayan-Bahau yang mendiami daerah aliran sungai Mahakam; (2) Ot-Danum; (3) Iban, yang mendiami kawasan pegunungan Kapuas; (4) Murud di Sabah; (5) Klemantan; dan (6) Punan. Kelompok rumpun suku tersebut di atas oleh August Hardeland sebagai penduduk asli yang dinamakan Dayak (Worterbuch, 1859). Dengan demikian nama Dayak merupakan pemberian orang Barat bernama August Hardeland untuk penduduk asli yang mendiami wilayah pulau Kalimantan. Dayak atau Daya (ejaan lama *Dajak* atau *Dyak*) adalah kumpulan berbagai sub etnis *Austronesia* yang dianggap sebagai penduduk asli yang mendiami pulau Kalimantan (Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan). Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang

---

<sup>5</sup> Lihat Daldjoeni, Geografi Kesejarahan II, Indonesia, (Bandung, Penerbit: Alumni, 1984); h.1. Daldjoeni memberikan kutipan dari Von Eickstedt memberikan sebutan bagian besar penduduk Indonesia termasuk ras *Paleo mongoloid* untuk ras Melayu, sebagai cabang dari ras induk kuning, merupakan ras Melayu yang tua. Kemudian dikutipkan lagi dari H.Th. Fischer yang menyatakan bahwa, Persebaran dari sumber aslinya (yakni mungkin daerah Tibet) menuju selatan melalui daerah Hindia Belakang. Adapun cabang lain dari ras induk kuning, yakni ras *Mongoloid* bergerak ke Timur seperti ke Cina, Korea dan Jepang. (Lihat H.Th Fischer, *Inleiding tot de culturele antropologie van Indonesia*, Haarlem, 1952; hh. 21-23). Selain itu William C Boyd (1950) pada bukunya "*Genetics and the Races of Man (an introduction of modern physical anthropology)* Boston; hh. 313-314 dalam Daldjoeni (1984) menjelaskan, bahwa ciri-ciri khusus bangsa *Mongoloid* sebagai berikut : noda hitam dekat pantat sewaktu masih kanak-kanak, dan mata agak sipit, Noda hitam ini tersebar pada bangsa Indonesia dan Polinesia meski lebih menonjol lagi pada bangsa Cina, Korea, Jepang, kemudian Eskimo dan Indian di Amerika. Ras Mongoloid-Melayu Tua (*Proto-Melayu*) diduga penghuni abad ke-3 SM.

berhubungan dengan "perhuluan" atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluarganya.

Suku bangsa Dayak terdiri atas enam rumpun yakni rumpun *Klemantan* alias Kalimantan, rumpun *Iban*, rumpun *Apokayan* yaitu Dayak Kayan, *Kenyah* dan *Bahau*, rumpun *Murut*, rumpun *Ot Danum-Ngaju* dan rumpun *Punan*. Masyarakat Dayak Barito beragama Islam yang dikenali sebagai suku *Bakumpai* di sungai Barito tempo dulu. Secara etimologi, istilah "*Dayak*" paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non Muslim, non Melayu yang tinggal di pulau Kalimantan. Terutama berlaku di Malaysia karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang muslim, namun tetap termasuk kategori Dayak walaupun beberapa diantaranya disebut dengan Suku Banjar dan Suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah tersebut.

Jika hasil penelitian arkeologi pada kelompok kedua, sekitar wilayah Candi Agung atau areal sebelum dibangunnya Candi Agung juga pernah tinggal kelompok manusia antara tahun 708-745 Masehi. Tidak terlalu jelas kelompok manusia dengan nama apa, kemungkinan dibuat dugaan penulis adalah kelompok Dayak Maanyan hal ini dikaitkan dengan ceritera rakyat atau tradisi lisan (*oral tradition*) suku Dayak Maanyan. Di daerah Kalimantan Selatan suku Maanyan pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan (*Wadian* atau *Taliwakas*) orang Dayak maanyan di daerah Warukin Kabupaten Tabalong itu disebut kerajaan *Nansarunai*, merupakan kerajaan Orang Dayak Maanyan. Kerajaan ini disebutkan *Usak Jawa* (dirusak oleh pasukan dari Jawa), yakni kerajaan *Nansarunai* Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Kerajaan *Marajampahit* (kemungkinan kerajaan Majapahit). Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya kurun waktu yang belakangan terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1520-an) berakibat Orang Maanyan menyebar keberbagai penjuru di daerah Kalimantan Selatan dan Tengah.

Mengenai wilayah asal-usul kerajaan Orang Maanyan dapat dirangkum dari *Wadian* atau syair turun-temurun yang dibacakan pemangku adat sebelum melakukan upacara Mia (*Mambatur*), syair kuno (*Taliwakas*) dan cerita tersebut

menggambarkan asal-usul atau riwayat kerajaan Maanyan. Mengenai cerita lisan (*folklore*) Orang Maanyan Kontribusi Sejarah Lokal” (lihat Tulisan artikel Rusdi Effendi yang dipublikasikan dalam Kolom Opini SKH. Mata Benua, Rabu 18 April 2007, h. 10)<sup>6</sup> Ini hanyalah sebuah dugaan bahwa sebelum kedatangan imigran asing yang nantinya membangun kerajaan Negara Dipa dan Candi Agung, maka dibuat dugaan bahwa Orang Maanyan sudah lebih duluan menempati wilayah tersebut sebagai bagian periode kedua hunian antara tahun 708-745 Masehi sebagaimana hasil penelitian arkeologi di sekitar Candi Agung Amuntai.

Sebagian besar suku Dayak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memeluk agama Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai Urang Banjar dan Suku Kutai. Orang

---

<sup>6</sup> Rusdi Effendi, “*Folklore* (Legenda) Orang Maanyan Kontribusi Sejarah Lokal”, Surat Kabar Harian Mata Benua, Rabu 18 April 2007, Kolom Opini, h. 10. Intinya: Orang Maanyan memiliki legenda etnis atau tradisi lisan (*oral tradition*), bahwa tempat tinggal awal mereka di daerah *Kayutangi* dipimpin oleh Datu Borongan, diduga daerah awal ini adalah asli tempat mereka bermukim di daerah Kayutangi (dekat pesisir pantai) sejak kedatangannya dari Yunnan Cina Selatan. Karena terdesak suku lain, mereka pindah ke *Gunung Madu Maanyan* (sekitar gunung Karamaian Tanah Laut), karena terdesak para pendatang mereka pindah lagi agak kepedalaman yakni didaerah *Batang Helang Ranu Tane Leo Langit* (sekitar danau Panggang Hulu Sungai Utara-Amuntai sekarang). Penerus Datu Borongan membangun kerajaan besar dengan membangun Balai (rumah Adat Besar) “*Balai Jatuh Kabilawang Natat Panyawungan*”, karena Danau Panggang sering banjir, mereka pindah lagi ke hulunya dan mendirikan kerajaan *Nansarunai*-disekitar Banua Lawas (ditepian sungai Tabalong). Orang Maanyan saat ini tersebar selain tinggal di desa Warukin Buruhayang dan Warukin Bajud Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan juga tersebar dalam Paju Epat atau Paju Sapuluh ada yang tinggal di Tamiyang Layang (Barito Timur) dan Buntok (Barito Selatan) dan sebagian Muara Teweh (Barito Utara) Kalimantan Tengah, termasuk orang Dayak Samihim di Sampanahan juga diperkirakan termasuk rumpun Maanyan. Dugaan lain tentang bercerai berainya sub suku Maanyan adalah disebabkan penaklukan daerah-daerah sekitar saat pembentukan kerajaan Negara Dipa, karena dalam nyanyian atau wadian Orang Maanyan, kerajaan mereka yang dikenal dengan Nansarunai dirusak oleh pasukan Jawa (disebut dari Marajampahit atau Majapahit), selain itu kemungkinan besar Empu Jatmika memerintahkan hulu balangnya Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa dengan pasukannya menaklukkan orang Maanyan, ada yang mau dan menyerah menjadi rakyat kerajaan Negara Dipa dan sebagian kelompok Orang Maanyan terusir, serta melakukan pengungsian ke berbagai penjuru di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk orang Dayak Samihim di Kalimantan bagian Tenggara yang menetap dikawasan Pamukan, Sampanahan, Cengal, Manunggul, Bangkalaan dan sekitarnya yang nantinya kurun waktu belakangan menjadi bagian wilayah Kerajaan Tanah Bumbu di bagian Tenggara Kalimantan selatan.

Dayak yang menolak beragama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah Tabalong, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Labuan Amas dan Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba sebagai masyarakat pedalaman. Salah seorang pimpinan cikal bakal orang Banjar dikemudian hari, yakni di zaman Hinduisme dengan kerajaan Negara Dipa disekitar Amuntai (sekarang Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang terkenal adalah tokoh Lambung Mangkurat yang menurut orang Dayak Maanyan Lambung Mangkurat adalah seorang Dayak (Maanyan atau Ot-Danum), namun asumsi ini perlu diteliti lagi kebenarannya.

Kalau melihat asal-usul sebaran etnis Dayak diduga sementara orang Dayak yang tinggal di Kotabaru, Cengal, Cantung, Sampanahan dan lainnya yang kemudian disebut Dayak Samihim adalah berasal dari Tamiyang Layang tentunya diduga dari sub rumpun orang Dayak Maanyan atau kemungkinan pecahan Dayak Maanyan lainnya ketika dihancurkan oleh penyatuan wilayah Negara Dipa saat Mangkubumi Lambung Mangkurat mengutus Tumanggung Tatah Jiwa dan Arya Megatsari menghancurkan kerajaan Nan sarunai. Orang Dayak Maanyan (*'olon maanjan'*) merupakan salah satu sub suku dari kelompok besar Suku Dayak Ngaju; dari 53 suku kecil-kecil yang termasuk bagian Suku Ngaju, Dayak Maanyan memiliki 8 suku kecil-kecil yang tersebar di pulau Kalimantan. Pemukiman mereka sekarang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian berada di Provinsi Kalimantan Tengah bagian Timur, yakni di daerah Barito Timur dan Barito Selatan, serta di daerah Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Dayak Maanyan memiliki 8 (delapan) suku-suku kecil yang berbeda nama, diantaranya adalah (1) Maanyan Paku; (2) Maanyan Patai; (3) Maanyan Paju Epat; (4) Maanyan Dayu; (5) Maanyan Paju Sapuluh; (6) Maanyan Jangkung; (7) Maanyan Banua Lima; dan (8) Maanyan Warukin (Noortyani, 2016:15). Jika ditambahkan dengan nama rumpun Maanyan lainnya dengan nama Dayak Samihim yang bermukim di wilayah Pra Kerajaan Tanah Bumbu, maka kemungkinan pecahan rumpun Orang Maanyan menjadi 9 (Sembilan) selain nama-nama suku kecil di atas.

Pada tahun terakhir hasil penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi Banjarmasin terhadap wilayah Jangkung di Kabupaten Tabalong, yang identik

dengan eks wilayah Orang Maanyan Jangkung, hal ini dipaparkan oleh Sunarningsih (2012) dalam Hartatik (2017:41-43) yang menyebutkan bahwa di aliran Sungai Tabalong Kabupaten Tabalong terdapat situs pemukiman Jangkung. Dari identifikasi temuan keramik asing diketahui bahwa situs tersebut berasal dari abad 15 sampai 17 Masehi. Situs Jangkung berkaitan dengan masyarakat Dayak (Maanyan), yang hingga sekarang ini sering di datangi orang-orang Dayak dari wilayah tersebut untuk “berziarah”. Sementara itu, dalam cerita turun-temurun yang masih dikenal masyarakat Dayak sekarang. Situs Jangkung berkaitan dengan Patih Bentar yang hidup pada masa kerajaan Dayak bernama Nansarunai.

Jika ditelaah pada penelitian arkeologi tersebut sangatlah jauh rentang waktunya dengan Kerajaan Nansarunai awal, karena abad 15-17 sudah berganti tampuk kekuasaan politik. Jika Candi Agung simbol Hinduisme Negara Dipa diperkirakan berdiri sekitar abad ke 14, maka pada abad ke 15 sudah bergeser dengan kerajaan Negara Daha dan Abad ke 16 sudah berdiri kerajaan Banjarmasin Islam di Kuin (24 September 1526), hingga abad ke 17 masih regenerasi Kerajaan Banjar memerintah. (Hanya pusat keraton sultan berpindah sejak 1612 dari keraton lama di Kuin ke keraton Kayu Tangi Karang Intan di Kabupaten Banjar). Jadi situs Jangkung di Kabupaten Tabalong memang diduga adalah bagian peninggalan kerajaan Maanyan Nansarunai, namun wilayah Pulau Jangkung di Kabupaten Tabalong di bawah Patih Bentar diperkirakan sisa akhir kerajaan Maanyan (Pikrianada, 1990:14).<sup>7</sup> Kerajaan

---

<sup>7</sup> Pikrianada menyatakan bahwa Kerajaan Nansarunai mengalami kekalahan atas serangan Majapahit, 10 orang panglimanya tewas, hanya Datu Garingsingan yang selamat melarikan 12 putra temannya ke pegunungan. Setelah dewasa 12 putra tersebut yang dikenal dengan sebutan “*Pangunraun duabelas*” menjadi vazal Nansarunai taklukan Negara Dipa. Masyarakat Maanyan sisa kerajaan Nansarunai diperkenankan tinggal di sekitar Amuntai dan menjadi bagian rakyat kerajaan Negara Dipa. Legenda syair kuno (*Taliwakas*) Maanyan menuturkan mereka juga membantu membangun Candi Agung, Candi Munge dan Candi Amu, mereka tetap dibawah kekuasaan Negara Dipa. *Pangunraun duabelas* tersebut terdiri dari 1) Mantir Kutalengu Tamanggung Gilang Lunsir; 2) Dambung Tengkal Maleh Ratu Guruh Undru; 3) Dambung Anya Wugan Biring Manu Nanyo; 4) Dambung Mantir Kaki Ratu Nyaluk Langit; 5) Dambung Raden Limbong Ratu Agung Mansing; 6) Dambung Bangkas Maleh Pandring Hijau Runse; 7) Dambung Liban Langit Pusi Raya Gunung; 8) Dambung Lampung Dinei Ratu Mean Sinsing; 9) Mantir Pangidingen Kaun Lungai Bansir; 10) Dambung Lamuara Ratu Guke Nulun; 11) Dambung Paning Maleh Rahu Niang Runsa; dan 12) Dambung Datu Tatau Raden Bagawan Sugih.

Nansarunai yang telah tunduk kepada kerajaan Negara Dipa dan kerajaan Negara Daha, bagi Orang Maanyan yang tidak mau tunduk mereka melakukan migrasi berpindah-pindah tempat mempertahankan tradisinya ke daerah yang jauh dari kekuasaan kerajaan Negara Dipa, maupun kerajaan Negara Daha.

M. Idwar Saleh (1959) mengutip sumber Wetheim, menyebutkan bahwa daerah Kalimantan Selatan, terutama di daerah Hulu Sungai meliputi Tabalong, Batang Alai, Batang Amandit, Labuan Amas dan sekitarnya merupakan daerah yang subur dan padat penduduk. Mengingat Nagarakretagama telah menyebutkan Tabalong sebagai daerah taklukkan Majapahit telah terdapat "*boerenbeschaving*" dengan sawah *cultuur*, serta organisasi desa yang teratur dibawah pimpinan kepala adat masing-masing.<sup>8</sup> Lebih lanjut M. Idwar Saleh menambahkan "Tetapi ketentraman ini berakhir, sejak bebasnya demon-perpecahan, kesatuan wilwatikta, retak, daerah-daerah luar Jawa mulai melepaskan diri dari cengkraman superstaat. Hal inipun terasa di Kalimantan Selatan. Desa-desa di daerah Hulu Sungai, dibawah pimpinan ketua-ketuanya mulai berekspansi, berebut kekuasaan, tak tentu yang kalah menangnya, merupakan musuh bebuyutan dengan perang antara desa yang tak ada habisnya, hingga mereka ditaklukkan oleh Temenggung-Temenggung Megatsari dan Tatah Jiwa dari Negara Dipa".

Tentu kita semakin bertanya siapa imigran yang datang dan kemudian membuka koloni di wilayah Amuntai saat itu, sehingga nantinya mendirikan kerajaan Negara Dipa? Usman (1989) memberikan hipotesa tentang asal-usul kerajaan Negara Dipa di Kalimantan Selatan, dimana beliau memberikan pendapat "Dalam abad ke 13 terjadi peperangan Ganter antara Ken Angrok dengan Raja Kertajaya (tahun 1222) Ken Angrok tokoh dalam kalangan dunia bawah yang berhasil membunuh Tunggul Amatung dan memperisiteri Ken Dedes, selanjutnya ambisinya diteruskan sehingga mengalahkan Kertajaya. Dalam peperangan itu Kertajaya mati, pengikutnya melarikan diri ke Kalimantan, inilah imigran para bangsawan Jawa yang kemudian mendirikan

---

<sup>8</sup> Jika diperkirakan, bahwa sebelum kedatangan imigran dari Jawa keadaan di wilayah Hulu Sungai di Kalimantan Selatan berjalan normal dan tenteram dalam kehidupan penduduk asli wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan M. Idwar Saleh kehidupan penduduk asli dalam keadaan aman dan tenteram dalam lingkup desa-desa dibawah kepala suku masing-masing, sebelum kedatangan imigran dari Jawa.

kerajaan Negara Dipa di Amuntai yang juga mendirikan candi yang dikenal sebagai Candi Agung.

Dari hipotesa tersebut tentunya memerlukan kajian dari perspektif perang Ganter tahun 1222 M yang terjadi di Jawa Timur. Bisa jadi rombongan Empu Jatmika hanya berkedok sebagai saudagar-pedagang yang melarikan diri ke daerah Kalimantan Selatan, atau sebaliknya memang pedagang yang sukses, tetapi dikemudian hari berbalik ikut politik, dengan bekerjasama pada kerajaan Majapahit di Jawa Timur, akhirnya berhasil membangun kerajaan Negara Dipa, tetapi ini hanyalah prakiraan, namun bisa juga terjadi saat itu. Tundjung (1991:23) memaparkan asal mula terbentuknya kerajaan Negara Dipa, seperti disebutkan dalam T tutur Candi maupun Hikayat Banjar, pendiri kerajaan mempunyai kehidupan ekonomi sebagai pedagang. Dalam T tutur Candi dikatakan bahwa Empu Jatmika sebagai pendiri kerajaan Negara Dipa adalah anak seorang saudagar Keling yang bernama Jantam. Dalam Hikayat Banjar diceritakan pula, Empu Jatmika adalah anak saudagar Keling bernama Mangkubumi.

Jika ditelusuri asumsi Tundjung, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendiri kerajaan Negara Dipa adalah seorang yang mempunyai latar belakang kehidupan ekonomi sebagai pedagang. Pusat kerajaan Negara Dipa terletak ditepi sungai besar, daerah pedalaman yang ada dibawah kekuasaannya tidak dipaksa untuk mengikuti sistem ekonomi dagang. Kerajaan Negara Dipa menggantungkan kebutuhan primernya pada pertanian yang didukung daerah-daerah pedalaman yang relatif subur. Disamping itu karena hasil alamnya yang lain, kerajaan Negara Dipa bisa memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di daerahnya dengan jalan saling saling tukar menukar dengan bangsa lain.

## **PENUTUP**

Dari seluruh paparan diatas dan beberapa analisa telah dikemukakan, maka dari seluruh tulisan menyangkut kerajaan Negara Dipa di Kalimantan Selatan antara mitologi dan realitas sejarah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.



- (1) Memang terasa sulit untuk menentukan tanggal pasti berdirinya kerajaan Negara Dipa, disadari bisa tergelincir kepada mitos dan legenda-legenda, cerita rakyat (*folklore*) dan sumber lisan (*oral tradition*) yang tidak berkesudahan. Jika hanya berpatokan pada sumber-sumber klasik seperti Hikayat Lambung Mangkurat, T tutur Candi, Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin, Cerita Lambung Mangkurat Turunan Raja-Raja Banjar dan Kotawaringin, disamping sumber Barat yang oleh sebagian penulis asing juga dianggap mitos, maka tanpa bantuan ilmu lain, misalnya hasil penelitian arkeologi, maka semakin sulit mengungkap sejarah lokal/daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Cerita mitos dan legenda mengenai kerajaan Negara Dipa mulai ditepiskan dengan bantuan hasil-hasil penelitian arkeologi dari Balai arkeologi Banjarmasin yang telah melakukan ekskavasi di sekitar kompleks Candi Agung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dimana menunjukkan bukti pernah adanya hunian manusia di sekitar Candi Agung yang merupakan peninggalan zaman Hinduisme atau tepatnya pada masa kerajaan Negara Dipa berdiri dan berkembang.
- (3) Hasil penelitian arkeologi sebagai salah satu ilmu bantu sejarah yang telah meletakkan hasil penelitiannya di sekitar Candi Agung menyimpulkan hunian sudah ada sejak masa prasejarah, seperti yang berada di Candi Agung (242-226 SM) atau sekitar abad ke-3 SM, oleh penulis dianalisa diperkirakan hunian pada masa prasejarah tersebut adalah bagian akhir perjalanan manusia prasejarah kelompok ras Mongoloid-Melayu Tua (Proto Melayu) yang pernah tinggal di sekitar areal Candi Agung, mereka inilah cikal-bakal penduduk asli yang dikemudian hari dinamakan oleh bangsa Barat dengan sebutan "Orang Dayak".
- (4) Temuan hasil penelitian arkeologi tahap kedua terdapat hunian di sekitar Candi Agung antara tahun 708-745 Masehi atau abad ke-8 Masehi, oleh penulis diberikan analisa hunian tersebut diperkirakan adalah kelompok Orang Maanyan yang telah berpindah-pindah dan pernah menetap disekitar Candi Agung, karena pada perpindahan

beberapakali kelompok Maanyan tersebut pernah tinggal di Danau Panggang-Amuntai dan terakhir mendirikan kerajaan Nansarunai disekitar Banua Lawas ditepian sungai Tabalong, hal tersebut sangat memungkinkan mereka sempat menetap disekitar Candi Agung, karena jarak antara Candi Agung, Danau Panggang, Banua Lawas tidak terlalu jauh.

- (5) Mengingat Candi Agung berdasarkan hasil penelitian arkeologi dibangun pada abad ke-14 Masehi, tentunya pembangunan sebuah Candi menunjukkan kemapanan kerajaan Negara Dipa, hal tersebut diduga, bahwa sebelum Candi Agung dibangun tentunya ketatanegaraan kerajaan Negara Dipa ditata lebih dahulu sebelum pembangunan candi. Jika dihubungkan dengan pelarian imigran kelompok Empu Jatmika yang berhasil mencari daerah baru dan menempati kawasan Amuntai, maka bisa ditarik benang merah dengan Perang Ganter 1222 di Singhasari Jawa Timur, bisa jadi kelompok Empu Jatmika adalah pelarian yang bisa disebut sebagai imigran dari peristiwa tersebut, boleh disebut saudagar atau pedagang pada mulanya, tetapi pada babakan periode sejarah selanjutnya dari regenerasinya telah berubah kearah politik, karena buktinya telah berhasil mendirikan kerajaan Negara Dipa, tentunya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang meminta pengakuan legitimasi politik dan persembahan upeti sebagai penguasa Nusantara saat itu.

## **DAFTAR BACAAN**

- Daldjoeni, N. 1984. *Geografi Kesejarahan II: Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Effendi, Rusdi. 2007. "Folklore (Legenda) Orang Maanyan Kontribusi Sejarah Lokal" *dipublikasikan dalam Kolom Opini SKH, Mata Benua*, Rabu 18 April 2007.
- Fong, Goh Yoon. 2013. *Perdagangan dan Politik Banjarmasin 1700-1747*, terjemahan oleh Ika Diyah Candra. Yogyakarta: Penerbit Lilin.
- Hartatik. "Sungai Barito Dalam Persebaran Suku Dayak Di Kalimantan Tenggara" *Buletin Arkeologi Naditira Widya, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2017*.

- Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti dan Harry Widiyanto. 1997. "Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Berita Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti, Endang Sri Hardiati, Priyo Panunggul, Agung Sukarjo, Wawan Suhawan, Normalina, Attaberani Kusuma, Harry Widiyanto, Bambang Sulistyanto, dan Siswanto. 1996. "Ekskavasi Situs Candi Agung Tahap I, Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Laporan Penelitian Arkeologi* Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Marniati, Nia Etie Fajari. "Karakteristik Situs-situs Arkeologi di Kalimantan Selatan Berdasarkan Lokasi Geografi", *Buletin Arkeologi Naditira Widya*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2017.
- Mayur, Gusti. tanpa tahun. *Hikayat Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: CV Rapi.
- Radam, Noer'id Haloe. 1987. "Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi", *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saleh, M. Idwar. "Sejarah Lokal Kerajaan Banjarmasin dan Kebudayaan Sungainya", *Buletin Kayuh Baimbai*, Nomor 1, Tahun 1, Februari 1991.
- Saleh, M. Idwar. 1958. *Sedjarah Bandjarmasin*. Bandung: Penerbit Masa Baru.
- Saleh, M. Idwar. 1981. *Banjarmasin*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat
- Sjamsuddin, Helius. 2014. *Pegustian & Temengung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Slametmulyana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Penerbit Bhatara Karya Aksara.
- Suriansyah Ideham, M., H. Sjarifuddin et.al. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan.
- Tundjung. "Kehidupan Ekonomi Di Kerajaan Negara Dipa dan Negara Daha", *Buletin Kayuh Baimbai*, Nomor 1, Tahun I, Februari 1991; hh. 23-28.
- Usman, A. Gazali. 1989. *Urang Banjar dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.



**BAB II**  
**PERKEMBANGAN MARITIM MASA**  
**KERAJAAN**

# PELABUHAN SUNGAI DAN LAUT DI KALIMANTAN SELATAN DARI ERA KERAJAAN SUKU HINGGA KESULTANAN BANJARMASIN

Yusliani Noor

yusli@ulm.ac.id

## PENDAHULUAN

Orang Banjar selalu menyebut zaman lampau dengan sebutan “zaman bahari”. Istilah zaman bahari untuk menyebut masa lampau yang sangat kuno atau jauh dari masa kini. Sering diistilahkan dalam bahasa Banjar yaitu *bahari banar*. Istilah yang sebenarnya, kata Bahari diperuntukkan bagi sebutan lautan. Kata Bahari diambil dari asal kata bahasa Arab yakni Bahar, artinya Laut. Kata yang mengingatkan kita pada episode aktivitas kehidupan manusia yang sepenuhnya tergantung pada Laut dan Sungai. Mitologi suku-suku bangsa dari etnis Dayak, seperti Bukit, Ngaju, Maanyan, Lawangan, Dusun, selalu menjelaskan mitologi asal muasal nenek moyangnya dari negeri yang jauh. Misalnya, suku Maanyan dan Bukit menyebutnya Negeri Lautan Kabut. Nenek moyang mereka kemudian datang ke Kalimantan. Termasuk ke Kalimantan Selatan. Mereka mempercayai makhluk-makhluk air yang berasal dan kembali ke Lautan. Misalnya, binatang naga dan manglong. Oleh sebab itu, cerita-cerita tentang naga sebagai ular raksasa yang berkaki dengan kemampuan hidup di tanah, air dan udara menunjukkan mereka pada zaman dahulu sangat mengenal laut. Mereka juga sebagai anak sungai, yang hidup dan beraktivitas di sungai. Nama-nama kampung sebagian berasal dari nama sungai.

Orang Melayu Banjar yang sebagian besar hasil dari proses *mixing generation* berbagai suku, mulai dari suku Melayu, Dayak, Jawa, dan Bugis, sangat mengenal mitos tentang naga. Misalnya cerita tentang Naga Si Rintik dan Si Ribut dari Margasari, Batung Badarah dari Kandangan, dan Naga Mencari Lautan Dalam dari Martapura, serta lain sebagainya. Memahami *maintifact* yang menjadi ingatan kolektif masyarakat di Kalimantan Selatan tentang zaman bahari, sebagai era Maritim, mengharuskan upaya penelusuran

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat

\*\* Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

jejak pelayaran sungai kuno di Kalimantan Selatan, terutama pelabuhannya. Setidaknya harus dimulai dari istilah-istilah nama kampung, direkonstruksi dengan kondisi geografis serta sumber-sumber lainnya, termasuk diantaranya temuan-temuan benda arkeologis. Sumber-sumber tertulis diambil dari *kroniek*, cerita rakyat, hikayat dan tutur lisan. Begitu pula dengan pelabuhan sungai dan laut pada era modern, sejak Kesultanan Banjar hingga zaman kolonial.

## **PELABUHAN KUNO: KERAJAAN-KERAJAAN SUKU**

### **1. Pelabuhan Kerajaan Nan Sarunai**

Nan Sarunai dikenal sebagai kerajaan etnis Maanyan. Letak Nan Sarunai paling awal adalah kawasan Tanjung Tabalong. Kitab Negara Kretagama Kanto 13, menyebut dengan istilah Tabalong. Dalam Hikayat Banjar, disebutkan adanya Kerajaan Dipa. Nama Dipa diambil dari kata Dwipa yang artinya Pulau. Negara Dipa disebut Pulau Nusa Tanjung Negara. J.J. Ras, menyebutkan letak Negara Dipa awalnya di Tanjung, dengan ibukotanya Tanjung Puri. Sebutan Negara Dipa muncul ketika Nan Sarunai telah ditaklukkan Majapahit. Sebagaimana Nyanyian (*Wadian*) etnis Maanyan, bahwa Kerajaan mereka Nan Sarunai telah ditaklukkan oleh Majapahit.

Kerajaan Nan Sarunai pusatnya di Tabalong dengan pelabuhan utamanya di kawasan Murung Pudak. Murung Pudak terletak di kawasan Sungai Tabalong Kiri. Istilah Tabalong dari kata Taba dan Long. Long artinya sungai. Kemungkinan dulunya ada wilayah yang bernama Taba dengan dialiri sebuah sungai besar, yakni Sungai Taba. Pada wilayah ini terdapat istilah Pangkalan. Pangkalan adalah Pelabuhan sungai. Letaknya di tepi sungai Tabalong Kiri. Di tempat ini, masih terdapat kerangka-kerangka kayu ulin tua, yang ditemukan di pinggir Pelabuhan. Sungai Tabalong Kiri menembus kawasan Murung Pudak dan bermuara ke wilayah Pasir Grogot. Sebuah sungai yang dapat dilayari dengan perahu-perahu besar dengan bobot mencapai 25 ton sampai tahun 1900-an. Setelah diserang kekuatan Lambung Mangkurat, Kerajaan Nan Sarunai pindah ke Pudak Satagal di tepi Sungai Kelua. Sebagian lagi, mendirikan Kerajaan Gagalang di hulu Sungai Kelua, dengan tokohnya

yang terkenal Datu Kartamina. Sebagian lagi pindah ke kawasan tengah pada kawasan Barito Tengah, yakni di Tamiyang Layang.

## **2. Kerajaan Surya Abang (Habang)**

Berdasarkan cerita komunitas etnis Bukit di Penginangan Ratu Batu Licin, Kerajaan Surya Abang (Habang) sebagai Kerajaan etnis Bukit. Kerajaan ini pusatnya di Riam Kiwa-Pengaron. Perbatasan Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar, sedikit ke arah perbatasan Hulu Sungai Selatan. Pelabuhan utamanya di kawasan kaki Pegunungan Meratus di wilayah Batu Licin. Termasuk diantaranya wilayah Kintap dan Asam-Asam di Tanah Laut. Eksistensi wilayah Asam-Asam sudah disebutkan dalam Hikayat Banjar. Khususnya pada masa Kerajaan Negara Daha abad ke-13/14. Dari sisi utara, Sungai Riam Kanan dan Kiwa terhubung dengan Sungai Kusan Hilir di Tanah Bumbu, yang terhubung pula dengan Sungai Pagatan. Kerajaan ini terpecah akibat terpisahnya dua saudara, Dayuhan dan Intingan. Dayuhan atau Datu Ayuh tetap memilih agama lama, yakni Balian, sementara adiknya Intingan memeluk Islam.

Menurut M. Idwar Saleh, Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar adalah sebuah pelabuhan zaman kuno. Istilah Pamaton dari kata "Pamuatan". Artinya, pada zaman kuno, kawasan Pamaton adalah tempat pemuatan barang. Lalu, pelabuhan kerajaan apa? Jika dilihat banyaknya komunitas etnis Bukit di Kabupaten Banjar, maka boleh jadi Pamaton adalah satu bagian dari pelabuhan Kerajaan Surya Abang. Di sisi Gunung Pamaton terdapat Sungai Pamaton yang mengalir ke Sungai Banyu Irang, tembus ke Guntung Manggis Banjarbaru sampai ke Lok Baintan. Ke utara, Sungai Pamaton terhubung dengan Riam Kanan.

Kedua bersaudara berpisah jalan. Sebagian besar etnis Bukit tercerai-berai, khususnya di kawasan Kalimantan sampai serawak-Malaysia. Pada masa jayanya, mereka sempat berafiliasi dengan Kerajaan Nan Sarunai di Tabalong. Sebagian suku Bukit di kawasan Batang Alai menggunakan pelabuhannya di Batang Alai. Pusatnya di kawasan kampung Labuhan dan Labuhan Amas. Disinilah perahu-perahu besar bertambat sebelum menuju Batang Balangan di Tabalong dan ke Pelabuhan di Murung Puduk, Tanjung.

Satu jalur pelayaran sungai di kawasan Barabai adalah di Sungai Palayarum di kawasan kampung Jatuh- Barabai. Sungai ini terhubung dengan

Batang Alai dan Sungai Barabai. Legenda Raden Penganten di kampung Pagat, yang kapal layarnya pecah dihantam badai akibat tidak mengakui ibunya, mengisyaratkan adanya jalur pelayaran di kawasan ini. Kawasan ini bagian dari jalur pelayaran etnis Bukit Meratus di kawasan Hulu Sungai Tengah.

### **3. Kerajaan Pihan (Datu Pihan)**

Kerajaan ini sebagai kerajaan asal dari etnis Lawangan. Sisa-sisa peninggalan kerajaan ini masih ada di Gunung Pihan, berupa tonggak-tonggak kayu ulin besar bekas bangunan, serta keramik-keramik Cina. Kerajaan Pihan diambil dari tetua etnis Lawangan di Gunung Pihan, Tabalong. Pelabuhannya di sekitar kaki Gunung Pihan, yang bertautan dengan Sungai Tabalong. Kemungkinan besar, kerajaan ini melakukan afiliasi politik dengan Kerajaan Nan Sarunai. Ketika terjadi kekacauan politik di Kerajaan Nan Sarunai, etnis Lawangan sebagian besar pindah ke Kalimantan Tengah kawasan Barito Tengah, Utara dan Selatan. Sebagian lagi, masih ada di kawasan lembah Gunung Pihan sampai sekarang.

### **4. Kerajaan Kahuripan**

Kerajaan Etnis Ngaju yang paling kuno, kemungkinan besar di kawasan Pantai Batakan hingga Pantai di Kuala Tambangan Takisung, Tanah Laut. Pelayaran hanya sekitar satu hari dari Muara Barito Kuala, menyebabkan kawasan tersebut dikenal dengan istilah *Palayhari* (Pelaihari), Tanah Laut. Kontak awal dengan Portugis kemungkinan tahun 1618 M di kawasan Batakan. Sisa-sisa etnis ini ada di Gunung Pamalongan, Tanah Laut. Sebagian lagi, membangun Kerajaan di Kawasan Sungai Bahan dan Kapuas. Pelabuhan lautnya ada di Kuala Tambangan dan Batakan, Tanah Laut. Komunitas etnis Ngaju memiliki sebuah wilayah kuasa di Banua Lawas di Kecamatan Takisung. Pusatnya di kawasan Gunung Sangiang Banua Lawas. Mereka kemungkinan menghuni bagian sungai Panjaratan, Sungai Riam di Kandangan Lama hingga ke Kuala Tambangan, di pesisir Laut Takisung.

Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan asal etnis Ngaju di Kalimantan Selatan. Dalam Hikayat Banjar dan T tutur Candi, rajanya bergelar Ratu Kahuripan atau Ratu Huripan. Letak Kerajaan ini di kawasan Kecamatan Kuripan, di Barito Kuala. Posisi awal pelabuhan Kahuripan ada di sekitar Sungai Bahan. Sungai Bahan dan pelabuhan Kuripan tembus ke Sungai Paliwara. Sungai Paliwara



termasuk sungai besar. Asal kata Paliwara dari kata Palaywihara, artinya pelayaran ke Wihara. Kerajaan Kahuripan menerima kedatangan Ampu Jatmika, dan membangun afiliasi politik. Keturunan Ratu Kahuripan, yakni Putri Junjung Buih kawin dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Mereka membentuk Kerajaan Negara Dipa. Pusatnya di Sungai Malang. Kerajaan Dipa berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Nan Sarunai.

Akibat pendangkalan sungai, maka pelabuhan Murung Pudak di Tabalong ditinggalkan, dan membangun pelabuhan baru di kawasan kampung Negara-Tumbukan Banyu. Sisa-sisa ulin besar sebagian kecil masih ada di tepi Sungai Negara, Muara Hulak-Tumbukan Banyu. Kerajaan ini kemudian menambahkan pelabuhannya di Marampiau. Pelabuhan ini dikenal dengan sebutan Pelabuhan Muara Rampiau. Banyak temuan arkeologis keramik Cina di kawasan ini.

## **PELABUHAN KUNO: KERAJAAN HINDU-BUDHA**

### **1. Kerajaan Negara Dipa**

Kerajaan Hindu ini menempatkan Muara Rampiau sebagai Pelabuhan sungainya, selain dari Tumbukan Banyu.Hulak Negara, Hulu Sunga Selatan. Pada mulanya Empu Jatmika membangun kerajaannya di Pulau Hujung Tanah. Dalam T tutur Candi dan Hikayat Banjar, banyak pedagang datang ke pelabuhan Negara Dipa. Diantaranya, dari Jawa, Cina, Jambi, Palembang, Makassar, dan lain-lain. Peninggalan Kerajaan ini adalah Candi Agung di Amuntai di tepi Sungai Malang, yang tersambung dengan Sungai Paliwara Amuntai.

### **2. Kerajaan Negara Daha**

Kerajaan ini didirikan oleh Raden Sekar Sungsang. Sebuah kerajaan yang menggantikan Kerajaan Negara Dipa. Pusat kekuasaannya ada di Negara, Hulu Sungai Selatan. Pelabuhannya di Muara Bahan, Barito Kuala. Pelabuhan ini sekitar Rantauan Bakumpai di Muara Sungai Bahan. Pengelola Pelabuhan adalah anak dari Raden Sekar Sungsang, yang bernama raden Sira Panji Kesuma. Ia seorang pemeluk Islam. Pada zamannya Sunan Giri dan Sunan Bonang pernah datang mengunjungi Banjarmasin, yakni di Pelabuhan Muara Bahan.

## **PELABUHA BESAR: KESULTANAN BANJARMASIN**

### **1. Pelabuhan Patih Masih (Bandar Masih) Kota Banjarmasin**

Pelabuhan Kesultanan Banjarmasin terletak di Muara Kuin. Istilah Banjarmasin dari kata Bandar dan Masih. Masih berasal dari nama seorang Patih yang bernama Patih Masih. Orang Belanda menyebut Banjarmasin kemudian menjadi Bandermachsin, kemudian mengalami perubahan lafal menjadi Banjarmasin. Dengan demikian Pelabuhan Patih Masih di Muara Kuin di Kota Banjarmasin sekarang, sebagai pelabuhan awal di awal abad ke-16. Kemungkinan besar pada pertengahan abad ke-15, Pelabuhan Muara Kuin sudah ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah di luar Banjarmasin.

### **2. Pelabuhan Lok Baintan dan Teluk Selong Martapura**

Pelabuhan ini didirikan oleh Sultan Mustainbillah (1595-1620 M). Embrio perpindahan pelabuhan ini sudah ada sejak Sultan ke-3 Kesultanan Banjar, yakni Sultan Hidayatullah. Pelabuhan Kesultanan Banjar menjadi lebih aman dari serangan Belanda, setelah istana Banjar dan Pelabuhannya diserang Belanda pada awal abad ke-17.

### **3. Pelabuhan Muara Tambangan Martapura**

Pelabuhan Muara Tambangan di Martapura terletak di kawasan Sungai Martapura. Pelabuhan ini didirikan oleh Sultan Mustainbillah, sekaligus istananya.

### **4. Pelabuhan Panyambaran Karang Intan Martapura**

Pelabuhan ini didirikan oleh Sultan Sulaiman Rahmatullah (1801-1825 M). Tepatnya di kampung Panyambaran, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Pelabuhan ini tidak jauh dari kompleks istana Sultan Sulaiman Rahmatullah. Pelabuhan ini jauh lebih ke dalam, dari aliran Sungai Riam Kanan, Kabupaten Banjar.

## **PELABUHAN DI KAWASAN TANAH BUMBU DAN PULAU LAUT**

1. Pelabuhan Pagatan, sebuah pelabuhan yang digunakan sejak abad ke-17. Pelabuhan ini didirikan oleh Kerajaan Paser-Pagatan.
2. Pelabuhan Cantung. Pelabuhan yang sejak lama digunakan komunitas Bukit, yang pusatnya di kawasan Cantung. Pelabuhan ini letaknya di Sungai

Cantung, yang terhubung dengan Sungai Batu Besar, bermuara ke Sungai Kusan Hulu, yang tembus ke Laut Pagatan.pada masa Kerajaan Cantung, pelabuhan ini terus dipergunakan para bangsawan dan pedagang.

3. Pelabuhan Sampanahan, yang didirikan oleh Kerajaan Sampanahan.
4. Pelabuhan Sebamban, yang sejak lama digunakan komunitas Bukit, kemudian menjadi ramai sejak berdirinya kerajaan Sebamban.

### **PELABUHAN SUNGAI: ERA KOLONIAL**

Pada zaman Portugis, setidaknya ada dua pelabuhan laut, yakni di kawasan Taboneo di Tanah Laut dan kawasan Batakan, Pulau Datu di Kecamatan Batakan. Pada sebuah gunung di Batakan, terdapat tugu berbahasa Portugis, berangka tahun 1618. Setidaknya Portugis pernah menjadikan kawasan ini sebagai pelabuhan utamanya untuk menjalin hubungan dagang dengan pedagang Banjar dan Cina. Pada zaman kolonial, khususnya sejak VOC hingga Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Abad 17-19), menempatkan pelabuhannya di Banjarmasin, sekitar Sungai Martapura di Muara Mantuil hingga *Fort Tatas* (Muka Mesjid raya Sabilal Muhtadien sekarang). Kawasan ini sangat ramai dikunjungi para pedagang nusantara dan pedagang asing dari berbagai bangsa. Dari sini, hasil alam Banjarmasin dimuat dan diperdagangkan ke berbagai wilayah, termasuk lada, damar, madu, dan lilin. Pada masa dibuka tambang batubara *Oranje Nassau* di Pengaron, hasil produksinya dibawa melalui sungai Pengaron Riam Kiwa, dengan menempatkan pelabuhannya di kampung Arang Alus, Pengaron. Sebagian lagi, dikirim melalui kereta api, menggunakan rel ke pelabuhan Kampung Melayu, Martapura-Kabupaten Banjar.

Alexander Hare (Raja Putih Maluka), yang mendapat konsesi Maluka, dari Kesultanan Banjar atas restu Raffles, ia mewakili Kerajaan Inggris (Serikat Hindia Timur) pada 1 Oktober 1812. Pusat kuasanya ada di Maluka-Pelaihari. Hare menempatkan Sungai Kurau sebagai pusat pelabuhan. Akses pelabuhan ini tembus ke Sungai Takisung, Taboneo, serta Tanah Laut.

## **ORANG BANJAR DAN BUDAYA SUNGAI**

Segala aktivitas kehidupan orang Banjar tidak bisa dilepaskan dari Sungai, begitu pula orang Dayak. Sungai sebagai sarana transportasi yang paling utama sejak zaman Bahari. Mulai dari menggunakan rakit bambu dan rakit dari kayu. Kemudian mereka mengenal *jukung sudur*, yakni *jukung* yang hanya terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dibentuk seperti perahu. Umumnya terbuat dari kayu yang lumayan ringan dan sederhana. Misal kayu lanan dan kayu kruing. Seiring dengan perubahan zaman, muncul jenis-jenis perahu besar yang terbuat dari kayu yang tahan lama, yakni kayu ulin. Bahan-bahan untuk menutup lubang-lubang dan sambungan-sambungan ulin tersedia sangat banyak di Kalimantan Selatan, kayu damar, kayu jelatang, dan tanah lempung (bauksit). Orang Banjar mengenal *jukung* besar, yakni *jukung* Tiung yang mampu membawa sampai 50 kubik hasil alam.

Sungai menjadi tempat wilayah mereka tinggal. Pesisir sungai di Kalimantan Selatan sebelum adanya jalan darat awal abad ke-20 dipenuhi oleh rumah penduduk, termasuk pula istana, makam para bangsawan, mendirikan rumah pemujaan dan rumah ibadah.

Akar sosial politik orang Banjar bermula dari sungai. Oleh sebab itu, semua istana Kesultanan Banjar letaknya di tepi sungai. Jaringan birokrasi dan pemerintahan terkoordinasi melalui sungai. Terbentuknya bubuhan bermula dari sungai. Interaksi antar individu dan kelompok melalui jalur sungai. Begitu pula relasi dan komunikasi terbentuk dan terhubung melalui sungai. Laut dan sungai menjadi bagian dari ritual masyarakat Kalimantan Selatan, dengan adanya berbagai upacara. Suku Bugis mengenal dengan upacara Mappanre Tassi, yakni pesta laut. Tujuannya memberi sedekah laut. Orang Banjar dengan mengadakan acara Aruh Sungai, yakni melepas makanan ke sungai. Sebagian masyarakat Banjar sudah meninggalkan upacara ini, kecuali yang bersifat perorangan.

Sungai menjadi tempat aktivitas jual-beli sekaligus menjadi tempat mandi, cuci dan kakus. Bahkan sungai dijadikan tempat membuat rumah *lanting* untuk tempat tinggal sekeluarga. Mereka juga terbiasa hidup sekeluarga dalam perahu dagang. Jiwa dagang terbentuk melalui pembiasaan dari orang tua kepada anaknya, melalui perahu dagang yang hilir mudik dari

hulu ke hilir sungai. Jika ke hilir mereka berlabuh, jika ke hulu mereka mudik. Jika menuju arah ke hilir mereka sebut ke arah laut, jika menuju ke hulu mereka sebut ke darat.

## **PENUTUP**

Pelabuhan sungai dan laut di Kalimantan Selatan menjelaskan munculnya istilah Zaman Bahari, yakni zaman dahulu yang menjadikan sungai dan laut sebagai urat nadi kehidupan Orang Dayak dan Orang Banjar. Hampir semua nama Kabupaten di Kalimantan Selatan tidak bisa dilepaskan dari istilah sungai dan laut. Semua ini memastikan telah adanya rute pelabuhan-pelabuhan sungai ke muara laut, begitu pula sebaliknya. Kenyataan demikian menjelaskan karakter sosial masyarakat Banjar yang senantiasa terbuka dengan etnis pendatang lainnya. Mereka memiliki jiwa dagang yang menjelaskan munculnya istilah orang Banjar adalah orang dagang. Pelabuhan sungai dan laut sebagai tempat pusat interaksi antar bangsa, menyebabkan orang Banjar selalu dinamis dalam menerima berbagai perubahan zaman. Mereka selalu beradaptasi sesuai dengan kondisi zamannya. Walau demikian, potret kehidupan sungai masih banyak tersisa di Kalimantan Selatan, meskipun sungai-sungai dan pelabuhannya hanya sekedar tempat lewat tongkang-tongkang kayu dan batubara, serta minyak sawit.

## **DAFTAR BACAAN**

- Daudi, Abu. 2003. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary (Tuan Haji Besar)*. Martapura: Yayasan Dalam Pagar (YAPIDA).
- Irwin, Graham. 1986. *Borneo Abad Ke-19*, terjemahan oleh M. Nor Ghani dan Noraini Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Lapian, A.B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Noor, Yusliani. 2016. *Islamisasi Banjarmasin (Abad Ke-15 Sampai Ke-19)*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Putro, Herry Porda Nugroho. 2009. "Sungai di Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Sejarah", *Makalah pada Seminar Nasional Pendidikan "Kemaritiman Dalam Perspektif Historis dan Pendidikan"*. Banjarmasin: FKIP Unlam.

- Ras, J.J. tanpa tahun. *Hikayat Banjar: The Malay Mythe of Origin*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Saleh, M. Idwar. 1983/1984. *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir Abad 19*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, M. Idwar. 1986. *Banjarmasih*. Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat,
- Subiyakto, Bambang., dan Djoko Suryo. "Pelayaran Sungai di Kalimantan Tenggara: Tinjauan Historis tentang Traansportasi Air Abad XIX", *Sosiohumanika*, Vol. 14, No. 1, Januari 2001.
- Usman, Ahmad Gazali. 1989. "Orang Banjar Dalam Sejarah", *Diktat*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.
- Usman, Ahmad Gazali. 1994. *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.

# **PELAYARAN DAN PERDAGANGAN DAN DINAMIKA POLITIK KESULTANAN BANJAR ABAD KE 17/18**

**Hairiyadi**

tanganyangindah@gmail.com

## **PERMULAAN**

Kurang lebih tahun 1500 M terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam dunia perniagaan di Asia sebagai akibat dari kedatangan bangsa Eropa di Asia sesudah penemuan jalan perhubungan laut yang mengelilingi benua Afrika. Lalu-lintas perdagangan antara Asia dan Eropa dalam abad ke-15 terutama melalui Laut Merah dan kota Iskandariah. Kemajuan Mesir pada waktu itu disebabkan oleh perdagangan ini. Pada waktu tersebut kompas kapal sudah ditemukan, sehingga pelayaran berlangsung cukup mudah dan bangsa Portugis sudah mulai dengan perlawatan-perlawatan taktis militer menyusur pantai barat benua Afrika. Bangsa Portugis menyelenggarakan perlawatan-perlawatan tadi awalnya tidak berdasarkan suatu tujuan ekonomi. Kemudian timbul perhitungan-perhitungan komersil ketika Afrika Barat mulai menghasilkan barang-barang baru. Mereka mulai menaruh harapan penemuan jalan ke Asia mengelilingi Afrika. Portugis lah yang pertama-tama menemukan jalan perhubungan melalui laut ke Asia dan satu abad lamanya mereka adalah satu-satunya bangsa Eropa yang mempergunakan jalan ini. Pada tahun 1509 mereka untuk pertama kali di Indonesia.

Dalam pada itu, bangsa Spanyol mencoba menemukan jalan ke Asia ke arah Barat, dan suatu perlawatan mereka menjumpai Amerika. Columbus yang hendak mencari jalan ke Tiongkok, pada tahun 1492 mendarat di Kuba, kemudian mereka berlayar Asia mengelilingi Amerika Selatan. Jalan-jalan perniagaan yang ada sejak sediakala dari Asia ke Eropa dan yang sebagian melalui darat, sekarang ditambah dengan jalan baru yang semata-mata melalui laut, yaitu mengelilingi Afrika. Karena adanya jalan laut baru tadi terjadilah suatu revolusi dalam struktur perdagangan. Perhubungan langsung antara daerah

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

produksi dengan daerah konsumsi dapat diadakan. Misalnya bangsa Portugis lalu mengetahui harga rempah-rempah di Malaka lima atau tujuh kali di Maluku. Oleh sebab itu mereka langsung berlayar ke Maluku untuk membeli sendiri rempah-rempah di sana.

Seabad sesudah bangsa Portugis, bangsa Belanda sampai di Asia. Di Eropa mereka sudah berhasil mengembangkan suatu usaha pengangkutan laut antar negara-negara Eropa, mereka mengambil rempah-rempah dari Portugal untuk diangkut ke Eropa Utara dan Timur. Akan tetapi pada waktu Perang Depalanpuluh Tahun antara Spanyol dan Belanda, Portugal takluk oleh Spanyol pada tahun 1580 dan perdagangan Belanda di sana dilarang. Maka bangsa Belanda lalu berusaha sendiri mencari jalan ke Asia. Demikianlah, akhirnya bangsa Belanda untuk pertama kalinya tiba di Indonesia, berlabuh di Banten. Bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berniaga. Mula-mula beberapa kongsi dagang yang menyediakan kapal-kapal, akan tetapi dalam tahun 1602 telah didirikan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* yaitu gabungan kongsi yang berlayar ke Indonesia.

Sekitar tahun 1600 sebagian besar dari perdagangan di laut Jawa masih berkedudukan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur, walaupun ketika itu Banten sedang maju, Tuban masih tetap menjadi kota dagang. Gresik yang muncul pada abad ke-15 menjadi tempat penimbunan rempah-rempah dari Maluku. Jepara dan Surabaya makin bertambah penting, Semarang menjadi penting setelah pertengahan abad ke-17. Sejarah selanjutnya pelayaran kapal-kapal Jawa juga kekuasaan laut orang-orang Jawa berakhir secara menyedihkan dalam abad ke-17. Sejarah ini berhubungan erat dengan terpecah-belahnya pulau Jawa dalam abad ke-16, munculnya Mataram dalam abad ke-17 dan peperangan demi peperangan dalam negeri yang harus dilakukan oleh Mataram untuk memulihkan kesatuan negara di Jawa.

Keadaan peperangan yang terus-menerus ini mempunyai akibat yang sangat menyedihkan bagi perdagangan laut Jawa. Penaklukan dan penghancuran kota-pantai menyebabkan banyak saudagar-saudagar pindah secara besar-besaran ke Makasar dan Banjarmasin. Perdagangan rempah-rempah orang-orang Jawa pindah ke kota-kota tersebut. Ketika pada tahun 1511 Malaka ditaklukan oleh orang-orang Portugis dan banyak pedagang-



pedagang Indonesia pindah dari Malaka ke tempat-tempat lain, ada pula diantara mereka yang pindah ke Makasar, tetapi pada waktu tersebut belum mempunyai arti yang penting. Baru setelah kedatangan pedagang-pedagang dari Jawa Timur dalam permulaan abad ke-17 maka Makasar menjadi tempat penimbunan yang besar untuk perdagangan rempah-rempah dari Maluku.

Banjarmasin muncul sebagai pusat perdagangan. Banyak pedagang-pedagang Jawa yang pindah ke Banjarmasin permulaan abad ke-17. Tambahan pula, waktu itu Banjarmasin merupakan penghasil lada. Orang-orang Eropa membeli lada banyak sekali di Banten, sehingga orang-orang Tionghoa hampir-hampir tidak kebagian. Permintaan yang besar dan harga yang tinggi di Banten mengakibatkan tumbuhnya penanaman lada di Banjarmasin. Pada lebih kurang tahun 1600 perdagangan di Banjarmasin oleh orang-orang Tionghoa, tetapi setelah datang pedagang-pedagang Jawa dari Jawa Timur maka pedagang-pedagang Jawa lah yang menguasai (Burger, 1962:57).

### **MUNCUL RAJA ISLAM PERTAMA DAN BANDAR BARU**

Raden Samudera adalah cikal-bakal raja-raja Banjar. Dia adalah cucu Maharaja Sukarama dari Negara Daha. Raden Samudera dirajakan setelah Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, Patih Kuwin mengadakan pertemuan permusyawaratan. Selanjutnya Raden Samudera bersama-sama dengan para patih merebut Bandar Muara Bahan, bandar dari Neagara Daha. Pangeran Samudera memindahkan ke Banjar, sekalian mengangkut pedagang dan penduduknya.

Bagi Pangeran Tumenggung sebagai raja Negara Daha yang juga adalah paman Raden Samudera, direbutnya Bandar Muara Bahan merupakan pemberontakan. Terjadilah pertikaian antara Raden Samudera dengan Pangeran Tumenggung. Pertikaian berakhir dengan damai. Pangeran Tumenggung dengan rela menyerahkan kekuasaan dan segala tanda kebesaran kepada keponakannya Raden Samudera. Terjadilah penyerahan regalita kerajaan kepada Raden Samudera. Pangeran Tumenggung diperintahkan berkuasa di Batang Alai dengan 1000 orang penduduk. Negara Daha ditinggalkan, menjadi kosong karena semua penduduknya diangkut ke Banjar. Negara Daha berakhir. Bantuan Demak mempunyai pengaruh besar

sebab bantuan Demak hanya diberikan kalau Raden Samudera beserta seluruh rakyatnya memeluk Islam ketika pertikaian Raden Samudera dengan Pangeran Tumenggung. Sultan Demak mengirim bantuan 1000 orang pasukan dan diiringi oleh seorang penghulu Islam yang akan mengislamkan raja dan penduduknya. Dengan kemenangan Raden Samudera atas Pangeran Tumenggung dan diangkutnya rakyat Daha ke Banjar maka muncul kota baru di Banjar.

Raden Samudera yang telah memeluk Islam sebagai suatu persyaratan atas bantuan Demak telah mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Setelah meninggal terkenal namanya sebagai Panembahan Batu Habang. Perubahan kebudayaan yang hebat terasa dengan masuknya agama Islam. Kesultanan Banjar sebagai kerajaan yang rakyatnya beragama Islam. Kesultanan Banjar didirikan di daerah orang Ngaju, sebagian pegawai kerajaan adalah orang Ngaju. *Amalgamasi* kebudayaan Banjar sesudah itu menjadi lebih luas dengan perpaduan Ngaju, Melayu, Jawa, Ma'anyan, dan Bukit. *Amalgamasi* ini berjalan dengan damai dan melahirkan orang Banjar yang bercirikan agama Islam, bahasa Banjar menjadi bahasa ibu.

Agama Islam sebagai agama negara dari sebuah kerajaan Islam, Kesultanan Banjar, menjadikan agama Islam sebagai sumber hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur bangsa Banjar. Para ulama menempati kedudukan yang tinggi dalam negara. Jabatan tuan Penghulu merupakan jabatan ketiga dari urutan kepangkatan, setelah Sultan dan Mangkubumi. Pada abad ke-17/18 dibentuklah hakim besar. Hakim Besar terdiri dari, Kepala Qadi, Kepala Mufti dan Kepala Khalifah (Usman, 1989:42). Bahkan kemudian pada masa pemerintahan Sultan Adam al wasik Billah diundangkanlah sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam 1835. Undang-Undang ini mendasarkan pada hukum Islam yang berlaku seluruh bangsa Banjar dari Kesultanan Banjar.

Banjarmasin pada abad ke-16 belum dikunjungi orang-orang Eropa. Banjarmasin mulai dikenal oleh orang Eropa semenjak kehadiran orang Banjar yang datang ke Banten pada tahun 1596 untuk berdagang membawa beras, ikan kering dan lilin (Noorlander, 1935:5). Barang bawaan tersebut merupakan hasil penukaran barang-barang mereka yang berupa intan, emas dan hasil

hutan. Di pelabuhan Banten para pedagang Banjarnasin mengalami perampasan barang dagangan oleh Belanda (Noorlander, 1935:5). Hubungan awal orang Eropa diawali dengan kehadiran bangsa Belanda pada 7 Juni 1607 berlabuh di pelabuhan Banjarmasin dipimpin oleh Koopman Gillis Michielszoon. Ketika turun ke darat bersama anak buahnya mereka dibunuh semuanya dan barangnya dirampas (Saleh, 1970:14) Lima tahun kemudian barulah pembalasan Belanda tiba, tahun 1612 istana Sultan yang terletak di Banjarmasin hancur terbakar oleh tembakan-tembakan dari kapal-kapal Belanda. Hubungan Kesultanan Banjar dengan Belanda baru membaik pada tahun 1636 dibuat kontrak yang pertama antara Banjarmasin dengan Belanda.

Pada tahun 1666 perusahaan dagang Belanda di Banjarmasin ditarik ketika sultan berjanji untuk menjual semua lada ke Batavia. Bangsa Inggris mendirikan perusahaan dagang di Banjarmasin pada tahun 1615. Hubungan perdagangan yang erat antara Banjarmasin dengan Inggris terjadi pada masa pemerintahan Sultan Saidillah (1685-1700). Henry Watson dan Captain Cotesvorth tiba pada April 1700 dimana sultan mengizinkan Inggris mendirikan kantor dagangnya di Pasir (Suntharalingan, 1964:57). Diantara tahun 1701-1706, Inggris telah mengekspor lada sebanyak 3421 ton untuk Eropa. Produk lainnya seperti sarang burung dan emas merupakan barang komoditas kedua. Tingginya permintaan akan lada dan banyaknya pedagang di Banjarmasin dimanfaatkan oleh Kesultanan Banjar untuk mengembangkan perdagangan, untuk itu Sultan melakukan ekspansi ke wilayah pedalaman yang merupakan sumber komoditas perdagangan. Dilakukanlah penguasaan atas Kutai, Pasir, Kotawaringin, Sambas, dan lainnya (Schrieke, 1957:55). Daerah-daerah yang ditaklukkan dibagi kepada para bangsawan, selanjutnya para bangsawan memerintahkan menanam tanaman komersil berupa lada. Lada ini merupakan barang dagangan penting di Kesultanan Banjarmasin (Knapen, 2001:252).

Pada sisi lain ramainya perdagangan di Banjarmasin sikap para penguasa yang baik kepada pedagang. Para penguasa Kesultanan menjamin agar para pedagang dapat berdagang dengan aman dan memperoleh layanan sebaik-baiknya. Dengan demikian Banjarmasin ramai didatangi pedagang-pedagang dari pelbagai daerah, Melayu, Jawa, Cina, Portugis, Belanda, Inggris

dan Denmark. Barang-barang perdagangan dari Banjarmasin, berupa lada, damar, lilin, sarang burung walet, kayu ulin, rotan, emas dan intan. Barang perdagangan dari luar berupa beras, keramik Cina dan peralatan sehari-hari.

Penanaman lada ditingkatkan. Wilayah penanaman lada adalah di Martapura, khususnya sekitar Riam Kiwa dan Riam Kanan, Hulu Sungai seperti Hamandit, Pamangkih, Tapin, Kelua dan Tanah Laut. Lebih kurang pertengahan abad ke-18, wilayah Hulu Sungai menjadi daerah terpenting penghasil lada. Negara dan Amuntai menjadi pusat transit barang perdagangan dari pedalaman (Knapen, 2001:100). Berdasarkan data 1747-1761 Belanda telah membawa lada dari Banjarmasin 83,276 pikul (20,819 ton) dan Cina lebih kurang 32,213 pikul atau 8.053,25 (Noorlander, 1935:192). Para penanam lada tidak dapat menentukan harga. Harga ditentukan oleh Sultan, Sultan membeli lada dari pedalaman sekitar 2 real Spanyol per pikul. Harga menjadi mahal ketika Sultan menjualnya kepada para pedagang Cina, yakni 8 real Spanyol per pikulnya. Keuntungan yang didapat dari perdagangan lada telah menjadikan Sultan dan para bangsawan cepat kaya.

Berdasarkan berita Cina, Sultan Banjar mempunyai ratusan dayang-dayang dalam balutan pakaian yang indah-indah. Apabila Sultan bepergian, ia menaiki gajah, diiringi para pengiring yang membawa pakaian, sepatu, pusaka kesultanan dan tempat-tempat sirih. Kemudian dari berita lain dinyatakan karena keuntungan dari perdagangan lada inilah Sultan sering mengadakan pesta besar, membiayai kehidupan istana dan keluarganya, membiayai pengawal, membangun istana yang indah (Sulanjani, 1991:67).

Awal abad ke-18 Kesultanan Banjar mencapai puncak kemakmurannya. Berbagai bangsa meramaikan perdagangan. Secara pelan mereka tinggal di Banjarmasin, seperti Cina, Siam, Johor, Jawa, Arab, Sunda, Palembang, Pegu, Kedah, Kamboja, Bangka, Brunei, Bugis, Maluku, Jambi, Aceh, Portugis, Inggeris dan Belanda (Leirizza, 1984:70). Perkembangan perdagangan lada menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik dan pemerintahan. Para penguasa (*the rulling class*) berusaha dengan cepat untuk memperoleh tanah yang lebih luas dalam bentuk apanage yang dijadikan wilayah penguasaan penanaman lada.

Besarnya volume perdagangan lada menyebabkan kekayaan yang melimpah bagi golongan penguasa politik dan perdagangan. Kekuasaan politik dan perdagangan merupakan haknya golongan bangsawan, bukan hak rakyat umum. Kekayaan mendominasi karakteristik tingkah-laku bagi golongan penguasa yang merupakan penguasa politik-perdagangan dan penguasa perkapalan. Kekayaan menyebabkan seseorang memperoleh kekuasaan politik atau mempunyai pengaruh dalam bidang politik yang mempunyai status sebagai golongan penguasa dan justru sebagai golongan penguasa akan menghasilkan kekayaan, karena penguasa lah yang mempunyai monopoli dalam bidang perdagangan lada dan perkapalan.

Perubahan ini menyebabkan pengaruh yang besar bagi sistem politik dan pemerintahan, karena sejak itu golongan bangsawan yang kaya raya lebih berkuasa daripada Sultan. Para bangsawan atau para pangeran bertingkah-laku terhadap rakyatnya dengan menganggap dirinya sebagai raja, yang mempunyai kekuasaan absolut dalam wilayahnya. Para pangeran juga mempunyai pengaruh besar dalam perundingan-perundingan perdagangan dan kadang-kadang kepentingan para pangeran ini lebih menonjol daripada kepentingan politik negara. Bagi pedagang luar negeri terutama bangsa Belanda, kekuasaan absolut dari golongan aristokrasi ini sangat merugikan mereka. Dan itu pula sebabnya Belanda tidak dapat memperoleh hak monopoli lada dalam kontrak yang dibuat saat itu, Dewan Mahkota (*the Royal Council*) yang terdiri dari keluarga Sultan, golongan aristokrat, para pejabat tinggi, para Kiai mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan situasi politik, ekonomi dan perdagangan. Sultan tidak dapat melakukan suatu tindakan atau langkah tanpa ijin atau persetujuan Dewan Mahkota, terutama yang menyangkut pembicaraan dengan pedagang-pedagang asing.

Aktivitas pelayaran dan perdagangan bangsa Banjar pada abad ke-17 melintasi sampai Cochin Cina dan Aceh. Pertumbuhan perdagangan dan adanya kontrak-kontrak dengan pedagang-pedagang luar negeri, memerlukan orang asing untuk menduduki jabatan syahbandar. Syahbandar adalah orang asing yang mengerti tata cara perdagangan dan memahami bahasa asing. Syahbandar pertama dari Kesultanan Banjar adalah seorang Gujarat, Goja Babouw dengan gelar Ratna di Raja. Sebuah kontrak perdagangan yang

diadakan antara Kesultanan Banjar dengan Belanda diselesaikan melalui pengaruh Syahbandar Ratna di Raja Goja Babouw dan ditanda tangani oleh Sultan pada tahun 1635. Lambat laun penguasaan perdagangan oleh kesultanan Banjar mengalami kemunduran karena penguasaan jaringan perdagangan yang sebelumnya ada pada penguasaan Sultan diambil alih pedagang-pedagang Eropa. Mundurnya penguasaan perdagangan ini sesudah VOC memperoleh monopoli perdagangan di tahun 1787.

Konflik dalam istana juga memberikan andil terhadap kemunduran penguasaan perdagangan. Sejak pertengahan abad ke-17 terlihat pertumbuhan dari kekuatan baru dalam konflik dengan elemen-elemen golongan kerajaan yang mendominasi, yang mempunyai kekuasaan dalam bidang politik dan perdagangan, yang mempengaruhi masa selanjutnya. Hal ini dimulai pada suatu gerakan yang tidak pernah berakhir pada golongan tingkat atas dari masyarakat Banjar, yaitu perebutan, perampasan kekuasaan (usurpation), persaingan kekuasaan, tipu daya dan faham mengutamakan golongan sendiri (factionalism) menjadi sangat umum. Akibat dari hal-hal ini menjadikan pemerintahan sangat lemah dan terjadinya kekacauan.

Ketika Sultan Nata memberikan kedaulatannya kepada VOC dan menjadikan Banjarmasin sebagai daerah vazal saja yang ditandai dengan kontrak pada 1787, isinya: (1) Sultan menyerahkan semua daerah kepada VOC, kecuali Kayu Tangi, Martapura, Tanah Dusun, Amuntai dan Sampit. Daerah-daerah tersebut tetap dibawah kekuasaan sultan sebagai daerah pinjaman VOC. Sedangkan Tatas, Tabonio, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotawaringin diserahkan sepenuhnya kepada VOC. (2) Sultan sebagai vazal VOC mempunyai pemerintahan sendiri yang langsung diperintahnya. (3) Putra Mahkota, Mangkubumi diangkat oleh VOC. (4) Jaminan bahwa Kesultanan Banjar hanya diperintah untuk selanjutnya oleh keturunan Natadilaga. Dari nama daerah yang diberikan kepada VOC hampir semua daerah itu terletak di pantai. Tatas yang merupakan pelabuhan terbesar di Banjarmasin, Kotawaringin, Tabonio, Tanah Laut juga tedrletak di tepi pantai merupakan pintu gerbang untuk pedagang luar yang ingin berdagang ke Banjarmasin (Wicaksono, 2010:71). Semua daerah tersebut oleh VOC dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukannya di Kesultanan Banjar dengan didirikannya pos militer dengan

sejumlah serdadu dan kapal patroli. Akibatnya bertambah kuatnya kedudukan VOC di Kesultanan Banjar (Sulanjari, 1991).

Akibat dari monopoli dan penguasaan Belanda terhadap Banjarmasin sejak perjanjian 1787 telah mengakibatkan mundurnya perdagangan di Banjarmasin. Ketidak senangan rakyat terhadap hal ini terkadang menimbulkan konflik antara Sultan dan rakyat. Rakyat yang tidak senang dengan monopoli yang dilakukan Belanda akhirnya melakukan pengrusakan terhadap perkebunan lada (Sulanjari, 1991:104). Akibat perang perebutan kekuasaan, berdampak rakyat pergi ke daerah lain yang lebih aman. Hal ini menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap hasil komoditas perdagangan karena penduduk tidak hanya meninggalkan rumahnya namun juga lahan pekerjaan mereka (Knapen, 2001:265).

#### **DAFTAR BACAAN**

- Burger, Prajudi. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Knapen, Han. 2001. *Forest of Fortune? The Enviromental history of Southeast Borneo, 1660-1880*. Leiden: KITLV Press.
- Leirissa, R.Z. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noorlander. 1935. *Bandjarmasin en de Compagnie in Tweede Helft der 18 Eeuw*. Leiden: Dubbelmen.
- Saleh, M. Idwar. 1970. *Bandjarmasin*. Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru.
- Schrieke, B.J.O. 1957. *Indonesian Sociological Studies*. Bandung: The Hague W. Van Hoeve.
- Sulanjari. 1991. *Politik dan Perdagangan Lada di Kesultanan Banjarmasin 1774-1787*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Surthalarigan, P. 1964. *The British in Bandjarmasin: an Abortive Attempt at Settlement*. K.G. Treganing (ed). JSAH, vol. IV Singapore.
- Usman, A. Gazali. 1989. *Urang Banjar dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Wicaksono, Ibnu. 2010. *Kesultanan Bandjarmasin dalam Lintas Perdagangan Nusantara Abad ke-XVIII*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

# **MENGENAL KERAJAAN TANAH BUMBU: BERPOROS MARITIM (Sejarah Perkembangan Politik Wilayah Kesultanan Banjar di Tenggara Kalimantan Selatan Abad 17 Sampai 19)**

**Rusdi Effendi**

rusdieffendi@ulm.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Bertahun-tahun penulis menjadi bingung atas kesimpang-siuran ceritera rakyat yang berkembang pada masyarakat di daerah Batulicin, Pagatan, Sebamban, Kusan Hulu hingga di Kotabaru tentang Kerajaan Tanah Bumbu, terutamanya tentang tokoh pendiri Kerajaan Tanah Bumbu. Kesimpang siuran tersebut dari ceritera yang irasional terbelenggu pada mitos atau legenda lebih menonjol jika dibandingkan pola keilmiahan sangat kental pada lidah informan lokal apabila dimintakan bertutur tentang ceritera tersebut selalu terkait dengan Sultan-sultan Banjar dengan berbagai kebijakannya. Setelah Kabupaten Tanah Bumbu berdiri tahun 2003 hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, seakan-akan Kabupaten inilah yang dianggap bagian dari Kerajaan Tanah Bumbu tersebut. Buku yang agak diharapkan bisa membuka tabir tentang Kerajaan Tanah Bumbu dan Sejarah Kotabaru hadir dengan titel "Sejarah Kotabaru" (2009) belum puas untuk dibaca, mengingat Kerajaan Pagatan hanya terdapat empat lembar saja (halaman 62-66), Kerajaan Tanah Bumbu dan Sampanahan (halaman 67-68) dua lembar dan didalamnya terdapat setengah halaman tentang Kerajaan Sebamban, Jadi memerlukan penelitian akan hal ini.

Dengan rasa penasaran tersebut akhirnya penulis berusaha mencari arsip atau dokumen berupa laporan pemerintah Kolonial Belanda, alhasil dengan ditemukannya laporan ekspedisi Schwaner tahun 1853, dimana ia pernah tinggal di kawasan Tanah Bumbu, Pagatan dan Pulau Laut dari tahun 1846 hingga laporan tersebut ditulis tahun 1853 sangat menolong membuka tabir sejarah tentang sejarah Kerajaan Tanah Bumbu. Melalui tulisan ini

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.



diringkaskan hasil penelitian berupa draft pra buku "Tanah Bumbu dalam Sejarah" tentang Keberadaan, perkembangan Kerajaan Tanah Bumbu yang merupakan pemekaran dari kekuasaan politik wilayah Kesultanan Banjar di bagian Tenggara Kalimantan Selatan dari abad 17 hingga Abad ke-19 ternyata tidak bisa diabaikan begitu saja dalam sejarah di wilayah ini.

Jauh sebelum berdirinya Kabupaten Kotabaru yang meliputi gabungan Pulau Laut dan Tanah Bumbu, ternyata wilayah ini telah memiliki peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalunya. Dengan berbagai kesimpang-siuran ceritera mengenai sejarah pelan-pelan mulai diluruskan. Penulis mencoba membuka tabir untuk melihat titik terang peristiwa sejarah di daerah ini khususnya di Tanah Bumbu jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan, 5 (lima) kecamatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia sebagai hasil pemekaran untuk Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru.

Kelima kecamatan tersebut di atas sebelum dilakukan pemekaran tahun 2003 adalah bagian kecamatan yang berada dalam lingkup administratif pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Jika ditengok agak ke belakang dengan tinjauan peristiwa sejarah sebelumnya Kabupaten Kotabaru terbentuk juga melalui proses sejarah yang panjang dengan bagian berdirinya Republik Indonesia setelah perjuangan revolusi fisik di daerah-daerah di Indonesia untuk melepaskan diri dari masa penjajahan Belanda sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwa penting sebagai evolusi negeri ini dalam berusaha melepaskan diri dan meminta pengakuan kedaulatan dunia Internasional seperti usaha yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, dimana pengakuan pihak Belanda akan kedaulatan Republik Indonesia hanya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kemudian usaha tokoh-tokoh Republik Indonesia dengan diplomasi menghasilkan Perjanjian Renville 17 Januari 1948, wilayah Republik Indonesia semakin sempit dan merugikan. Tanggal 17 Mei 1948 Perjanjian Roem-Royen menghasilkan kesepakatan pemerintah Republik Indonesia di kembalikan ke Yogyakarta dan delegasi tokoh-tokoh diplomasi Republik Indonesia terus berjuang menuju

Konferensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda. Hasil kesepakatan 23 Agustus 1949 perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dampak Republik Indonesia Serikat tersebut bagi di daerah Kalimantan termasuk bagian RIS dengan pembentukan Borneo dan Timur Besar. Untuk wilayah di bagian tenggara dikeluarkannya Surat Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 18 Januari 1947 Nomor 2 Staatblad 1847 No. 3 yang kemudian diubah dengan Staatblad 1947 No.112 Jo Staatblad 1948 No. 189 dibentuk struktur pemerintahan Hindia Belanda di Kotabaru: (1) Neo Swapraja (*Neo Landschap*) Pulau Laut dan Neo Swapraja (*Neo Landschap*) Pasir; (2) Neo Swapraja (*Nep Landschap*) Pagatan Staatblad 1947 No. 37 Jo. Staatblad 1948 No. 50; (3) Neo Swapraja (*Neo Landschap*) Cantung Sampanahan. Berdasarkan hal itulah dibentuk Dewan Kotabaru. Dalam Konferensi I antara RI-Belanda di Yogyakarta, 29 Juli 1949 dan Konferensi antara Indonesia II di Jakarta, 31 Juli 1949, Kotabaru masuk dalam B.F.O (*Bijoonkomen voor Federal Overleg*).

Hasil Konferensi tersebut melahirkan Republik Indonesia dan RIS (Republik Indonesia Serikat). Rakyat Kotabaru tidak puas karena wilayahnya masuk RIS dan para tokoh Kotabaru dan Pagatan melakukan perjuangan untuk lepas dari RIS. Usaha tersebut membawa hasil dan tuntutan tersebut disetujui, Dewan Kotabaru dan Dewan Banjar dibubarkan, berdasarkan Keputusan Presiden RIS tanggal 4 April 1950 No. 137 dan No. 138 dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia kesatuan Yogyakarta. Dalam keadaan situasi yang masih darurat, maka dibentuklah Dewan Pemerintahan Daerah Sementara beranggotakan Muchtar Hamzah, Usman Dunrung dan Ali Kumala Noor. Ketuanya adalah M. Yamani. Kepala daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 161/OPB/17/73 dan diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan acting Kepala Daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada tahun 1951 M. Yamani dipindahkan ke daerah lain dan digantikan dengan A. Rasyid sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru.

Adapun wilayah pemerintahan Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang Daerah No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan (resmi) Daerah

Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah di Propinsi Kalimantan Selatan adalah Wilayah Kabupaten Kotabaru meliputi kewedanaan-kewedanaan Pulau Laut, Tanah Bumbu dan Pasir. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, menetapkan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 sebelumnya sebagai Undang-Undang, maka wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan kewedanaan Pasir. Dengan demikian Kabupaten Kotabaru sejak tahun 1959 adalah wilayah administrasi pemerintahannya meliputi Pulau Laut dan Tanah Bumbu.

Dari proses evolutif perkembangan administrasi pemerintahan hingga sekarang ini di bagian Tenggara Kalimantan menghasilkan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (hasil pemekeraan tahun 2003) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Tanah Grogot di Kalimantan Timur juga harus merelakan Kabupaten Penajam Paser Utara (hasil pemekaran tahun 2003). Terlepas dari garis administratif pemerintahan saat ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan mempunyai sisi historis yang sama, yakni dimana di masa lampau adalah bagian dari Kerajaan Tanah Bumbu yang merupakan pemekaran dari Kesultanan Banjar di wilayah Tenggara Kalimantan Selatan.

## **ASUMSI DAN ANALISIS SEPUTAR KERAJAAN TANAH BUMBU**

### **1. Awal Mula Kerajaan Tanah Bumbu: Pendapat dan Analisis**

Mengenai asal-usul berdirinya Kerajaan Tanah Bumbu dan suku bangsa penyerang yang menghancurkan tatanan kerajaan orang Dayak di Pamukan di wilayah sekitarnya, beberapa pendapat menyatakan mereka adalah 'lanun' (bajak laut), ada juga yang membuat argumentasi penyebaran Islam dari Kerajaan Pasir dan umumnya menyatakan sebagai serangan para perompak yang tidak terorganisir. *Versi Pertama*; mengenai asal-usul kerajaan Tanah Bumbu dipaparkan oleh Kasuma (1981) diantaranya menyebutkan, "Pada pemerintahan Kesultanan Banjar, penduduk asli yang terdiri dari orang-orang Dayak dari Kalimantan Tenggara telah berangkat ke Banjarmasin menghadap Sultan Banjar, Sultan Tamdjidillah gelar Panembahan Badarul Alam untuk

meminta agar Sultan menunjuk putera (laki-laki atau wanita) untuk dijadikan raja di daerah mereka. Maka untuk itu Sultan Banjar menunjuk puterinya menjadi raja di Tanah Bumbu. Kemudian dikenallah di Kerajaan Tanah Bumbu Ratu Intan I yang menjadi raja, sebelumnya daerah ini belum pernah diperintah oleh siapapun. Ratu Intan bersama dengan rombongan yang disertai oleh beberapa pengawal kerajaan berangkat menuju daerah yang dimaksud, dibawa masuk sungai keluar sungai. Akhirnya Ratu Intan memilih sebuah anak sungai yang terletak di dalam sungai Cengal, yang bernama "Sungai Bumbu". Ditempat inilah oleh pemuka-pemuka rakyat setempat didirikan sebuah Keraton yang disebut "*Dalam*", maka Sungai Bumbu menjadi pusat perhatian orang-orang daerah itu, daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan beliau dinamai "Tanah Bumbu". Mulailah berkembang sebuah Kerajaan Tanah Bumbu.<sup>1</sup>

Tentang asal-usul kerajaan Tanah Bumbu menurut *Versi kedua* dari Hakim dkk (2009) dalam "Sejarah Kotabaru" menyebutkan bahwa:

"Alkisah, sebelum agama Islam, daerah Kotabaru didiami penduduk dari suku Dusun atau Dayak yang menganut kepercayaan animisme. Mereka berasal dari Tamiyang Layang. Baik di Kotabaru, Cengal, Cantung, Sampanahan dan lainnya masih hidup berkelompok. Kehidupan kelompok tersebut tidak aman karena sering dikacau perompakan dan pembunuhan kaum lanun (bajak laut). Dalam kondisi demikian kepala-kepala suku mengadakan perundingan untuk mencari pemimpin agar dapat memberantas lanun. Perundingan membuahkan kesepakatan untuk minta perlindungan kepada kerajaan Banjar. Sebagai realisasi perundingan diutuslah wakil ke kerajaan Banjar semasa pemerintahan

---

<sup>1</sup> Kasuma juga memaparkan lebih lanjut, bahwa mengenai hubungan dengan Kerajaan Gowa dimana akibat hubungan perdagangan dan usaha-usaha ekonomi dan politik Kerajaan Tanah Bumbu baik dengan Kerajaan Banjar sendiri, maupun dengan kerajaan di Sulawesi dan kerajaan lainnya sangat baik. Ratu Intan sendiri akhirnya kawin dengan saudagar Raja Gowa, yang dalam kalangan Kerajaan Tanah Bumbu dikenal dalam panggilan bahasa Bugis "*Petta Melemepe Gemmana*" (Raja yang panjang rambutnya). Setelah perkawinan Ratu Intan I mengalihkan kekuasaan kepada suami beliau, yang diangkat menjadi Raja Tanah Bumbu dan bergelar Sultan Sepuh. Sangat disayangkan Kasuma tidak menyebutkan mengutip darimana sumber asal-usul tersebut diperoleh, apakah dari sumber Barat ataupun cerita lisan, seandainya dari hasil wawancara jelaskan saja secara terbuka.

Sultan Tamjidilah. Sultan Tamjidilah menyambut baik maksud wakil-wakil kepala suku tersebut dan menunjuk puterinya, Ratu Intan sebagai raja. Ratu Intan bersama rombongan menuju daerah Kotabaru bersama rombongan untuk menjadi kepala pemerintahan. Oleh Ratu Intan dipilih daerah sungai Bumbu di muara sungai Cengal, kerajaan itu kemudian bernama Tanah Bumbu".<sup>1</sup>

Dari kutipan di atas ada beberapa pertanyaan yang muncul, *pertama* tentang orang Dayak mereka berasal dari Tamiyang Layang dari rumpun etnik Dayak manakah? Karena demikian banyaknya sebaran Orang Dayak di Pulau Kalimantan. *Kedua*, dari mana istilah kaum Lanun tersebut diambil, sehingga mereka dikenal sebagai kaum bajak laut? *Ketiga*, Apakah sudah benar atau agak tepat akan peristiwa permohonan minta bantuan dari orang Dayak yang berasal dari Pamukan tersebut kepada Sultan yang berkuasa saat itu adalah Sultan Tamdjidillah? *Kelima*, benarkah Sultan Tamjidillah memiliki anak bernama Ratu Intan sebagai Raja Tanah Bumbu? Tentunya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari paparan versi di atas, tetapi apabila kutipan tersebut hanyalah sebuah tradisi lisan (*oral tradition*) yang diangkat dari cerita rakyat di Kotabaru sekitarnya tentunya lebih bisa dipahami, namun apabila untuk mengarah kepada fakta historis harus didukung dengan berbagai sumber tertulis yang relevan, bisa dipertanggungjawabkan hasil seleksi melalui kritik dokumen dalam historiografi.

Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang orang Dayak mereka berasal dari Tamiyang Layang yang menempati wilayah Pamukan, pertanyaannya dari rumpun etnik Dayak mana? Karena demikian banyaknya sebaran tempat tinggal orang Dayak yang menempati wilayah terpisah di Pulau Kalimantan. Kapan keberadaan nama Dayak sebagai penduduk di pulau Kalimantan dan siapa yang memberi nama demikian? Dalam disertasi mendiang Noerid Haloe Radam mengenai "*Religi Orang Bukit*" (1987) dikutipkan pengelompokan suku dan orang-orang yang mendiami pulau Kalimantan pada disertasi H.J. Malinnkrodt yang berjudul "*Het Adatrecht van*

---

<sup>1</sup> Hakim dkk tidak menyebutkan darimana sumber alkisah tersebut, apakah dari catatan orang Barat dalam sebuah arsip ataukah hanya dari sumber lisan (*oral tradition*) berupa cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun.

*Borneo*" (1928). H.J. Malinnkrodt (1928) membagi rumpun suku penduduk asli Kalimantan kedalam enam kelompok besar yakni (1) rumpun suku Kenyah-Kayan-Bahau yang mendiami daerah aliran Sungai Mahakam; (2) Ot-Danum dan (3) Iban, yang mendiami kawasan Pegunungan Kapuas, (4) Murud di Sabah, (5) Klemantan dan (6) Punan. Kelompok rumpun suku tersebut di atas oleh August Hardeland sebagai penduduk asli yang dinamakan Dayak (Worterbuch, 1859). Dengan demikian nama Dayak adalah pemberian nama oleh orang Barat bernama August Hardeland untuk penduduk asli yang mendiami wilayah pulau Kalimantan wilayah Republik Indonesia saat ini.

Kemungkinan nama Dayak ini pertamakali diberikan oleh August Hardeland. Dayak atau Daya (ejaan lama: *Dajak* atau *Dyak*) adalah kumpulan berbagai sub-etnis *Austronesia* yang dianggap sebagai penduduk asli yang mendiami Pulau Kalimantan (Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan "perhuluan" atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya.

Suku bangsa Dayak terdiri atas enam rumpun yakni rumpun *Klemantan* alias Kalimantan, rumpun *Iban*, rumpun *Apokayan* yaitu Dayak Kayan, *Kenyah* dan *Bahau*, rumpun *Murut*, rumpun *Ot Danum-Ngaju* dan rumpun *Punan*. Masyarakat Dayak Barito beragama Islam yang dikenali sebagai suku *Bakumpai* di sungai Barito tempo dulu. Secara Etimologi, Istilah "Dayak" paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Ini terutama berlaku di Malaysia, karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang Muslim namun tetap termasuk kategori Dayak walaupun beberapa diantaranya disebut dengan Suku Banjar dan Suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini.

Etnis Dayak Kalimantan menurut pakar antropologi J.U. Lontaan (1975) dalam bukunya 'Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat', terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan. Sedikit berbeda pendapat dengan pakar antropologi di atas, Tjilik Riwut (1954) membagi wilayah persebaran dan daerah tempat tinggal suku Dayak

Kelompok Besar jika pendapat pakar antropologi hanya 6 (enam) Kelompok Besar suku Dayak, maka Tjilik Riwut membagi ada 7 (tujuh) Kelompok Besar suku Dayak diantaranya : (1) Dayak Ngaju; (a. Dayak Ngaju terdapat 53 suku kecil-kecil, b. Dayak Maanyan dengan 8 suku kecil-kecil, c. Dayak Dusun dengan 8 suku kecil-kecil dan d. Dayak Lawangan dengan 21 suku kecil-kecil). (2) Dayak Apu Kayan; (a. Dayak Kenya dengan 24 suku kecil-kecil, b. Dayak Kayan dengan 10 suku kecil-kecil, dan c. Dayak Bahau dengan 26 suku kecil-kecil). (3) Dayak Heban (Iban) atau Dayak Laut terdiri dari 11 suku kecil-kecil. (4) Dayak Klemantan atau Dayak Darat; terdiri dari (a. Dayak Klemantan dengan 47 suku kecil-kecil dan b. Dayak Katungau dengan 40 suku kecil-kecil). (5) Dayak Murut; (a. Dayak Murut dengan 28 suku kecil-kecil, b. Dayak Idaan dengan 6 suku kecil-kecil dan c. Dayak Tidong dengan 10 suku kecil-kecil). (6) Dayak Punan; (a. Dayak Punan dengan 24 suku kecil-kecil, b. Dayak Basap dengan 20 suku kecil-kecil, c. Dayak Ot dengan 3 suku kecil-kecil dan d. Dayak Bukat dengan 3 suku kecil-kecil). dan (7) Dayak Ot-Danum dengan 61 suku kecil-kecil.

Ada juga yang mengemukakan, bahwa kata Dayak berasal dari kata *daya* dari bahasa *Kenyah*, yang berarti hulu (sungai) atau pedalaman. Ada yang menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata *aja*, sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Sebagian pendapat lain juga ada yang yakin bahwa kata itu "mungkin" berasal dari sebuah istilah dari bahasa Jawa Tengah yang berarti *perilaku yang tak sesuai* atau *yang tak pada tempatnya*. Istilah untuk suku penduduk asli dekat Sambas dan Pontianak adalah *Daya*, di Banjarmasin disebut *Biaju* (*bi= dari; aju= hulu*). Kalau dilihat hampir tidak ada orang *Ngaju* atau *Biaju* yang tinggal dekat dengan Banjarmasin, kecuali sub etnik bagian Ngaju terkecil, misalnya orang *Berangas* di sekitar pulau Alalak atau orang *Bakumpai* di alur sungai Barito di Muara Bahan (Marabahan-Barito Kuala) saja.

Ada asumsi yang mengemukakan bahwa di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826, untuk menggantikan istilah *Biaju Besar* (daerah sungai *Kahayan*) dan *Biaju Kecil* (daerah sungai *Kapuas Murung*) yang masing-masing diganti

menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil.<sup>3</sup> Sejak itu istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngaju-Ot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah "Dayak" dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya Non-Muslim atau non-Melayu. Pada akhir abad ke-19 istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan.

Di daerah Kalimantan Selatan Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan (*Wadian*) orang Dayak maanyan di daerah Warukin Kabupaten Tabalong itu sering disebut *Nansarunai Usak Jawa*, yakni kerajaan *Nansarunai* dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Kerajaan *Marajampahit* (kemungkinan Kerajaan Majapahit), yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpecah, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1520-an) berakibat Orang Maanyan menyebar keberbagai penjuru Kalimantan Selatan dan Tengah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Istilah "Dayak" juga muncul dalam kontrak perjanjian sebelumnya pada tahun 1802 antara Kerajaan Banjar dibawah Sultan Sulaiman (1801-1825) dengan Gubernur Komisaris Francois van Boekholtz di Betavia dalam *VOC Hoge Regering Inv nr. 3614, Acte van Renovatie en Vernieuwing der Contacten tergeleegenheid van de Installatie van den Sultan Soliman Amoh Tamit Alalah op den 19 en April anno 1802*. Misalnya pada pasal (perkara ketiga, halaman 4), intinya diantaranya menyebutkan untuk keselamatan perkebunan lada dan pedagang agar Sultan turut berjanji kepada rakyat senang bekerja diperkebunan lada dengan damai, tentang orang Dayak yang suka memotong leher orang (Mengayau) Sultan diminta tegas menegakkan aturan (hukum). Pada pasal (perkara, keempat halaman 5), juga perjanjian kontrak kedua belah pihak ini (Sultan Solaeman dengan VOC Belanda) disebutkan intinya, agar Sultan dengan tegas menangkap orang Dayak yang terbukti memotong leher orang, kemudian dikirimkan kepada kompeni dan dihukum setimpal dipotong kembali dimuka loji kompeni.

<sup>4</sup> Mengenai "Folklore (Legenda) Orang Maanyan Kontribusi Sejarah Lokal" (lihat Tulisan artikel Rusdi Effendi yang dipublikasikan dalam Kolom Opini SKH. Mata Benua, Rabu 18 April 2007, halaman 10). Intinya: Orang Maanyan memiliki legenda etnis atau Tradisi Lisan (*oral tradition*), bahwa tempat tinggal awal mereka di daerah Kayutangi dipimpin oleh Datu Borongan, diduga daerah awal ini adalah asli tempat mereka bermukim di daerah Kayutangi sejak kedatangannya dari Yunnan Cina Selatan. Karena terdesak mereka pindah ke Gunung Madu maanyan (sekitar Gunung Keramaian Tanah laut), karena terdesak para pendatang



Sebagian besar suku Dayak di wilayah Selatan dan Timur Kalimantan yang memeluk agama Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan Suku Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah Tabalong, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Labuan Amas dan Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba sebagai masyarakat pedalaman. Salah seorang pimpinan cikal bakal orang Banjar dikemudian hari, yakni di zaman Hinduisme dengan kerajaan Negara Dipa disekitar Amuntai (sekarang Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang terkenal adalah tokoh Lambung Mangkurat menurut orang Dayak adalah tokoh Lambung Mangkurat adalah seorang Dayak (Ma'anyan atau Ot Danum). Namun harus diteliti kebenarannya. Kalau melihat asal-usul sebaran etnik Dayak diduga sementara orang Dayak yang tinggal di Kotabaru, Cengal, Cantung, Sampanahan dan lainnya yang kemudian disebut Dayak Samihim adalah berasal dari Tamiyang Layang tentunya diduga dari sub rumpun orang Dayak Maanyan atau kemungkinan pecahan Dayak Maanyan lainnya ketika dihancurkan oleh pemekaran wilayah Negara Dipa saat Mangkubumi Lambung

---

mereka pindah lagi agak kepedalaman yakni didaerah Batang Helang Ranu Tane Leo Langit (sekitar danau Panggang Hulu Sungai Utara-Amuntai sekarang). Penerus Datu Borongan membangun kerajaan besar dengan membangun Balai (rumah Adat Besar) Balai Jatuh Kabilawang Natat Panyawungan", karena Danau Panggang sering Banjir, mereka pindah lagi ke hulunya dan mendirikan kerajaan Nan-Sarunai di sekitar Banua lawas (ditepian sungai Tabalong). Orang Maanyan saat ini tersebar selain tinggal di desa Warukin Buruhayang dan Warukin Bajud Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan juga tersebar dalam Paju Epat atau Paju Sepuluh ada yang tinggal di Tamiyang Layang (Barito Timur) dan Buntok (Barito Selatan) dan sebagian Muara Teweh (Barito Utara) Kalimantan Tengah, termasuk orang Dayak Samihim di Sampanahan juga diperkirakan termasuk rumpun Maanyan. Dugaan lain tentang bercerai berainya sub suku Maanyan adalah disebabkan penaklukan daerah-daerah sekitar saat pembentukan kerajaan Negara Dipa, karena dalam nyanyian atau wadian Orang Maanyan, kerajaan mereka yang dikenal dengan Nan Sarunai dirusak oleh pasukan Jawa (disebut dari Marajampahit atau Majapahit), selain itu kemungkinan besar Empu Jatmika memerintahkan hulu balangnya Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa dengan pasukannya menaklukan orang Maanyan yang mau menjadi rakyat Kerajaan Negara Dipa dan sebagian kelompok Orang Maanyan terusir, serta melakukan pengusian ke berbagai penjuru di Kalimantan, termasuk orang Dayak Samihim di Pamukan yang menetap dikawasan Pamukan, Cengal, Manunggul, Bangkalan dan sekitarnya yang nantinya menjadi bagian wilayah Kerajaan Tanah Bumbu.

Mangkurat mengutus Temungung Tatah Jiwa dan Arya Megatsari menghancurkan Kerajaan Nan Sarunai.

Saat ini Orang Dayak Maanyan atau disebut juga dengan Orang Dayak Maanyan (*'olon maanyan'*) merupakan salah satu sub suku dari kelompok besar Suku Dayak Ngaju; dari 53 suku kecil-kecil yang termasuk bagian Suku Ngaju, Dayak Maanyan memiliki 8 suku kecil-kecil yang tersebar di Pulau Kalimantan. Pemukiman mereka sekarang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian berada di Provinsi Kalimantan Tengah bagian timur, yakni di daerah Barito Timur dan Barito Selatan, serta di daerah Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Dayak Maanyan memiliki 8 (delapan) suku-suku kecil yang berbeda nama, diantaranya adalah: (1) Maanyan Paku; (2) Maanyan Patai; (3) Maanyan Paju Epat; (4) Maanyan Dayu; (5) Maanyan Paju Sapuluh; (6) Maanyan Jangkung; (7) Maanyan Banua Lima dan (8) Maanyan Warukin. Jika ditambahkan dengan nama rumpun Maanyan lainnya dengan nama Dayak Samihim yang bermukim di wilayah Pra Kerajaan Tanah Bumbu, maka kemungkinan pecahan rumpun Orang Maanyan menjadi 9 (Sembilan) selain nama-nama suku kecil di atas.

Untuk menjawab pertanyaan *Kedua*, dari mana istilah kaum Lanun tersebut diambil, sehingga mereka dikenal sebagai kaum bajak laut? Istilah "kaum Lanun" dari beberapa sumber adalah kelompok etnis tempat tinggal mereka adalah di antara pulau-pulau yang tersebar di Filipina bagian Selatan, atau berdekatan dengan pulau Minadano. Versi lain menyebut kelompok Lanun atau dikenal dengan Bajak laut tersebut terdapat dalam beberapa uraian tentang perompak laut di daerah Laut Sulu di kawasan Filipina Selatan yang berdekatan dengan Kawasan Brunei atau Kalimantan Bagian Utara yang masuk Malaysia (Sabah). Umumnya kelompok Lanun tersebut bekerja sebagai perompak atau lebih dikenal dengan "Bajak Laut" yang membajak kapal-kapal dagang, menyita barang-barang rampasan apa saja yang ada di dalam muatan kapal dan bahkan membunuh orang-orang yang tidak mematuhi keinginan mereka ketika saat perompakan dilakukan. Kadangkala para perompak juga menculik awak kapal dan penumpangnya. Dalam cara kerjanya kelompok bajak laut ini atau kaum Lanun tersebut umumnya memiliki kapal layar besar yang

bertenaga angin atau tergantung arah angin dan didalam kapal biasanya disediakan perahu-perahu kecil ada yang pakai layar dan tidak.

Istilah Lanun terdapat dalam buku yang ditulis Guru Besar Emiritus bidang kajian Sejarah Asia Tenggara D.G.E Hall (1988) dari *London University*. Memang umumnya sebutan Lanun ditujukan kepada kelompok bersenjata tradisional dan perahu yang kehidupan dan perekonomian mereka membajak kapal-kapal dagang di samudera ataupun muara sungai yang mengarah ke laut, namun tidak menutup kemungkinan bisa melakukan perampokan di daratan, apabila jalur dagang sepi.<sup>5</sup> Kemudian kaum Lanun seperti dijelaskan Hall (1988) di atas apakah mungkin melakukan perompakan di daerah Pamukan? Mungkin saja terjadi karena antara laut Sulu di Filipina selatan

---

<sup>5</sup> Dalam uraiannya Hall (1988) menjelaskan bahwa baik Inggris maupun Belanda dalam upaya mengurangi kekacauan perdagangan di Nusantara dan antarkontental di Asia Tenggara sejak abad ke-16, ke-17, hingga abad ke-18 sama-sama memiliki kepentingan untuk bertindak menekan "Perompak". Dalam abad ke-18 orang-orang Bugis, yang telah mencapai kenaikan besar di negara-negara Melayu dan digambarkan oleh Francis Light sebagai saudagar-saudagar yang terbaik diantara pulau-pulau di sebelah timur juga merupakan teror Nusantara seperti perompak. Karena kelakuan Belanda-lah terhadap Makasar tahun 1667 dan hancurnya Maluku yang memulai mereka dalam karirnya sebagai perompak dan ini dimasa yang telah lalu; karena dalam abad ke-19 tidak lagi terdengar mereka sebagai perompak. Hall (1988) lebih lanjut menjelaskan, bahkan yang lebih luar biasa adalah orang-orang *Moro* atau *Illano* dari kepulauan Sulu. Dalam abad ke-19 mereka dianggap sebagai *Balanini* dari kelompok pulau yang menjadi rumah mereka. Seperti orang-orang "*Lanun*" atau "*Perompak Daerah Teluk*" yang berasal dari teluk besar bernama Lanun di Selatan Pulau Mindanao, mereka menggunakan perahu-perahu berbobot 40 sampai 100 ton dengan anak buah 40 sampai 60 orang. Nyatanya ini adalah kapal perang pribumi yang teratur di pakai di Asia Tenggara. Orang *Lanun* dan *Balanini* memberangkatkan angkatan laut beberpa ratus setiap tahun. Jung yang kecil dan perahu dagang pribumi merupakan kebanggaan mereka. Mereka kadang-kadang menyerang kapal-kapal Eropa bahkan jung-jung Cina yang lebih besar. Sulu merupakan markas dagang mereka. Serangan mereka yang buruk untuk mendapatkan budak dan barang rampasan adalah Philipina; dan meskipun Spanyol mengirimkan banyak ekspedisi untuk menghukum yang menghancurkan benteng-benteng mereka dan membakar desanya, mereka tidak pernah efektif menguasai mereka. Dalam abad ke-19 di pantai barat laut Kalimantan merupakan salah satu pusat perompak yang sangat terkenal. Perompakan yang sesungguhnya dilakukan oleh orang Dayak Laut. Orang Lanun tetap dipekerjakan dan diarahkan oleh pemimpin-pemimpin Melayu dan orang-orang Arab perseorangan yang telah bertempat tinggal diantara mereka. Mereka dan orang-orang Lanun yang bentengnya ada di Brunei Utara, adalah perompak-perompak yang terutama diarah oleh usaha-usaha Raja James Brooke

(Mindanao) harus turun ke Kalimantan Timur, ke Kutai, Paser dan terus ke tenggara Kalimantan.

Namun tidak cukup rasional jika orang Lanun merompak kearah daratan di Pamukan, orang Lanun lebih senang merompak di lautan, tetapi tidak mustahil itu bisa saja terjadi. Untuk memberikan gambaran lain tentang Kaum Lanun bisa juga tersamarkan dengan Orang Bajau yang juga sudah ada di pesisir Kalimantan Tenggara yang sebagai besar mereka adalah perompak juga, seperti digambarkan Saleh (1958) dari arsip Nasional (TBG, h.224) menyebutkan, bahwa "Penduduk asli kerajaan Banjar ini yang tinggal dipantai ialah suku Bajau (Badjau). Diabad ke-17 hidup mereka dari pembajakan di laut dan baru di abad ke-19 setelah Belanda dapat mengatasi pembajakan laut mereka menjadi nelayan". Dari kutipan di atas bisa saja terjadi, bahwa yang disebut Lanun (perompak, pembajak di laut) yang terbiasa dipakai dalam aktivitas dunia pelayaran samudera saat itu, apabila ada perompakan maka selalu disebut dilakukan oleh orang atau kaum Lanun, namun sekalipun orang Bajau dan bahkan kemungkinan orang Banjar yang melakukan perompakan juga disebut Lanun, padahal kedua asal-usul etnis berbeda, walaupun sama-sama dari Filipina bagian Selatan, tetapi umumnya kelompok perompak disebut kaum Lanun sekalipun merompak di laut lainnya.

Suku Bajau adalah suku bangsa yang tanah asalnya kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajau menggunakan bahasa Sama-Bajau. Suku Bajau sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Suku Bajau juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku ada di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara (Filipina) sejak pada zaman prasejarah. Suku Bajau yang Muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau sekitarnya, lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar. Wilayah yang terdapat suku Bajau di Nusantara sesuai persebarannya terdapat di wilayah antara lain : (1) Kalimantan Timur (Berau, Bontang, dan lain-lain) (2) Kalimantan Selatan (Kota Baru) disebut orang Bajau Rampa Kapis, (3) Sulawesi Selatan (Selayar), (4)

Sulawesi Tenggara, (5) Nusa Tenggara Barat (6) Nusa Tenggara Timur (Pulau Komodo), (7) Sapeken, Sumenep dan tempat lainnya.

Istilah Lanun, menurut Lopian (2009) dalam kamus bahasa Melayu dan Indonesia dianggap nama lain untuk menyebut 'bajak laut' atau 'perompak laut' tanpa menghubungkan lagi dengan suku bangsa Lanun (Ilanun atau Iranun), menurut ucapan setempat diberbagai daerah di kepulauan Filipina).<sup>6</sup> Ada dua faktor utama yang dianggap sebagai pendorong orang Ilanun meninggalkan daerah Lanao dan berpindah ke daerah pantai, terutama ke daerah teluk yang sekarang bernama Teluk Illana, Pertama, letusan gunung api yang menghancurkan kampung serta lahan pertanian mereka. Peristiwa ini terjadi kira-kira 1765, sebagaimana dilaporkan oleh Forrest yang mengunjungi daerah Mangindano sepuluh tahun kemudian.<sup>7</sup> Kedua; stratifikasi sosial yang khas pada suku bangs Maranao. Aristokrasi yang menduduki lapisan atas memperkokoh kedudukannya dengan sistem perkawinan yang mencari pasangan diluar sukunya sendiri. Apapun istilah yang digunakan untuk merujuk nama 'Bajak Laut' seperti pengertian *pirata* yang dikenal dalam kebudayaan Barat (bahasa Inggris dan Perancis: *pirate*, bahasa Spanyol, Portugis dan Italia: *pirata*, Bahasa Belanda: *piraat* atau *zeerover*, bahasa Jerman: *pirate* atau *Seerauber*. Dalam bahasa Indonesia selain kata 'perompak' atau perompak laut' dan 'bajak laut', dikenal pula kata 'Lanun' (seringkali disebut pula 'perompak Lanun'. Kata ini berasal dari nama Ilanun atau Iranun, yaitu nama salah satu suku bangsa di Filipina Selatan.

---

<sup>6</sup> Lebih lanjut Lopian menambahkan bahwa kata 'Lanun' dalam bentuk majemuk 'perompak lanun' berfungsi menegaskan kata pertama (seperti dalam bentuk majemuk penuh-sesak, gelap-gulita, dan sebagainya). Bukan berarti 'perompak yang terdiri dari orang Lanun yang sebenarnya merupakan arti semula. Lanun, Ilanun atau Iranun (dalam kepustakaan Barat sering di eja pula sebagai Illanun, Illano, Illanaon dan lain-lain). Berasal dari bahasa Mangindano *I-lanao-en*, yang berarti 'orang dari danau' yaitu Lanao yang terletak di tengah Pulau Mindanao. Bagi orang Spanyol istilah 'Illano' atau 'Illanun' dipakai untuk menyebut baik orang Maranao dan Ilanun maupun orang Mangindao, Tausug dan Samal (kedua kelompok terakhir inimendiami kepulauan Sulu); Sedangkan Orang Tausug sendiri mengelompokkan semua Orang Mangidano, Marano dan Ilanun sabagi 'Iranun'.

<sup>7</sup> Dilaporkan oleh Forrets, bahwa Daerah Ilannon sangat menderita sehingga banyak pemukiman berpindah ke Sulu. Malah juga ke Tampasuk dan Tawan di pantai timur Kalimantan, mencahari tempat yang lebih baik, tempat yang mereka diami sampai sekarang.

Terlepas dai sangkaan siapa sebenarnya yang menghancurkan tatan kehidupan damai bagai Orang Dayak Samihim di daerah Cengal, Cantung, Sampanahan sekitarnya di kawasan Tenggara Kalimantan yang disebut tindakan brutal kaum Lanun, dimana semula Saleh menduga akibat tindakan Orang Bajau, namun jika dilihat route perjalanan bajak laut dari Filipina, maka ada kemungkinan langsung dilakukan oleh bajak laut atau Lanun dari Filipina Selatan.



**Gambar 1. Peta Perjalanan Bajak Laut dari Filipina Selatan**

(Sumber: Andrian B. Lopian, 2009)

## 2. Laporan Ekspedisi Schwaner

Satu hal yang cukup membantu tentang titik terang dari kegelapan sejarah Tanah Bumbu adalah dengan terdapatnya sumber laporan ekspedisi dari Schwaner (1853), walaupun harus diseleksi dengan ketat laporan arsip Belanda tersebut, sehingga tidak dianggap mendiskreditkan etnis, agama dan hal-hal bersifat menyinggung perasaan kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Namun harus diakui arsip laporan dari Schwaner sangat menolong membuka tabir yang simpang siur mengenai silsilah Raja-raja dan pembagian wilayah kerajaan di Tanah Bumbu yang sudah dituliskan dalam laporan ekspedisinya di bagian Tenggara Kalimantan, hampir delapan tahun lamanya Schwaner keluar masuk daerah pedalaman, pesisir pantai dan gunung-gunung, sungai-sungai di daerah Tanah Bumbu sekitarnya. Ekspedisi-ekspedisi sebelumnya juga dilakukan untuk memetakan dan upaya melihat secara langsung keadaan di Borneo (Kalimantan) seperti pernyataan Thomas Lindblad tentang ekspedisi pertengahan Abad 17 disebutkan:

“Beberapa telaahan sumber Barat dari: Endert 1927, Molengraaf 1900; Nieuwenhuis, 1900; Posewitz 1889, Sellato 1987, Tichelman 1949-81-100, 112-129; Tillema 1938 yang disarikan Lindblad disimpulkan, bahwa Pada pertengahan abad itu (abad ke-17), jelas bahwa informasi yang tersedia

tentang pulau-pulau dengan sumber daya alam yang kaya berkurang dengan menyakitkan. Dalam rentang waktu singkat, puluhan ekspedisi eksplorasi dilakukan di Banjarmasin, Schwaner melakukan perjalanan ke Pontianak di Kalimantan Barat. H. von Gaffron mencari batubara dan emas di tenggara, dan H. von Dewall datang ke pantai timur. Perahu kano para ahli geologi dan geografi dengan banyak pembantu mereka. Menjadi pemandangan yang lazim di sungai dan aliran sungai pedalaman." Selain ekspedisi di atas yang dilakukannya juga laporan ekspedisi Hindia Belanda dari Schwaner di Wilayah Timur dan Tenggara Kalimantan Sejak 1846-1853: Sumber arsip dari tulisan penelitian Schwaner berjudul "*Historische, Geographische en Statistieke Aantekeningen Betreffende Tanah Boembo*".

Berhubung situasi politik di Kalimantan, yaitu adanya kekuasaan Inggris di Kalimantan Utara, maka Pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Kalimantan secara politik. Ekspedisi-ekspedisi dikirimkan ke daerah pedalaman untuk menentukan batas kawasan yang menjadi hak Pemerintah Hindia Belanda, terutama batas di sebelah utara dan timur. Pada bulan Juni 1846, suatu ekspedisi di bawah pimpinan Letnan II O. von Kessel yang menjelajahi pedalaman Kalimantan dari arah Pontianak, pada bulan September 1846 ekspedisi Schwaner menjelajah dari arah timur. Disamping ekspedisi-ekspedisi tersebut, pos-pos pemerintah juga ditambah, terutama di afdeeling Pantai Kalimantan Selatan dan Pantai Kalimantan Timur. Ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu tentunya selain pemetaan dan laporan perjalanan juga mempunyai tujuan utama seperti dinyatakan oleh Ahyat (2012) diantaranya yaitu:

"Pada bulan April 1846, diangkat seorang penguasa sipil di Kutai, dan pada bulan Februari 1847 di Kalimantan Selatan juga ditempatkan seorang penguasa sipil yang berkedudukan di Kotawaringin. Selain itu, pada bulan April 1847, semua pembesar afdeeling Kalimantan diperintahkan agar menemui raja-raja dan kepala-kepala suku untuk mengingatkan atau memperbaharui isi perjanjian-perjanjian yang pernah mereka buat dengan Pemerintah Hindia Belanda dan membuat perjanjian-perjanjian dengan mereka yang belum pernah mengadakan hubungan dengan Pemerintah Hindia Belanda."



Sekarang mulai mulai terjawab dari paparan di atas siapa Schwaner? Sampai tahun 1839 M, pengaruh kekuasaan di Pulau Borneo ini terbagi dalam 3 (tiga) kawasan atas kekuasaan yaitu Sebelah barat daya di kuasai oleh Kesultanan Brunei, sebelah timur laut dikuasai oleh Kesultanan Sulu dan sebelah tengah dan selatan dikuasai Pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar wilayahnya diperolehnya dari Sultan Banjar, Tamdjidullah pada Perjanjian 20 Oktober 1756. Sebagian besar wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kemudian direbut oleh James Brooke yang menjadi Raja di Sarawak. Aktivitas Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Borneo ini jauh lebih agresif daripada masa VOC yang lalu karena saat itu Belanda bersaing keras dengan Inggris dalam merebut pengaruh di Pulau Borneo ini apalagi setelah diangkatnya James Brooke (orang Inggris) yang menjadi Raja Putih di Sarawak pada tahun 1841.

Berhubung situasi politik di Kalimantan, yaitu adanya kekuasaan Inggris di Kalimantan Utara, maka Pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Kalimantan secara politik. Ekspedisi- ekspedisi dikirimkan ke daerah pedalaman untuk menentukan batas kawasan yang menjadi hak Pemerintah Hindia Belanda, terutama batas di sebelah utara dan timur. Pada bulan Juni 1846, suatu ekspedisi di bawah pimpinan Letnan II O. von Kessel dan bulan September 1846 ekspedisi Schwaner menjelajah dari arah timur, termasuk penelitiannya di wilayah kerajaan Tanah Bumbu. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Schwaner adalah seorang Doktor yang dikirim pemerintah Hindia Belanda menjelajah dan mencatat semua yang ia temukan dalam ekspedisinya di wilayah Timur Kalimantan, termasuk di kawasan Kalimantan Tenggara, khususnya menyangkut Kerajaan Tanah Bumbu dan sekitarnya. Ekspedisi Schwaner dimulai bulan September 1846, jika dihitung dengan catatannya yang ada pada ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) yang sudah diterjemahkan dari bahasa Belanda Tahun 1853, maka Schwaner berada di kawasan Timur Kalimantan termasuk kawasan Kalimantan Tenggara selama hampir 8 (delapan) tahun lamanya, dari laporan penelitian ekspedisi Schwaner yang dibuat dalam tahun 1853.

Jika disimak dan diberikan interpretasi dari Arsip laporan penelitian dari perjalanan Schwaner sangat menarik dimana ia sebagai peneliti dalam ekspedisinya di wilayah Tanah Bumbu banyak melakukan perjalanan dari pesisir pantai, menelusuri sungai, teluk, ia masuk ke pedalaman wilayah Tanah Bumbu, cukup lama waktu sekitar 8 (delapan) tahun, Schwaner bertualang, melihat kenyataan kawasan Tanah Bumbu, Kusan, Pagatan dan Pulau Laut yang punya Potensi, aktivitas dan perdagangan, atau merekam jejak sejarah dari yang bersifat takhyul, dongengan, legenda, hingga intrik-intrik politik dinasti Pangeran Dipati Toha dan keturunannya di Tanah Bumbu, termasuk kekuasaan Kusan dan Pagatan. Laporan ini sangat berguna untuk membantu merekonstruksi Sejarah Tanah Bumbu khususnya dalam pertengahan Abad ke-19. Arsip laporan penelitian dan petualangan yang dilakukan Schwaner dalam ekspedisinya diterjemahkan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), dimana laporan aslinya berada pada arsip Nasional Negeri Belanda, sehingga untuk mempermudah memahami redaksi isi laporan tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kemudian diketik ulang dan dibagi berdasarkan alenia dan halaman, dengan tujuan agar mudah dipahami pengertiannya dalam memberikan kritik, interpretasi untuk historigrafi atau penulisan sejarah lokal.

Dalam menelaah siapa kelompok penyerang orang Dayak Samihim (rumpun Maanyan) di kawasan Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan, dan sekitarnya. Schwaner (1853) menuliskan dalam laporannya antara lain:

“Tidak ada tulisan yang bisa memberikan penjelasan mengenai sejarah tanah Bumbu dulu. Dulu (Tanah Bumbu merupakan nama kolektif dari suatu daerah yang terdiri atas kerajaan Cantung di Buntar Laut, Bangkalan, Sampanahan, Manunggul dan Cengal). Tanah Bumbu (1853) terletak di pantai timur Borneo yang terbentang dari Tanjung Aru pada  $2^{\circ}7'$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}48'$  Bujur Timur sampai sungai Serongga yang terletak pada  $3^{\circ}2'$  Lintang Selatan dan dibatasi disebelah utara oleh Pasir, di sebelah Timur oleh Selat Makasar, di sebelah Selatan oleh Kusan dan disebelah Barat oleh Banjarmasin, yang dipisahkan oleh pegunungan Beratus atau Meratus. Untuk selanjutnya bisa dilihat gambaran topografi hasil tulisan Schwaner. Berikut ini ada peristiwa singkat yang sangat penting dalam sejarah Tanah Bumbu, yang dicatat setelah banyak

pembicaraan yang melibatkan raja dan para tetua setempat. (Kisah-kisah tertua beredar sampai penduduk asli di tempat itu yang disebut Suku Dayak menjadi kaya dan kuat, serta hidup di kampung-kampung yang dikelilingi oleh kebun-kebun yang luas dan indah, dibawah raja-raja yang berasal dari mereka dan keturunannya. Tempat kedudukan dan pusat dari semua peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah Pamukan, yang terletak di muara sungai Cengal (Pamukan muncul pada peta Borneo karya Valentijn, tidak bisa dipastikan sisa-sisanya masih ada). Sejarah kerajaan itu tercampur dengan kisah berbagai peristiwa alam gaib, tindakan legendaris dan adat barbar dan berakhir dengan kehancuran daerah itu akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu, menyerang penduduk dan menghancurkan Pamukan (Kapan peristiwa itu tidak bisa dipastikan. Orang hanya tahu bahwa orang asing datang dari Jawa dengan perahu. Mungkin ini bisa dilacak kembali dari pengukuhan kekuasaan raja-raja Giri di Pasir, (tetapi angka tahunnya tidak bisa ditemukan). Ribuan orang terbunuh dan sisanya dipukul mundur sampai pegunungan tinggi, dimana karena tekanan sampai sekarang mereka menjadi ketakutan dan bersembunyi, tinggal dalam beberapa keluarga dan tersebar di kampung-kampung kecil”.

Dari keterangan laporan tersebut, menunjukkan bahwa kehancuran tatanan kerajaan orang Dayak di Pamukan tidak bisa dipastikan angka tahunnya, Orang hanya tahu bahwa yang melakukan adalah orang asing dari Jawa dengan perahu. Kalau demikian cerita penduduk setempat menyatakan dengan sebutan “Orang asing dari Jawa yang juga menggunakan perahu”, tentunya tetua masyarakat Dayak atau orang Banjar yang menuturkan ceritera tersebut kepada Schwaner saat itu masih mengingat penyerbu tersebut menggunakan bahasa Jawa. Peristiwa tersebut jelas tidak menutup kemungkinan penyerbu Pamukan bisa jadi orang Jawa, bukan dari kaum Lanun ataupun Bajau yang berdialek Bahasa Filipina, tetapi bisa juga diduga pasukan perompak atau bajak laut yang naik ke darat dari pasukan Lanun atau orang Bajau dimana sebagian anggota perompak atau bajak laut mungkin saja berasal dari orang Jawa yang bekerja dalam sindikat perompak, yang jelas bahwa kehancuran dan banyak korban dari orang Dayak Samihim atau orang Dusun yang tewas di Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan sekitarnya.

Schwaner juga memberi dugaan peristiwa penghancuran Pamukan oleh serbuan dari Pasir yang saat itu dalam proses Islamisasi kerajaan Paser. Mungkin ini bisa dilacak kembali dari pengukuhan kekuasaan raja-raja Giri di Pasir, (tetapi angka tahunnya tidak bisa ditentukan). Schwaner hanya menduga atau membuat prakiraan yang secara tidak langsung mengisyaratkan, bahwa proses Islamisasi masyarakat Paser di Tanah Pasir cenderung meluaskan ekspansi ke wilayah sekitarnya berdasarkan pemikiran Barat. Untuk itu kita lihat dulu prosesi pernikahan Puteri Petung sebagai bagian Kerajaan Sadurangas (cikal bakal berdirinya Kerajaan Pasir) yang berhubungan dengan kedatangan penyiara agama Islam dari Giri atas nama Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Karena melalui perkawinan inilah telah berdiri tatanan Kerajaan Pasir di Tanah Paser. Mengenai asal-usul penyiara Agama Islam di Pasir yang semula bernama Kerajaan Sadurangas. Assegaf (tanpa tahun) memberikan ilustrasi, bahwa:

“Pada tahun 923 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1521 Miladiyah di teluk Adang berlabuh 5 buah kapal layar yang memakai bendera yang berlambangkan bulan sabit bintang berwarna putih bertuliskan huruf Arab berwarna kuning emas dengan kalimat *“Laa Illaha Ilallah Muhammada Rasulallah”*. Kelima buah kapal tersebut adalah kapal ekspedisi Penyiara Agama Islam dari Giri, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Mansyur Indra Jaya.... Kapal ekspedisi Penyiara Agama Islam yang sedang berlabuh itu didekati berpuluh-puluh perahu layar kecil, tetapi tidak berani menyerang kapal ekspedisi tersebut, karena telah dilengkapi dengan persenjataan dan meriam. Perahu-perahu layar kecil tersebut adalah perahu bajak laut yang bersarang di teluk Adang. Baru beberapa hari mendekatlah sebuah perahu yang memuat tiga orang tanpa senjata, salah seorang yang tertua dari usianya bernama La Malluluang. Dari keterangan ketiga orang bajak laut tadi yang menjelaskan bahwa di daratan ada kerajaan yang bernama Sadurangas, rombongan Abu Mansyur Indra Jaya memasuki Sungai Kendillo dengan lima buah kapalnya, kemudian merapat di sekitar sungai Suatang dan mendirikan markas di daerah batu cadas, sejak itulah pendakwaan dan penyiara agama Islam dilakukan di kerajaan Sadurangas. Salah satu kebijakan seorang ulama peserta ekspedisi tersebut yang bernama khatib Dayan, yang telah beberapa kali mengunjungi ibu Negeri

Sadurangas di Libur Dinding dan bertemu langsung dengan Puteri di Dalam Petung (Ratu Sadurangas), ialah mengawinkan Abu Mansyur Indra Jaya dengan Puteri Di dalam Petung. Sebelum akad nikah Puteri Didalam Petung telah mengucapkan Dua Kalimah Syahadat didepan Khatib Dayyan yang disaksikan pula Ariya Manau alias Kaka Ukop dan Garuntung Hanau alias Temenggung Tau Keu”.

Ilustrasi Assegaf di atas menggambarkan bahwa kedatangan kapal yang membawa rombongan penyiar atau pendakwah agama Islam dari Giri yang berasal dari kesultanan Demak tersebut dibawah pimpinan Abu Mansyur Indra Jaya, yang berhasil meng-Islamkan Puteri Petung (sebagai Raja Kerajaan Sadurangas) dengan melakukan perkawinan. Namun yang perlu dicatat, bahwa saat rombongan pembawa syiar Islam tersebut kedatangan mereka sudah dihadang perahu-perahu layar kecil yang banyak jumlahnya, mereka adalah kelompok perompak atau bajak laut di Teluk Adang, hal ini menunjukkan, bahwa di daerah perairan manapun di kawasan Kalimantan Timur dan Tenggara tidak luput dari bajak laut, jika demikian di awal abad ke-16 dikawasan ini terdapat kelompok perompak atau yang umumnya disebut kaum Lanun.

Pada kenyataannya nama Abu Mansyur Indra Jaya dapat ditelusuri dari situs Ki Mantri Giri dan peninggalan batu-batu yang diangkat dari kapal dari Gresik, Giri. Selain itu sangat jelas dari nama “Abu Mansu” atau Abu Mansyuh” ataupun “Abu Mansyur”, adalah nama yang sangat kuat pengaruh Islamnya. Orang-orang Arab umumnya menggunakan sebutan nama depannya dengan “Abu”. Abu Mansyur Indra Jaya dinyatakan berasal dari Giri. Namun hal yang prinsip tidak terdengar kabar sebelumnya bahwa 5 (lima) buah kapal yang berbendera Syiar Islam yang datang dari Jawa-Giri tersebut pernah singgah di Muara sungai Cengal dan menghancurkan Kerajaan orang Dayak di Pamukan.

Jika memang ada berita penyerangan terhadap Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan sekitarnya oleh orang Jawa dari Giri yang dipimpin oleh Abu Mansyur Indra Jaya sebelum kapal mereka merapat di Sungai Kendilo menuju bagian daratan masuk ke ibukota negeri kerajaan Sadurangas di Libur Dinding, tentunya akan ada berita dan jadi pertimbangan penolakan dari Ratu Petung sebagai Raja Sadurangas, tetapi kenyataannya tidak demikian, dan

bahkan dalam perkawinan Puteri Petung dan Abu Mansyur Indra Jaya tahun 1530 Masehi berjalan dengan tata cara Islam dengan penuh kedamaian. Tahun 1530 Masehi tersebut dipakai sebagai patokan agama Islam masuk diwilayah Kerajaan Pasir, atau empat tahun lebih kebelakang jika dibandingkan dengan Banjarmasin 24 September 1526, hal yang dianggap sama adalah Penghulu yang meng-Islamkan Puteri Petung didepan calon suaminya Abu Mansyur Indra Jaya adalah sama dengan di Banjarmasin yakni Khatib Dayan. (Khatib Dayan Sesudah meng-Islam Sultan Suriansyah di Banjarmasin terus ke Pasir).

Kemudian setelah perkawinan Puteri Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya, dimana sebuah perkawinan antara Pembesar lokal Puteri Petung yang berasal dari Pasir dengan Abu Mansyur Indra Jaya dari Jawa. Percampuran adat-istiadat inilah yang membuat nuansa baru dalam silsilah Raja-Raja Paser di Kerajaan Pasir. Setelah mengawini Puteri Petung bertambah gelar Pangeran, kemudian setelah memiliki anak ditambahkan lagi oleh Puteri Petung menambah gelarnya dengan Kesuma, sehingga lengkaplah gelarnya dengan Pangeran Indra Jaya Kesuma.

Ketika Aji Mas Pati Indra sebagai pengganti ayahnya Abu Mansyur Indra Jaya sebagai Raja Paser yang memerintah antara tahun 1568-1607, maka kerajaan Pasir sepenuhnya bernuansa Islam, artinya agama Islam sepenuhnya telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Paser. Saat itulah telah datang di kerajaan Pasir ulama besar dari Mampawa-Pontianak Kalimantan Barat yang bernama Sayyid Ahmad Khairuddin (tahun 1015 Hijriyah atau 1607 Masehi). Ulama ini akhirnya mengawini Aji Meter, anak dari Puteri Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya atau saudara dari Raja Aji Mas Pati Indra. Masa pemerintahan Aji Mas Pati Indra 1568-1607 juga tidak ada sumber yang menyatakan penyerangan terhadap Pamukan, khususnya terhadap orang Dayak yang kemudian dikenal dengan Dayak Samihim. Demikian juga dengan penggantinya yakni Raja Aji Mas Anom Indra (1607-1644) tidak ada berita bahwa keturunan Abu Mansyur Indra Jaya melakukan gerakan untuk menyerang Pamukan. Jika serangan terhadap orang Dayak Samihim di Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan sekitarnya diduga dari Paser, maka harus dilihat dulu keadaan Kerajaan Paser dalam rentang tahun yang hampir bersamaan, dimana Kerajaan Paser dibawah pemerintahan Aji Anom Singa Maulana bin Aji Mas

Anom Indra (1644-1667) sedang sibuk membangun istana megah, istana ini sebagaimana penelitian Hariyadi et.al (2005) dibuat 300 depa dan tinggi 2 depa dari batu gunung dan batu sungai. Istana ini disebut Libur Dinding. Bahkan dalam pembangunan istana tersebut terjadi penyerangan perampok dari Tanah Dusun yang akhirnya menguasai istana kerajaan dan menewaskan Sultan Aji Anom Singa Maulana.

Dengan demikian dugaan pendapat terhadap Kerajaan Paser yang melakukan penyerangan terhadap orang Dayak Samihim (rumpun Maanyan) di Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan sekitarnya kurang beralasan, sebab Keadaan di istana Paser sendiri masih tidak stabil setelah mendapat serangan Orang Tanah Dusun yang berhasil merebut kekuasaan. Ketiga anak Sultan Aji Anom Singa Maulana yakni: Aji Perdana, Aji Duwo dan Aji Geger sempat diselamatkan oleh Imam Mempawa Sayyid Abdurrahman mengungsi ke Lempesu di hilir sungai Kendilo. Keadaan Paser saat itu dalam keadaan kacau, berbeda dengan kerajaan Banjarmasin saat Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) dimana perekonomian kerajaan Banjar lagi mapan dengan hasil perdagangan, melalui Sultan inilah daerah Pamukan mulai diamankan dari para pendatang dengan mengutus adiknya Pangeran Dipati Tuha (anak Sultan Saidullah) yang perlu dianalisis lagi lebih lanjut dari dugaan kebenarannya.

### **3. Pelurusan Sejarah: Sultan Banjar Pengutus Raja Perintis Tanah Bumbu**

Istilah "Pelurusan Sejarah" sangat populer sejak berhentinya rezim Orde Baru, ada juga beberapa orang yang kurang setuju dengan istilah tersebut. Apakah sejarah bisa diluruskan, demikian pertanyaan mereka. Perdebatan ini tentu bersumber dari perbedaan pengertian tentang sejarah. Demikian pernyataan Adam (2009:2-3). Lebih lanjut mengenai "Pelurusan Sejarah" dijelaskan mengenai bagian mana dari sisi sejarah yang harus diluruskan menurut Adam dijelaskan bahwa:

Kalau sejarah itu dibagi dua, yaitu sejarah sebagai peristiwa yang dialami (*histoire-realite*) dan sejarah sebagaimana diceritakan (*histoire-recid*) maka pelurusan sejarah menyangkut aspek yang kedua tadi, yaitu sejarah sebagaimana yang diceritakan. Mengenai aspek pertama, sejarah sebagai peristiwa, memang ada perdebatan apakah sejarah itu bersifat linier atau spiral, melingkar dan seterusnya. Pendapat sebagian orang

bahwa sejarah itu tidak dapat diluruskan tentu berkenaan yang kategori yang pertama tadi. Ada pula yang mengusulkan istilah lain untuk pengertian serupa, seperti penjernihan sejarah atau penulisan kembali sejarah. Istilah "penulisan kembali sejarah" jelas sangat umum.

Istilah penjernihan sejarah memang pernah dikemukakan sebelumnya. Tetapi istilah "pelurusan sejarah" itu yang lebih sering terdengar di masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh E. H. Carr, sejarah itu merupakan dialektika antara masa lampau dengan masa sekarang, dialog yang tidak berkesudahan antara sejarawan dengan sumber yang dimilikinya. Jadi bila ditemukan data baru, sejarah itu bisa mengalami revisi. Walaupun tidak ada sumber baru, bila sejarawan mempergunakan metode atau pendekatan yang baru atau melihat suatu peristiwa dari sudut pandang baru, sejarah juga mengalami penulisan ulang. Jadi memang wajar bila sejarah itu mengalami revisi dan penulisan ulang dari waktu ke waktu".

Dikesempatan ini penulis berupaya mencoba meluruskan cerita sejarah yang bersifat lisan yang ada dalam merekonstruksi kerajaan Tanah Bumbu, Raja-Raja Tanah Bumbu dan urutan kronologi babakan sejarahnya yang umumnya karena belum ada sumber tertulis saat ceritera tersebut dituangkan secara lisan atau tulisan dengan minimnya data dan dokumen sejarah. Hakekat peristiwa sejarah sebagaimana diceritakan (*histoire-recid*) maka pelurusan sejarah menyangkut aspek yang kedua setelah beberapa data baru ditemukan, hal ini penting dengan tujuan ceritera sejarah Tanah Bumbu di masa akan datang selain bersumber dari sejarah yang diceritakan harus dikomparatifkan dengan sumber tertulis lainnya seperti arsip dan dokumen yang bersifat tertulis (*heuristic*) diseleksi dengan kritik intern dan kritik ekstern, dilakukan interpretasi dan dituturkan ceritera secara historiografi yang meminimalkan unsur subyektifitas.

Berkaitan dengan pertanyaan *Ketiga* tersebut di atas versi berdirinya kerajaan Tanah Bumbu dari Kusuma (1981) dan dalam "Sejarah Kotabaru" oleh Abdurrahman Hakim dkk. (2009), Apakah sudah benar peristiwa permohonan bantuan orang Dayak dari Pamukan tersebut kepada sultan Banjar yang berkuasa saat itu adalah Sultan Tamdjidilah?, karena jika ditunjukkan nama Tamdjidilah tersebut untuk masa pemerintahan Sultan Tamjid Ollah



(menggunakan abjad "O" Tamjid Ollah) hanya dikenal sebagai Sultan Tamjid Ollah atau Sultan Tamjid ia pernah memerintah (3 November 1857–25 Juni 1859) dengan dukungan Belanda sebagai Raja Banjar. Hal ini berkaitan erat dengan peristiwa sebelumnya tanggal 9 Oktober 1856 pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi, Tamjid Olla menjabat Raja Muda, setelah Sultan Adam Al-Wasik Billah wafat 1 November 1857, dimana Sultan Adam telah memerintah antara tahun 1826-1857. Barulah Tamjid Olla atau Tamjid diangkat secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Sultan, dalam perjanjian dengan Belanda 9 Oktober 1856 disebut nama Tamdjidullah, tidak dikenal dalam perjanjian tersebut nama Tamdjidillah.

Peristiwa pengangkatan Sultan Tamdjid Ollah atau Sultan Tamjid tersebut yang menyulut Pecahnya Perang Banjar (1859-1865) dengan perlawanan yang dilakukan Pangeran Antasari beserta seluruh bangsawan Kesultanan Banjar dan melibatkan rakyat Banjar, walaupun akibatnya Kesultanan Banjar telah dihapuskan tahun 1860 oleh Belanda, namun penghormatan rakyat Banjar dalam bentuk pertempuran terbuka maupun tersembunyi tidak pernah padam melawan pihak Belanda.

Apabila Sultan Tamjid Ollah yang dimaksudkan tersebut nama Sultan ini, maka sangatlah mustahil, karena masa pemerintahannya adalah masa yang penuh dengan kemelut akhir suramnya kerajaan Banjar, sebab pemerintah kolonial Belanda sendiri dengan kemelut Perang Banjar mengakibatkan ketiadaan kepercayaan dan kebencian rakyat kepada Tamjid Ollah atau Sultan Tamjid yang menyukarkan Belanda memadamkan perlawanan rakyat Banjar, maka atas nasihat kolonel Andresen, pada 25 Juni 1859 Tamjid Ollah atau Sultan Tamdjit turun tahta dan dibuang ke Bogor. Kebijakan manifest F.N. Nieuwenhuyzen tanggal 5 Februari 1860 menghapuskan kerajaan Banjarmasin seluruhnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ditambahkan pada buku M. Idwar Saleh (1958) dalam Proklamasi yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dibagian akhir disebutkan *Bandjarmasin, den 11 Juni 1860. De resident van Surakarta, gouvernements kommisaris in de Z en O afedeling v. Borneo*. F.N Nieuwenhuyzen. Disalin dari van Rees: *De Bandjermasinche Krijg-1865*, 234-235-236- 232 dan 238, halaman 111-113. Pada Buku M. Idwar Saleh, *Lukisan Perang Banjar 1859-1865* (1985), ditetapkan tanggal 10 Juni 1860 Belanda memproklamkan dihapuskannya kerajaan Banjar dan dijadikannya wilayah jajahan Belanda. Dalam buku ini juga nama Tamjid Ollah disebut beliau Pangeran Tamjid lahir tahun 1817 hasil perkawinan Sultan Muda

Kemudian dalam versi Sejarah Kotabaru yang secara khusus mengulas kerajaan Tanah Bumbu dan Sampanahan menyatakan, bahwa Ratu Intan anak dari Sultan Tamjidillah, apabila Ratu Intan sebagai puteri yang ditunjuk ayahnya Sultan Tamjidillah sebagai Raja di Tanah Bumbu, setelah menuju Kotabaru dan oleh Ratu Intan dipilih sungai Bumbu di muara sungai Cengal, kerajaan itu kemudian bernama kerajaan Tanah Bumbu, hal ini sangat tidak rasional, mengingat masa pemerintahan Tamjid Ollah atau Sultan Tamdjit sangat singkat dan saat itu pecah Perang Banjar (1859-1865), kemudian ayahnya sendiri harus di buang ke Bogor setelah diturunkan tahta oleh pemerintah Belanda, Mungkinkah kerajaan Tanah Bumbu berdiri saat kehancuran kerajaan Banjar? Cerita tersebut sulit dibuktikan, bahkan tidak bisa dibuktikan secara tertulis dari berbagai sumber, arsip dan dokumen dalam historiografi sejarah Banjar manapun.

Apabila Sultan yang dimaksudkan yang berkaitan dengan pertanyaan *Ketiga* tersebut di atas versi berdirinya kerajaan Tanah Bumbu dari versi Kusuma (1981); dan dalam buku "Sejarah Kotabaru" (2009), yang mempunyai kemiripan argumentasi dimaksudkan permohonan orang Dayak Samihim (rumpun Maanyan) di Cengal, Cantung, Sampanahan, Pamukan sekitarnya untuk merajakan atau meminta adanya raja yang memerintah dilingkungan orang Dayak ataupun orang Dayak Samihim keturunan Tamiyang Layang yang meminta bantuan pengamanan atas serangan dan pendatang asing ke wilayah mereka dan ditujukan kepada nama Sultan Tamjidillah, hal ini memang sulit ditemukan apabila memakai kronologi Raja-raja Banjarmasin versi Saleh (1958) yang diadopsi beliau dari J.C. Noorlander (1935), sebuah disertasi Leiden tahun 1935 dan title bukunya "*Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helf van de 18 de eeuw*".

Dalam kronologi Raja-raja Banjar versi Saleh hanya dikenal dua nama Tamdjid, pertama Sultan Tamdjidullah (mengggunakan abjad "u" pecah, huruf: u-kecil) pernah memerintah Kesultanan Banjar antara tahun 1734-1759. Kemudian nama Tamdjid yang kedua adalah Sultan Tamdjit Ollah

---

Abdurakhman dengan selir keturunan Cina Kampung Pecinan bernama Nyai Aminah, karena isteri pertama Sultan Muda Abdurakhman bernama Ratu Antasari (adik Pangeran Antasari) meninggal dunia, tidak ada keturunan anak dari perkawinan pertamanya.

(menggunakan abjad "O" bulat, huruf: O besar) merupakan Sultan Banjar terakhir yang memerintah antara tahun 1857-1859. Jika nama Sultan Tamjidillah yang dimaksudkan merujuk kepada nama Sultan Tamjidullah (menggunakan abjad "u"-Tamjidullah), memang benar ada, ia adalah Sultan Tamjidullah yang pernah memerintah Kesultanan Banjar (antara tahun 1734-1759), ia memerintah sesudah pemerintahan Sultan Kuning atau Sultan Hamidullah (1700-1734).

Keterkecualian apabila kronologis tersebut mengacu pada sumber dari versi Eisenberger (1936) dalam silsilahnya memang menyusun Silsilah Raj-Raja Banjar dan ditemukan menuliskan nama Sultan Tamdjid Illah (1745-1778), dan Sultan Tamdjid Illah (1857-1859). Untuk nama Sultan Tamdjid Illah yang pertama terdapat angka tahun yang lebih mundur dari kronologi yang dipakai dalam Silsilah Raja-Raja Banjar dari versi Saleh (1958) dan dalam Buletin Kayuh Baimbai (1991), maupun dan versi kronologi Sejarah Banjar (Kalimantan Selatan) Tahun 2010. Namun satu hal yang disayangkan tidak ada satu kutipan sumber apapun baik versi Kasuma (1981), maupun dalam "Sejarah Kotabaru" versi Hakim et.al (2009) yang menjadi rujukan tentang Kerajaan Tanah Bumbu dan Sampanahan pada halaman 67-68 (dua halaman). Silakan diperiksa apabila pernyataan ini keliru. Kemudian tentang Kerajaan Pagatan berjumlah sekitar empat halaman, perlu di cek ulang kebenaran tata cara penulisan dan substansinya, (lihat halaman 62-66).

Kemudian sangat tidak masuk akal jika Sultan Tamjidullah yang dimaksud sebagai ayahnya Ratu Intan Raja Tanah Bumbu yang masa pemerintahannya antara 1734-1759 jika dihubungkan dengan peristiwa permohonan bantuan orang Dayak Samihim kepada Sultan karena penghancuran kerajaan mereka diperkirakan terjadi sebelum atau saat tahun 1660-an. Artinya antara peristiwa atau kejadian di pertengahan abad ke-17 dihubungkan dengan Sultan Tamjidullah (1734-1759) yang memerintah dipertengahan abad ke-18, atau lebih dramatis lagi jika memakai patokan yang menerima permohonan orang Dayak di pamukan tersebut adalah Sultan Tamjit Ollah ia memerintah (3 November 1857-25 Juni 1859) kemudian diturunkan tahtanya oleh pemerintah Hindia Belanda dan sekaligus dianggap Sultan Banjar terakhir. jelas rentang waktunya sangat jauh dan tidak rasional. Memang perlu

diteliti dalam membaca dan menulis sejarah Banjar, apabila membaca saja sepotong-sepotong tentang sejarah kesultanan Banjar tanpa pernah melihat kronologi silsilah Raja-raja Banjar, maka akan tergelincir kepada penanggalan yang kurang pas dan tidak umum dipakai sejarawan lokal Banjar. Apabila membawa kronologi yang dirujuk adalah dari Eisenberger (1936), maka penanggalan Raja-raja Banjar akan mundur kebelakang, disamping itu memang ditemukan nama Sultan Tamdjid Illah (1745-1778), dan nama yang sama lagi Tamdjid Illah (1857-1859) dari versi Eisenberger dalam Cronologi dari DR Eisenberger, *Kroniek der Zuider en Ooster afdeling van Boerneo, (Banjarmasin, drujuk, Liem Hwat Sing, 1936)*.

Apabila memakai kronologi Raja-raja Banjar versi Eisenberger (1936), maka sangat wajar akan muncul dua nama Tamdjid Illah yang sering ditulis dengan Tamdjidillah I dan Tamdjidillah II, namun keduanya tidak pernah ada sumber Barat atau sumber tertulis lainnya yang menerangkan bahwa Sultan Tamdjidillah versi J. Eisenberger (1936) punya keturunan atau anak yang bernama Ratu Intan yang nantinya sangat dikenal di Kerajaan Tanah Bumbu, khususnya di wilayah Cantung dan Batulicin. Nama Tamdjidullah lebih rasional, karena dalam perjanjian dengan pihak Kompeni Belanda dapat dibuktikan, nama jelas, cap dan tanda tangannya.

Penutur cerita lisan atau informan sejarah Banjar kemudian memvonis nama Sultan pada kerajaan Banjar tersebut ada dua nama Tamjidillah yang sama yakni Tamjidillah I (Pertama) memerintah 1745-1778 dan Tamjidillah II (Kedua) yang memerintah 1857-1859 adalah sultan yang terakhir dari kerajaan Banjar yang diturunkan tahtanya oleh pemerintah Kolonial Belanda dan dibuang ke Bogor, tanggal 10 Juni 1860 Belanda memproklamkan dihapuskannya kerajaan Banjar dan dijadikannya wilayah jajahan Belanda. Kedua nama Tamdjidillah tersebut nyata dituliskan dalam kronologi Eisenberger (1936) yang selalu bertentangan angka tahunnya dengan penulis sejarah Barat sendiri seperti A.A. Cense (1928) maupun J.C. Noorlander (1935), demikian juga dengan sejarawan lokal Banjar berlatar belakang akademisi seperti Saleh (1958), maupun Usman (1989).

Pada Silsilah Raja-Raja Banjar versi Saleh dalam chronologi Raja-raja Banjar tersebut dalam ejaan tahun 1958 menyebutkan "Tamdjidullah (1734-

1759). Demikian juga dalam Periodisasi versi Saleh Chronologi Raja-raja Banjarmasin dari 1438 hingga 1859 dalam Buletin Kayuh Baimbai (MSI Cabang Banjar) No.1 Tahun I Februari, 1991. Halaman 46-50 menyebutkan dengan nama Sultan Tamdjidullah. Begitu juga dalam situs Sejarah Banjar (Kalimantan Selatan) menyebutkan dengan tegas bahwa tahun 1734-1759 adalah masa pemerintahan Sultan Tamjidullah. Begitu juga dengan Fong (2013), dimana sumber penulisannya penuh arsip dokumen Barat tertulis, di dalam uraiannya selalu menyebut nama "Sultan Tamjeed Dulla", tidak dikenal nama Tamdjidillah atau Tamdjid Illah.

Sebagai bukti otentik tertulis untuk memperkuat bahwa nama Tamdjidillah (menggunakan abjad "i" sesudah nama depan Tamdjid, baru kemudian "Illah"), tidak pernah ditemukan dalam perjanjian atau kontrak-kontrak yang sezaman antara sultan Banjar dengan pihak kompeni Belanda, misalnya kontrak atau perjanjian 16 Juni 1747 yang ditulis dalam huruf Arab Melayu (Orang Banjar menyebutnya huruf "Arab Gundul") yang telah diterjemahkan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) tahun 2003, misalnya tentang sultan Banjar yang membuat perjanjian dengan pihak Belanda pada Halaman I disebutkan antara lain:

*"Gurnadur Jenderal Gustaaff Willem Baron van Imhoff dan segala Raad van India telah memandang dan melihat serta membaca wa'ad perjanjian perniagaan shahabat bersahabat yang karib daripada kedua pihak yaitu Sultan Tamdjidullah dan Pangeran Ratu Anom bersama-sama dengan orang-orang besar di negeri Banjarmasin maka yaitu kompeni telah menyurati membaharui pula seperti nama Operkoopman Stefen Markus van der Heyden serta dua Koopman yaitu Jan van Schetelen dan Daniel van der Burgh ialah yang telah disuruh Membawa titah perintah pada wa'ad perjanjian yang mutaqaddimin."*

Pada perjanjian dagang tersebut jelas tertulis nama Sultan Tamdjidullah (1734-1759), merupakan Sultan Banjar yang ke-13 yang telah melakukan permbaharuan perjanjian atau membuat kontrak dengan pihak kompeni Belanda tanggal 16 Juni 1747. Dalam redaksi di atas yang tertuang sama sekali tidak ada disebutkan nama Sultan Tamdjidillah atau nama Sultan Tamdjidillah I dan II, artinya nama Sultan Tamdjidillah tidak dikenal oleh pihak kompeni

Belanda yang dikenal adalah nama Sultan Tamdjidullah yang didampingi Pangeran Ratu Anom saat memperbaharui kontrak dagang saat itu.

Kemudian nama Tamdjit Ollah yang juga dalam versi tulisan Saleh (1985) sering disebut pangeran Tamdjit atau Putera Mahkota Tamjid, tidak lain adalah sebutan untuk Sultan Tamjidullah atau Tamdjit Ollah (1857-1859). Setelah Pangeran Tamjid diangkat menjadi Putera Mahkota tanggal 10 Juni 1852 atas bantuan Belanda, ia tidak berani tinggal di Martapura, sebab pengangkatannya sebagai Putera Mahkota dianggap melanggar adat-istiadat bertentangan dengan adat Kesultanan Banjar, semestinya Pangeran Hidayatullah (Hidayat Allah) yang menjadi putera mahkota, guna mendamaikan keadaan tersebut dan atas usul Sultan Adam Al-Wasik Billah (1825-1857), akhirnya Belanda menyetujui mengangkat Pangeran Hidayatullah menjadi Mangkubumi pada tanggal 9 Oktober 1856. Dalam perjanjian pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi tersebut yang dibuat dengan Van de Graaf Resident Banjarmasin dengan persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia 9 Oktober 1856, ditanda tangani pada akhir surat perjanjian tersebut sebelah kiri dengan cap Sultan Moeda Tamdjidullah, ditengahnya Lak, di kiri cap *Zuid en Oos Kust van Borneo je maintiendrai* dan dibawahnya Cap Pangeran Hidayattullah.

Berdasarkan surat-surat perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1747 disebutkan nama Sultan Tamdjidullah (1734-1759) sama sekali dalam kontrak perjanjian dagang tersebut tidak ada redaksi atas nama Sultan Tamdjidillah, kemudian menjelang akhir kekuasaan Sultan Adam Al-Wasik Billah (1825-1857) atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda mengangkat Mangkubumi Pangeran Hidayatullah (Hidayat Allah) juga ditanda tangani, cap dan nama Sultan Moeda Tamdjidullah (1857-1859). Dengan demikian diantara babakan kronologi angka tahun dalam Silsilah Raja-raja Banjar ada dua nama sultan Banjar yang bernama Sultan Tamdjidullah memerintah pada pertengahan abad ke-18 dan Sultan Moeda Tamdjidullah atau Tamdjit Ollah, kemudian ia dinobatkan oleh Belanda sebagai sultan Banjar dengan gelar Sultan Tamdjidullah (Tamdjit Ollah) tanggal 3 November 1857 hingga tanggal 25 Juni 1859 tahtanya diturunkan pemerintah kolonial Belanda, karena mulai Pecahnya Perang Banjar 1859-1865.

Saleh (1958) merasionalkan sumber kronologi Raja-Raja Banjarmasin dari DR. J.C. Noorlander dari sebuah disertasi Leiden, tahun 1935 dengan judul bukunya "*Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft van de 18 de eeuw*". Pendapat DR. Eisenberger (1936), bahwa Banjarmasin didirikan dalam tahun 1595 juga tidak dapat diterima. Demikian juga dengan Usman (1989) dalam buku beliau "*Urang Banjar Dalam Sejarah*", terbitan Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, (lihat halaman 52-53), dari 3 (tiga) sanggahan beliau terhadap pendapat Eisenberger (1936) tersebut salah satunya penolakan Usman (1989), apabila kerajaan Banjar berdiri atas bantuan Kesultanan Demak tahun 1595, maka kesultanan Demak sudah tidak ada lagi karena mengalami kehancuran hancur tahun 1588.

Kembali kita kepada pelurusan penulisan sejarah yang mengesampingkan cerita lisan (*oral tradition*) yang kental dengan emosional, karena jika masih ada sumber sejarah tertulis atau arsip yang didapat untuk merekonstruksi Sejarah Tanah Bumbu, mengapa tidak kita berdayakan untuk "meluruskan sejarah", menuju penulisan sejarah yang bersifat obyektifitas, walaupun berusaha untuk meminimalitaskan unsur subyektifitas dan emosional dalam penulisan sejarah. Mengingat dalam sejarah sebagai yang diceriterakan (*histoire-recid*), apabila ditemukan data, dokumen ataupun arsip baru yang dianggap sah dalam pengumpulan data secara *heuristik* dan bisa dilakukan kritik ekstern dan kritik intern, kemudian bisa dilakukan interpretasi (penafsiran) ulang, maka revisi penulisan sejarah bisa dilakukan kembali berdasarkan tatanan penulisan sejarah (*Historiografi*).

Untuk melihat proses awal terbentuknya Kerajaan Tanah Bumbu pasca kehancuran tatanan kekuasaan kerajaan orang Dayak Samihim menurut sumber tertulis yang pernah dituliskan Schwaner (1853) memaparkan dalam laporannya berkenaan dengan rintisan tugas saat pemerintahan Sultan Saidullah (Said A-Ullah) kepada putranya Pangeran Toha, dimana dalam laporannya dipaparkan antara lain: "Petualangan yang berulang kali dilakukan oleh orang-orang Melayu ini bukannya tanpa pengaruh pada para penguasa dan penduduk di kerajaan Banjarmasin yang saat itu tumbuh, yang mencoba melalui peperangan dan melalui penyebaran agama Islam menyebar dan menambah kekuasaannya. Jelas bahwa dengan tidak bertahannya suku Dayak,

perpindahan penduduk dari Banjarmasin melalui Gunung Meratus ke Tanah Bumbu dimulai. Kaum kolonis ini dengan keterkaitan pada tanah air mereka melalui perjalanan yang jauh tetap memiliki hubungan erat dan dengan ketundukan pada raja-raja mereka sendiri tinggal di Tanah Bumbu dan menaklukan kerajaan-kerajaan kecil yang sering terdiri atas hanya beberapa negori tanpa batas-batas tertentu dibawah kekuasaan para Panembahan Banjarmasin. Tetapi kondisi ini tampaknya telah bertahan selama bertahun-tahun dengan kekuasaan Banjarmasin yang hampir tidak terasa dengan tindakan hukum atau pemungutan pajak, sampai akhirnya di bawah kekuasaan Sultan Said Ullah, salah seorang putranya bernama Pangeran Dipati Toeha yang mungkin diundang oleh orang-orang Banjar yang tinggal di Tanah Bumbu berangkat ke tempat ini dan disana ia menikah dengan seorang wanita bangsawan (*putri ini bernama Nyai Galih*).” Dia menyatukan semua raja-raja kecil yang berada disana dibawah kekuasaannya, Tinggal di Sampanahan di tepi aliran sebuah sungai kecil yang disebut Sungai Bumbu dan memberikan nama sungai itu pada kerajaan yang berhasil disatukan olehnya. Yang mencakup semua tanah yang terbentang dari Tanjung Silat di Selatan sampai Tanjung Aru di utara (disebut aru, ru atau pohon cemara, yang tumbuh disudut itu dan dilihat dari laut, memberikan pemandangan indah dengan nama *rugged point* muncul di peta laut Inggris), yang dipisahkan oleh gunung Beratus dari Banjarmasin di sebelah barat dan di sebelah timur dibatasi oleh selat Makasar, termasuk Pulau Laut.

Dari sumber dokumen di atas Schwaner memberitakan dalam laporannya, bahwa penyebutan orang-orang Banjar tersebut lebih cenderung disebutkan sebagai bagian dari orang Melayu (lihat bagaian terdahulu mengenai riwayat awal pendirian kerajaan Banjarmasin yang disukung oleh Patih Masih, ia adalah kepala kampung orang Melayu) dan Patih Masih mengadakan pertemuan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, Patih Kuwin untuk merajakan Raden Samudera untuk jadi Raja terlepas dari Negara Daha dengan kemenangan tahun 1526 Masehi atas sukungan orang Melayu. Orang Barat kadang menilai penduduk dan warga Banjar itu sebagai bagian dari orang Melayu, (Orang Banjar merupakan campuran multi-etnis menjadi group dan menyebut identitasnya dengan '*Urang Banjar*').



Orang-orang Banjar yang pindah ke kawasan Pamukan ke wilayah tanah bekas pemukiman kerajaan orang Dayak Samihim seperti Sampanahan, Cengal, Manunggul, Bangkalaaan, Cantung, Batulicin, Buntar Laut dan sekitarnya (dikemudian hari bernama kerajaan Tanah Bumbu) dilakukan melalui jalan setapak melalui pegunungan Meratus dan menempati wilayah-wilayah bekas pemukiman orang-orang Dayak Samihim yang sudah mengungsi kearah pedalaman mempertahankan tradisi dan religi mereka, karena proses masuknya agama Islam tentunya sudah kental dengan orang Banjar yang juga dibawa dari kawasan Hulu Sungai (Banua Lima) pindah ke kawasan eks kerajaan orang Dayak di Pamukan dan sekitarnya.

Schwamer (1853) menyebutkan perpindahan itu dari Banjarmasin melalui jalan darat, tetapi dugaan tersebut belum dapat dipastikan, karena dugaan penulis yang pindah melalui jalan darat tersebut adalah umumnya orang-orang Banjar dari kawasan Hulu Sungai, khususnya di daerah Banua lima (Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kelua) daerah tersebut termasuk Kelua (berada di tepian aliran sungai Tabalong antara Tanjung dan Amuntai), dulunya saat Sultan Saidullah bertahta, daerah Kelua kemungkinan besar termasuk dijadikan daerah atau tanah apanage di Benua Lima saat itu penduduk hulu sungai mengubah nasibnya melalui jalan setapak melintasi kaki pegunungan Meratus pindah ke Cengal, cantung, Pamukan, Sampanahan dan sekitarnya terutama untuk berkebun lada dan mengubah nasib mereka untuk mencari mata pencaharian baru, wilayah ini kemudian hari dikenal bernama Kerajaan Tanah Bumbu. Selain jalan darat kemungkinan perpindahan orang Banjar ke daerah baru tersebut menggunakan transportasi perairan lebih memungkinkan, sebab masa itu jalur perairanlah yang menjadi jalur penting untuk transportasi melalui sungai-sungai dan jalur laut dipesisir pantai.

Satu redaksi alenia yang sangat penting dari catatan Schwamer (1853) di atas adalah menyatakan "sampai akhirnya di bawah kekuasaan Sultan Said Ullah, salah seorang putranya bernama Pangeran Dipati Toeha yang mungkin diundang oleh orang-orang Banjar yang tinggal di Tanah Bumbu berangkat ke tempat ini dan disana ia menikah dengan seorang wanita bangsawan (*putri ini bernama Nyai Galih*)". Berita tersebut mengingatkan pada kita bahwa Pangeran Toha Bin Sultan Saidullah Said Ullah atau Saidullah adalah putera bangsawan

kerajaan Banjar yang mulai pindah secara langsung ke daerah Pamukan sekitarnya tersebut dikarenakan tugas mengamankan wilayah tersebut dan untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari luar memasuki daerah tersebut. Namun Schwaner tidak menjelaskan kapan tanggal, bulan dan tahun kedatangan Pangeran Dipati Toeha kesana, demikian pula siapa Sultan Banjar yang mengutusnyanya?

Pada situs Wikipedia (2014) yang berikaitan dengan sejarah di Kabupaten Tanah Bumbu disebutkan bahwa:

“Antara tahun 1660-1700, Orang Pamukan atau Suku Dayak Samihim dahulu telah memiliki kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Pamukan yang telah dihancurkan oleh suatu serangan dari luar dengan bukti sisa-sisa pemukiman mereka terdapat di Tanjung Kersik Itam. Setelah kejadian tersebut, orang Pamukan atau Dayak Samihim meminta kepada Sultan Banjar untuk mendirikan pemerintahan (kerajaan) untuk mengamankan wilayah tersebut dan untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari luar memasuki daerah tersebut, maka Pangeran Dipati Tuha (Raden Basus) putera Sultan Saidullah ditunjuk sebagai raja membawahi wilayah antara Tanjung Silat sampai Tanjung Aru yang dinamakan Kerajaan Tanah Bumbu dengan pusat pemerintahan di sungai Bumbu termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Sampanahan”.<sup>9</sup>

Pendapat atau versi baru yang dikemukakan dari keluarga keturunan dalam silsilah Raja-Raja di Tanah Bumbu, khususnya pada Kerajaan Cantung juga dipaparkan Hendri Nindyanto (2014) bahwa pada zaman Sultan Banjar ke-6 yaitu Sultan Saidullah atau Raden Kasuma Alam yang bergelar Panembahan Batu, ketika itu banyak sekali huru hara atau perampokan yang terjadi di wilayah pesisir atau dinamakan Tanah Bumbu. Sultan Saidullah lalu mengutus anaknya Raden Basus atau di kenal sebagai Pangeran Dipati Tuha 2 sebagai Raja Tanah Bumbu I (1660-1700) untuk mengamankan wilayah tersebut.

---

<sup>9</sup> Kedua situs tersebut harus diperiksa lagi dengan teliti, karena situs Wikipedia selalu mencantumkan label “belum diperiksa. Namun masih dapat dipakai sebagai acuan perbandingan dengan buku-buku atau referensi yang terkait terbitan terdahulu secara selektif, mengingat apabila diteliti dengan seksama banyak kronologis masa pemerintahan Raja atau Sultan kerajaan Banjar yang disiiikan oleh penulis di situs tersebut bertentangan atau selisih dengan sumber buku yang telah ada sebelumnya.

Dari kutipan di atas menunjukkan, bahwa Sultan Saidullah yang mengutus anaknya Raden Basus (Pangeran Dipati Tuha) sebagai Raja Tanah Bumbu. Sebelum membuat kesimpulan interpretasi (penafsiran) yang terlalu dini, bahwa di masa pemerintahan Sultan Saidullah (1637-1642) sebagai Sultan Kerajaan Banjar ke-6 itulah ia yang mengutus anaknya Pangeran Dipati Tuha (Pangeran Dipati Toeha menurut versi Schwaner 1853), untuk itu mari kita lihat dulu gambaran masa pemerintahan Sultan Saidullah dimasa tersebut. Saleh (1958) dalam "Sedjarah Bandjarmasin" beliau pun sempat bimbang dalam melihat keadaan Kesultanan Banjar saat itu, sampai dalam buku tersebut menyatakan bahwa:

"Sebenarnya siapa-siapa yang berkuasa dalam kerajaan Banjarmasin disekitar tahun 1637-1642, ini agak kabur, bila dibandingkan dengan Cense: *Kroniek van Bandjermasin* p. 105. Menurut Cense, pembunuhan orang Belanda ini berlangsung ketika pemerintahan Sultan Said Allah. Ia memerintah 15 tahun dan ayahnya Sultan Inayat Allah memerintah 7 tahun lamanya. Selanjutnya Cense menyebutkan, bahwa menurut kronik, Sultan Said Allah mempunyai dua orang anak yaitu Raden Bagus dan Raden Basu yang belum dewasa ketika ia mati, sehingga tahun 1642 atau 1643, walinya, Dipati Halit atau Pangeran Tapesana yang amat berkuasa itu merebut tahta dan menggelari dirinya Sultan Rakyat Allah atau Pangeran Ratu, sebagaimana Dagh. 1663 menyebutnya. Cense menyatakan bahwa berita Dagh. 1637, 11 April itu, yang menyatakan bahwa "sultan menyerahkan pemerintahan kepada anak-anak dan ipar-iparnya, yaitu Raja Anom, Raja Paty Anom, Raja Antacosama, Raja Martasary" tak sesuai dengan berita kroniek, karena Said Allah hanya meninggalkan dua orang anak yang belum dewasa".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mengenai Peristiwa Tahun 1638 jelas masa pemerintah Sultan Saidullah, bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan peristiwa pada tahun 1637 opperkoopman W. Geleinszoon digantikan oleh opperkoopman Coenraet Craemer yang dengan tegas menuntut berlakunya kontrak 1635. Ketika Coenraet Craemer menolak permintaan Sultan untuk pengiriman lada ke Makasar pecahlah perasaan anti VOC pada tahun 1638, dengan pembunuhan, pembakaran loji dan penyitaan barang milik VOC di Banjarmasin dan Kotawaringin. Sebanyak 64 orang Belanda dan 21 prajurit Jepang dibunuh (kabar lain menyatakan korbannya 108 orang). Disamping kerugian kapal-kapal, alat senjata dan barang dagangan sebesar F.160.00.41, Enam orang Belanda di Martapura selamat karena mau di Islamkan. Peristiwa tersebut juga ditegaskan Thomas Lindblad (2012), bahwa tahun

Sejarawan lokal yang menulis buku "Sedjarah Bandjarmasin" ini sempat bingung karena kaburnya pemberitaan asing, khususnya sumber Belanda masa pemerintahan tahun 1637-1642, untunghlah tulisan A.A. Cense, *De Kroniek van Bandjermasin* (Zantpoort, 1928), sebuah disertasi Leiden mengenai sejarah kerajaan Banjarmasin, berdasarkan kroniek dan menelitinya, kemudian dengan berita-berita *Daghregister Batavia* untuk abad ke-17. Ketika Coenraet Craemer beraudiensi di Banjarmasin 11 April 1637 tidak terlihat Sultan Saidullah. Demikian pula ketika S. Barenz dan Pool tiba di Banjarmasin tahun 1635 – Dijk dalam "*Neerlands*" p. 38 menyebutkan mereka berunding dengan Raja Itam, Godja Babaouw dan Raja Dipaty Anom yang disebutkannya sebagai "*s koningszoon*" Idem p.48. Ketika W. Geleinsz jadi opperkoopman disana, Raja Muda Raja de Patty Anom-ipar Raja (Sultan Saidullah telah meminjam uang 2000 real dari orang Inggris dengan menjanjikan lada sebagai gantinya. Peran Sultan Saidullah tidak muncul).

Dari paparan tersebut di atas terdapat sebuah kejelasan, bahwa ketika naiknya tahta Sultan Said Allah atau Sultan Saidullah dalam tahun 1637 menggantikan ayahnya Sultan Inayat Allah atau Sultan Inayatullah atau Ratu Agung (1620-1637) yang hanya memerintah 7 (tujuh) tahun lamanya. Ketika Sultan Saidullah meninggal dunia anak-anaknya masih kecil. Dengan matinya Sultan Saidullah, Dipati Halit atau pangeran Tapesana menjadi wali anaknya. Boleh jadi Sultan Inayatullah masih hidup sebagai kakeknya, tetapi karena usianya sudah tua, ia tidak berdaya menghadapi intrik-intrik politik di keraton istana Sultan Saidullah yang dianggap boneka pemerintahan kesultanan Banjar, disamping anaknya Sultan Inayatullah bernama Pengeran Dipati Anom dari selir Ratu Ibu (diperisteri oleh Sultan Inayatullah sebagai selir dari wanita golongan Biaju (Ngaju) yang juga punya ambisi untuk merebut tahta jadi sultan, Pangeran Dipati Anom sebagai saingan Dipati Halit atau Pangeran Tapesana.

Anak-anak Saidullah yang menurut kroniek bernama Raden Bagus dan Raden Basu masih belum dewasa. Disamping itu kakeknya mantan sultan Inayatullah sudah tua yang tak berdaya dengan kelompok Pangeran Dipati Anom yang dapat dipengaruhinya, dengan berdalih sebagai wali pemeliharaan

---

1638 hampir seluruh staf VOC dari dua pos perdagangan lokal di Banjarmasin dan Kotawaringin tewas dalam penyerangan.

Raden Bagus dan Raden Basu terbukalah jalan usurpasi (Perampasan kekuasaan dari kata: *usurpation*) yang dicita-citakan. Sejak tahun 1642 atau 1643 oleh Dipati Halit atau Pangeran Tapesana mengangkat dirinya menjadi Sultan dengan gelar Sultan Rakyat Allah atau Pangeran Ratu sebagai Sultan Banjar yang ke-7 (memerintah antara tahun 1642-1660).

Sebagai tambahan, tentang masa pemerintahan Ratu Anom atau Sultan Saidullah (1637-1642), menurut pandangan Usman (1989) dijelaskan antara lain:

“Selama masa pemerintahannya dia sebetulnya menjadi raja boneka belaka, sebab wewenang kekuasaan politik Negara dan pemerintahan dipegang oleh pamannya Pangeran Di Darat, sebagai orang yang paling berkuasa yang menguasai seluruh pemerintahan. Ketika Pangeran Di Darat meninggal, jabatan itu digantikan oleh Dipati Tapesana yang mengambil gelar: Dipati Mangkubumi yang bertindak sebagai raja (*temporary King*). Sejak Pangeran Di Darat menjabat Mangkubumi, sejak itu pulalah jabatan Mangkubumi, jabatan yang tertinggi dalam Negara tidak pernah lagi dijabat oleh rakyat umum, tetapi merupakan jabatan monopoli oleh family kerajaan, yaitu paman, saudara tertua, mertua atau paman yang juga mertua dari raja”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Sultan Saidullah yang juga bergelar Ratu Anom atau Ratu Anomdullah (1637-1642) adalah Sultan yang diangkat sebagai raja boneka saja, peran Pangeran Di Darat sangat berkuasa dibalik kekuasaan boneka terhadap Sultan Saidullah yang dianggap lemah dalam pemerintahan kesultanan Banjar. Ketika Pangeran Di Darat meninggal dunia, maka peran itu tetap berlanjut dengan Dipati Tapesana atau Dipati Halit yang mengambil gelar Dipati Mangkubumi yang bertindak sebagai raja.

Dengan mempertimbangkan sumber-sumber terakhir di atas, maka dapat titik terang, bahwa jika sumber laporan Schwaner (1853) dijadikan patokan sebagai interpretasi (penafsiran), bahwa Saat Sultan Saidullah (1637-1642) telah memerintahkan, mengutus atau memberikan tugas kepada salah satu anaknya untuk mengamankan wilayah Pamukan-Sampanahan sekitarnya (yang namanya kemudian menjadi Tanah Bumbu) atas permintaan Orang

Dayak Samihim maupun penemuan undangan orang-orang Banjar disana tentunya laporan Schwaner tersebut meragukan kebenarannya.

Sangatlah tidak rasional dan tidak bisa diterima, penolakan nalar tersebut dengan argumentasi rasional, bahwa ketika Sultan Saidullah (1637-1642) memerintah sampai dengan meninggal ia hanya memiliki dua orang anak yang bernama Raden Bagus dan Raden Basu usianya masih kecil dan belum dewasa, perwalian dan pemeliharaan kedua kakak-beradik tersebut diserahkan kepada Dipati Halit atau Pangeran Tapesana (Dipati Halit atau Pangeran Tapesana-lah selaku wali asuhan yang menggantikan ayah Raden Bagus dan Raden Basu saat ia menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Rakyat Allah (1642-1660).

Lemahnya kedudukan Sultan Saidullah (Said Allah) disebabkan ayahnya mantan sultan tua Inayatullah yang masih hidup saat itu tidak mampu juga mengimbangi gesekan perebutan atau keinginan menduduki jabatan raja di dalam keluarganya. Inayatullah masih membimbing Saidullah sekalipun telah naik tahta, hingga tahun 1641 pemerintahan tetap berada dalam tangan Sultan Inayatullah yang sudah tua usianya. Memang naik tahtanya Sultan Saidullah adalah hak penuh putra mahkota yang lahir dari Ratu bangsawan asli (Permaisuri) dan memiliki hak penuh atas tahta kesultanan Banjar.

Namun dilain pihak Pangeran Dipati Anom atau disebut Belanda Raja Patty Anom atau de Patty Anom adalah anak Sultan Inayatullah dengan Ratu Ibu yang berasal dari golongan Biaju (orang Dayak Ngaju atau *oloh Ngaju*) yang telah di Islamkan saat perkawinan, ia sangat berpengaruh dalam istana, Pangeran Dipati Anom adalah saingan Sultan Saidullah dalam mendapatkan mahkota pada tahun 1637. Pangeran Dipati Anom terlibat dalam intrik perebutan kekuasaan, termasuk rencana pembunuhan ayahnya yang gagal, sebagai sekutu Inggris dan anti dengan Belanda.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mengingat dalam kerajaan Banjar terdapat pula sistem selir, terutama para raja dan bangsawan, maka harus dimengerti bahwa jumlah keluarga bertambah banyak. Tambah banyaknya kerabat raja tersebut merupakan salah satu sebab pula timbulnya keruwetan dalam soal pergantian raja maupun dalam pengisian jabatan-jabatan penting tingkat atas seperti Mangkubumi. (Poesponegoro et.al, 1984:54-55). Pada Hikayat Banjar disebutkan bahwa putra Sultan Rahmatullah (1545-1570) yang bernama Sultan Hidayatullah (1570-1695) mempunyai tiga orang isteri yang berasal dari golongan yang berbeda, yaitu golongan bangsawan dan ulama. Istri Sultan yang diambil dari golongan bangsawan ialah

Menjelang pertengahan abad ke-17 tersebut dalam istana Kesultanan Banjar di Martapura alot dengan kubu-kubu ada yang pro dan kontra atas naik tahtanya Sultan Saidullah (1637-1642), dimana selain Pangeran Dipati Anom dengan Ratu Ibunya mendapat dukungan kuat dari kelompok orang Ngaju (Biaju), disini lain kelompok Sultan atau Inayatullah dengan sekutunya seperti Sultan Sukadana, Raja Mampawa, Raja Marta Sahari, Pangeran Kusumah dari Kotawaringin dan Dipati Halit atau Pangeran Tapesana. Alhasil setelah meninggalnya Sultan Saidullah, Dipati Halit (Pangeran Tapesana) sebagai wali anak Saidullah yang masih kecil (Raden Bagus dan Raden Basu), maka dengan kesempatan itulah ia memproklamirkan dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Rakyat Allah atau Pangeran Ratu (1642-1660).

Semasa pemerintahan Sultan Rakyat Allah keadaan suhu politik dilingkungan istana kesultanan Banjar makin memanas, dimana dibalik naik tahtanya Sultan Rakyat Allah (1662-1660) usaha yang gagal lagi dialami Pangeran Dipati Anom yang disukung Ratu Ibu dan orang Biaju (Ngaju), kegagalan ini karena didahului oleh Pangeran Tapesana (Dipati Halit) yang mendapatkan dukungan dari golongan bangsawan menjadi sultan Banjar. Dari sudut hak warisan atas tahta adalah anak sulung dari mendiang Sultan Saidullah bernama Raden Bagus yang semestinya naik tahta (kedua anak almarhum Sultan Saidullah Raden Bagus dan Raden Basu masih kecil dalam perwalian atas asuhan Pangeran Tapesana atau Sultan Rakyat Allah). Namun dalam permufakatan bangsawan kerajaan Banjar dan kalangan menteri-menterinya mampu mengatasinya. Hak suara ini menjadi satu tradisi dimana sokongan kaum bangsawan atas Tapesana tetap kuat, sehingga dipilihlah Pangeran

---

Putri Nur Alam, seorang puteri dari Pangeran di Laut, sedang yang diambil dari golongan birokrasi dan ulama ialah putri dari seorang Kyai di pondok dan seorang puteri dari Tuan Khatib Banun. (Periksa J.J. Ras, hlm. 145-147). Disebutkan pula bahwa selain itu sultan masih mempunyai banyak *selir*. Putra seluruhnya berjumlah 40 orang. Pada waktu Sultan Soleiman (1801-1825) meninggal tahun 1825 dan digantikan Sultan Adam (1825-1857), terdapat 25 orang Pangeran keluarga dekat dari raja, silakan bandingkan Anonym. Dalam pencalonan Raja setelah Abad ke-17 sering terjadi pengabaian syarat-syarat calon raja dari garis keturunan, anak dari selir kadang berperan aktif dalam ambisi untuk jadi raja. Demikian dengan Pangeran Dipati Anom anak Sultan Inayatullah dari Ibu Ratu merupakan saingan Sultan Saidullah, membuat kerancuan di istana sultan.

Tapesana (Dipati Halit) menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Rakyat Allah (1642-1660).

Pada masa pemerintahan Sultan Rakyat Allah (1642-1660), perdagangan dan pelayaran meningkat maju dengan pesat. Dengan jatuhnya Malaka 1641, Indonesia Barat dan Selat Malaka di kontrol oleh Belanda, kedudukan Banjarmasin sebagai penghasil lada bagi perdagangan bebas Indonesia menjadi penting dan hubungan dagang dengan Makasar menjadi erat. Disamping itu peran Pangeran Ratu, Pangeran Mangkubumi adalah tokoh yang besar pengaruh dan pribadinya. Rupanya antara Sultan Rakyat Allah atau Dipati Halit ada ketidak cocokan dengan Pangeran Mangkubumi pada persoalan kontrak dengan VOC-Belanda tahun 1660 dan tahun 1661, namun pengaruh Mangkubumi memaksakan untuk menerimanya. Menurut Evert Michielsz dalam Saleh (1958) disebutkan Pangeran Mangkubumi ini disisihkan sultan, supaya anaknya sendiri Pangeran Aria Wiraradja yang berumur 30 tahun itu dan lama di luar negeri dapat menggantikan kedudukan Mangkubumi.

Pada tahun 1660, anak-anak Sultan Saidullah telah dewasa mereka (Raden Bagus dan Raden Basu) menuntut hak mereka sebagai putra mahkota calon raja atau sultan. Walaupun Dipati Halit atau Pangeran Tapesana sebagai wali pengasuhnya saat itu telah jadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Rakyat Allah. Permohonan Raden Bagus dan Raden Basu (anak Sultan Saidullah) ternyata mendapat dukungan orang-orang Banjar dalam sukunya, dimana suku Banjar sangat menghormati legitemasi rajanya dan sangat terikat kepada tradisi dan adat-istiadat kesultanan Banjar.

Pangeran Dipati Anom (selaku pamannya Raden Bagus dan Raden Basu anak Sultan Saidullah) dibantu Sutajaya dan Panjangjiwa dengan dukungan orang-orang Biaju, menuntut agar Sultan Rakyat Allah (Dipati Halit atau Pangeran Tapesana) mengembalikan kekuasaan kepada kemenakannya, mengingat Raden Bagus dan Raden Basu sudah dianggap dewasa, selaku anak dari almarhum Sultan Saidullah yang mempunyai hak penuh dari Putra Mahkota untuk menjadi Raja atau Sultan, terutama Raden Bagus sebagai anak tertua.

Dukungan juga mungkin diberikan Pangeran Mangkubumi yang telah disisihkan oleh Sultan Rakyat Allah (saat ia menggantikan Pangeran



Mangkubumi dan mendudukan anaknya yang bernama Pangeran Arya Wiraradja menjadi Mangkubumi). Jabatan Mangkubumi adalah jabatan yang tertinggi setelah raja atau sultan, katakanlah orang nomor dua dalam istana setelah kedudukan tahta raja atau sultan. Jabatan Mangkubumi saat Sultan Rakyat Allah bukan lagi ditunjuk dari orang yang cakap atau ahlinya yang diambil dari rakyat biasa, tetapi ditunjuknya sendiri anaknya sebagai mangkubumi saat Sultan Rakyat Allah memerintah dalam Kesultanan Banjar.

Kejadian tersebut rupanya sudah direncanakan oleh Sultan Rakyat Allah dalam pemerintahannya ingin membentuk kekuatan dalam garis keturunannya atau strategi politik masa depan Sultan yang telah ditanamkannya sebagai persiapan dalam lingkungan keluarga batihnya (mengingat Raden Bagus dan Raden Basu anak almarhum Sultan Saidullah masih belum terlalu dewasa, sekalipun masih dalam perwalian untuk pengasuhannya), dimana anaknya yang bernama Pangeran Arya Wiraradja yang berusia 30 tahun disiapkannya untuk generasi berikutnya menjadi raja, tetapi terlebih dahulu di desak kelompok pangeran Dipati Anom anak dari perkawinan Sultan Inayatullah dengan selirnya Ratu Ibu dari orang Ngaju (Biaju) yang saat itu sangat berpengaruh dan mendapat dukungan kuat dari kelompok orang-orang Ngaju dan sekutunya, sehingga peran Sultan Rakyat Allah terjepit, demikian juga dengan jabatan anaknya Pangeran Arya Wiraradja sebagai mangkubumi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ketika Pangeran Samudera pertama kali mengatur organisasi kerajaan, ia memilih Mangkubumi dari golongan rakyat biasa berjasa dan cakap bukan dari golongan bangsawan, dipilihnya Patih Masih sebagai Mangkubumi dibantu empat deputy yaitu Pangiwa, Panganan, Gampiran dan Panumping. Dibawah Gampiran, Panumping terdapat 30 wilayah mantri (*captain*). Keempat Deputy ini berwenang sebagai hakim. Raja juga mengangkat Kyai Pelabuhan (penguasa pelabuhan sebagai kepala beacukai) saat ia dinobatkan sebagai Sultan Suriansyah Kyai Pelabuhan disebut Mantri Bandar memiliki 100 orang anak buah. Terdapat pula Mantri Sikap dengan pasukannya 30 orang yang mengurus Paseban dan dalam istana, Mantri tabuhan 40 orang anggota bertugas melayani raja dan keluarganya, regu pengayuh perahu ketangkasan raja. Menjaga keamanan terdapat dua kepala Singabana (Singataka dan Singapati (mempunyai 40 orang anggota). Tugas Mangkubumi berwenang dalam administrasi Negara, menentukan keputusan hukuman mati, mempunyai wewenang penyitaan segala harta benda yang dijatuhi hukuman. Dari periode Sultan Suriansyah sampai dengan Sultan Inayatullah (1620-1637) orang yang pernah menjabat Mangkubumi : Patih Arya Taranggana, Kyai Anggadipa, Kyai Jayanegara dan Kyai Tumangung Daksanegara. Masa Sultan Saidullah (1637-1642) berubah, pamannya Pangeran Di Darat bertindak sebagai Mangkubumi dan raja, ketika

Akhirnya dengan tidak melanggar adat-istiadat orang Banjar dalam lingkungan istana Kesultanan Banjar yang sudah berlaku umum dalam kalangan Rakyat Banjar, maka Sultan Rakyat Allah mau menyerahkan tahtanya kepada Raden Bagus. Usaha kelompok pendukung Raden bagus berhasil dengan baik merajakan Raden Bagus sebagai Sultan dengan gelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663). Untuk menjawab pertanyaan di atas: Pada saat Sultan Banjar yang mana yang telah memerintahkan salah satu dari dua orang putra Sultan Saidullah ketika ia telah dewasa untuk mengemban tugas mengamankan wilayah Cengal, Cantung, Pamukan, dan Sampanahan sekitarnya (nantinya menjadi Kerajaan Tanah Bumbu) atas permintaan orang Dayak Samihim maupun orang-orang Banjar di sana? Sebagai jawaban sementara seperti paparan di atas sejak Sultan Saidullah (1637-1642) jelas terlihat tidak memungkinkan Sultan Saidullah atau Said Allah memerintahkan anak-anaknya yang masih belum dewasa untuk mengamankan wilayah di Pamukan sampai Sampanahan sekitar dari gangguan keamanan.

Demikian pula dengan masa perwalian, ketika Sultan Saidullah meninggal dunia tahun 1642, keduanya anaknya (Raden Bagus dan Raden Basu) diasuh oleh Dipati Halit atau Pangeran Tapesana hingga kenaikan tahta dan masa pemerintahan Dipati Halit atau Pangeran Tapesana dengan gelar Sultan Rakyat Allah (1642-1660) juga tidak memungkinkan ada utusan atau perintah untuk menugaskan kedua atau salah satu dari anak Sultan Saidullah (kedua anak tersebut bernama Raden bagus dan Raden Basu) untuk mengamankan wilayah Pamukan-Sampanahan sekitarnya dari gangguan keamanan yang saat itu berkecamuk dikawasan Kalimantan Selatan bagian tenggara dari pendatang asing.

Pertanyaan akhir akan muncul semasa pemerintahan sultan Banjar yang mana dan siapa namanya yang memerintahkan salah satu anak dari Sultan Saidullah yang diutus ke Pamukan-Sampanahan sekitarnya (kemudian bernama Tanah Bumbu) untuk diamankan wilayahnya dari pendatang asing dianggap yang paling kuat argumentasinya. Jawaban yang sangat memungkinkan adalah utusan tersebut dikirim pada masa Sultan Banjar VIII

---

meninggal digantikan oleh Mangkubumi Dipati Tapesana atau Dipati Halit yang bertindak sebagai Mangkubumi dan raja.

yakni Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), ia adalah Raden Bagus anak sulung dari Sultan Saidullah yang sudah dewasa dan berhasil menuntut haknya sebagai putra mahkota dan dengan banyak dukungan ia dianggap Sultan yang sah sebagai sultan Banjar menggantikan wali asuhnya Sultan Rakyat Allah (1642-1660) yang tidak lain adalah Dipati Halit atau Pangeran Tapesana.

Kenaikan tahta Raden Bagus yang dikenal dengan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) bukan saja mendapat dukungan dikalangan bangsawan di lingkungan kerajaan Banjar terlebih atas dukungan pamannya yang bernama Pangeran Dipati Anom, serta neneknya Ratu Ibu (selir dari kakeknya mantan Sultan Inayatullah (1620-1637) dari golongan Biaju (Ngaju) yang sangat berperan dan berpengaruh dalam istana keraton Kesultanan Banjar di Kayutangi-Karang Intan). Dukungan kenaikan tahta Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) juga datang dari pihak asing terutama kongsi dagang dari orang-orang Portugis yang memerlukan komoditi lada dan hubungan dagang dengan kesultanan Banjar, hal ini baru terungkap dari sumber dokumen-dokumen Barat setelah terbitnya disertasi Fong (2013) yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*Trade and Politics in Banjarmasin 1700-1747*" atau "Perdagangan dan Politik Banjarmasin 1700-1747".

"Ketika Bagus Kusuma beranjak dewasa, sebuah suksesi (Pergantian pimpinan kerajaan) menimbulkan perselisihan antara Bagus Kusuma dan pamannya setelah pamannya merencanakan Purabaya sebagai pewarisnya. Setelah sebuah permintaan bantuan yang tidak berhasil kepada Belanda, Sultan Bagus Kusuma berubah untuk minta bantuan kepada Portugis di Makau. Portugis membantunya untuk mendapatkan kembali mahkota pada tahun 1660. Sebagai imbalan untuk bantuan militernya, Portugis dihadiahi sebuah perjanjian eksklusif untuk membeli lada dengan harga 12 gantang per dollar."

Dari paparan Fong (2013) di atas dalam kenyataannya Portugis tidak secara langsung ikut berperang atau mengamankan konflik di istana Kayutangi-Karang Intan, mengingat musyawarah elite politik bangsawan Banjar berdasarkan adat-istiadat Kesultanan Banjar berjalan damai, dimana Sultan Rakyat Allah (1642-1660) mau menyerahkan tahtanya mengingat Raden Bagus

sudah dewasa dan memiliki hak waris yang sah dari almarhum ayahnya Sultan Saidullah sebagai putera Mahkota dan telah dapat didudukkan sebagai Sultan Banjar.

Untuk menjawab pertanyaan Kedua: Dari kedua anak sultan Saidullah yang dipelihara perwaliannya oleh Dipati Halit atau Pangeran Tapesana yang kemudian mengangkat dirinya menjadi Sultan Rakyat Allah (1642-1660) apakah anak yang tertua (sulung) bernama Raden Bagus atau anak yang kedua (bungsu) yang bernama Raden Basu yang kemudian disebut secara umumnya dengan gelar Pangeran Dipati Tuha atau Pangeran Dipati Toeha (versi Schwaner-1853) yang mengemban tugas mengamankan wilayah Pamukan-Sampanahan dan sekitarnya?

Tentunya tidak terlalu jauh jawabannya dengan paparan di atas, ketika Raden Bagus anak tertua dari almarhum Sultan Saidullah (1637-1642) yang sudah dewasa berhasil menuntut haknya sebagai putra mahkota dan oleh aturan adat-istiadat keraton dan budaya Banjar, ia diangkat sebagai Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), dengan demikian sudah jelas Raden Bagus menjadi Raja dengan gelar Sultan. Berarti yang tertinggal hanyalah adiknya Raden Basu, "Sebagai dugaan penulis "kemungkinan besar" Raden Basu inilah yang diutus kakaknya Raden Bagus (Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) untuk mengamankan wilayah Pamukan, Sampanahan dan sekitarnya dari gangguan keamanan pendatang asing"

#### **4. Peran Sultan Amarullah Bagus Kusuma dalam Mengamankan Wilayah Tanah Bumbu (1660-1663)**

Pada masa Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) sebagai pemimpin ke 8 Kesultanan Banjarmasin semakin kuat dalam perekonomiannya, tahun 1660 dan 1661 dibuatlah kontrak baru dengan VOC, dan memberikan hak monopoli, ia disebut Belanda (*kerckhoven*) "*arm...en schrapzuchtig*" berharap mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, begitu pula kemungkinan pinjaman-pinjaman kepada VOC, sekalipun akan mengikat dia. Keadaan di kerajaan Banjar setelah perjanjian antara Kompeni dengan Sultan di Martapura ditandatangani 1660 itu perlawanan terhadap kompeni Belanda menurun. Diakhir tahun 1662 menurut Barra dalam Saleh (1958) ada 12 jung

orang Melayu, Inggris, Portugis dan lainnya mengangkut emas dan lada ke Makasar.

Semasa Sultan Amarullah Bagus Kusuma inilah menurut versi tertentu tentang salah satu wilayah di Bagian Tenggara yang kemudian dikenal dengan Tanah Bumbu mulai muncul ke permukaan setelah adanya anggapan cerita, bahwa tokoh-tokoh orang Dayak meminta bantuan kepada Sultan untuk mengamankan wilayah Pamukan dari gangguan dan penyerbuan orang asing di negeri leluhur mereka. Saat itu tentunya sudah dikenal tentang nama Pamukan, Sampanahan dan Cengal (Cingal), tetapi belum dikenal nama Tanah Bumbu, dimana di wilayah yang kurang diperhatikan keberadaannya, namun Pulau Laut sudah lama dikenal sebagai daerah Sultan.

Gambaran perekonomian Kesultanan Banjarmasin saat Sultan Amarullah Bagus Kusuma tersebut cukup kuat seperti pernyataan Barra dalam Dagh, 1663,7 Juni, p. 231. Demikian dalam bidang politik dan wilayah pemerintahan, dimana Kerajaan Sukadana juga menjadi tunduk dan berusaha bersekutu dengan Banjarmasin. Pelabuhan Banjarmasin penuh lebih 1000 perahu-perahu layar, baik pelayaran interinsulair ataupun interkontenental. Karena itu kontrak tinggal kontrak, namun perdagangan bebas tetap dipertahankan.

Saat pemerintahan Sultan Ammarullah Bagus Kusuma (1660-1663) dimana kenaikan tahtanya adalah desakan kelompok pamannya Pangeran Dipati Anom dan dukungan neneknya Ratu Ibu beserta kelompok besar orang Ngaju (Biaju) berhasil menurunkan tahta Dipati Halit atau Pangeran Tapesana yang bergelar Sultan Rakyat Allah (1642-1660), tentunya semua aset kenegaraan dan sumber-sumber perekonimian kerajaan masih ditangan kelompok mantan Sultan Rakyat Allah, apalagi jabatan Mangkubumi saat ia masih berkuasa dibawah anaknya Pangeran Arya Wiraradja. Demikian pula dengan kelompok Pangeran Dipati Anom yang masih punya ambisi besar untuk menduduki tahta sebagai raja atau sultan masih tidak padam, sekalipun keponakannya Raden Bagus berhasil naik tahta menjadi sulatan Banjar.

Semasa Sultan Amarullah Bagus Kusuma menjalankan tugasnya sebagai Raja Banjar, wilayah sekitarnya seperti kerajaan Sukadana, Kerajaan Mampawa di Kalimantan Barat dan Kerajaan Kotawaringin di Kalimantan

Tengah mengakui dan bersekutu menjadi bagian pengaruh Kesultanan Banjar. Namun pada tahun 1661 Mataram masih menganggap Sukadana adalah koloninya. Dengan pengakuan Mataram tersebut kerajaan Sukadana menjadi resah, sebagai bukti kesetiaan Kerajaan Sukadana kepada Sultan Amarullah Bagus Kusuma, dimana Sukadana mengirim utusan ke Banjarmasin untuk mengadakan persekutuan defensif dan ofensif terhadap Mataram dan memberikan puterinya yang boleh jadi dikawinkan dengan Sultan Amarullah.

Masa pemerintahan pertama dari Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) tidak lama hanya sekitar tiga tahunan saja, berhubung adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pamannya Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Sourianata yang bergelar Sultan Surianata (1663-1679), tetapi nantinya Sultan Amarullah Bagus Kusuma dan pendukungnya berhasil kembali merebut tahtanya yang sah sebagai Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) pada masa kedua pemerintahannya. Lebih lanjut Fong (2013) memaparkan keadaan Kesultanan Banjar pasca ancaman Mataram saat transisi perebutan kembali tahta Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) dari kekuasaan Pamannya Pangeran Dipati Anom yang berhasil menggeser tahtanya dengan mengangkat dirinya sebagai Sultan Surianata (1663-1679), Setelah kekuasaan itu kembali ke tangannya Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) menentukan kebijakan-kebijakatan wilayah kesultanan Banjar sebagaimana berikut pemaparan Fong:

“Setelah mendapatkan kembali kemerdekaan dari kerajaan Mataram pada tahun 1670-an, dapat diketahui bahwa Panembahan Banjarmasin berusaha untuk menjalankan kekuasaannya ke daerah-daerah tetangga, yaitu Sukadana, Sambas, Landak, Kota Waringin, Pasir dan Kutai. Otoritasnya terhadap Negara-negara barat daya dan tenggara Kalimantan ini dilemahkan pada akhir abad ke-17 ketika kekuasaannya terhadap Banjarmasin menurun karena konflik internal. Sejak saat itu, perhatian Panembahan fokus pada teritorialnya sendiri (Banjarmasin), pada kenyataannya setiap negara pulau dapat menolak perintah negara induknya dan membangun kembali kemerdekaannya. Di dalam kesultanan Banjarmasin, Panembahan Bagus Kusuma, yang memerintah pada awal abad ke -18, adalah sebagai yang ditunjukkan oleh gelarnya, adalah pengatur pemerintahan tertinggi. Kontrol politiknya, hadir hanya

dalam teori, namun dalam praktiknya, kontrol tersebut terbatas pada daerah-daerah dataran rendah Barito dan sungai Bahan, termasuk kota-kota di Tatas, Banjarmasin, Kayutangi dan ibukota Martapura. Pemerintahan di dalam kerajaan yang tersisa (selain daerah yang disebutkan sebelumnya), dikuasai oleh tiga orang, yaitu: Pangeran Anom, Gusti Temenggong dan Pangeran Purba atau Marta Ningrat.

Dari paparan di atas betapa sempitnya wilayah kekuasaan Sultan Amarullah Bagus Kusuma dalam wilayah pemerintahannya, ketika ia berhasil merebut kembali tahtanya dari pamannya mantan Sultan Surianata (1663-1679), hal ini jika dipahami sangatlah lumrah dalam pemetaan wilayah tanah apanage saat Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) naik tahta pertama, semua aset negara dipegang oleh keluarga mantan Sultan Rakyat Allah (1642-1660) berikut anaknya Arya Wiraradja sebagai Mangkubumi yang masih terselubung kekuasaannya, bahkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma selaku sultan yang memerintah mirip dengan boneka dikendalikan keluarga mantan Sultan Rakyat Allah.

Ketika Pangeran Dipati Anom naik tahta dengan gelar Sultan Surianata (1663-1679) juga aset negara Kesultanan Banjar terbagi lagi dengan keluarga Sultan Surianata. Dengan demikian wilayah pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) tidak seluas kekuasaan sebelumnya ketika ayahnya Sultan Saidullah (1637-1642) memerintah di wilayah Kesultanan Banjar dengan bimbingan kakeknya mantan Sultan Inayatullah (1620-1637).<sup>12</sup> Semasa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) sebagai kelanjutan pemerintahannya masa pertama sebagai sultan Banjar (1660-1663), ada tiga pimpinan daerah yang kuat dan berpengaruh di wilayahnya, seperti digambarkan oleh Fong (2013) diantaranya adalah

1. Pangeran Anom, ia adalah saudara laki-laki Sultan Amarullah Bagus Kusuma, yang secara resmi ia dikenal sebagai Sultan Negara,

---

<sup>12</sup> Fong (2013) memaparkan bahwa selama dekade awal abad ke-17, khususnya diseluruh daerah selatan kawasan barat, tenggara dan timur Kalimantan menyatakan hormat kepada Banjarmasin. Pada tahun 1636, Panembahan (Sultan Inayatullah 1620-1637) mengklaim Sambas, Lawei, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawei, Kahayan Atas dan Kahayan Bawah, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asem-Asem, Kintap dan Sawarangan sebagai negara bagian kekuasaannya.

mengontrol provinsi-provinsi penghasil lada seperti Gekompai (Bakumpai), Borangbaha (?), Marampiade (Muararampiau), dan Negara (Nagara), dan memungut pajak tersebut presentasi tertentu diberikan kepada Panembahan (Sultan). (Penulis menduga: nama Pangeran Anom, tidak lain adalah Raden Basu, karena Sultan Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) hanya memiliki satu orang adik yang bernama Raden Basu, kemungkinan ketika ia naik tahta pertama kali tahun 1661 adiknya Raden Basu diangkatnya sebagai penguasa wilayah ini sebagai penghasil lada, diberikannya gelar Pangeran Anom (=Bahasa Banjar berarti yang muda atau si *Anom* atau *bungsu*) dan disebut Sultan Negara. Sebagian cerita lisan menyatakan, bahwa sebelum ia diutus kakaknya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) masa pemerintahan Sultan pertama untuk mengamankan wilayah Pamukan sekitarnya, adiknya yang bernama Raden Basu diberikan wilayah Negara sebagai tanah apanagenya.<sup>13</sup>

2. Gusti Temenggong, ia yang berkuasa atas Benowa Assam (Benua Assam), memerintah distrik-distrik tambang emas di pedalaman seperti Alli (Alai), Nahara (Nagara?), Pantsja (?), Komanting (?) dan Benowa Tengah (Banua Tengah). Ia dikatakan sebagai seorang politisi yang cerdas dan licik. Dia mendapatkan pendapatan yang besar dari pertambangan dan dari upeti wajib tahunan yang dibayarkan orang Banjar ke Panembahan (Sultan). Daripada mengirimkan semua upeti tersebut ke Panembahan (Sultan), dikatakan bahwa Gusti Temenggong hanya memuat transaksinya kepada pimpinannya, karena dia pikir "(hal tersebut) layak dan mengikuti kepentingannya sendiri". Meskipun Bagus Kusuma mengetahui ketidakjujuran Gusti, Dia tidak dapat bergerak untuk mencegahnya, karena dia merasa bahwa "seseorang dari kalangan atas dan pemegang otoritas tidak dapat dengan mudah

---

<sup>13</sup> Berdasarkan catatan Belanda yang dikutip oleh Fong (2013), kekuasaan Pangeran Dipati Anom (Sultan Surianata 1663-1679) secara serius ditantang oleh dua putra Pangeran Ratu (sebutan Pangeran Ratu ialah Sultan Rakyat Allah (1642-1660) yang merupakan wali pemeliharaan anak mantan Sultan Saidullah yakni Raden Bagus dan Raden Basu) yaitu Suria Angsa dan Suria Negara. Suria Angsa dan Suria Negara juga dikenal sebagai Raden Bagus dan Raden Basu.



diawasi, karena tidak satu orang yang datang dari distrik dan tambangnya tanpa sebelumnya memperoleh ijin darinya, sehingga masih kurang berani mereka untuk masuk ke dalam spekulasi perdagangan apapun dengan orang-orang dibawah yuridiksinya (Gusti).

3. Pangeran Purba, yang bertempat tinggal di pinggiran Martapura. Menjadi seorang figur militer yang mengontrol pasukan Banjar, dia bertanggungjawab pada Penembahan (Sultan) dan Pangeran Anom untuk pertahanan teritori mereka dimana mereka berpikir bahwa dia (Pangeran Purba) tidak terlihat (*invincible*). Saat pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma ia berhati-hati terhadap kebijakan politiknya terhadap rakyatnya, khususnya orang Biaju, karena menyangkut pembayaran upeti bagi orang Dayak Biaju yang di pedalaman Negara dan Kapuas, dipaksa membayar emas dan lada ke Panembahan. Pemberontakan orang Biaju pecah tahun 1711 (walaupun sesudah masa pemerintahan Bagus Kusuma), namun peran Pangeran Purba cukup besar dengan pasukan militer Banjar dapat memadamkannya.

Terlepas persoalan intrik politik dalam kesultanan Banjar kembali kita kepada topik pembicaraan awal tentang raja perintis di kawasan Pamukan-Sampanahan sekitarnya yang nantinya menjadi Kerajaan Tanah Bumbu. Tentunya tidak lepas dari persoalan permintaan awal dari orang-orang Dayak Samihim yang memohon kepada Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) saat ia menjadi Sultan Banjar pada masa pemerintahan pertama. Dari berbagai sumber yang ditelaah masih belum terdapat dokumen tertulis yang menjelaskan, siapa tokoh dari orang Dayak Samihim yang datang menghadap Sultan Amarullah Bagus Kusuma ke pusat Kesultanan Banjar di Kayutangi-Karang Intan. Sampai saat ini belum ditemukan secara tertulis, maupun cerita lisan yang biasanya dimiliki oleh orang Dayak Samihim yang dapat menuturkannya.

Ulasan yang umum dan mudah diakses untuk melihat sejarah awal Tanah Bumbu adalah melalui situs Wikipedia, misalnya pada situs "Kerajaan Bangkalan" disebutkan tentang tokoh perintis pengamanan di wilayah

Pamukan, Sampanahan dan wilayah sekitarnya dipaparkan: "Pangeran Dipati Tuha (Raden Basus?) bin Sultan Saidullah. Ia diutus Sultan Banjar mengamankan wilayah tenggara Kalimantan dari para pendatang atas permintaan penduduk lokal yaitu orang Dayak Samihim (golongan Dusun Maanyan) yang dahulu tinggal di kota Pamukan di sungai Cengal yang telah dihancurkan oleh para penyerang dari laut. Kerajaan Tanah Bumbu didirikan Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah, yang pada mulanya mencakup kawasan mulai Tanjung Aru sampai Tanjung Silat.

Paparan singkat di atas memang sezaman dengan masa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), mengingat dalam lingkungan istana kesultanan Banjar dalam keraton di Kayutangi saat itu tidak ada nama lain yang sama atau satu-satunya nama dari adiknya Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang bernama Raden Basu (Raden Basus = ditambah abjad "s" dalam versi Wikipedia). Sekalipun kakaknya naik tahta menjadi Sultan Banjar, nama "Bagus" yang berasal dari Raden Bagus tetap dipakainya. Kedua kakak beradik ini (Raden Bagus dan Raden Basu) adalah anak almarhum Sultan Saidullah (1637-1642). Dalam versi Schwaner (1853) menyebut Pangeran Dipati Tuha dengan sebutan Pangeran Dipati Toeha.<sup>14</sup>

Seandainya diajukan pertanyaan tentunya akan muncul beberapa pertanyaan menyangkut kebijakan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) yang mengutus adiknya yang bernama Raden Basu ke daerah Pamukan-Sampanahan sekitarnya dengan tugas mengamankan daerah tersebut dari pendatang asing, misalnya siapa tokoh Dayak Samihin tersebut? kapan mereka menghadap sultan di Kayutangi-Karang Intan? Pembicaraan apa antara sultan dengan tokoh orang Dayak Samihim, sehingga sejumlah pertanyaan akan muncul dan memerlukan jawaban analisis yang panjang. Namun satu hal yang

---

<sup>14</sup> Mengenai nama Pangeran Dipati Tuha, Schwaner (1853) menyebut Pangeran Dipati Toeha "Dia menyatukan semua raja-raja kecil yang berada disana dibawah kekuasaannya, Tinggal di Sampanahan di tepi aliran sebuah sungai kecil yang disebut Sungai Bumbu dan memberikan nama sungai itu pada kerajaan yang berhasil disatukan olehnya. Yang mencakup semua tanah yang terbentang dari Tanjung Silat di Selatan sampai Tanjung Aru di utara (disebut aru, ru atau pohon cemara, yang tumbuh disudut itu dan dilihat dari laut, memberikan pemandangan indah dengan nama rugged point muncul di peta laut Inggris), yang dipisahkan oleh gunung Beratus dari Banjarmasin di sebelah barat dan di sebelah timur dibatasi oleh selat Makasar, termasuk pulau Laut.

sangat disayangkan tidak ada bukti-bukti tertulis menyangkut permohonan orang Dayak Samihim, demikian juga dengan surat pemberian tugas dari Sultan Amarullah Bagus Kusuma kepada adiknya Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha saat diperintah mengamankan wilayah yang disebut Tanah Bumbu. Namun disadari saat itu bahasan lisan seorang Sultan dengan titahnya adalah sebuah perintah.

Tanpa banyak mempersoalkan perbedaan tentang pendapat tentang siapa perintis atau pendiri Kerajaan Tanah Bumbu umumnya sekan-akan tidak ada masalah menyebut nama Pangeran Dipati Tuha (Schwaner (1853) menyebutnya "Pangeran Dipati Toeha" yang tidak lain adalah Raden Basu saudara muda atau adik dari Raden Bagus (Raden Bagus ketika menjadi Sultan Banjar bergelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663), keduanya anak dari Sultan Saidullah (1637-1642) yang pernah memerintah Kesultanan Banjar.

Dalam laporan Schwaner (1853) tidak terdapat angka tahun masa pemerintahan raja-raja di kerajaan Tanah Bumbu, demikian juga dengan silsilah yang dibuatnya berdasarkan narasi kalimat saja tentang garis keturunan raja-raja yang pernah memerintah. Menyangkut permohonan orang Dayak Samihim di daerah Pamukan sekitarnya meminta pertolongan kepada Sultan Banjar Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) untuk mengamankan wilayah mereka dari serangan pendatang asing, pertanyaannya mengapa hal tersebut dilakukan, seandainya tokoh-tokoh pemuka Orang Dayak Samihim diam saja juga tidak mengapa, tetapi harus diingat dan dipahami setiap lingkungan penduduk dari suku apapun yang tinggal di wilayah kerajaan Banjar, baik sebagai daerah taklukan, maupun daerah yang didiami dengan kesepakatan persekutuan harus seizin Sultan sebagai penguasa Kesultanan Banjar.

Syarifuddin et.al (1989) menjelaskan mengenai sejarah pertumbuhan sistem pemerintahan, sejarah tentang tanah dan asal-usul penguasaan tanah masa sebelum penjajahan di Kalimantan Selatan memaparkan:

"Sejak abad ke-17 Karang Intan menjadi ibukota kerajaan Banjar dan kedudukan sebagai pusat kerajaan ini berlangsung sampai masa pemerintahan Sultan Sulaeman Almu'tamidullah (1801-1825). Dengan demikian hampir dua abad Karang Intan menjadi pusat kerajaan dan memegang peranan penting dalam percaturan politik. Sultan pertama

yang menjadikan Karang Intan sebagai ibukota kerajaan adalah Sultan Musata'in Billah (1595-1620) dan sejak itu berlangsung sampai Sultan Sulaeman Almu'tamidullah. Pada masa itu pembagian wilayah teritorial untuk seluruh daerah kerajaan mengenal tiga jenis wilayah teritorial, meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan kerajaan. Tiga teritorial itu ialah: *Negara Agung*, *Mancanegara* dan *Pesisir*. Wilayah kerajaan Banjar meliputi titik pusat, yaitu wilayah keraton tempat istana raja berkedudukan di Kayutangi-Karang Intan yang nanti setelah Sultan Adam al Wasik Billah (1825-1857) dipindahkan ke Martapura. Tetapi periode Karang Intan sebagai ibukota kerajaan sangat lama, jika dibandingkan dengan Martapura. Daerah Karang Intan dan kemudian Martapura merupakan wilayah pertama dan pusat pemerintahan dimana sultan berada. Wilayah teritorial kedua meliputi (1) Tanah Laut; (2) Daerah Banjar Lama dengan pelabuhan Banjarmasin; (3) Banua Ampat: Wilayah Martapura dan Rantau; (4) Banua Lima, yaitu Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kelua; (5) Margasari; (6) Alai; (7) Daerah Amandit; (8) Muara Bahan dan (9) Dusun, nama untuk daerah atas Barito. Wilayah teritorial ketiga adalah: Tanah Bumbu, Pulau Laut, Karasikan, Pasir, Berau, dan Kutai dan daerah Pantai Timurnya. Kotawaringin, Landak, Sukadana, Sambas dan pantai sebelah Barat. Ketiga teritorial ini dikenal sebagai wilayah kerajaan Banjar, dimana Karang Intan sebagai ibu kota Negara. Semua wilayah tersebut membayar upeti kepada kerajaan" (Kesultanan Banjar).<sup>15</sup>

Dari paparan di atas dapat gambaran, bahwa semua wilayah yang disebutkan di atas adalah daerah atau wilayah yang berada dalam kekuasaan Kesultanan Banjar. Dimana setiap wilayah terdapat pimpinan wilayah atau dibawah seorang raja bawahan yang berkewajiban membayarkan upeti tahunan kepada Sultan Banjar yang berpusat pemerintahan di Kayutangi-Karang Intan, kecuali semasa Sultan Adam al Wasik Billah (1825-1857) pusat

---

<sup>15</sup> Mengenai tanah, pada masa kesultanan Banjar, Sultan mempunyai hak umum atas tanah, Sultan berhak menentukan dengan ketetapan hukumnya atas penguasaan, pemilikan dan penggunaan atas tanah. Dalam hal tanah apanage yang diberikan sultan kepada kaum bangsawan yang juga kerabat dari sultan, antara lain, anaknya, saudaranya, kemenakan atau keluarga sultan, bahwa hak atau kepemilikan atas tanah yang diberikan oleh sultan harus dilihat dari pemberian pengganti gaji tetapi tidak sama dengan pembayaran gaji terhadap tugas mereka. Sultan sebagai *Tetuha Bubuhan Raja-Raja* mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk kepentingan keluarga besarnya.

pemerintahan pindah ke Martapura. Kemudian bagaimana dengan Orang Dayak dengan lingkungan kerajaannya yang bermukim di wilayah kerajaan Banjar? Bagaimana status tanah yang ditempati mereka.

Kampung-kampung yang dihuni oleh kelompok suku bangsa Dayak berkewajiban membayar tiap tahun berupa pembayaran upeti. Demikian juga dengan Orang Dayak Samihim, mereka sebelumnya sudah ada hubungan dengan sultan di Kayutangi-Karang Intan, mengingat setiap tahunnya mereka wajib membayarkan upeti kepada sultan, jadi ketika kerajaan mereka diserang oleh pengganggu keamanan di wilayah Pamukan mereka melaporkan dan memohon untuk diamankan wilayah tersebut, karena wilayah tanah yang mereka tinggali merupakan tanah milik Kesultanan Banjar termasuk teritorial ketiga daerah Pesisir. Dengan demikian kewajiban Sultan Banjar untuk melindungi negerinya.

Dalam sistem pengelolaan tanah Apanage, mengingat Sultan mempunyai hak umum terhadap tanah, dimanapun dia menentukan dengan ketetapan hukumnya atas penguasaan pemilikan tanah dan penggunaan atas tanah. Sultan juga mempunyai hak untuk hak mengatur produksi yang dihasilkan dari penggarapan tanah sesuai dengan adat kerajaan turun-temurun. Hak untuk menetapkan produksi tanah oleh Sultan tersebut, sesuai dengan hukum yang tidak tertulis.

Satu pertanyaan akhir mengapa wilayah Pamukan, Sampanahan dan wilayah sekitarnya yang semula menjadi kerajaan Dayak Samihim sekitarnya menjadi penting untuk diamankan dari pendatang asing, tentunya tidak lepas dari kebijakan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) saat pemerintahan pertama, ia mengutus adiknya Raden Basu sekitar tahun 1660-an yang tidak lain adalah Suria Negara atau Pangeran Anom yang semula telah diberikan wilayah kekuasaan di Bakumpai, Muara Rampiau dan Nagara untuk mengontrol perkebunan lada dan menarik pajak yang dihasilkan dari perdagangan lada di wilayah tersebut. Karena Sultan adalah kakaknya dan perintah Sultan Amarullah Bagus Kusuma adalah titah yang wajib dilaksanakan, maka Raden Basu melaksanakannya untuk mengamankan wilayah Cengal, Cantung, Pamukan, Sampanahan sekitarnya di bagian Tenggara dari gangguan

keamanan negeri Banjar, tentunya didampingi pasukan militer Kesultanan Banjar dibawah komando Pangeran Purba.

Raden Bagus ketika naik tahta bergelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) tentunya masih dianggap sebagai boneka oleh wali pemeliharanya yakni Sultan Rakyat Allah yang pernah memerintah sebagai Sultan Banjar antara tahun 1642-1660, beserta anaknya Arya Wiraradja sebagai Mangkubumi yang masih terselubung kekuasaannya, sehingga Sultan Amarullah Bagus Kusuma tak berketuk dengan tindak-tanduk kedua orang ini dalam kebijakan politik dan perdagangan, dimana banyak aset terselubung yang masih dirahasiakan, termasuk upaya menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma, dikarenakan kedua orang ini tidak legawa melepaskan tahtanya. Demikian juga dengan pamannya Pangeran Dipati Anom yang didukung kaum Biaju (Ngaju) dibawah permainan politik Ratu Ibu yang tetap mencari celah untuk menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma dalam pemerintahan pertamanya (1661-1663).

Mengingat luasnya teritorial wilayah kesultanan Banjar, baik di wilayah Barat, tengah, Tenggara dan Timur di pulau Kalimantan, tentunya wilayah yang disebutkan sebagai bagian tempat tinggal orang Dayak Samihim bukannya daerah tak bertuan, wilayah tersebut seperti Pamukan, Cengal, Cantung, Sampanahan, Batulicin, Buntar Laut dan sekitarnya, telah menjadi bagian wilayah yang telah diklaim oleh Sultan Banjar, maka ketika naik tahtanya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) pada masa pemerintahan pertamanya, wilayah yang nantinya dinamakan Tanah Bumbu, sebelumnya sudah merupakan bagian tanah milik atau teritorial ketiga sebagai *Daerah Pesisir* dalam Kesultanan Banjar. Orang Dayak Samihim yang juga memiliki kerajaan tersendiri dan tinggal menetap di wilayah Pamukan, sungai Cengal, Sampanahan dan sekitarnya bukannya berdiri sendiri, mereka juga membayar pajak tahunan atau menyerahkan upeti kepada Sultan Banjar di Kayutangi-Karang Intan.

Ketika Raden Bagus atau Sultan Amarullah Bagus Kusuma naik tahta dalam pemerintah pertamanya tahun 1661-1663, ternyata dibalik kedudukannya sebagai Sultan dibelakangnya ada kelompok atau orang yang menaruh dendam terutama dengan ambisi untuk menjadi Sultan Banjar, sebut

saja seorang yang bernama "Pangeran Purabaya", ia menganggap dirinya telah diusir ke Pulau Laut, di daerah Pulau Laut ini ia menyusun kekuatan untuk membalas dendam terhadap kubu Sultan Amarullah Bagus Kusuma, maupun Sultan Banjar yang memerintah sesudahnya

Sebagai contoh, ketika Suria Alam menggantikan Bagus Kusuma sebagai Panembahan tahun 1708, bangsawan-bangsawan Banjar memutuskan untuk meningkatkan upeti yang dibebankan kepada orang Biaju dari 40 menjadi 60 tahlil emas.<sup>61</sup> Tindakan ini meningkatkan protes keras dari pimpinan Biaju yang mengeluhkan bahwa mereka telah dianiaya dengan nyata dan meminta pengurangan upeti tersebut, namun pemerintah Banjar tidak mendengarkan permohonan mereka. Dengan gelombang besar pedagang-pedagang kapal barang dari Cina ke Banjarmasin, setelah pengusiran utusan-utusan Inggris dari Banjar, Orang Biaju, meskipun faktanya mereka adalah penanam lada pertama di Negara, Muararampiau dan Bakumpai, dilarang oleh pemerintah Banjar untuk menjual lada secara langsung kepada orang Cina atau pedagang asing lainnya. Mereka dipaksa untuk mengirimkan semua persediaan mereka dengan harga yang murah kepada orang Banjar, yang akan menjual lada tersebut kepada orang Cina dengan keuntungan yang sangat tinggi di Tatas dan Kayutangi. Dua penyebab ini, pajak yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah, rupanya mendorong orang-orang dataran tinggi untuk menghilangkan semua ketakutan terhadap ancaman militer Banjar dan memberontak pada tahun 1711.

Pemberontakan dari orang Biaju tahun 1711 dapat dengan mudah dipatahkan oleh pasukan militer Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Purba yang didukung dengan persenjataan api seperti duapuluh senapan kuno. Suria Alam mengampuni tahanan orang Biaju dengan berharap mereka tidak berbuat kecauan lagi, ternyata mereka, orang Biaju masih dendam dan bergabung dengan Pangeran Purabaya di Pulau Laut. Orang-orang Biaju memohon dukungan Pangeran Purabaya, rupanya Pangeran Purabaya masih mempunyai dendam yang besar kepada keluarga kerajaan Banjar yang mengusirnya dari Banjarmasin sejak masa pemerintahan pertama Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663).

Dengan demikian tergambar, bahwa ketika Sultan Amarullah Bagus Kusuma naik tahta Pertama (1661-1663), kemudian berhasil merebut kembali tahta keduanya dari kekuasaan Sultan Surianata (1663-1679) dan Sultan Amarullah Bagus Kusuma meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar dari 1680-1700, ternyata dendam Pangeran Purabaya belum surut dan masih menyusun kekuatan di Pulau Laut sebagai daerah basis perjuangannya. Berkaitan dengan peristiwa terusirnya Pangeran Purabaya dari Banjarmasin ke Pulau Laut harus dilihat dari kemelut saat pengangkatan Sultan Amarullah Bagus Kusuma, dimana Fong (2013) menyatakan:

Telah terindikasi bahwa beberapa waktu, Purabaya telah menganggap dirinya sebagai putra mahkota yang sah, berdasarkan klaimnya pada fakta, bahwa meskipun ibunya adalah puteri Makasar, ayahnya, adalah paman dari Bagus Kusuma, yang telah menjadi bupati ketika Bagus Kusuma masih kecil. Ketika Bagus Kusuma beranjak dewasa, sebuah suksesi (pergantian pimpinan kerajaan) menimbulkan perselisihan antara Bagus Kusuma dan Pamannya, setelah pamannya merencanakan Purabaya sebagai pewarisnya.

Dari paparan di atas terlihat, bahwa Pangeran Purabaya berusaha menuntut haknya sebagai putera mahkota, sebagaimana yang dijanjikan oleh ayahnya yang pamannya Bagus Kusuma, bahwa kelak Pangeran Purabaya yang menggantikan dirinya sebagai Sultan, tentunya hal ini salah satu sisi saingan utama Sultan Amarullah Bagus Kusuma ketika naik tahta tahun 1661. Dendam inilah yang selalu membara di hati Pangeran Purabaya, ia menyingkir dari Banjarmasin, karena malu dan menganggap dirinya telah terbuang dan pindah menetap menyusun kekuatan baru di Pulau Laut sebagai daerah Imbalan perdamaian yang diberikan kepadanya.

Dari uraian di atas dapat dibuat sebuah asumsi sementara, mengapa Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) menunjuk adiknya yang bernama Raden Basu (kemudian bergelar Pangeran Dipati Tuha) untuk mengemban tugas bersama pasukan militer Kesultanan Banjar mengamankan wilayah Pamukan sekitarnya dari gangguan keamanan adalah dengan beberapa kemungkinan pertimbangan kebijakan antara lain:



1. Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) adalah sultan yang baru menjabat sebagai Sultan Banjar harus memperhatikan kepentingan rakyatnya, apalagi adanya gangguan keamanan dimana di wilayah Pamukan sekitarnya telah banyak berdatangan orang-orang asing, hal ini wajib diamankan sebagai ketenteraman negeri yang diperintahnya, baik terhadap orang Dayak Samihim, maupun orang-orang Banjar yang telah bermukim di wilayah tersebut, termasuk menjamin segala keamanan di dalam negerinya, mengingat saat itu aktivitas perdagangan di ibu kota Kayutangi-Karang Intan dan Banjarmasin, khususnya di Pulau Tatas barang dagangan seperti lada adalah komoditi perdagangan internasional saat itu, dimana kapal-kapal asing seperti Cina, Portugis, Belanda dan Inggris sangat memerlukan lada untuk pengisian kapal-kapal mereka, disamping pedagang dari Nusantara sendiri yang keluar masuk negeri Banjar untuk melakukan aktivitas perdagangan.
2. Ketika Raden Bagus naik tahta menggantikan Sultan Rakyat Allah (Pangeran Tapesana atau Dipati Halit) karena haknya selaku anak dari Sultan Saidullah (1637-1642) dan ia bergelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663), ternyata ada sekelompok orang dan perseorangan yang kecewa, salah satunya secara perseorangan adalah Pangeran Purabaya yang berambisi menyaingi Raden Bagus untuk mendapatkan tahta Sultan Banjar. Kekecewaan secara kelompok tidak lain dimainkan oleh mantan Sultan Rakyat Allah atau Pangeran Tapesana atau Dipati Halit, Mangkubumi Aria Wiraradja dan bangsawan sekutunya yang bermain secara terselubung, karena pergantian tahta Sultan bukanlah yang diharapkan Pangeran Tapesana. Pemilihan Sultan sudah ditetapkan dewan bangsawan Kesultanan Banjar sesuai ketentuan adat di dalam keraton Banjar atas Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Akhirnya dengan perasaan malu bercampur dendam Pangeran Purabaya diberikan daerah 'Pulau Laut' Sebagai perdamaian oleh Sultan sekitartahun 1661, tetapi dengan penuh kekecewaan dan rasa dendam Pangeran Purabaya pindah dan menyusun kekuatan di daerah Pulau Laut. Berdasarkan letak posisi geografis Pulau Laut berseberangan dengan wilayah Pamukan, Sampanahan, Cengal dan sekitarnya hanya dipisahkan oleh selat yang dekat, hal inilah oleh Sultan

Amarullah Bagus Kusuma wajib diantisipasi untuk mengamankan sedini mungkin wilayah Pamukan sekitarnya dari pendudukan pihak asing maupun kekacauan yang dibuat oleh Pangeran Purabaya dengan kelompoknya.

Kedua asumsi tersebut di atas ditinjau dari persepektif politis, bahwa wilayah yang disebut Pamukan, Sampanahan, Cengal dan sekitarnya diamankan oleh Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) dari serangan ataupun gangguan pihak asing. Ditunjuknya adiknya yang bernama Raden Basu atau Pangeran Anom beserta pasukan militer Kesultanan Banjar yang handal dan pilihan untuk mengawal adiknya mengamankan wilayah yang nantinya disebut sebagai kerajaan baru bernama Kerajaan Tanah Bumbu. Jadi jika dilihat keadaan dalam negeri Banjar untuk wilayah bagian Tenggara pada tahun 1661 antara Pulau Laut dan daerah Tanah Bumbu terdapat dua kekuasaan dari keluarga kesultanan Banjar yakni Pangeran Purabaya sebagai pemilik tanah apanage di Pulau Laut<sup>16</sup> dan Raden Basu setelah berhasil

---

<sup>16</sup> Pangeran Purabaya telah diberikan daerah Pulau Laut sejak tahun 1660 sebagai imbalan perdamaian saat kenaikan tahta Sultan Amarullah Bagus Kusuma, ia menerimanya, tetapi memang sangat dendam dengan keluarga Kesultanan Banjar yang dianggap telah mengusirnya dari Banjarmasin saat kenaikan tahta Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Pangeran Purabaya sengaja dimunculkan namanya secara politis sebagai Putera Mahkota yang disebutkan dari pamannya Raden Bagus yang diduga adalah Pangeran Dipati Halit atau Pangeran Tapesana alias Sultan Rakyat Allah (1642-1660) menjelang pemilihan Sultan yang menggantikannya, kemungkinan Pangeran Purabaya adalah anak sultan dengan selirnya dari puteri Makasar. Ketika dua kali masa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma 1661-1663 dan 1680-1700 Pangeran Purabaya dengan kelompoknya tidak menunjukkan reaksi yang tampak atau hanya masih menyusun kekuatan, tetapi ketika masa pemerintahan sesudahnya pemberontakan terjadi. Misalnya dengan tidak puasnya tindakan kelompok orang Biaju dalam tahun 1711 menyerang pemerintahan Sultan Suria Alam (Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning 1700-1734), ketika Sultan membebaskan para tahanan orang-orang Biaju yang dilepas sultan dngan harapan baik, ternyata kelompok orang Biaju tersebut memohon kepada Pangeran Purabaya di Pulau Laut untuk bergabung melawan aparat kesultanan Banjar. Pangeran Purabaya selain merekrut pasukannya dari orang-orang Makasar berkoalisi dengan orang Biaju, Pengeran Purabaya juga mencari tambahan dukungan kepada Daeng Mamantuli, seorang pangeran Bugis yang terusir dari Makasar karena perbuatan buruknya, saat itu ia ada di Kutai sebagai tamu Kraing Bonteramboe dalam rangka mendukung klaim Kraing Bonteramboe pada wilayah Pasir. Tahun 1713 pasukan Pangeran Purabaya dan dibantu anaknya Gusti Busu, beserta pasukan orang-orang Biaju dan bergabung dengan pasukan Daeng Mamantuli menyerang Banjar, Hulu Barito, dibagian penghasil lada seperti Negara dan Bakumpai diisolasi. Pasukan militer

menduduki wilayah Pamukan, Sampanahan, Cengal, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Batulicin, Buntar Laut sekitarnya yang kemudian menjadi raja bawahan Kesultanan Banjar bergelar Pangeran Dipati Tuha sebagai Raja pertama berkuasa di Kerajaan Tanah Bumbu.

## **PERKEMBANGAN KERAJAAN TANAH BUMBU HINGGA ABAD KE-19**

### **1. Kerajaan di Tenggara Kalimantan**

Daerah-daerah seperti Sampanahan, Cengal, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Pamukan, Batulicin, Buntar Laut termasuk Pulau Laut dan sekitarnya yang umumnya dikenal dengan wilayah Kalimantan Selatan bagian Tenggara bukanlah daerah yang tidak bertuan sebagaimana ilustrasi orang dalam pemikiran tertentu saat membayangkan dan melihat riwayat asal-usul berdirinya Kerajaan Tanah Bumbu. Sebelumnya daerah ini telah didiami orang-orang dari kesatuan kelompok Dayak Samihim dari sub etnik Dayak Maanyan yang menetap dalam kerajaan mereka secara turun-temurun, namun orang Dayak tetap membayar upeti tahunan kepada pihak kesultanan Banjar. Sejak berdirinya kesultanan Banjar yang dipatok tanggal 24 September 1526 sebagai hari permulaan kemenangan Pangeran Samudera yang kemudian setelah di Islamkan oleh Penghulu yang dikirim dari Kesultanan Demak bernama Khatib Dayyan kemudian ia bergelar Sultan Suriansyah (1526-1545) yang bertahta di keraton Kuin sebagai Sultan Banjar pertama. Saat itu wilayah bagian Tenggara Kalimantan seperti Pamukan, Sampanahan, Cengal, Bangkalaan, Cantung, Buntar Laut dan Batulicin, serta Pulau Laut sekitarnya saat itu belum terdengar menjadi bagian wilayah dari kesultanan Banjar.

Nama-nama wilayah di Kalimantan bagian Tenggara tersebut di atas masih belum menjadi bagian wilayah teritorial Kesultanan Banjar, hal ini berlanjut hingga beberapa generasi pengganti Sultan Suriansyah, misalnya pada masa pemerintahan Sultan Rakhmatullah atau Panembahan Batu Putih

---

Banjar dibawah Pangeran Purba dan Pangeran Nata Dilaga dikalahkan. Belanda dan Inggris tidak mau mencampuri masalah dalam negeri Banjar. Tahun 1714 orang Banjar dengan sekutunya membalas, anak Pangeran Purabaya, Gusti Busu terbunuh, orang-orang Biaju tidak sanggup melawan pasukan militer Kesultanan Banjar dan lari kepedalaman, tertinggal orang-orang Makasar yang masih bertahan, pasukan koalisi Pangeran Purabaya mulai mengalami kekalahan dalam perang, dia tetap tidak menyerah namun terus bertarung sampai akhirnya dia (Pangeran Purabaya) terbunuh pada akhir tahun 1717.

(1545-1570), Sultan Hidayatullah atau Panembahan Batu Irang (1570-1595) hingga masa pemerintahan Sultan Musta'in Biellah atau Marhum Panembahan (1595-1620) juga masih belum ada berita asing maupun lokal yang menyatakan, bahwa daerah Kalimantan bagian Tenggara menjadi wilayah teritorial kesultanan Banjar. Barulah semasa pemerintahan pemerintahan Sultan Inayatullah atau Ratu Agung (1620-1637) daerah bagian tenggara seperti Pulau Laut dan Satui dimasukan dalam wilayah kesultanan Banjar seperti paparan A.A. Cense dalam Fong (2013) disebutkan: "Selama dekade awal abad ke-17, khususnya diseluruh daerah selatan kawasan barat, tenggara dan timur Kalimantan menyatakan hormat kepada Banjarmasin. Pada tahun 1636, Panembahan mengklaim Sambas, Lawei, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawei, Kahayan Atas dan Kahayan Bawah, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asem-Asem, Kintap dan Sawarangan sebagai negara bagian kekuasaannya".

Pada masa pemerintahan Sultan Inayatullah (1620-1637) itulah kawasan Pulau Laut dan Satui dianggap bagian dari wilayah teritorial kesultanan Banjar, hal ini dilakukan sultan Inayatullah berkaitan dengan penambahan wilayah baru dalam kesultanan Banjar, disamping itu ancaman dari Mataram yang masih menganggap Kesultanan Banjar dalam taklukannya, mengingat Demak dulunya membantu berdirinya Kesultanan Banjar, setelah Demak jatuh ke dalam kekuasaan Pajang dan kemudian Mataram, maka Mataram selalu jadi ancaman Kesultanan Banjar. Wilayah baru seperti tersebut di atas dimasukan ke teritorial Kesultanan Banjar, karena potensi penduduknya diharapkan bisa menambah kekuatan jika Mataram benar-benar bertindak menyerang Kesultanan Banjar., disamping tanah dan potensi kekayaan alamnya melimpah.

Selain persoalan Mataram yang selalu mengancam dan kepentingan hubungan dagang dengan negara-negara asing saat itu, dimana pihak VOC Belanda yang mulai meredakan peristiwa dalam tahun 1612, dimana akibat serangan VOC tersebut keraton Kuin dihancurkan, sehingga ibu kota pindah lebih kepedalaman yakni ke Kayutangi-Karang Intan. Lada Banjarmasin di tahun 1626 amat meningkat, VOC Belanda berusaha mendapatkan monopoli lada dan menghilangkan rasa cemas dengan peristiwa tahun 1612, antara lain

permintaan maaf VOC atas perampokan kapal jung Banjar yang dalam perjalanannya ke Brunai 4 Juli 1626. Dalam tahun 1626 Sultan Inayatullah meminta kepada VOC Belanda hubungan dagang dijalin kembali, hal ini ada hubungannya dengan permusuhan Banjar dengan Mataram.

Tahun 1631 perasaan takut terhadap serangan Mataram menghantui semua rakyat Kesultanan Banjar, seperti halnya Sukadana yang telah diserang Mataram, tanggal 2 September 1631, Sultan Inayatullah mengirimkan dua orang utusannya guna merundingkan pertolongan defensif pada VOC, Belanda, kesempatan ini dimanfaatkan oleh VOC Belanda untuk mendapatkan monopoli lada atas kesultanan Banjar. Ketika G. Corszoon tiba dengan kapal-kapalnya bulan Juli 1633 di Banjarmasin, ternyata monopoli lada telah diberikan kepada orang Makasar, sehingga armada VOC Belanda hanyalah sebagai tameng untuk menghadapi serangan Mataram. Pada Bulan Januari 1634 commandeur Pool tiba di Banjarmasin dengan 6 buah kapalnya, sungai-sungai penuh dengan penghalang kayu-kayu besar, negeri Banjar seakan kosong, ternyata Sultan Inayatullah telah bersiap-siap didarat dengan 3000 orang pasukan militernya. Akhirnya terjadilah negosiasi antara utusan V.O. C Belanda dan pembicaraan damai dilakukan, sultan bersedia menjanjikan monopoli lada asalkan VOC mau menjamin keselamatan negeri Banjar dengan kapal-kapalnya. Sekalipun VOC menjagai muara Sungai Barito, lada Banjar terus mengalir keluar melalui sungai-sungai kecil yang banyak jumlahnya di daerah wilayah Kesultanan Banjar untuk dijual kepada pedagang-pedagang Makasar dan pedagang Cina.

Barulah pada tanggal 4 September 1635 atas nama Sultan di Kesultanan Banjar diwakili Syahbandar Ratna di Radja alias Godja Babouw di Batavia mendatangi kontraknya yang pertama dengan VOC Belanda yang isi perjanjian tersebut antara lain: selain hal-hal mengenai pembelian lada dan soal bea cukai, VOC akan membantu menaklukan Pasir dan Kutai kembali serta melindungi terhadap Mataram.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Idwar Saleh menambahkan soal penaklukan Pasir dan Kutai sebenarnya telah ada dirancang Banjarmasin sendiri. Daerah ini diduduki oleh orang Makasar karena amat penting bagi produksi pembuatan kapal-kapal armada dagang dan perang mereka, dan dari sini mereka kerap merampok kedaerah lada Tabalong.

Setelah perjanjian 4 September 1635, wajar pada tahun 1636 daerah Satui dan Pulau Laut menjadi dianggap penting dan dimasukkan sebagai bagian wilayah teritorial Kesultanan Banjar oleh Sultan Inayatullah (1620-1637) bersama daerah pesisir lainnya di Tanah Laut seperti Asam-Asam, Kintap dan daerah Sawarangan, lebih-lebih daerah Pulau laut kemungkinan besar dijadikan tempat persinggahan dan perbekalan pasukan kapal perang VOC Belanda, dimana Pulau tersebut sebagai daerah batu loncatan strategis lewat laut untuk membantu Kesultanan Banjar menaklukkan Pasir dan Kutai di Kalimantan Timur. Mengenai orang Dayak Samihim dengan kerajaannya tetap diwajibkan membayar upeti tahunnya kepada Sultan, mengingat daerah yang merekatempati seperti Pamukan, Sampanahan, Cengal, Bangkalaan, Cantung, Batulicin dan sekitarnya juga menjadi bagian tanah wilayah Kesultanan Banjar, apalagi setelah Pasir dapat ditaklukan, namun daerah-daerah tersebut saat itu tidak terlalu diperhatikan. Ketika masa pemerintahan Sultan Saidullah bin Inayatullah (1637-1642) sebagai Sultan Banjar keadaan politik dalam negeri Kesultanan Banjar terbelenggu kemelut politik internal perebutan tahta, walaupun Sultan Saidullah berhasil naik tahta tahun 1637 menggantikan ayahnya Sultan Inayatullah secara sah karena ia keturunan langsung dari ibu permaisuri Sultan Inayatullah, ia ternyata tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, karena rongrongan saudara seayahnya Pangeran Dipati Anom (anak dari selir Sultan Inayatullah bernama Ratu Ibu dari golongan Biaju (orang Dayak Ngaju) yang juga berambisi untuk menjadi Sultan Banjar.

Sultan Saidullah tidak berketik, roda pemerintahan dijalankan pamannya Pangeran di Darat sebagai orang yang paling berkuasa dalam pemerintahan. Ketika Pangeran di Darat meninggal dunia, ia digantikan Dipati Halit atau Pangeran Tapesana sebagai Mangkubumi yang juga sama berkuasanya. Sultan Saidullah seakan boneka dalam kekuasaannya. Tahun 1642 Sultan Saidullah meninggal dunia, ia meninggalkan anaknya yang masih kecil dan belum dewasa bernama Raden Bagus dan Raden Basu, perwalian pemeliharaannya diserahkan kepada Mangkubumi Dipati Halit atau Pangeran Tapesana. Mengingat Raden Bagus dan Raden Basu belum dewasa kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Mangkubumi Dipati Halit (Pangeran Tapesana) dia menganggap dirinya mewakili anak-anak almarhum Sultan

Saidullah untuk menjadi Sultan Banjar, Dipati Halit (Pangeran Tapesana) menobatkan dirinya sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Rakyat Allah (1642-1660).

Semasa pemerintahan Sultan Rakyat Allah (1642-1660) roda pemerintahan Kesultanan Banjar berjalan baik, terutama dalam hubungan luar negeri dan menjalin hubungan dagang dengan pihak asing, namun disatu sisi permasalahan internal di keraton Kayutangi-Karang Intan masih mendapat rongrongan keluarga besar Pangeran Dipati Anom (bersama Ratu Ibu dari golongan Biaju), karena Pangeran Dipati Anom masih berambisi menggulingkan Sultan Rakyat Allah dalam pemerintahannya, apalagi setelah Sultan Rakyat Allah mengangkat anaknya Pangeran Aria Wiraradja sebagai Mangkubumi, semakin memperkeruh suasana internal kesultanan Banjar.

Pada akhir tahun 1659 kekuasaan Sultan Rakyat Allah semakin rumit keadaan di dalam negeri Kesultanan Banjar, Pangeran Dipati Anom dan Ratu Ibu mulai menyusun strategi untuk menggulingkan Sultan didukung oleh sebagian bangsawan Banjar dan kelompok orang-orang Biaju, disisi lain Raden Bagus dan Raden Basu anak almarhum Sultan Saidullah sudah dewasa dan mulai menuntut hak-haknya, terutama Raden Bagus yang secara otomatis adalah Putera Mahkota calon Sultan Banjar berdasarkan adat-istiadat Kesultanan Banjar. Disisi lain dibagian Tenggara Kalimantan daerah Pamukan, Sampanahan dan sekitarnya yang merupakan wilayah orang Dayak Samihim dari sub Maanyan diserang oleh pendatang-pendatang asing, ada yang menyebut diserang oleh kaum Lanun (Bajak laut), ada yang menyatakan diserang oleh penyiar agama Islam dari Jawa sebagai proses Islamisasi terhadap orang Dayak Samihim, ada juga versi serangan dari Kerajaan Pasir dan berbagai versi tentang kekacauan di daerah Tenggara tersebut.

Konflik kepentingan secara internal menjelang tahun 1660 semakin memanas di keraton Kesultanan Banjar di Kayutangi-Karang Intan, setelah Raden Bagus dan Raden Basu menuntut hak mereka untuk menjadi calon Sultan, terutama Raden Bagus sebagai anak tertua almarhum Sultan Saidullah punya hak penuh sebagai Putera Mahkota untuk menjadi Sultan. Kubu Sultan Rakyat Allah dengan anaknya Aria Wiraradja selaku Mangkubumi masih ingin bertahan dalam pemerintahannya, bahkan kemunculan seorang bernama

Pangeran Purabaya yang sengaja ditampilkan Sultan Rakyat Allah mengaku sebagai Putera Mahkota sesuai janji ayahnya yang merupakan paman dari Raden Bagus untuk dijadikan Sultan Banjar, (diduga Pangeran Purabaya adalah anak dari selir Sultan Rakyat Allah, sebelum ia jadi Sultan, selirnya tersebut adalah seorang puteri yang berasal dari Makasar). Kealotan terjadi dalam Dewan Mahkota bangsawan Kesultanan Banjar di keraton Kayutangi-Karang Intan menjelang tahun 1660, Pangeran Dipati Anom bersama Ratu Ibu (dari golongan Biaju) dibantu Sutadaja dan Panjangjiwa sangat mendukung keponakannya Raden Bagus sebagai Putera Mahkota untuk diangkat sebagai Sultan. Akhirnya permufakatan bangsawan Banjar memutuskan bahwa Raden Bagus diangkat sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), kemudian sebagai penghormatan dan imbalan perdamaian Pangeran Purabaya diberikan daerah Pulau Laut sebagai wilayah tanah *apanage*-nya.

Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) naik tahta sebagai Sultan Banjar bukan hanya mendapat dukungan dari pamannya Pangeran Dipati Anom, maupun neneknya Ratu Ibu, maupun kalangan bangsawan *Bubuhan* Raja-Raja Banjar, tetapi juga mendapat dukungan Portugis di Macao, karena sebelumnya ia pernah meminta bantuan Belanda, namun pihak Belanda menolaknya, sehingga monopoli lada diberikan kepada Portugis ketika Sultan naik tahta, kapal-kapal Portugis melimpah dengan lada atas perlakuan khusus sebagai balas jasa dari Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Kebijakan Sultan Amarullah Kusuma (1660-1663) yang tidak lain adalah Raden Bagus sebagai langkah perdamaian memberikan daerah Pulau Laut kepada Pangeran Purabaya yang saat itu merasa kecewa dan dendam kepada keluarga Sultan Amarullah Bagus Kusuma.

Berkaitan dengan permohonan orang Dayak Samihim, maupun orang-orang Banjar yang bermukim di daerah Pamukan, Cengal, Bangkalan, Sampanahan dan sekitarnya untuk diamankan dari gangguan pendatang asing, Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) mengutus adiknya Raden Basu (nama lainnya adalah Suria Nagara atau Sultan Negara atau Pangeran Anom) secara diam-diam dalam tahun 1660, beserta pasukan militer Kesultanan Banjar dibawah koordinasi komando Pangeran Purba pimpinan tertinggi ketenteraan



Kesultanan Banjar yang sangat bertanggungjawab kepada Sultan dan Pangeran Anom (Raden Basu), ia Panglima tertinggi mengontrol pasukan militer Banjar. Kebijakan lain dari Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) selain untuk mengamankan wilayah tersebut di atas (Pamukan, Cengal, Sampanahan, Bangkalaan dan sekitarnya) dari pendatang asing juga untuk mengontrol gerak-gerik tindakan Pangeran Purabaya yang telah diberikan daerah Pulau Laut untuk tanah apanage-nya. Mengingat kekecewaannya terhadap Sultan Amarullah Bagus Kusuma dan keluarga Kesultanan Banjar saat itu sangat mendalam dan dendam yang terpendam, sehingga langkah tepat untuk mengamankan wilayah Pamukan sekitarnya yang kemudian hari oleh Raden Basu wilayah tersebut diberikan nama Tanah Bumbu.

Raden Basu atau nama lainnya dikenal Suria Negara atau Sultan Nagara ataupun Pangeran Anom yang kemudian bergelar Pangeran Dipati Tuha, tahun 1660 dikawal bersama pasukan militer Kesultanan Banjar di bawah komando Pangeran Purba yang memiliki tanggungjawab penuh atas keselamatan Raden Basu berangkat dan direstui seizin Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) ke wilayah Pamukan, Sungai Cengal sekitarnya untuk mengamankan wilayah tersebut dari para pendatang atas permintaan penduduk lokal yaitu orang Dayak Samihim (Maanyan) yang tinggal dahulu di daerah Pamukan di sungai Cengal yang telah dihancurkan oleh para penyerang dari laut. Ditambahkan, pendapat Schwaner (1853) bukan hanya itu, tetapi juga atas permintaan atau undangan dari orang-orang Banjar yang sudah bermukim disana. (Kawasan Pamukan, Sungai Cengal dan sekitarnya).<sup>18</sup> Kedatangan

---

<sup>18</sup> Schwaner menduga bahwa orang-orang Banjarlah yang mengundang Pangeran Dipati Toeha untuk datang kesana (wilayah Pamukan, sungai Cengal dan sekitarnya) yang disebut Tanah Bumbu. Jelas bahwa dengan tidak bertahannya suku Dayak, perpindahan penduduk dari Banjarmasin melalui Gunung Meratus ke Tanah Bumbu dimulai. Kaum kolonis ini dengan keterkaitan pada tanah air mereka melalui perjalanan yang jauh tetap memiliki hubungan erat dan dengan ketundukan pada raja-raja mereka sendiri tinggal di Tanah Bumbu dan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang sering terdiri atas hanya beberapa negeri tanpa batas-batas tertentu dibawah kekuasaan para Panembahan Banjarmasin. Tetapi kondisi ini tampaknya telah bertahan selama bertahun-tahun dengan kekuasaan Banjarmasin yang hampir tidak terasa dengan tindakan hukum atau pemungutan pajak, sampai akhirnya di bawah kekuasaan Sultan Said Ullah, salah seorang putranya bernama Pangeran Dipati Toeha yang mungkin diundang oleh orang-orang Banjar yang tinggal di Tanah Bumbu berangkat ke tempat ini.

rombongan Pangeran Dipati Tuha membawa misi kedua-duanya ditujukan untuk pengamanan wilayah baik terhadap orang Dayak maupun orang Banjar yang tinggal didaerah tersebut.

Pangeran Dipati Tuha bersama pasukan yang mengawalinya sebagian pendapat menyatakan jalur yang ditempuh adalah melalui jalan darat setelah rombongannya naik dari sungai Tabalong di Kelua, terus menyusuri jalan setapak membelah pegunungan Meratus antara Tabalong dan Balangan dan tiba menetap di Sampanahan pada sebuah sungai kecil bernama sungai Bumbu. Dari nama 'Sungai Bumbu' inilah Pangeran Dipati Tuha memberi nama wilayah ini dengan nama "Tanah Bumbu" kemudian dinamakan Kerajaan Tanah Bumbu berdasarkan nama sungai tersebut. Adapun wilayah kekuasaan Pangeran Dipati Tuha membentang dari Tanjung Aru hingga Tanjung Silat.<sup>19</sup>

Pangeran Dipati Tuha bin Saidullah (1660-1700), sebagai Raja pertama di Kerajaan Tanah Bumbu telah berhasil mengamankan wilayah-wilayah yang dianggap rawan dari gangguan keamanan, ia menetap di Sampanahan ditepian Sungai Bumbu, Pangeran Dipati Tuha berhasil menyatukan semua penduduk disana dan membangun keraton seadanya, kemudian ia kawin dengan seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Nyai Galih atau Gusti Batar. Schwaner (1853) tidak menjelaskan siapa Nyai Galih ataupun keturunan bangsawan dari mana, yang jelas ia dijadikan sebagai permaisuri mendampingi Pangeran Dipati Tuha dalam menjalankan pemerintahannya sebagai Raja Tanah Bumbu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kekuasaannya Pangeran Dipati Toeha mencakup semua tanah yang terbentang dari Tanjung Silat di Selatan sampai Tanjung Aru di utara disebut Kerajaan Tanah Bumbu, sebuah kerajaan berupa vazal dari Kesultanan Banjar di Tenggara Kalimantan Selatan. Sebuah dugaan secara politis, mengapa Raden Bagus (Amarullah Bagus Kusuma) baru naik tahta tahun 1661, tetapi adiknya (Raden Basu) sudah duluan dikirim dengan pasukan tahun 1660 ke wilayah Cengal, Sampanahan sekitarnya, hal ini strategi politik Raden Bagus, Jika ini suruhan Sultan Rakyat Allah (1642-1660) sangat tidak mungkin terjadi, karena Sultan Rakyat Allah saja berusaha memadamkan keinginan kedua bersaudara ini untuk menggantikan tahtanya, tetapi karena desakan Dewan Mahkota Kesultanan Banjar, akhirnya mau menyerahkan tahtanya kepada Raden Bagus yang kemudian bergelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma.

<sup>20</sup> Mengenai nama Nyai Galih, perlu dijelaskan disini, nama Nyai Galih ada kesamaan dengan seorang puteri dari suku Mandar, dimana sebagai bukti makam Islam tertua dari suku-suku di Sulawesi yang berdatangan di daerah Pasir dan Kalimantan Tenggara, setelah adanya perjanjian Sultan Makasar meminjam tanah Pasir sebagai tempat berdagang

Pangeran Dipati Tuha sebagai Raja di Kerajaan Tanah Bumbu, tentunya bukan harus lepas dan berdiri sendiri terpisah dengan Kesultanan Banjar, kerajaan yang ia pimpin adalah kerajaan bawahan (*vazal*) tetap mendapat bimbingan dari Kesultanan Banjar, ia dianggap sebagai raja yang mandiri memerintah wilayah Kerajaan Tanah Bumbu, namun tetap setia dengan kakaknya Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) selaku Sultan Banjar, memang ada versi pendapat yang menyatakan, bahwa Pangeran Dipati Tuha dikirim oleh Sultan Amarullah Bagus Kusuma ke Pamukan dan sekitarnya untuk mengamankan wilayah disana pada kenaikan tanta yang kedua, yakni antara tahun 1680-1700, setelah Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata (1663-1679) yang juga pamannya sebelumnya menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma saat pemerintahan pertamanya (1661-1663). Tanpa memperdebatkan persoalan itu yang jelas Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) adalah adik Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang diangkatnya sebagai Raja pertama di Kerajaan Tanah Bumbu.

Sebelum Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) diperintahkan kakaknya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) untuk mengamankan wilayah Pamukan, Sampanahan dan wilayah sekitarnya, kemudian menjadi raja bawahan memerintah di kerajaan baru yang bernama Kerajaan Tanah Bumbu, ia (Raden Basu) sudah pernah membantu Sultan Amarullah Bagus Kusuma menjabat sebagai kepala wilayah propinsi penghasil lada, ia dikenal dengan Suria Negara atau Pangeran Anom atau orang di wilayah daerah pengawasannya seperti daerah Bakumpai, daerah Muara Rampiau dan daerah

---

kepada Kesultanan Banjar saat sultan Musta'inbillah (1595-1620), sewaktu Kiyai Martasura diutus Sultan Musta'inbillah ke Makasar dan membuat perjanjian dengan I Mangadacina Daeng Sitiba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, yaitu Sultan Tallo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654, nama Nyai Galih dari Mandar kebetulan sama dengan nama Nyai Galih permaisuri Pangeran Dipati Tuha (1660-1700) namun tahunnya berbeda. Kemungkinan besar nama Nyai Galih dalam laporan C.M. Schwaner (1853) adalah dari keturunan bangsawan Banjar yang duluan tinggal di kawasan Sampanahan sebelum masuknya Pangeran Dipati Tuha untuk mengamankan wilayah tersebut. Kalau melihat Silsilah keturunan keluarga Raja-Raja Tanah Bumbu, versi Hendri Nindyanto (Mei, 2014) dalam "Kerajaan Cantung dan Kerajaan Tanah Bumbu", selaku keturunan ke 4 dari Pangeran Kusumanegara/Adji Darma Bin Adji Madura dalam silsilah Kerajaan Cantung-Tanah Bumbu, bahwa Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha menikah dengan Gusti Batar, adalah anak dari selir Sultan Inayatullah.

Nagara menyebutnya sebagai Sultan Negara, kemungkinan kebijakan Sultan Rakyat Allah (1642-1660) sebelumnya untuk member jabatan keponakannya ini.

Pengalaman Pangeran Dipati Tuha menjabat sebagai kepala wilayah propinsi di daerah penghasil lada tersebut sebelumnya adalah pertimbangan khusus kakaknya Sultan Amarullah Bagus Kusuma untuk mengangkatnya sebagai Raja di Kerajaan yang oleh adiknya Pangeran Dipati Tuha atau Raden Basu diberi nama Kerajaan Tanah Bumbu (yang diambil dari nama sungai kecil yang bernama Sungai Bumbu di wilayah Sampanahan). Pangeran Dipati Tuha sebagai Raja Tanah Bumbu pertama berhasil menyatukan orang-orang Banjar dan orang Dayak Samihim sebagai rakyatnya, namuntidak menutup kemungkinan para pendatang atau pedagang yang bertempat tinggal di kawasan Pamukan, Sampanahan, Cengal, Bangkalaan, Cantung, Batulicin dan Buntar laut, seperti orang Bugis Gowa, Bone, Wajo, Makasar, Jawa, Melayu maupun pendatang lainnya. Perkawinan Pangeran Dipati Tuha dengan Nyai Galih (Gusti Batar) menghasilkan keturunan dua orang anak, yaitu Pangeran Mangu dan Pangeran Citra.<sup>21</sup>

Ketika terjadi perubahan suksesi (pergantian kepemimpinan) kekuasaan di Kayutangi-Karang Intan, dimana pamnnya Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang bernama Pangeran Dipati Anom berserta Ratu Ibu dan dukungan orang-orang Biaju (Dayak Ngaju) pada tahun 1663 menggulingkan kakaknya selaku Sultan Banjar, Pangeran Dipati Tuha diperkirakan jelas memberikan bala bantuan beserta pasukannya yang setia berangkat ke kawasan Hulu Sungai, terutama menggalang pasukan di daerah Banua Lima dengan basis perjuangan di daerah Alai, Amuntai, Nagara, dan daerah Banua Lima sekitarnya, dimana daerah tersebut merupakan sebagian tanah lungguh (*apanage*) kedua kakak beradik ini (Raden Bagus atau Sultan Amarullah Bagus

---

<sup>21</sup> Schwaner (1853) menyebutkan, "Pangeran Dipati Toha memiliki dua orang putra yaitu Pangeran Mangu dan Pangeran Citra, dengan Pangeran Mangu menggantikan ayahnya memerintah Tanah Bumbu sementara Pangeran Citra kembali ke Banjarmasin, menerima dari Sultan tanah *apanage* negori Kluwak, di atas Amuntai ditepi aliran sungai Tabalung atau Negara". Perlu diperjelas nama negori "Kluwak", ditafsirkan dengan daerah Kelua yang berada ditepian aliran sungai Tabalong yang mengalir dari hulu Tabalong ke daerah Amuntai dan bagian hilirya bertemu dengan sungai Negara.

Kusuma dan Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha) yang telah dimiliki mereka sebelumnya. Disamping itu sebelum Raden Basu menjadi Raja Tanah Bumbu ia adalah kepala wilayah di daerah Negara dikenal oleh rakyat disana dengan Sultan Negara alias Suria Negara atau biasa disebut dengan Pangeran Anom. Dari kawasan Alai dan Amuntai inilah Raden Bagus (Amarullah Bagus Kusuma) dan adiknya Raden Basu (Pangeran Dipati Tuha) Raja Tanah Bumbu mulai menyusun kekuatan untuk memberontak dan menyerang Sultan Surianata atau Pamannya yang bernama Pangeran Dipati Anom yang telah merampas dan menggulingkan tahta Amarullah Bagus Kusuma.

Saleh (1958) memberikan alternatif tentang kesempatan Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata (1663-1679) berhasil menggulingkan tahta keponakannya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) dipaparkan beliau antara lain:

“Bila sejak 1637 Pangeran Surianata telah mencoba menduduki tahta, ditahun 1642 didahului oleh Tapesana, di tahun 1660 dengan sokongannya Sultan Amarullah dapat menaiki tahta ayahnya, dan baru tahun 1663 ia merebut tahta, kesempatan ini mungkin, karena : (1) Amarullah sebagai Sultan hanya boneka saja di tangan Tapesana dan anaknya Pangeran Aria Wiraradja. Kontrak 1661 (dengan VOC Belanda), masih diurus oleh Tapesana; (2) Politik anti VOC Pangeran Surianata yang sejak 1635 hingga 1665, baik mengenai kontrak, monopoli ataupun bantuan kapal-kapal VOC Surianata mempersalahkan utusan-utusan Pangeran Ratu yang tahun 1662 pergi ke Batavia untuk mengurus bantuan-bantuan ini dan ia tak menyukainya. Politik anti VOC ini jelas sekali ketika ia dengan 200 perahu perangnya dan 700 orang prajuritnya berdemonstrasi mengelilingi kapal-kapal VOC yang sedang berlabuh di Banjarmasin, sehingga Pangeran Ratu menasihati VOC agar jangan berlabuh dengan satu kapal saja, takut peristiwa 1638 terulang lagi. (3) Dalam peristiwa perebutan kekuasaan ini, Pangeran Surianata hanya sebuah pion ditangan ibunya, yaitu Ratu Ibu. Ratu ini merupakan salah satu contoh wanita-wanita yang turut berpolitik dalam sejarah kerajaan Banjarmasin”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Idwar Saleh menjelaskan, bahwa perebutan kekuasaan Sultan Surianata (1663-1679) dari keponakannya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663) adalah perebutan kekuasaan yang setengah-setengah ini membahayakan dirinya dikemudian hari. Mula-

Dari paparan di atas betapa lamanya waktu yang diperlukan oleh Pangeran Dipati Anom bersama ibunya yang bernama Ratu Ibu dan dukungan orang-orang Biaju (Dayak Ngaju) untuk merebut tahta dan menjadikan ia sebagai Sultan Surianata (1663-1679) yang memerintah dalam Kesultanan Banjar. Sultan ini lebih pro E.I.C. Inggris jika dibandingkan dengan VOC Belanda, sehingga utusan-utusan Kesultanan Banjar yang terdahulu termasuk mantan Sultan Rakyat Allah (1642-1660) atau Pangeran Tapesana alias Dipati Halit yang telah membuat kontrak atau perjanjian dengan VOC Belanda tidak dipakainya dalam kebijakan hubungan dagang maupun proteksi Kesultanan Banjar.

## **2. Raja Tanah Bumbu Ikut Berjuang Merebut Kembali Tahta Amarullah Bagus Kusuma**

Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) setelah ia digulingkan tahtanya dan digantikan Sultan Surianata (1663-1679) tentunya tidak tinggal diam, apalagi ia memiliki seorang adik (Raden Basu) yang telah menjadi raja bawahan di wilayah kekuasaannya dalam Kerajaan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan bagian Tenggara yang bergelar Pangeran Dipati Tuha. Tentunya antara kedua kakak beradik ini Raden Bagus (Amarullah Bagus Kusuma) dan Raden Basu (Pangeran Dipati Tuha) Raja Tanah Bumbu menyusun dan menggabung dua pasukan militernya menjadi satu kekuatan untuk melawan Sultan Sultan Surianata dan menuntut kembali hak yang sah atas tahtanya.

Fong (2013) menyatakan, bahwa berdasarkan catatan-catatan Belanda, pada tahun 1670-an kekuasaan Pangeran Dipati Anom (maksudnya Sultan Surianata) secara serius ditantang oleh dua putra Pangeran Ratu (gelar lain ayah angkatnya Raden Bagus dan Raden Basu yang tidak lain adalah mantan Sultan Rakyat Allah) yaitu Suria Angsa dan Suria Negara (juga dikenal dengan Raden

---

mula ia berkuasa sekali dengan sokongan golongan Biadju (Orang Dayak Ngaju) dan golongan bangsawan yang memihaknya, Pangeran Ratu (mantan Sultan Rakyat Allah (penguasa 1642-1660) hanya disokong oleh rakyat dan golongan pedagang. Anehnya coup (kudeta) ini merupakan politik kompromi, yang berarti pengaruh Tapesana (nama lain dari mantan Sultan Rakyat Allah) besar dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Kompromi itu ialah: a. Pangeran Ratu (mantan Sultan Rakyat Allah) akan tetap bertahta di Kayu Tangi; b. Pangeran Surianata pindah ke Banjarmasin, yang menjadi ibukota ketiga kalinya. Dari martapura diangkutnya 10 pucuk meriam, 600 orang prajurit tambahan dan orang-orang dari Dewan Mahkota. Dari pusat baru inilah ia mengontrol perdagangan, tambang-tambang emas dan hasil dari kebun-kebun lada.

Bagus dan Raden Basu).<sup>23</sup> Perlawanan Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan adiknya Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) untuk merebut tahta kembali dari Sultan Surianata (1663-1680) masih berlangsung dimana sejak tahun 1670-an serangan pasukan kubu Amarullah Bagus Kusuma gencar dilakukan terhadap Banjarmasin (karena Sultan Surianata berada di keraton Banjarmasin). Namun pasukan Amarullah dan pasukan adiknya Pangeran Dipati Tuha yang membantu pemberontakan tersebut mengalami kekalahan. Tahun 1677 orang-orang Makasar menyerbu Banjarmasin tapi dapat dipukul mundur. Pada tahun 1678, pasukan Amarullah mundur kembali ke basis perjuangan di daerah Alai dan Amuntai bertahan disana juga untuk menahan hasil-hasil lada, selain menyusun kekuatan kembali untuk menyerang Sultan Surianata di Banjarmasin.<sup>24</sup>

Disisi lain pasukan kapal Portugis membantu pasukan Amarullah Bagus Kusuma lewat perairan, terutama di daerah Muara Barito berpatroli hingga Muara Kuin Cerucuk, kadang sesekali kapal Portugis masuk ke sungai Martapura yang melintasi Pulau Tatas untuk berjaga-jaga jika ada bantuan asing seperti Inggris yang menjadi sekutu Sultan Surianata yang turun campur dalam konflik bersenjata internal Kesultanan Banjar. Ketika Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan adiknya Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) beserta pasukannya yang tersisa mundur ke daerah Alai dan Amuntai sambil menugaskan beberapa bagian menjaga pos-pos perkebunan lada terutama di daerah Negara, karena Sultan Surianata dengan kelompok bangsawan saat ia

---

<sup>23</sup> Goh Yoon Fong sendiri menafsirkan dari catatan Belanda, bahwa nama Suria Angsa adalah Raden Bagus, kemudian nama Suria Negara juga dikenal sebagai Raden Basu. Namun catatan dari laporan Belanda tersebut tidak memaparkan, bahwa Raden Bagus sudah pernah menjabat Sultan Banjar yang telah bergelar Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1661-1663), kemudian adiknya Suria Negara atau Raden Basu sudah pernah menjabat sebagai kepala wilayah propinsi penghasil lada yang ditugaskan mengawasi perkebunan lada di Bakumpai, Muara Rempiau dan Negara, ia diberi nama Pangeran Anom, atau di daerah Negara dikenal dengan nama Sultan Negara dan di Tanah Bumbu ia adalah Pangeran Dipati Tuha. Raja. Penetapan tahun perlawanan Suria Angsa dan Suria Negara terhadap Sultan Surianata (1663-1679) disebutkan pada awal tahun 1670-an.

<sup>24</sup> Penjelasan M. Idwar Saleh apa yang disebut oleh Goh Yoon Fong belakangan tentang nama daerah Alli dan Montrado, diinterpretasi laporan Belanda tersebut, maka nama Alli adalah sebutan daerah Alai (Batang Alai), nama Mantrado dalam laporan Belanda adalah daerah Amuntai. Kedua daerah ini basis perjuangan Amarullah Bagus Kusuma atau Raden Bagus dan adiknya Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha untuk menyerang Sultan Surianata di Banjarmasin.

memerintah memerlukan lada yang besar untuk memenuhi kontrak, khususnya dengan Inggris.

Di Kayutangi sebuah kejadian mengejutkan terjadi dalam pada bulan Mei tahun 1678, Pangeran Ratu atau Pangeran Tapesana atau mantan Sultan Rakyat Allah (pernah memerintah Kesultanan Banjar antara tahun 1642-1660) meninggal dunia, disamping usianya yang sudah tua Pangeran Tapesana adalah ayah angkat perwalian yang pernah memelihara Raden Bagus dan Raden Basu sewaktu mereka masih kecil ketika ayahndanya mantan Sultan Saidullah meninggal tahun 1642. Saat pemakaman Pangeran Tapesana atau Pangeran Ratu Sultan Surianata menghadirinya. Dengan meninggalnya Pangeran Tapesana yang harus diterima secara suka-cita oleh Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu), sekalipun Pangeran Tapesana adalah salah satu musuh dalam persoalan politik, namun ia juga keluarganya (Pamannya). berarti sudah berkurang intrik politik dalam kesultanan Banjar yang pernah dimainkan Pangeran Tapesana (mantan Sultan Rakyat Allah), demikian juga dengan posisi anaknya Aria Wiraradja semakin sempit perannya dalam kancah perpolitikan lokal di lingkungan istana Kayutangi dan Kesultanan Banjar.

Hal ini menguntungkan kubu Amarullah Bagus Kusuma dan Pangeran Dipati Tuha yang hanya menghadapi Sultan Surianata dengan pasukan militernya, berikut keluarga bangsawan seperti Pangeran Purba Negara (Raja Muda) dalam Dewan Mahkota, Raden Aria Adi Mangale (saudara isteri Sultan Surianata) dan juga Raden Panjang Jiwa yang amat berkuasa dalam pemerintahan Sultan Surianata, namun semuanya tunduk kepada Ratu Ibu yang bermain di belakang layar sebagai wanita pertama yang berpolitik dalam Kesultanan Banjar.

Pemberontakan Amrullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan adiknya Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) beserta pasukan terhenti untuk menyerang Banjarmasin, karena orang-orang Makasar yang menjadikan Pasir sebagai basis operasi mereka mulai memberikan tanda dan isu yang mendekati kebenarannya akan menyerang Banjarmasin. Demikian juga dengan kubu Sultan Surianata melalui intelejen Kesultanan Banjar jauh hari telah menyiapkan diri menghadapi bahaya serangan orang-orang Makasar yang dianggap sebagai ancaman serius bagi Negara di Kesultanan Banjar. Sejak tahun 1670-an utusan Sultan Surianata sudah dikirim ke Batavia untuk membeli mesiu,



misalnya bulan Oktober 1670 Pangeran Adi Mangale, Bulan Nopember 1674 mengirimkan Naja Dوتا sebagai utusan Sultan Surianata, Bulan Mei 1676 oleh Pangeran Anom dengan perantaran utusannya Ziribad Jaya dan Intche Zaleman dan bulan Nopember 1676 oleh Pangeran Agon (Sultan Surianata dengan perantaraan Naja Dوتا dan Oupa Dوتا).

Sebelumnya, antara tahun 1669-1670 di wilayah Timur, khususnya di kawasan Sulawesi Selatan terjadi perubahan total dalam perkembangan politik di wilayah tersebut. Bandar internasional Makasar telah di kontrol Fort Rotterdam, bersendikan perjanjian Bongaya yang ditanda tangani tanggal 18 November 1667 antara kerajaan Gowa dengan pihak VOC Belanda. Belanda diuntungkan dengan perjanjian Bongaya tersebut, tetapi dari pihak Gowa dan dampaknya bagi orang Makasar dan Bugis lainnya merasa sangatlah dirugikan dengan perjanjian Bongaya tersebut. Namun kejadian sebelumnya haruslah ditinjau sebagai latar belakang apa dan mengapa orang Makasar dan orang Bugis melakukan perpindahan atau penghijrahan dari tempat tinggal asal mereka ke luar daerahnya secara besar-besaran pada pertengahan dan akhir abad ke-17, kemudian berlanjut sampai pertengahan abad ke-18.

Satu sisi yang harus dipahami dan dimengerti dalam melihat masyarakat Bugis dengan adat-istiadat dan kebiasaan orang Bugis melalui kegiatan berlayar, mengembara, berdagang dan merantau merupakan satu tradisi utuh dalam kehidupan mereka. Sebagai suku bangsa yang terkenal dekat dengan laut dalam aktivitas pelayaran dan perantauan bagi pelaut Bugis telah mengembangkan satu kebudayaan maritim yang dilakukan sejak beberapa abad yang lalu. Perahu-perahu mereka yang sangat terkenal dari jenis *Phinisi* dan *Lambo*, telah mengharungi perairan Nusantara untuk berdagang dan merantau. Istilah "*Sompe*" (berlayar) dalam masyarakat Bugis juga berarti merantau. Terjadinya penghijrahan secara besar-besaran pada abad ke-17 dan awal abad ke 18 di kalangan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan adalah karena salah satu akibat rasa tertekan tersebut. Mereka telah berhijrah ke Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera, Borneo dan Indragiri, Riau serta Alam Melayu. Secara internal yang mempengaruhi puncak penghijrahan masyarakat Bugis ke luar adalah karena keadaan politik di wilayah Sulawesi Selatan yang tidak stabil. Sebelum Belanda memasuki kepedalaman tanah Bugis, wilayah-wilayah itu sudah dalam keadaan kacau Balau.

Disamping itu disebabkan ketidakamanan di tempat tinggal mereka menyebabkan kebanyakan kegiatan ekonomi mereka tidak bisa dijalankan. Abdul Razak Daeng Pantunru (1993) dalam Rafiudin Afkari Hj. Abdul Rajak dkk. (2011) menyatakan bahwa dikalangan bangsawan-bangsawan Bugis sesama sendiri seringkali terjadi sengketa karena masing-masing tokoh menganggap dirinya lebih berhak mewarisi suatu kerajaan atau pemerintahnya. Keadaan seumpama ini menyebabkan banyaknya berlaku pertumpahan darah, perang saudara dan peperangan antar daerah-daerah. Puncak permusuhan antara Gowa dengan Bone dan meningkatnya ketegangan antara VOC Belanda dengan Gowa telah menyebabkan terjadinya perang Makasar. Pergolakan perang Makasar tersebut telah menjadi faktor pendorong penghijrahan masyarakat Bugis ke luar Sulawesi Selatan. Pada pertengahan abad ke-17 Gowa menjadi salah satu kerajaan terkuat dan terbesar dalam sejarah Nusantara. Begitu tersohnya kekuatan dan kejayaan Gowa sehingga orang-orang di Nusantara bagian Timur sukar mempercayai bahwa VOC Belanda berani menentang kerajaan Gowa.

Dalam perjalanan panjang pencarian sumber perdagangan lada pada kerajaan-kerajaan di Nusantara kongsi dagang Belanda yang bernama VOC sama sekali tidak tertarik untuk berhubungan dengan kerajaan Gowa terutama dalam perjalanan ke Timur, tentang pentingnya kedudukan pelabuhan Gowa baru diketahui Belanda setelah mereka merampas kapal Portugis di dekat perairan Malaka yang ternyata memiliki seorang awak kapal Makasar. Dari awak kapal orang Makasar inilah mereka mengetahui bahwa pelabuhan Gowa merupakan pelabuhan transito bagi kapal-kapal yang berlayar dari atau ke Maluku. Selain itu ketika mereka bertemu dengan kapal Gowa yang memuat orang-orang Portugis tidak diserang, untuk memberi kesan baik pada raja Gowa.

Hubungan dagang antara utusan VOC Belanda dengan Gowa berjalan baik, namun ajakan Belanda kepada raja Gowa untuk menyerang Banda terlihat mulai ada niat tidak baik dari VOC Belanda, ajakan tersebut ditolak Gowa. Kemudian utusan Belanda juga membujuk raja Gowa melarang menjual beras kepada orang-orang Portugis. Mulai retak hubungan VOC Belanda dengan raja Gowa saat pihak VOC Belanda menyerang Maluku. Penyebab yang agak fatal, ketika orang-orang VOC Belanda menagih utang mereka kepada pembesar

kerajaan Gowa adalah ketika pembesar Gowa tersebut diundang ke atas kapal VOC Belanda, kemudian dilucuti, terjadilah perkelahian dan jatuh korban.

Sebagai pembalasan dalam tahun 1616 terjadi pembunuhan orang Belanda yang dilakukan oleh orang Makasar saat turun dipelabuhan Sumba. Jan Pieters Coen marah besar dan menaruh dendam pada orang-orang Makasar. Tahun 1634 kerajaan maritim Gowa diblokir oleh Belanda lewat laut, salah satunya jalan upaya VOC Belanda adalah mengadakan kontrak atau perjanjian dagang dengan Kesultanan Banjar dalam tahun 1634 saat Sultan Inayatullah (1620-1637). VOC Belanda mengirimkan 6 buah kapal mereka di Martapura. Demikian juga armada kapal VOC Belanda memblokir Sombaopo di Gowa terus merusak, merebut kapal Portugis dan kapal dagang India juga perahu-perahu orang Makasar. Kebencian orang Gowa kepada VOC Belanda semakin besar.

Perang terbuka mulai digelar pada tahun 1654 berlangsung hingga 1655 antara VOC Belanda dengan sekutu kerajaan Gowa. Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto (1984) memaparkan:

“Meskipun perjanjian Bongaya ditandatangani tanggal 18 November 1667 antara kerajaan Gowa dan Kompeni, keadaan yang diharapkan Kompeni tidak terlaksanakan begitu saja. Gowa sangat merasa tertekan oleh isi perjanjian ini, sehingga mengajukan protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Gowa pun tetap mempersiapkan diri untuk kembali melawan Kompeni, karena merasa sangat dirugikan. Pada tanggal 16 April 1668, Gowa memulai penyerangan terhadap pendudukan Belanda di wilayahnya yang mengakibatkan banyak korban. Diantaranya Aru Palaka pun tidak luput dari serangan itu dan menderita luka-luka. Kompeni sangat menderita akibat serangan ini, sehingga Speelman memutuskan untuk meninggalkan Gowa beberapa waktu. Tanggal 5 Agustus, Gowa mencoba lagi untuk memulai perang. Pasukan Sultan Hasanuddin berhasil mengepung Aru Palaka akan tetapi Kompeni dibantu oleh orang-orang Ternate berhasil memberi bantuan kepada Aru Palaka, Meskipun demikian Speelman memuji Sultan atas kebenarannya. Bagi Sultan ini adalah kewenangan terakhir, karena Speelman mulai melakukan penyerangan total terhadap Gowa, sehingga Gowa dapat ditundukan. Banyak orang-orang Makasar yang merasa sangat dirugikan oleh perjanjian Bongaya meninggalkan Gowa dan mengembara serta memberi bantuan-bantuan kepada musuh Kompeni, misalnya kepada

Tronojoyo dari Madura. Orang-orang Makasar yang mulai mengembara dibawah pimpinan Karaeng Montemara Monmaranu dan Karaeng Galesung ternyata tidak mau tunduk kepada Kompeni”.

Pada tahun 1669, Sombaopu, ialah benteng ibu kota kerajaan Gowa yang sangat kuat dan yang menjadi simbol kemegahan kerajaan Gowa, jatuh ketangan musuh. Setelah kejatuhan Gowa pemimpin baru yang muncul dan berkuasa di di Sulawesi selatan adalah Arung Palaka ialah pahlawan Bugis Bone-Soppeng Berjaya mendominasi kekuasaan wilayah Sulawesi. Kesan pergolakan di Sulawesi Selatan yang melibatkan pihak Belanda dengan kerajaan setempat ini telah memberikan implikasi terhadap migrasi besar-besaran masyarakat Bugis pada akhir abad ke-17. Dalam kancah perang di Sulawesi Selatan melawan VOC Belanda yang umumnya disebut melawan pihak Kompeni, ternyata bantuan tenaga-tenaga orang Wajo kepada Gowa untuk perang antara Gowa dengan Kompeni sangat besar berjumlah 10.000 orang. Setelah perjanjian, tenaga bantuan itu dikirim kembali ke Wajo. Bone yang menjadi sekutu dengan Kompeni ditundukan tahun 1670. Pada akhir tahun 1670 itu juga Kota Tosora sebagai pusat awal perkembangan Islam dan pusat Kerajaan Bugis Wajo telah dihancurkan, hal ini semakin menambah arus penghijrahan dalam kalangan masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan itu bilangan perantauan orang Bugis Wajo selepas 1670 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok lain di daerah-daerah lain di Makasar. Orang-orang Bugis adalah orang merdeka, mereka bebas berniaga, berlayar dan hidup dalam kekerabatan dan memiliki budaya pelaut dan perantau, ketika VOC Belanda merampas kebebasan tersebut mereka berontak. Perang adalah salah cara mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan tersebut, walaupun akhirnya harus mengalami kekalahan, tetapi pantang harus dijajah dan diperlakukan sewenang-wenang oleh bangsa asing seperti VOC Belanda.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kota Tosora menurut kronik Lontara disebutkan sebagai pusat kerajaan Wajo di masa lampau. Pusat Kerajaan Wajo diperkirakan berpindah dari Cinnottabi ke Tosora pada awal masuknya agama Islam di Wajo. Sumber sejarah menunjukkan bahwa agama Islam resmi sebagai agama Kerajaan Wajo ketika Arung Matowa Wajo XII La Sangkuru Patau Mulajaji memeluk agama Islam pada tahun 1610 dengan gelar Sultan Abdurrahman. Versi lain menyatakan agama Islam masuk ke Tosora dibawa oleh Jamaluddin al-Akbar al-Husaini

Oleh karena situasi itu menyebabkan sebahagian orang Bugis keluar dari kampung halamannya pergi merantau ke kawasan Indonesia lainnya dan ke Alam Melayu. Berita yang semula hanya isu tentang wilayah Kesultanan Banjar dan khususnya ibu kota Kesultanan Banjar di Kayutangi-Karang Intan, maupun pusat perdagangan di Pulau Tatas Banjarmasin disekitarnya akan diserang oleh pasukan orang-orang Makasar ternyata benar. Tahun 1677 serbuan itu terjadi. Dalam laporan Belanda 13 Mei 1677 pada Dagh, p. 135, menyatakan bahwa Daeng Tellolo, dibantu lanun (bajak laut) yang terkenal orang Melayu Soelongs dengan tiba-tiba menyerbu Banjarmasin hingga keraton musnah, tetapi dapat dipukul mundur dengan kekalahan besar. Daeng Tellolo pulang ke Sumbawa dan Soelongs ke Tetoly kembali.<sup>26</sup>

Masa pemerintahan Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata (1663-1679) dirasakan sangat berat menstabiliskan keadaan dalam dan luar negeri Kesultanan Banjar, disatu sisi ancaman serangan orang-orang Makasar selalu menjadi kecemasannya, terbukti sudah menyerang tahun 1677, dalam tahun 1678 ia harus menghadapi pemberontakan Amarullah Bagus Kusuma yang oleh Sultan Suianata sering disebutkan namanya dengan Suriadilaga (arsip-arsip Belanda menuliskan dalam laporannya *Zouriadilaga* atau *Zoura de Wangsa*, atau *Suria Angsa*) yang tidak lain adalah Raden Bagus dan adiknya

---

pada tahun 1320 Masehi. Kemudian Masjid Raya pertamakali dibangun pada tahun 1612 oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrunji.

<sup>26</sup> Dalam makalah Mattulada, dipaparkan bahwa penghijrahan orang Bugis kebanyakan dipimpin oleh orang-orang bangsawan yang turut diiringi oleh para pengikut yang besar jumlahnya. Mereka meninggalkan Sulawesi karena tidak dapat menerima perubahan politik dan sosial yang dipaksakan oleh Arung Palakka, Belanda dan sebahagian dari kalangan pemimpin Gowa dan Wajo. Bagi orang Gowa dan Wajo, mereka meninggalkan Sulawesi bukan bermaksud "malarikan diri" sebaliknya bertujuan untuk mencari sekutu diseborang lautan yang boleh membantu merebut semula negeri mereka. Ikatan sekutu yang diperlukan dari kawasan yang mereka kunjungi ialah dari kawasan Banten, Mataram, Madura, Jambi, Palembang, Aceh, Johor dan Ayutthia (Siam). Lebih lanjut, M. Idwar Saleh (1958) menyatakan bahwa Bahaya Makasar ini hebat sekali, lebih-lebih pantai Jawa Timur tak aman akibat Perang Tronojoyo. Untuk sementara mereka kalah. Kabar angin yang tersiar dan diceritakan Pangeran Depati kepada utusan VOC, disebutkan bahwa Kraeng Labacan, Daeng Tellolo, ditolong oleh Loubousen Cheminih dan Lanun (bajak laut) Soelongs dengan sejumlah 2000 prajurit, segera akan menyerbu Banjarmasin lagi hingga ia meminta pertolongan mesiu kepada VOC dan juga kepada orang Inggris yang memberinya 4 pucuk meriam mesiu.

Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha (Belanda menuliskan dalam laporannya adalah nama *Zoura de Gara* atau *Suria Negara*).

Pemberontakan kedua kakak-beradik ini memiliki pendukung dikalangan masyarakat luas di kawasan Hulu Sungai seperti daerah Alai, Amuntai, Alabio, Negara, Muarampiau dan Bakumpai, semuanya adalah daerah penghasil lada, dimana sebagaimana daerah tersebut pernah dipimpin oleh Pangeran Dipati Tuha saat ia menjadi kepala wilayah propinsi di daerah tersebut saat bergelar Pangeran Anom atau Sultan Nagara. Demikian pula dengan prajurit Tanah Bumbu yang dikerahkan mengikuti rajanya membantu Amarullah Bagus Kusuma berjuang merebut tahtanya kembali dari Sultan Surianata yang juga paman mereka. Selain usia Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata ataupun sering disebut Pangeran Agon sudah tua rongrongan dalam dan luar negeri menghantui tahta pemerintahannya di Kesultanan Banjar.

Akhirnya Sultan Surianata lepas tangan, pemerintahannya diserahkan kepada anaknya Pangeran Dipati dengan dukungan Kalangan Bangsawan yang berasal dari golongan Biaju yang berkedudukan di Banjarmasin, jelas terlihat persaingan kuat antara anaknya Pangeran Dipati dengan kubu Sultan Amrullah Bagus Kusuma dan adiknya Raja Tanah Bumbu Pangeran Dipati Tuha yang telah mendapat dukungan kalangan masyarakat di Banua Lima dan sukarelawan militer di wilayah Tanah Bumbu. Pangeran Agon atau Sultan Surianata memberikan hak penuh kepada anaknya Pangeran Dipati sebagai calon putera mahkota yang kelak diharapkan menggantikannya atau paling tidak apabila aktivitas pemberontakan Amarullah Bagus Kusuma dan Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha dapat dipadamkan, maka Pangeran Adipati sebagai penerus Sultan Surianata memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan sebagai Sultan Banjar.

Cita-cita Sultan Surianata hanyalah impian belaka, sesudah ada upaya perdamaian kedua kubu yang dilakukan antara Paman dan keponakan, ternyata akhir bulan Juni 1679 Pangeran Agon (Sultan Surianata) dan anaknya Pangeran Dipati dibinasakan oleh Amarullah dan Saudaranya.<sup>27</sup> Dengan

---

<sup>27</sup> M. Idwar Saleh menyatakan dengan singkat bahwa berita kematian Pangeran Agon atau Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata (1663-1679) bersama anaknya Pangeran

terbunuhnya Pangeran Dipati Anom atau Pangeran Agon alias Sultan Surianata (1663-1679) beserta anaknya Pangeran Dipati, maka tahta Kesultanan Banjar kembali ketangan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680- 1700) sebagai Sultan Banjar yang memerintah di Kesultanan Banjar. Perjuangan panjang kedua kakak beradik ini rupanya harus ditempuh demikian jalannya, agar tidak terlalu banyak mengorbankan pihak rakyat Banjar, baik pendukung Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan adiknya Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) yang turut berjuang habis-habisan membantu kakaknya dari Tanah Bumbu, maupun rakyat Banjar yang mendukung pihak Sultan Surianata dan anaknya Pangeran Dipati, termasuk golongan Biaju dan bangsawan Banjar yang selalu setia kepada sultan.

Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) atau nama sebelumnya disebut Suria Negara (*Zoura de Gara*) ataupun Sultan Negara hanya selama tiga tahun saja agak tenang, saat ia diperintahkan kakaknya Sultan Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) tahun 1660 mengamankan wilayah Pamukan, Sampanahan dan sekitarnya dan diangkat sebagai raja bawahan dari Sultan Banjar sebagai Raja di Kerajaan Tanah Bumbu. Tahun 1663 Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha ikut berjuang kembali membantu kakaknya Amarullah Bagus Kusuma mengembalikan tahtanya setelah digulingkan oleh pamannya Pangeran Dipati Anom atau Sultan Surianata (1663-1679).

Hampir 7 (tujuh) tahun kesetiaan yang diabdikan Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) kepada perjuangan kakaknya Amarullah Bagus Kusuma, tentunya selama masa perjuangan itu ia pulang pergi dari Sampanahan pusat kerajaanya di Tanah Bumbu ke daerah Hulu Sungai, menggalang pasukan di daerah Alai,

---

Dipati yang telah disiapkannya untuk menjadi Sultan Banjar dapat diketahui dari cerita Intie Zorla kepada Licentimeester Ocker Ockerze di Batavia, intinya berita terbunuhnya Pangeran Suianata (Sultan Surianata) dan anaknya Pangeran Dipati dan memberitakan, bahwa Amarullah untuk kedua kalinya menjadi raja. Tidak jelas kronologis bagaimana insiden berdarah antara Paman (Sultan Surianata) dan anaknya Pangeran Dipati berseteru dengan keponakannya Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu), apakah dalam perang tanding secara terhormat, ataukah diserang kedua kakak-beradik secara mendadak, yang jelas akhir Juni 1679 Pangeran Dipati Anom atau Pangeran Agon alias Sultan Surianata dan anaknya Pangeran Dipati tewas terbunuh ditangan Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus) dan Pangeran DipatiTuha (Raden Basu). Sejak itulah Sultan Amarullah Bagus Kusuma mendapatkan tahtanya kembali menjadi Sultan Banjar (1680-1700).

Amuntai, Alabio, Negara dan Bakumpai, serta daerah Banua Lima umumnya, maupun ke Kayutangi-Karang Intan atau ke Banjarmasin dalam rangka berperang, demi perjuangan kakaknya Amarullah Bagus Kusuma (Raden Bagus). Setelah keberhasilan membantu kakaknya menjadi Sultan Banjar, Pangeran Dipati Tuha kembali ke keraton yang merupakan istana kerajaan Tanah Bumbu di Sampanahan dan kembali membangun daerah-daerah kekuasaannya dalam wilayah Kerajaan Tanah Bumbu.

Di Pulau Laut (Kotabaru sekarang) yang berseberangan dengan kerajaan Tanah Bumbu adalah wilayah kekuasaan Pangeran Purabaya sejak tahun 1660 memiliki tanah lungguh (*apanage*) yang diberikan Sultan Amarullah Bagus Kusuma ketika ia naik tahta pertamanya (1661-1663) sebagai imbalan perdamaian dengan seizin Dewan Mahkota Kesultanan Banjar, secara politis Pangeran Purabaya dan keluarganya masih menaruh dendam kepada keturunan Amarullah Bagus Kusuma, tetapi tidak menunjukkan reaksinya ketika Amarullah Bagus Kusuma terguling dari tahtanya dan dianggap sebagai raja pelarian yang bersembunyi di daerah Alai dan Amuntai sebagai basis perjuangannya.

Kemungkinan Pangeran Purabaya sebagai penguasa tanah lungguh (*apanage*) di Pulau Laut saat itu masih melihat situasi dan kondisi perlawanan Amarullah Bagus Kusuma dan adiknya Pangeran Dipati Tuha penguasa Tanah Bumbu memberontak melawan Sultan Surianata (1663-1679), bisa jadi juga Pangeran Purabaya memainkan politiknya dibalik penyerangan orang-orang Makasar pada tahun 1667 yang lalu, karena ia keturunan orang Makasar dari pihak ibunya yang diduga selir dari Pangeran Tapesana atau Sultan Rakyat Allah (1642-1660), walaupun tidak ada sumber yang menjelaskan dimana ibu Purabaya tinggal.

Tahun 1680 adalah kenaikan tahta Raden Bagus atau Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) untuk kedua kalinya menjadi Sultan Banjar yang memerintah di Kesultanan Banjar. Adiknya Raden Basu atau Pangeran Dipati Tuha bersama permaisurinya Nyai Galih (Gusti Batar) tetap berkuasa sebagai raja bawahan di Kerajaan Tanah Bumbu. Baru beberapa bulan keadaan negeri Banjar dalam keadaan aman sesudah berlalunya masa revolusi pengembalian tahta, tahun 1681 Banjarmasin diserang kembali oleh orang-orang Makasar



sejumlah 50.000 orang. Mereka telah membuat kubu-kubu pertahanan di tepi Sungai Martapura, tetapi persatuan yang kuat terdapat antara golongan pedagang dan golongan bangsawan telah berhasil memukul mundur serbuan itu.

Sultan Amarulah Bagus Kusuma (1680-1700) dikenal sebagai seorang Sultan yang cakap dan tangkas, sehingga mampu menyatukan kembali istana Kayutangi Martapura dan istana Banjarmasin. Sultan ini meletakkan fondasi yang kokoh, bagi pelaksanaan sistem pemerintahan berikutnya, sehingga fase Sultan Hamidullah, anaknya. Kesultanan Banjar mencapai zaman kemakmuran. Sultan Amarullah Bagus Kusuma senantiasa dekat dengan golongan bangsawan Banjar, dan juga alim ulama. Dukungan rakyat yang merindukan hilangnya konflik internal Kesultanan juga cukup membantu. Dengan serbuan orang-orang Makasar ke wilayah Kesultanan Banjar dalam tahun 1681 juga membuat Pangeran Dipati Tuha beserta rakyatnya di wilayah kerajaan Tanah Bumbu ikut mengantisipasi serangan tersebut, walaupun serangan orang-orang Makasar tersebut bukan ditujukan ke wilayah kerajaan Tanah Bumbu, memang basis berkumpulnya pasukan orang-orang Makasar dengan pangkalan perahunya berada di perairan Pasir.

Dengan serbuan orang-orang Makasar ke wilayah Kesultanan Banjar dalam tahun 1681 juga membuat Pangeran Dipati Tuha beserta rakyatnya di wilayah kerajaan Tanah Bumbu ikut mengantisipasi serangan tersebut, walaupun serangan orang-orang Makasar tersebut bukan ditujukan ke wilayah kerajaan Tanah Bumbu, memang basis berkumpulnya pasukan orang-orang Makasar dengan pangkalan perahunya berada di perairan Pasir, tetapi Pulau Laut dengan letak strategisnya tidak menutup kemungkinan sebagai tempat persinggahan, lagi-lagi sangkaan selalu ditujukan kepada peran Pangeran Purabaya penguasa Pulau Laut yang selalu menaruh dendam dan ikut bermain dibelakang layar atas penyerbuan orang-orang Makasar terhadap Banjarmasin.

Jika ditinjau kembali masa sebelumnya, hubungan Kesultanan Banjar adalah hubungan yang baik dengan Makasar pasca peristiwa 1638, dimana VOC Belanda beberapa tahun tidak berani datang ke Banjarmasin. Perdagangan lada, emas, dan jung-jung Makasar selalu mendapatkan pasaran yang baik. Kemunduran hegemoni Jawa, mengakibatkan Maluku menguatkan

hubungannya dengan Makasar yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan VOC Makasar mengerti benar bahaya VOC dan sibuk menguatkan dirinya dengan senjata-senjata Eropa. Kepentingan-kepentingan ekonomi, perdagangan dan pelayaran di Maluku, menimbulkan konflik yang tajam dengan VOC dan diakhiri dengan perjanjian Bongaya 1667.<sup>28</sup>

Semenjak orang-orang Makasar dapat diusir dari wilayah Kesultanan Banjar atas serangan mereka tahun 1681, wilayah Kerajaan Tanah Bumbu juga terasa aman, Pangeran Dipati Tuha bersama Permaisurinya Nyai Galih (Gusti Batar) dan kedua putera mereka Pangeran Mangu dan Pangeran Citra yang berkedudukan di Sampanahan, beserta rakyatnya yang tersebar di daerah Cengal, Manunggul, Bangkalaan, Buntar Laut, Cantung dan Batulicin juga ikut tentram, kalangan rakyat kembali bekerja sesuai dengan mata pencaharian mereka semula. Schwaner (1853) menyebutkan "Saat itu status atau pengaruh raja-raja Banjar di Tanah Bumbu mulai merosot karena desakan orang-orang Bugis yang sebelumnya telah tinggal di Kutai dan Pasir memperoleh pengaruh yang dominan disana". Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian orang-orang Bugis yang dulunya tinggal di Kutai dan Pasir mulai sudah masuk, ada yang berdagang, bertani, pengrajin pembuatan kapal dan mata pencaharian sebagai nelayan maupun berbagai mata pencaharian lainnya ada yang menetap di kawasan kerajaan Tanah Bumbu.

### **3. Pangeran Mangu dan Penerus Raja Tanah Bumbu**

Menjelang tahun 1700, Pangeran Dipati Tuha digantikan oleh anaknya Pangeran Mangu sebagai Raja Tanah Bumbu berikutnya. Saudaranya yakni Pangeran Citra kembali ke Banjarmasin, kemudian menerima daerah baru dari Sultan berupa tanah apanage di daerah Kelua, di atas Amuntai ditepi aliran

---

<sup>28</sup> Perlu dijelaskan bahwa hubungan baik antara Kesultanan Banjar dengan Makasar adalah peristiwa di masa lalu tahun 1638, setelah perjanjian Bongaya 18 November 1667 antara Gowa dan VOC Belanda sangat merugikan Gowa. Banyak orang Makasar pergi meninggalkan Gowa akibat perjanjian Bongaya tersebut. Sebahagian mempertahankan hidupnya dengan apa adanya, sebahagian lagi dengan memilih jalan untuk menjadi Perompak yang disebut kaum Lanun atau bajak laut. Peristiwa serangan orang Makasar tahun 1681 adalah pembalasan kekalahan dari kelompok Daeng Tello dan Lanun (bajak laut) dari orang Melayu terkenal Soelongs yang pernah menyerang Banjarmasin tahun 1677, tetapi dapat diusir oleh pasukan militer Kesultanan Banjar saat Sultan Surianata (1663-1679). Serangan kedua kalinya tahun 1681 juga dapat diusir kembali saat Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700).

sungai Tabalong.<sup>29</sup> Dengan demikian kebijakan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700) sebagai Sultan Banjar, masih terlihat menata pembagian wilayah kekuasaan terhadap keponakannya, dimana Pangeran Mangu tetap sebagai Raja Tanah Bumbu, kemudian Pangeran Citra menjadi raja di daerah Kelua di tepian aliran Sungai Tabalong dan sekitarnya. Tidak banyak sumber yang menjelaskan tentang peranan Pangeran Mangu Raja Tanah Bumbu yang kedua sebagai penerus ayahnya Pangeran Dipati Tuha, daerah-daerah kekuasaannya tetap disatukan seperti daerah terdahulu yang menjadi kekuasaan ayahnya Pangeran Dipati Tuha. Laporan Schwaner (1853) tidak menyebutkan tahun masa pemerintahan Pangeran Mangu, tetapi dalam situs yang ditawarkan Wikipedia menuliskan masa pemerintahan Pangeran Mangu (1700-1740), sezaman dengan pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734) di Kesultanan Banjar yang juga sepupuhnya.

Hal ini juga memerlukan penelitian lebih lanjut tentang kronologi angka tahun tersebut. Misalnya disebutkan Pangeran Mangu bin Pangeran Dipati Tuha (1700-1740); memiliki anak bernama Ratu Mas. Ratu Mas bersaudara dengan Ratu Sepuh. Schwaner (1853) membantah dalam laporannya bahwa Pangeran Mangu memiliki anak bernama Ratu Mas bersaudara dengan Ratu Sepuh, menurutnya, "Pangeran Mangu tidak memiliki keturunan pria. Dia menurunkan seorang wanita yang bernama Ratu Mas. Mengenai isteri atau Permaisuri yang mendampingi Pangeran Mangu menurut versi Henri Nindyanto (2014) disebutkan "Pangeran Mangu Raja Tanah Bumbu 2 (1700-1740) menikah dengan Nyai Wadon Gadung memperoleh anak Ratu Mas."<sup>30</sup>

Setelah kematian ayahnya Pangeran Mangu (1700-1740), maka penerus Kerajaan Tanah Bumbu adalah Ratu Mas (1740-1780) sebagai Raja

---

<sup>29</sup> Perlu dijelaskan bahwa kemungkinan besar Tanah lungguh (*apanage*) di daerah Kelua diberikan kepada Pangeran Citra sebagai raja bawahan disana, ia keponakan dari Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1680-1700), demikian juga dengan Pangeran Mangu ia tetap meneruskan kekuasaannya ayahndanya Pangeran Dipati Tuha sebagai raja bawahan berkuasa di Kerajaan Tanah Bumbu juga tidak lepas dari bimbingan dan kekuasaan Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang saat itu berkedudukan di Kayutangi-Karang Intan. Sekitar tahun 1700 ia berganti gelar Sultan Tahmid Ollah atau Tahmidullah.

<sup>30</sup> Schwaner tidak menjelaskan siapa Permaisuri Pangeran Mangu, termasuk ia membantah tentang tentang Ratu Mas bersaudara dengan Ratu Sepuh. Laporan Schwaner menuliskan, "Pengeran Mangu tidak memiliki keturunan pria. Dia menurunkan seorang wanita yang bernama Ratu Mas, yang menurut segala kemungkinan sama seperti yang disebut Ratu Sepuh dalam sejarah (tetapi tidak benar; Ratu Mas dan Ratu Sepuh bersaudari)".

Tanah Bumbu, ia mengambil alih peran pemerintahan di Kerajaan Tanah Bumbu. Kemudian ia menikah dengan seorang Pangeran Gowa bernama Daeng Malewa yang mengambil nama Pangeran Dipati. Mengenai Daeng Malewa sebahagian berpendapat, ia adalah saudagar atau pedagang dari Gowa. Perkawinan inilah pertama kalinya di Kerajaan Tanah Bumbu memadukan dua etnis berbeda yakni percampuran antara Ratu Mas binti Pangeran Mangu sebagai Raja Tanah Bumbu keturunan Banjar dengan Daeng Malewa yang merupakan keturunan orang Gowa yang dapat hidup harmonis dalam satu keluarga.

Dari perkawinan ini lahir seorang wanita bernama Ratu Intan, sementara Pangeran Dipati (Daeng Malewa) masih menurunkan dua orang putra Pangeran Prabu dan Pangeran Layah dari wanita lain yang berstatus lebih rendah.<sup>31</sup> Pusat pemerintahan Ratu Mas sebagai Raja Tanah Bumbu tetap berpusat di Sampanahan yang mengayomi beberapa daerah bawahan seperti Cengal, Bangkalaan, Manunggul, Cantung, Buntar Laut dan Batulicin. Tidak banyak yang diketahui mengenai kiprah dan aktivitas dari Ratu Mas bersama suaminya Pangeran Dipati (Daeng Malewa) saat memerintah di Kerajaan Tanah Bumbu. Jika dilihat cukup lamanya masa pemerintahan Ratu Mas (1740-1780) didampingi suaminya Pangeran Dipati (Daeng Malewa), tentunya Masa pemerintahan Ratu Mas telah mengikuti kebijakan-kebijakan tiga orang Sultan Banjar yang memerintah sejaman dengan masa pemerintahan Ratu Mas, namun keadaan di Kerajaan Tanah Bumbu sebagai bawahan Kesultanan Banjar, mungkin tidaklah serumit masalah yang dihadapi Kesultanan Banjar yang masih beribukota di Kayutangi-Karang Intan. Jika benar kenaikan tahta Ratu Mas tahun 1740-an, maka Ratu Mas sebagai penguasa Kerajaan Tanah Bumbu paling tidak harus berkomunikasi dan berurusan dengan Sultan Tamdjidullah (1734-1759), paling tidak adanya konsultasi masalah upeti, perekonomian dan masalah politik yang menyangkut stabilitas antara raja bawahan dengan Sultan penguasa teritorial wilayah Pesisir, mengingat Kerajaan Tanah Bumbu termasuk teritorial ketiga wilayah pesisir. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan

---

<sup>31</sup> Perlu dijelaskan bahwa sumber dokumen tertulis laporan dari Schwaner, menyatakan Ratu Intan adalah anak dari perkawinan Ratu Mas binti Pangeran Mangu dengan Daeng Malewa (Pangeran Dipati). Jadi kesimpang siuran selama ini, bahwa Ratu Intan adalah anak dari Sultan Tamdjidillah sangatlah meragukan dan tidak kuat argumentasinya. Antara Ratu Intan, Pangeran Prabu (Sultan Sepuh) dan Pangeran Layah adalah bersaudara satu ayah yakni ayahnya bernama Daeng Malewa (Pangeran Dipati) namun berlainan ibu.

Mohammad Alienoedin atau Aminullah (1759-1761) dan Sultan atau Panembahan Kaharuddin Haliloellah (1761-1801).

Satu hal penting yang mungkin tidak bisa dilupakan dalam sejarah Banjar adalah masa pemerintahan Sultan Tamdjidullah (1734-1759), dimana kenaikan tahtanya sultan ini akan diwarnai kemelut intrik politik dalam keraton Kesultanan Banjar, namun hal yang paling penting adalah betapa piawainya Sultan Tamdjidullah dimasa pemerintahannya harus menghadapi kembali serangan orang-orang Makasar dan gabungan dengan kelompok bajak laut terkenal di wilayah Timur dibawah komando Arung Singkang (La Madukeling). Sebelumnya saat pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734) pernah menyerang Sampit pada akhir 1725. Bersamaan dengan pengokohan Sultan Pasir Aji Ngara bin Sultan Aji Muhammad Alamsyah yang bergelar Sultan Aji Sepuh Alamsyah yang memerintah antara tahun 1738-1768 Masehi, yang diduga kuat sudah memerintah sebelum tahun 1726, dimana bersamaan dengan kedatangan keluarga Arung Singkang di kerajaan Pasir yang dikemukakan Ricklefs terjadi pada tahun 1726.<sup>32</sup>

Tokoh Arung Singkang terkenal sebagai pimpinan perompak, dimana kelompok lainnya yang juga dilakukan kelompok Arung Singkang (La Madukeling) beserta anak buahnya di daerah pesisir dan sungai di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur. Kejadian perompakan atau serangan dari orang-orang Makasar bagi rakyat Banjar saat itu sudah dianggap biasa karena masa-masa sebelumnya sudah dilalui dengan keadaan serupa. Memang bagi rakyat Banjar saat itu kurang mengenal tokoh Arung Singkang (La Madukeling), kecuali di Kesultanan Pasir. Bagi rakyat Banjar lebih mengenal Pangeran Purabaya di Pulau Laut, misalnya dengan tidak puasnya tindakan kelompok orang Biaju dalam tahun 1711 menyerang pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734), tahanan orang-orang Biaju (Dayak Ngaju) yang dilepas Sultan disangka akan baik dan tidak mengulangi lagi

---

<sup>32</sup> Ricklefs merujuk kepada Noorduyn, *Kroniek van Wajo*; Skinner, *Syair Perang Mangkasar*, Stafel; Bongaais Verdrag, dan Noorduyn; *Arung Singkang*. Tahun 1726 Masehi tentang Arung Singkang (La Madukeling) datang ke Paser. Pada masa Sultan Aji Sepuh tersebut telah kedatangan Andi Sibengngareng anak Arung Singkang (La Madukeling) dan permaisurinya Andi Abeng dari Wajo, ia melamar puteri Aji Doja anak Sultan Aji Sepuh, perkawinan terjadi antara adat Paser dengan adat Wajo. Perkawinan Andi Sibengngareng dengan Puteri Aji Doyah terebut diperkirakan adalah perkawinan politik, karena sesudahnya ada dominasi pengaruh Wajo terhadap kerajaan dan adat-istiadat Paser.

perbuatannya, ternyata orang-orang Biaju tersebut memohon kepada Pangeran Purabaya di Pulau Laut untuk bergabung melawan aparat kerajaan Banjar.<sup>33</sup>

Selain merekrut pasukannya dari orang-orang Makasar berkoalisi dengan orang Dayak Biaju (Ngaju), Pangeran Purabaya mencari tambahan dukungan dengan Daeng Mamantuli, saat itu ia ada di Kutai sebagai tamu Kraing Bonteramboe dalam rangka mendukung klaim Kraing Bonteramboe pada wilayah Pasir. Tahun 1713 pasukan Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busu, pasukan Biaju (Dayak Ngaju) dan pasukan Daeng Mamantuli menyerang Banjar, Hulu Barito, dibagikan penghasil lada seperti Negara dan Bakumpai diisolasi. Pasukan militer Banjar dibawah Pangeran Purba dan Pangeran Nata Dilaga dikalahkan. Belanda dan Inggris tidak mau mencampuri masalah dalam negeri Banjar. Tahun 1714 orang Banjar dengan sekutunya membalas, anak Pangeran Purabaya, Gusti Busu terbunuh, orang-orang Biaju lari kepedalaman, tertinggal orang-orang Makasar yang masih bertahan, pasukan koalisi Pangeran Purabaya mulai mengalami kekalahan dalam perang, Pangeran Purabaya tetap tidak menyerah namun terus bertarung sampai akhirnya dia (Pangeran Purabaya) terbunuh pada akhir tahun 1717.

Pada masa pemerintahan Ratu Mas (1740-1780) sebagai penguasa Kerajaan Tanah Bumbu inilah peristiwa peminjaman tanah Kusan bagian hilir yang dilakukan oleh Puanna Dekke tahun 1733 beserta rombongannya dari

---

<sup>33</sup> Tokoh Arung Singkang atau La Madukelling (1700-1765) memang terkenal dramatis, ia keturunan keluarga Raja Bugis dari Wajo. Ia memulai karirnya sebagai seorang perompak. Pada tahun 1725 menaklukan Sampit, 1726 ia menaklukan Paser, kemudian Kutai Kalimantan Timur, yang kedua-duanya merupakan pemukiman suku Bugis. Pada bulan Mei 1729, wakilnya, Toassa, kapten atau wakil Arung Singkang berlayar ke sungai Barito, merampas kapal-kapal yang membawa kargo lada hingga memblokade kebun lada di Negara Atas. Demikian juga perompak lainnya Topass Aray bergabung dengan Arung Palla yang semula menjadikan Banjarmasin target berikutnya bersaing dengan kelompok Arung Singkang dan Toassa. Bulan April 1735 perang sesama perompak dari kubu Topass Aray-Arung Palla melawan Arung Singkang-Toassa di pesisir Banjarmasin. Kubu Topass Aray kalah, Bulan Mei 1735 Belanda dibawah komando J. Graffe dengan kapal *Snip*, *Rotte*, *Tanjung Pura*, *Onbeschaamheijt* dan *Quartel* membantu Sultan Tamdjidullah (1734-1759) berjaga di sungai Barito, Arung Singkang dan pasukannya berperang selama sepuluh hari dengan pasukan Banjar dan pasukan dari kapal-kapal Belanda bersenjata lengkap, ia mengalami kekalahan dan gagal menduduki Banjarmasin, Tahun itu 1735 Arung Singkang (La Madukeling) kembali ke Sulawesi.

Wajo kepada Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734) atau lebih dikenal dalam masyarakat Bugis Pagatan dengan Sultan Kuning, kemungkinan besar izin peminjaman tanah di daerah Kusan bagian hilir tersebut berlanjut pada masa Sultan Banjar Tamjidullah (1734-1759) saat itu ibu kota Kesultanan Banjar masih berpusat di Kayutangi-Karang Intan.

#### **4. Pembagian Wilayah Kekuasaan di Kerajaan Tanah Bumbu**

Mengenai wafatnya Ratu Mas tidak ada angka tahun maupun penjelasan lebih jauh, oleh Schwaner (1853) disebutkan Ratu Mas wafat lebih dahulu dan Setelah kematian ayahnya Pangeran Dipati (Daeng Malewa) kerajaan Tanah Bumbu diperkirakan tahun 1780 atas wilayah yang ada dibagi bertiga (Pangeran Prabu, Ratu Intan dan Pangeran Layah), diantara pembagian wilayah kerajaan Tanah Bumbu tersebut dibagi sebagai berikut:

- a. Kepada Pangeran Prabu, yang sejak saat itu bernama *Sultan Sepuh* diberikan tanah Cengal, menunggul, Sampanahan dan Bangkalaan (dalam uraian sejarah Borneo oleh J.C.M. Rademacher tahun 1730. Pangeran Prabu disebut sebagai penguasa Sampanahan);
- b. Kepada Ratu Intan diberikan tanah Cantung dan Batulicin; dan
- c. Kepada Pangeran Layah di berikan Buntar Laut.

Jika melihat pembagian di atas, Kerajaan Tanah Bumbu yang semula dibangun oleh Pangeran Dipati Tuha (Raden Basu) sejak tahun 1660 adalah merupakan wilayah kesatuan yang terdiri dari daerah Cengal, menunggul, Sampanahan, Bangkalaan, Cantung, Batulicin dan Buntar Laut atau dikenal dengan tujuh daerah bawahan Kerajaan Tanah Bumbu yang semuanya berpusat pada Sampanahan sebagi ibukota kerajaan, terutama saat Pangeran Dipati Tuha membangun keratonnya ditepian Sungai Bumbu. Generasi penerusya adalah Pangeran Mangu sebagai raja kedua juga tetap mempertahankan keadaan tersebut, demikian dengan Ratu Mas sebagai Raja/Ratu ketiga dan suaminya Pangeran Dipati (Daeng Malewa) juga tetap mempertahankan Sampanahan sebagai ibu kota Kerajaan Tanah Bumbu.

Pembagian wilayah ini terjadi pada tahun 1780-an, kemungkinan antara Ratu Intan dan saudaranya seayah seperti Pangeran Prabu dan Pangeran Layah tidak ada kesepakatan dalam permusyawarahan keluarga, tentang siapa yang harus jadi raja diantara mereka bertiga, memang sepanjang sejarah keturunan Sultan-sultan Banjar tidak pernah ada negara dipimpin oleh seorang

Ratu wanita, tetap putera sulung sebagai calon putera mahkota dan siap menggantikan keturunannya jadi Sultan. Namun ketika naik tahtanya Ratu Mas (1740-1780) ia adalah anak tunggal perempuan satu-satunya hasil perkawinan Pangeran Mangu dengan Nyai Wadon Gadung, jadi tidak ada lagi pilihan berdasarkan garis keturunan laki-laki, selain Ratu Mas yang menjadi Raja saat itu. Dengan demikian babakan baru sejarah pemerintahan di Kerajaan Tanah Bumbu sejak tahu 1780 telah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang satu sama lainnya berdiri sendiri, tetapi ikatan kekeluargaan bangsawan Kerajaan Tanah Bumbu tetap satu dalam naungan silsilah Raja-Raja Kerajaan Tanah Bumbu dalam garis keturunan Kesultanan Banjar. Setelah pembagian ketiga wilayah kerajaan kecil tersebut masing-masing wilayah menata dan membangun kerajaannya tersendiri.

Pangeran Prabu atau bergelar Sultan Sepuh (1780-1800) yang mendapat daerah Cengal, menunggul, Sampanahan dan Bangkalaan tentunya memiliki kekuasaan yang cukup luas, jika dibandingkan dengan saudaranya Ratu Intan yang hanya memiliki daerah Cantung dan Batulicin ataupun Pangeran Layah yang hanya mendapat daerah Buntar Laut. Pangeran Prabu atau Sultan Sepuh memiliki anak antara lain: Pangeran Nata, Pangeran Seria, Pangeran Muda atau disebut juga Gusti Kemir, Gusti Mas Alim, Gusti Besar, Gusti Lanjong, Gusti Arif, Gusti Reja dan Gusti Ali.

Shcwaner (1853) sama sekali tidak menyebutkan nama permaisuri yang mendampingi Pangeran Prabu (Sultan Sepuh), apakah kesembilan anaknya murni dari seorang permaisuri, ataukah gabungan dari anak selir dengan permaisuri tidak ada yang bisa menyebutkan namanya. Setelah kematian Sultan Sepuh (Pangeran Prabu) kerajaan itu kembali dibagi, Putra sulungnya Pangeran Nata menerima Bangkalaan, Sampanahan dan Menunggul dan berganti nama Ratu Agung, sementara kepada putra kedua Sultan Pangeran Seria menerima tanah Cengal. Dengan demikian sejak saat itu Tanah Bumbu dibagi sebagai berikut: Cantung dan Batulicin dibawah Ratu Intan, Buntar Laut dibawah Pangeran Layah, Bangkalaan Simpanahan dan Menunggul dibawah Ratu Agung dan Cengal dibawah Pangeran Seria.

Tetapi pembagian ini tidak bertahan lama karena setelah meninggalnya Ratu Agung dan Pangeran Seria, tanah-tanah mereka tidak bertahan lama dan diserahkan kepada Gusti Besar. Sebagian wilayah Tanah Bumbu lainnya jatuh kepadanya karena segera sebelum kematiannya dengan persetujuan para



tetaha penduduk setempat, Ratu Intan memilih tanah itu bagi ahli warisnya dimana hampir seluruh kerajaan itu berada dibawah satu pemerintahan. Gusti Besar (1820-1825) menikah dengan seorang raja Pasir yang bernama Aji Radin (Aji adalah gelar yang diambil dari bahasa Kawi yang dalam hal ini berarti raja. Di Pasir, Kutai, Berau dan Bulungan, dan juga di Tanah Bumbu sejak perkawinan Aji Radin dan Gusti Besar gelar itu diberikan kepada dua turunan raja. Gelar itu sudah ada sejak lahir atau sebagai bukti perkenan raja diberikan). Perkawinan Gusti Besar dengan Aji Radin melahirkan seorang putra bernama Aji Jawa.<sup>34</sup>

Ketika Aji Jawa masih muda, ayahnya dibunuh oleh orang Bugis utusan Sultan Pasir (dia adalah Sultan Suleiman, sama dengan menolak membuat suatu kesepakatan dengan utusan pemerintah Hindia Belanda G. Muller pada tahun 1825). Sultan ini juga melancarkan serangan terhadap tanah-tanah yang berada dibawah kekuasaan Gusti Besar, dan merampok Cengal, Menunggul, Bangkalan dan Cantung. Ratu Intan (1780-1800) setelah menerima daerah Cantung dan Batulicin sebagai tanah pembagian wilayah kerajaannya, ia menikah dengan seorang Raja Pasir yang bernama Sultan Anom. Selama perkawinannya dengan Sultan Anom sampai dengan meninggalnya Ratu Intan tidak memiliki keturunan anak, tetapi Sultan Anom kawin dengan wanita lain menurunkan Pangeran Muhammad, Andin Kedot, Andin Girok dan Andin Proah dari selir-selirnya. Kemudian saudara seayah Ratu Intan selain Pangeran Prabu (Sultan Sepuh) yakni Pengeran Layah yang menjadi penguasa Buntar Laut setelah perkawinannya akhirnya menurunkan dua orang anak yang bernama Puteri Gusti Citra dan Putri Gusti Tahora merupakan generasi yang mewarisi Buntar Laut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mengenai Gelar "Aji" pada bangsawan Paser adalah sebuah gelar nama kebangsawanan untuk pesyaratan menjadi Sultan Paser di Kerajaan Pasir. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi Sultan Paser: (1) Yang boleh dipilih dan dinobatkan menjadi Sultan Paser, ialah salah seorang yang menduduki nama Kebangsawanan AJI; (2) Tiada seorang AJI yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, kecuali ia memiliki kekuatan badaniah; (3) Tiada seorang AJI yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, kecuali ia memiliki kekuatan rohaniah; (4) Tiada seorang AJI yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, yang mempunyai sifat sombong, congkak, takabur, suka sanjungan dan suka memuji diri sendiri; dan (5) Tiada seorang AJI yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, yang peminum tuak (minuman keras), pengisap madat, penjudi, pembohong dan yang pernah mencuri.

<sup>35</sup> Laporan Schwaner tersebut sesuai dengan Ikhtisar Keadaan Politik-Hindia Belanda Tahun 1839-1848, bahwa perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Sultan Paser untuk pertama kalinya terjadi bulan Oktober 1844. Sebelumnya pada tahun 1825 utusan pemerintah

Pada saat itu kemelut melanda daerah kekuasaan Gusti Besar setelah kematian suaminya Aji Radin, wilayahnya itu diduduki pasukan militer Kerajaan Pasir. Datanglah saat itu Pangeran Haji Muhamad (Pangeran Haji Muhamad adalah leluhur Pangeran Abdul Kadir saat itu, penguasa Kusan), keturunan Pangeran Dipati Tuha di Cengal, tempat Gusti Besar tinggal, dan mengajukan permohonan melamar ratu Gusti Besar, tetapi lamaran Pangeran Haji Muhamad ditolak; namun kesepakatan dicapai dengannya untuk menikahkan putranya Aji Jawa dengan putri Pangeran Haji Muhamad. Tetapi Pangeran Haji Muhamad disini bertahan pada syarat bahwa Aji Jawa akan tinggal di Banjarmasin dan Gusti Besar tidak mengabulkannya. Perkawinan tersebut tidak terlaksana.

Setelah melihat kegagalan usahanya untuk menguasai kembali wilayah Gusti Besar baik bagi dirinya maupun ketutrunannya, Pangeran Haji Muhamad kembali ke Banjarmasin. Tetapi sebelum meninggalkan Cengal, dia meminta kepada Gusti Besar agar meminjamkan daerah penghasil intan di Sela, Selilau dan Kusambi yang saat itu termasuk wilayah Kusan kepadanya. Gusti Besar menyetujui peminjaman atas tanah di Sela, Selilau dan Kusambi, tetapi dengan syarat atau perjanjian kepada Pangeran Haji Muhamad, agar tanah-tanah itu dikembalikan kepadanya setelah Aji Jawa beranjak dewasa. Sejak itulah tanah dikawasan tersebut diberdayakan oleh generasi Pangeran Haji Muhamad dengan keturunannya.

Setelah wilayah dan tanah-tanah Gusti Besar dikuasai dan tunduk kepada raja-raja Pasir selama lima belas tahun, Aji Jawa yang sudah mulai dewasa berusaha memiliki wilayahnya kembali. Untuk mencapai tujuan itu, Aji Jawa dan ibunya Gusti Besar dengan alasan mengelola perdagangan dari waktu ke waktu dia belayar ke Batulicin sebagai tempat tinggal bersama ibunya setelah pindah dari Cengal. Dalam perjalanan tersebut secara diam-diam Aji Jawa mengatur strategi dengan menjalin hubungan kepada kepala daerah Manunggul, Sampanahan dan Cengal dan mendapatkan pengikut yang

---

Hindia Belanda, G. Muller, pernah berusaha untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan Paser, tetapi tidak berhasil. Perjanjian yang dibuat itupun sebenarnya tidak dalam arti Belanda berkuasa sepenuhnya atas Kerajaan Pasir, walaupun nantinya dalam prakteknya kemudian lebih untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda. Mengenai terbunuhnya Aji Radin (suami Gusti Besar dan juga ayah dari Aji Jawa) dari orang Bugis suruhan (bayaran) yang disebutkan C.M. Schwaner atas suruhan Sultan Suleiman, setelah diteliti di dalam A.S. Assegaff (tanpa tahun), pada tahun 1825 bukan lagi pemerintahan Sultan Suleiman, namun sultan yang memerintah memang memakai nama Bin Sulaiman, yakni masa pemerintahan Aji Karang Bin Sultan Sulaiman Alamsyah gelar Sultan Mahmud Han Alamsyah (1815-1843).

membuatnya siap untuk mendapatkan kembali tanah-tanah yang dahulu dimiliki oleh ibunya. Saat itu Aji Jawa dengan bantuan Punggawa Tatiup (dia adalah putra seorang Bugis dari Pagatan) yang pindah ke kawasan Tanah Bumbu. Ketika masih kecil, dia diasuh oleh para perompak dan berkelana selama sepuluh tahun.

Punggawa Tatiup dengan pasukan Aji Jawa melancarkan serangan di tanah-tanah Cengal, Bangkalaan, Manunggul dan Sampanahan, setelah pertempuran sengit Pasukan Aji Jawa yang dikomando Punggawa Tatiup dapat mengusir orang-orang Pasir dan menyatakan dirinya kembali sebagai penguasa Cengal dan Manunggul. Selama masa sebelumnya, masa kerusuhan dan pergolakan pemerintahan, berbagai kepala daerah atau *Pambakal* yang diangkat oleh Ratu Intan telah menganggap diri mereka sebagai penguasa distrik merdeka dibawah pemerintahannya. Misalnya Gusti Muso di Cantung dan Gusti Kamir di Bangkalaan tampil sebagai penguasa. Gusti Kamir yang berganti nama menjadi Pangeran Muda memiliki seorang putri bernama Gusti Kamil yang menikah dengan Aji Jawa, karena tidak ada cara lain baginya untuk memiliki daerah Bangkalaan yang termasuk milik ibunya. Dengan cara yang sama dia memiliki daerah Cantung karena dia juga menikah dengan Gusti Ketapi, putri Gusti Muso. Semua ini adalah upaya Aji Jawa menyatukan kekuasaannya.

Upaya melalui peperangan dan sebagian melalui perkawinan, Aji Jawa (1825-1841) menyatukan daerah-daerah ini menjadi suatu kerajaan: Cengal, Manunggul, Bangkalaan, Sampanahan, Cantung dan Batulicin. Sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepadanya untuk memperoleh kembali kerajaannya, Aji Jawa memberikan tanah Manunggul kepada Punggawa Tatiup sebagai apanage dan kepada pamannya Gusti Ali yang sekarang masih hidup diberikan tanah Sampanahan sebagai hak milik turun-temurun, di samping nama dan gelar Pangeran Mangku, Pangeran Mangku ini memiliki seorang putra bernama Gusti Hina Jasa pamannya Gusti Ali (Pangeran Mangku) sangat besar dalam membantu dan memotivasi Aji Jawa untuk merebut kembali wilayahnya dari pendudukan tentara Kesultanan Pasir.

Semasa pemerintahan Aji Jawa (1825-1841) ia hanya memegang wilayah Cengal, Bangkalaan, Cantung dan Batulicin, mengingat daerah Manunggul telah diberikan kepada Punggawa Tatiup dan Sampanahan diberikan kepada pamannya Gusti Ali atau Pangeran Mangku. Sejak dinasti

pertamanya Pangeran Dipati Tuha (1660) ibu kota kerajaan berada di sungai Bumbu-Sampanahan, saat pemerintahan Aji Jawa pusat pemerintahan dipindah ke lokasi Gunung Jawa di daerah Cengal. Perpindahan pusat pemerintahan tersebut sangat beralasan, mengingat Pamannya Gusti Ali (Pangeran Mangku) telah diberikan daerah Sampanahan, jadi kemungkinan Aji Jawa tidak tega kalau keraton di Sungai Bumbu-Sampanahan harus ditempati lagi, melainkan diberikan kepada paman Gusti Ali (Pangeran Mangku) dan keluarganya yang juga memimpin daerah Sampanahan. Di lokasi Gunung Jawa semasa pemerintahannya banyak ditumbuhi pohon jati, konon kabarnya saat itu oleh Raja Aji Jawa kepada setiap pendatang dari Jawa yang akan menetap agar membawa bibit pohon jati untuk ditanam disana.

Kusuma (1981) memberikan ilustrasi dan keadaan wilayah Gunung Jawa di Cengal tersebut diantaranya: "Di belakang Keraton di Cengal ada sebuah bukit yang merupakan dataran tinggi dan bertanah liat merah, bukit ini mulanya tidak mempunyai nama, setelah ditanami dengan bibit jati yang dibawa oleh Aji Raden alias Aji Jawa dari tanah Jawa dinamailah oleh penduduk dengan Gunung Jawa. Kebun jati ini masih ada hingga sekarang dan Aji Raden (maksudnya adalah Aji Jawa) sendiri di makamkan di dalam kebun jati di Gunung Jawa itu. Wilayah kebun jati di Gunung Jawa yang meliputi 12,775 ha. Itu sekarang ini adalah dimiliki oleh ahli waris kerajaan Tanah Bumbu. Gunung Jawa terletak disebelah kiri Sungai Cengal, dihulu anak sungai Cengal yang dinamakan Sungai Bangkai di daerah Pamukan. Daerah ini menjadi terkenal dan dianggap keramat. Rakyat di Kerajaan Tanah Bumbu pada waktu itu sebagian besar adalah orang Dayak yang dikenal oleh orang daerah itu dengan orang Bukit. Mereka di masa itu beranggapan, bahwa raja itulah yang paling mulia dan paling ditakuti yang biasa memberi tulaq kepada orang-orang yang bermaksud tidak baik dan khianat kepada rajanya.

Hasil perkawinan Aji Jawa dengan Gusti kamil, menurunkan Aji Tukul dan Aji Landasan, dan perkawinan dengan Gusti Ketapi dia menurunkan Aji Mandura yang juga sering disebut Aji Daha. Dari sini Aji Landasan menikah dengan seorang putra Pangeran Haji Musa yang bernama Pangeran Panji dan darinya menerima Batu Licin sebagai tanah apanagenya. Sementara Haji Musa dengan mematuhi kewajiban ayahnya Pangeran Haji Muhamad, mengembalikan tanah Sela, Selilau kepada pasangan yang baru menikah itu. Setelah kematian Pangeran Panji, saudaranya Pangeran Muhammad Napis

mengambil sendiri tanah-tanah tersebut, sementara Aji Landasan melangsungkan perkawinan keduanya dengan Daeng Magading.

Dia meninggal tanpa anak dan menyerahkan Batulicin kepada suaminya (Daeng Magading adalah ketutunan raja Bugis dan merupakan saudara almarhum Arung Boto, wali dari raja Pagatan saat itu), Dia meninggal di Pagatan pada tahun 1851. Sebagai orang asing dia tidak berhak mewarisi daerah Batu Licin. Tanah ini diberikan kepada Pangeran Muhamad Napis pada tahun 1845; sementara pada tahun 1846 kepada Daeng Magading yang selalu bertahan di Batu Licin diperintahkan oleh pemerintah Belanda meninggalkan tempat itu).

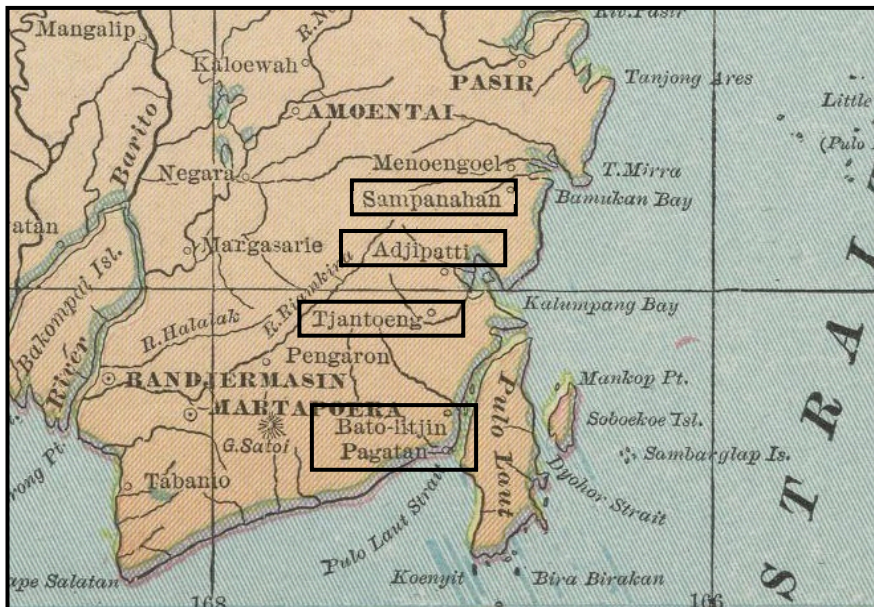
Aji Tukul, putri sulung Aji Jawa dari Gusti Kamil, menikah dengan Aji Pati, putra Sultan Sulaiman dari Pasir (Aji Pati pada tahun 1846 meninggal, putra sulungnya Aji Semarang menggantikannya memerintah daerah Bangkalaan, Manunggul dan Cengal dan kemudian menerima gelar Pangeran Muda. Jandanya Aji Tukul, yang kemudian bernama Ratu Agung pada tahun 1849 menikah dengan Pangeran Abdul Kadir, saat itu menjadi Raja Kusan).

## **5. Pembagian Wilayah Tanah Bumbu**

Untuk wilayah Batulicin harus dilihat kembali keadannya pada tahun 1841, dimana setelah Aji Jawa (1825-1841) meninggal dunia dikarenakan sakit yang cukup lama, tahun 1841 wilayahnya dibagi antara lain:

- a. Bangkalaan, Cengal, Menunggul kepada Aji Tukul (Pada tahun 1845 suaminya Aji Pati diangkat dan diakui sebagai penguasa oleh pemerintah Hindia Belanda) -Lihat gambar 2 kotak bintang satu-.
- b. Cantung diberikan kepada Aji Mandura/Aji Madura atau Aji Daha -Lihat gambar 2 kotak bintang dua-.
- c. Sampanahan diberikan kepada Pangeran Mangku/Gusti Ali (Paman Aji Jawa yang masih hidup) dan memiliki seorang putera bernama Gusti Hina) -Lihat gambar 2 kotak bintang tiga-.
- d. Buntar Laut diberikan kepada Gusti Dandai (Gusti Dandai pada tahun 1846 meninggal dunia tanpa anak). Aji Mandura/Aji Madura atau Aji Daha sebagai satu-satunya putra Aji Jawa mengambil alih tanah ini yang tidak berbeda dengan tanah Cantung yang dihuni oleh keturunan lainnya -Lihat gambar 2 kotak bintang empat-.

Kemudian untuk anak Aji Jawa yang satunya bernama Puteri Aji Landasan hasil perkawinan Aji Jawa dengan Puteri Gusti Kamil anak dari pamannya Gusti Kamir atau saudara ibunya Aji Jawa (Gusti Besar) dalam pembagian wilayah tahun 1841 setelah kematian Aji Jawa tidak mendapatkan bagian wilayah daerah kekuasaan. Tetapi Puteri Aji Landasan setelah kawin dengan Pangeran Panji (adalah putra dari Pangeran Haji Musa dari Kusan (Cucu Pangeran Haji Muhammad). Perkawinannya dengan Putri Aji Landasan diberikan Tanah Apanage Batulicin. Selain itu ditambah dengan Tanah Sela dan Selilau yang pernah dipinjamkan Gusti besar kepada Pangeran Haji Muhammad (Ayah dari Pangeran Haji Musa) sebagai pemenuhan janji kepada Gusti Besar sebelumnya.



**Gambar 2. Peta Pembagian Wilayah Kekuasaan di Tanah Bumbu (1841**  
(Sumber: Diolah dari peta *Borneo*, koleksi David Rumsey)

Dengan demikian di awal tahun 1841 Aji Landasan juga memiliki kekuasaan di daerah Batulicin dan daerah Sela dan Selilau (Kusan). Perkawinan Putri Aji Landasan dengan Pangeran Panji tidak memiliki keturunan anak. Setelah Pangeran Panji wafat, Putri Aji Landasan menikah lagi dengan Daeng Magading (Keturunan Raja Bugis Pagatan saudara dari almarhum Arung Boto, ia merupakan wali dari Raja Pagatan, Perkawinan kedua Putri Aji Landasan dengan Daeng Magading juga tidak memiliki keturunan (anak) sampai dengan

meninggalnya Putri Aji Landasan. Batulicin diserahkan kepada suaminya Daeng Magading, namun karena Daeng Magading tidak berhak atas warisan tanah apanage Batulicin, karena ia dianggap sebagai orang asing (dari keturunan orang Bugis Wajo di Pagatan-Kusan Hilir). Akhirnya tanah Batulicin diserahkan Daeng Magading kepada Pangeran Mohammad Nafis penguasa Kusan Pada tahun 1845. Pada Tahun 1846 Daeng Magading diperintahkan pemerintah Belanda untuk meninggalkan Batulicin. Daeng Magading meninggal tahun 1851.

Mengapa pemerintah kolonial dianggap mengusir Daeng Magading dari Batulicin, pertama yang harus dilihat Daeng Magading tidak memiliki hak waris atas tanah apanage Batulicin ataupun tanah di Sela dan Selilau, kedua hal penting harus dilihat bahwa Sultan Banjar pemilik teritorial wilayah pesisir Kesultanan Banjar di Martapura sebelumnya Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Alwasikh Billah (1825-1857) menyerahkan wilayah Batulicin kepada Hindia Belanda. Pada tahun 1860 wilayah Kerajaan Batulicin menjadi wilayah pemerintahan swapraja yang dikepalai seorang bumiputera, sebagai bagian dari *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah daerah swapraja tersebut dikuasakan kepada seorang kepala bumiputera yaitu Pangeran Syarif Hamid, seorang Arab dari Batavia, bukan keturunan Sultan Banjar. Atas perintah Belanda, Pangeran Syarif Hamid inilah yang berhasil menangkap Demang Lehman, salah seorang pemimpin Perang Banjar.<sup>36</sup>

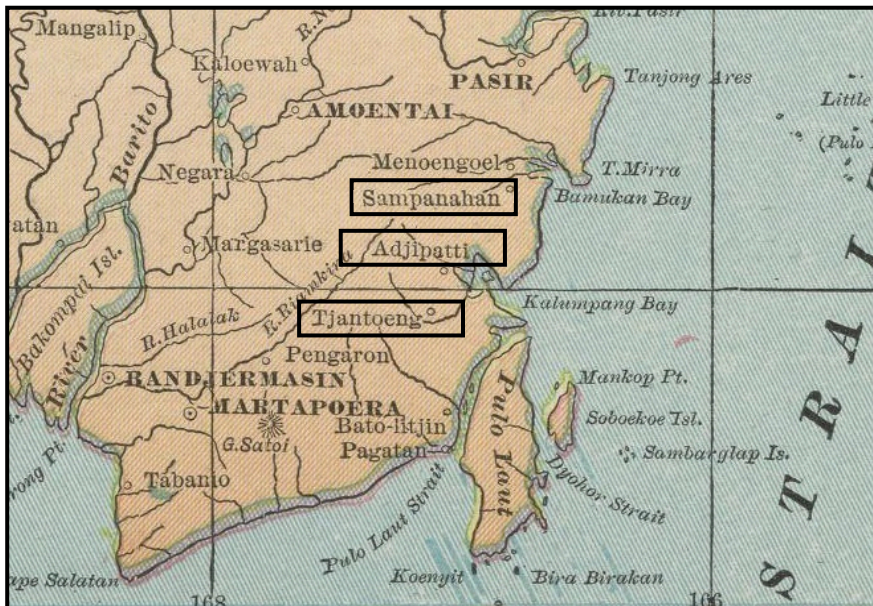
Syarif Hamid inilah yang menurunkan raja raja Batulicin berikutnya seperti Pangeran Syarif Toha, Pangeran Syarif Ahmad, Pangeran Syarif Mustafa

---

<sup>36</sup> Demang Lehman adalah pengikut setia Pangeran Antasari, ketika pecah Perang Banjar 28 April 1859 ia menjadi pemimpin salah satu pasukan,akhir tahun 1859 tercatat pertempuran dan penaklukan benteng Gunung Luwak dimana Demang Lehman kehilangan 100 orang anak buahnya dalam mempertahankan benteng itu. Akhir tahun 1859 peperangan berkisar di tiga daerah, Demang Lehman memimpin pasukannya disekitar Martapura dan Tanah laut. 31 Januari 1862 Surat Proklamasi yang dipaksakan Belanda akhirnya ditandatangani oleh Pangeran Hidayat, Kemudian Pangeran Hidayat dilarikan oleh rakyat, Belanda mengamuk dengan pasukannya, akhirnya menyerah, bulan Ferbruari 1862 Pangeran Hidayat ditangkap dan dibuang ke Jawa. Sampai dengan wafatnya Pangeran Antasari 11 Oktober 1862 ia tak mau bertatap muka, apalagi menyerah dengan Belanda dan meninggal karena penyakit cacar yang dideritanya, demikian juga dengan Demang Lehman, tertangkap oleh penipuan Belanda di daerah Batulicin, kemuidan ia diangkut ke Martapura dan dijatuhi hukuman gantung. Kepalanya diambil Belanda dan disimpan di negeri Belanda.

dan Pangeran Syarif Hamid. Walaupun diperintah oleh keturunan Arab, tetapi pengaruh Bugis masih cukup besar di Kerajaan Batulicin. Hal ini dibuktikan misalnya, makam Pangeran Syarif Thoha atau Syarif Muhammad Thaha yang bertuliskan inskripsi huruf lontara Bugis Makassar, berangka tahun 1279 Hijriyah atau tahun 1860 Masehi. Ketika Schwaner dalam tahun 1853 menyelesaikan laporan ekspedisinya keadaan daerah-daerah Tanah Bumbu terdiri atas pembagian beberapa daerah sebagai berikut (1) Daerah Cengal, Menunggul dan Bangkalaan dibawah kekuasaan Pangeran Muda (Aji Semarang atau Muhammad Arifbillah) putra almarhum Aji Pati dan Aji Tukul, cucu Aji Jawa; (2) Daerah Sampanahan dibawah Pangeran Mangku (Gusti Ali), paman dari sisi ibu Aji Jawa, dia adalah saudara Gusti Besar yaitu ibu Aji Jawa dan putra Pangeran Prabu, yang dikenal sebagai penguasa Sampanahan pada tahun 1780; dan (3) Daerah Cantung termasuk Buntar Laut, dibawah kekuasaan Aji Mandura (Aji Madura), putra almarhum Aji Jawa dan Gusti Ketapi. Sesudah meninggalnya Aji Semarang 1884, sebagai penggantinya adalah Aji Mas Rawan raja terakhir di kawasan Bangkalaan, Manunggul dan Cengal, ketika ia dinobatkan menjadi Raja ia bergelar Raja Arga Kasuma atau Pangeran Arga Kasuma bin Aji Semarang (Pangeran Muda) Muhammad Arifbillah (1884-1905). Pangeran Arga Kasuma adalah anak hasil perkawinan Aji Semarang atau Pangeran Muda Muhammad Arifbillah dengan Ratu Tarum binti Pangeran Brangta Kusuma (Raja Pulau Laut III), kemudian perkawinan Aji Semarang dengan Ratu Sengeng (Daeng Mangkau) Ratu Pagatan (Kerajaan Pagatan di Kusan Hilir) menurunkan Arung Abdurrachim. Jadi perkawinan Aji Semarang yang bergelar Pangeran Muda atau Muhammad Arifbillah atau di Kotabaru dan Pagatan ia dikenal dengan Pangeran Muda Muhammad Mahdi Arifbillah sebelumnya menjadikan antara bangsawan Bangkalaan, Menunggul, Cengal dan Pulau Laut, serta Kerajaan Pagatan adalah berkeluarga dan bersaudara melalui hasil perkawinannya dengan Ratu Tarum di Pulau Laut dan Ratu Sengeng Daeng Mangkau di Pagatan.





**Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Kekuasaan di Tanah Bumbu (1853)**  
 (Sumber: Diolah dari peta *Borneo*, koleksi David Rumsey)

Pada masa pemerintahan Pangeran Arga Kasuma (1884-1905) di wilayah Tanah Bumbu, kedudukan pusat pemerintahan berada di daerah Tanjung Batu. Disini dibangun keraton untuk pusat pemerintahan yang membawahi wilayah Bangkalaan, Manunggul dan Cengal. Di sekeliling keraton ditanami dengan pohon-pohon jati yang diambil bibitnya dari Gunung Jawa. Hasil kebun jati tersebut bermanfaat perahu layar dan bahan bangunan lainnya. Kemudian anak dari Pangeran Arga Kasuma yang bernama Pangeran Mas ditunjuk sebagai pengelola wilayah tanaman jati disekitar Gunung Jawa tersebut, ia dikenal juga dengan Mas Bandar. Kemudian oleh Mas Bandar ditunjuklah Pambakal Batu atau Pambakal Rampa Cengal I sebagai penjaga daerah Gunung Jawa. Kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Pangeran Abdul Majid Kasuma saudara sepapak dengan Pangeran Mas Bandar, dimana pemerintahannya atas persetujuan pemerintah Kolonial Belanda.

Dengan dikeluarkannya keputusan Gubeenur Jenderal (*Gouverneur Generaal*), tertanggal 3 April 1903, nomor 10, dinyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli 1903, seluruh *Landschap* dan *Gouvernementslandschappen* dimasukkan

dalam pemerintahan langsung (*daadwerkelijk bestuurd Gebied*), dan semua instruksi-instruksi yang telah diserahkan kepada kepala-kepala (*hoofden*) dari *landschap* tersebut lalu dicabut kembali, sebagai akibat perjanjian Kesultanan Banjar dengan Kompeni Belanda. Selanjutnya pemerintahan dikuasai oleh pihak kolonial Belanda. Dengan perberlakuan peraturan pemerintah kolonial Belanda tersebut, akhirnya Pangeran Arga Kusuma adalah merupakan raja terakhir di kawasan Tanah Bumbu. Sebagai akibat tindakan Belanda itu pihak Belanda mengeluarkan biaya ganti rugi penghasilan, dengan jumlah f. 207.972,90, terdiri atas: (1) Kerajaan Tanah Bumbu (Cengal, Menunggul, Bangkalaan) mendapat f. 93.840; (2) Cantung mendapat f. 28.152; (3) Sampanahan mendapat f. 3.284,40; (4) Batulicin mendapat f. 11.730; (5) Pulau Laut mendapat f. 70.300; dan Sebamban mendapat f. 506,50. Jumlah itu diterima pada tanggal 1 Januari 1905 dengan mendapat Residen Banjarmasin tanggal 28 Desember 1904, Nomor 3626. Jumlah sepenuhnya diberikan kepada Sebamban, yang lainnya diberikan sebagian saja dan sebagian lagi dimasukkan pada *Nederlandsche Handels Maatschappij* atas nama masing-masing kepala (deposito). Hal lain yang harus dilihat sebagai dasar hukum pemerintah kolonial Belanda menghapuskan pemerintahan lokal disatukan dengan pemerintah Kolonial Belanda dengan dikeluarkannya *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandch Indie* tanggal 3 April 1903 Nomor 10.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1903 sejauh diperlukan berdasarkan wewenang Raja. *Pertama*; menetapkan bahwa Tanah Bumbu menjadi bagian dari *Afdeeling* Pasir dan Tanah Bumbu, Keresidenan Borneo Timur dan Selatan, terdiri atas daerah, Cengal, Manunggul, Bangkalaan, Sampanahan, Cantung, Batulicin, Sebamban dan Pulau Laut yang sampai saat itu masih diperintah oleh pada kepala pribumi dengan pulau-pulau kecil disekitarnya dan pulau Sebuku, terutama dengan cara yang sama seperti bagian dari Borneo Timur dan Selatan yang termasuk daerah pemerintah langsung, yang diperintah oleh aparat pemerintah. *Kedua*; dengan perubahan lebih lanjut sejauh menyangkut pasal 2 dari keputusan tanggal 30 Mei 1898 nomor 3 (Lembaran Negara nomor 178) seperti yang kemudian diubah dalam pasal 1 keputusan tanggal 13 April dan 30 Oktober 1900 nomor 2 dan 26 (Lembaran Negara nomor 130 dan 289), menetapkan bahwa daerah Sebamban digabungkan dengan distrik Satu,

*Onderafdeeling* Tanah laut, *afdeeling* Martapura, dan daerah-daerah lain di Tanah Bumbu akan membentuk tiga distrik yaitu:

- a. Pulau Laut dan Batu Licin, yang terdiri atas Pulau laut dengan pulau-pulau kecil yang terletak disekitarnya dan pulau Sebuku, seperti juga daerah Batulicin.
- b. Cantung dan Bangkalaan, yang terdiri atas daerah tersebut.
- c. Sampanahan, Manunggul dan Cingal, yang terdiri atas daerah tersebut.

Ketentuan selanjutnya dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No. 179 Pemerintahan Afdeeling Borneo Selatan dan Timur, penerapan pemerintahan langsung di Tanah Bumbu disebutkan bahwa: demi kepentingan distrik Satui yang menurut pasal 2 keputusan ini ditambah dengan daerah Sebamban, dan demi kepentingan daerah Tanah Bumbu lainnya, jumlah kepala distrik di Karesidenan Borneo Timur dan Selatan, kini menurut pasal 3, III dari keputusan 30 Mei 1898 nomor 3 (Lembaran Negara nomor 178) berjumlah 28, ditambah dengan 2 kepala distrik klas-2 dengan gaji f 1800 per tahun masing-masing. Dan dua kepala distrik klas-3 dengan gaji f 1500 per tahun masing-masing. Dengan penurunan jumlah 1 kepala distrik klas-4 dengan gaji f 1200 pertahun, formasi kepala distrik di karesidenan tersebut sehubungan dengan ini dan dengan tidak berfungsinya kepala distrik yang dimaksud dalam pasal 3, IV sub c dari keputusan itu, sejauh mengubah alenia yang disebutkan terakhir, ditetapkan sebagai berikut: (1) 5 kepala distrik klas-1 dengan gaji f 2400 pertahun; (2) 9 kepala distrik klas-2 dengan gaji f 1800 pertahun; (3) 4 kepala distrik klas-3 dengan gaji f. 1500 pertahun; (4) 9 kepala distrik klas-4 dengan gaji f 1200 pertahun; dan (5) 4 kepala distrik klas-5 dengan gaji f 900 pertahun.

Sekalipun pemerintah kolonial Belanda berkuasa penuh sejak 1 Januari 1905, namun masih menunjuk beberapa orang yang dianggap berwibawa untuk menjadi penguasa di wilayah yang dipimpinnya. Misalnya pemerintah Belanda menunjuk Pangeran Abdul Majid bekas penguasa daerah Cantung, (*Waarnemend Zelfbestuurder van Cantung*) diangkat menjadi Kepala distrik (*districtafoofd van Sampanahan*). Pangeran Abdul Majid Kasuma adalah seorang yang dipandang Belanda berbahaya dan mempunyai pengaruh kuat, oleh karena itu Belanda berusaha untuk menguasainya dan mengangkatnya menjadi Kepala Distrik.

Upaya-upaya Belanda mengadu domba penguasa lokal atau peribumi tetap dijalankan, misalnya Belanda berusaha mengadu domba dengan pengikut kekuatan akhir Perang Banjar, dimana Gusti Muhammad Arsyad dihadapkan dengan Pangeran Abdul Majid Kasuma dengan tipuan dan ancaman Belanda untuk membuang Pangeran Arga Kasuma. Pangeran Abdul Majid Kasuma tidak mengetahui bahwa orang yang dicari Belanda itu adalah keluarga istana yang memberontak terhadap Belanda bersembunyi di Sengayam. Untuk itu karena termasuk dalam wilayahnya, maka Belanda membawa dan mengamankan karena dianggap pengacau dan berandal biasa.

Namun Gusti Muhammad Arsyad sempat melarikan diri, dan pengawalnya terbunuh. Tetapi akhirnya dapat ditangkap, dengan penuh penyesalan Pangeran Abdul Majid Kasuma atas peristiwa tersebut, Gusti Muhammad Arsyad dibuang ke Bogor. Dengan peristiwa tersebut Belanda yang berkedudukan di Kotabaru dibawah con Fietries mendapat Bintang Klas I. Pangeran Abdul Majid Kasuma pernah mengambil langkah berani mempertahankan sarang burung Tamuluang yang dinyatakan bukan termasuk dalam perjanjian dengan pihak Belanda, dan bukan hak kerajaan, namun hak milik Pangeran Abdul Majid Kasuma sebagai pemberian sewaktu orang tua beliau menjadi raja. Gugatan tersebut dilakukan, akhirnya pemerintah kolonial Belanda memberikan ganti rugi secara khusus atas sarang burung Tamuluang senilai f. 150.000,-, sesuai dengan edaran Residen Banjarmasin tanggal 21 Februari 1907, No. 422. Kemudian kepada bekas raja-raja itu mendapat tunjangan (*schadeloostelling*) setiap bulan untuk seumur hidup dari pemerintah kolonial Belanda diantaranya: (1) Pangeran Arga Kasuma, kepala dari Tanah Bumbu (Cengal, Menungul dan Bangkalaan), di dalam tiga bulan mendapat f. 500,-; (2) Pangeran Muhammad Aminullah Kasuma, Kerajaan Kotabaru (Pulau laut), Ipar Pangeran Abdul Majid Kasuma, dalam tiga bulan mendapat f. 1000,-.

Dengan demikian seiring dengan berakhirnya peristiwa Perang Banjar (1859-1896) di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, demikian juga dengan propaganda Gusti Muhammad Arsyad di kawasan Tanah Bumbu dan Pulau Laut, tentunya tidak semua keturunan raja-raja Kerajaan Tanah Bumbu yang pro, ada saja keturunan raja yang kontra terhadap tindakan kolonial Belanda di bagian Tenggara Kalimantan Selatan. Misalnya Belanda dengan segala daya upaya ingin menangkap Pangeran Kusumanegara. Dengan segala siasat

Belanda akhirnya Pangeran Kusumanegara/Adji Dharma berhasil di tangkap dan di tawan di Sel Kotabaru Pulau Laut kemudian Pangeran Kusumanegara/Adji Dharma di bawa menuju Pelabuhan Surabaya, lalu di teruskan menuju Pelabuhan Panarukan dan diteruskan jalan darat menuju Besuki. Pangeran Kusumanegara akhirnya di asingkan di Bondowoso, Karesidenan Besuki Jawa Timur.

## DAFTAR BACAAN

- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti (Tracing Ancient Indonesia History Through Inscriptions)*. Diterbitkan Atas Kerjasama Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Departemen Arkeologi (FIB UI) dan École française d'Extrême-Orient (EFEO). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brahmantyo, G. 1995. *Perwara Sejarah*. Malang: Penerbit I.K.I.P. Malang.
- Brandes, J.L.A. 1913. 'Oud-Javaansche Oorkonde (O.J.O). Nagelaten Transcripties van wijlen Dr. J.L.A Brandes. Uitgegeven door Dr. N.J. Krom'. *Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (V.B.G) van Kunsten en Wetenschappen deel LX*. Batavia: Albrecht & Co-'S Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Cahyono, M.D. 2013. *Wanwacarita Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang*. Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang.
- Dirjosuwondo, Y. 1984. 'Mitos Ratu Adil Jawa sebagai Usaha Memberikan Motivasi Penyatuan Kembali Kerajaan Janggala dan Kediri'. Dalam *Analisis Kebudayaan, Tahun IV, No. 1*. Hal. 122-135. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Firmansyah, D. 2017. *Ken Angrok Pendiri Wangsa Rājasa*. Skripsi belum diterbitkan. Malang: Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusan Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Budi Utomo (IBU).
- Hardjowardjojo, R.P. 1965. *Pararaton*. Jakarta: Bhratara.
- Hinzler, H.I.R., dan Schoterman, J.A. 1979. 'A Preliminary Note on Two Recently Discovered MSS of The Nāgarakṛtāgama'. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (B.K.I.) [Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia]*, Vol. 135, Issue 4. Hal. 481-484. Leiden: Brill Publishers in collaboration with KITLV.

- Kartodirdjo, S. 1992. *Ratu Adil*. (Penerjemah: Poeradisastra). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kasdi, A. 2008. *Serat Pararaton, Kajian Historis sebagai Sastra Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Komandoko, G. 2008. *Ken Arok: Banjir Darah di Tumapel*. Yogyakarta: Narasi.
- Komandoko. 2008. *Pararaton Legenda Ken Arok dan Ken Dedes*. Yogyakarta: Narasi.
- Kriswanto, A. 2009. *Pararaton Alih Aksara dan Terjemahan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Kusumadewi, S.A. 1988. *Prasasti Garamán 975 Śaka (1053 Masehi)*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).
- Mackenzie, D.A dan Goble, W. (Illustrations in Colour). (1913). *Indian Myth and Legend*. London: The Gresham Publishing Company LTD.
- Munandar, A.R. 2004. "Dinamika Kebudayaan Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas", *Jurnal ilmiah Lingua, Vol. III, No. I, Maret 2004*. Hal. 01-10. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia (STBA LIA).
- Munib, N.B. 2011. *Dinamika Kekuasaan Raja Jayakatyang di Kerajaan Glang-Glang Tahun 1170-1215 Çaka: Tinjauan Geopolitik*. Skripsi belum diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Program Studi Ilmu Sejarah-Universitas Negeri Malang (UM).
- Muljana, S. 2006. *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasoichah, C. 2007. *Prasasti Mruwak 1108 Śaka (1186 M)*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia (FIB UI).
- Nugroho, A.P. 2016. *Hasil Terjemahan Prasasti Kamulan Tahun 1116 Saka atau 1194 Masehi*. Kediri: Artikel Terjemahan.
- Nurharjarini, D.R., dan Suyami. 1999. *Kajian Mitos dan Nilai Budaya dalam Tantu Panggelaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Padmapuspita, K.J. 1966. *Pararaton, Teks Bahasa Kawi Terdjemahan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa.
- Parera, A.D.M. 1994. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pigeaud, Th.G.Th. 1924. *De Tantu Panggelaran*. Een Oud-Javaansch Prozageschrijf, Uitgegeven, Vertaald en Toegelicht. 's Gravenhage: Nederl. Boek en Steendrukkerij Voorheen H.L. Smits.

- Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1968. *Tjerita Pandji Dalam Perbandingan*. (Penerjemah: Drs. Zuber Usman dan Drs. H.B. Jassin). Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Riana, I. K. 2009. *Kakawin Dēśa Warṇnana Uthawi Nāgara Kṛtāgama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: PT Gramedia.
- Saktiani, D., Widya, K., Aminullah, Z.P., Marginingrum, N., dan Septi, N. 2018. *Kakawin Nagarakertagama: Teks dan Terjemahan*. Yogyakarta: Narasi.
- Saleh, M.I. Tanpa Tahun. *Kursus BI Tertulis Sedjarah: Sedjarah Bandjarmasin: Seri Monogarfi 3*. Bandung: K.P.P.K. Balai Pendidikan Guru.
- Saleh, M.I., Asnawi, A., Koroh, A.A., Yustian, D., dan Syah, Y. 1977/9178. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santoso, I.B. 2017. *Suta Naya Dhadap Waru: Manusia Jawa dan Tumbuhan*. Yogyakarta: Interlude.
- Santoso, S. 1975. *Calon Arang Si Janda dari Girah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Savitri, M. 2012. 'Ken Arok: Perusuh Pedesaan dengan Mobilitas Vertikal yang Tinggi'. Dalam *Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu*. Hal. 95-108. Pernah disampaikan pada Kongres Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (A.A.E.I) di Malang, 28-30 Mei 2001. Diterbitkan Atas Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (A.A.E.I); Badan Kerjasama Kebudayaan/Kesenian Indonesia (B.K.K.I.), dan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (B.P.K.K.I.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simandjuntak, B.S. 1958. *Kesusastraan Indonesia I*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Siswondo S.P., Somadisastra, M., Gitoasmoro, S., Sundoyo, Heru Sukadri, K., Mustopo, M.H., Anwar, K., dan Rochmat, Ny. U. 1978. *Sejarah Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekmono, R. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suhadi, M., dan Kartakusuma, R. 1996. *Berita Penelitian Arkeologi No. 47: Laporan Penelitian Epigrafi di Wilayah Jawa Timur*. Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta/Pusat Penelitian Arkeologi Nasional/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunyoto, A. *Sunan Ampel Raja Surabaya: Membaca Kembali Dinamika Perjuangan Dakwah Islam di Jawa Abad XIV-XV M*. Surabaya: Diterbitkan Atas Kerjasama Dianta,a Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren dan lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel (LPBA-MASA) Surabaya.

- Suyoto. (Online). *Menolak Hipotesis Indonesia Adalah Benua Atlantis (VII): Kulit Putih Jadi Pribumi Orang Jawa Jadi WNA Memahami Nusantara Secara Emic*. Diakses dari laman [www.facebook.com](http://www.facebook.com) pada 23/10/2018, 19:36 WIB.
- Suwardono. 2005. *Mutiara Budaya Polowijen Dalam Makna Kajian Sejarah, Cerita Rakyat, dan Nilai Tradisi*. Malang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang.
- Suwardono. 2013. *Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suwardono. 2013. *Tafsir Baru Kesejarahannya Ken Angrok*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Hari Jadi Kabupaten Malang. 1984. *Dari Pura Kāñjuruhan Menuju Kabupaten Malang (Tinjauan Hari Jadi Kabupaten Malang)*. Malang: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia II. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno, Edisi Pemutahiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, A.G. 1989. *Urang Banjar dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Usman, A.G. (1991). 'Tersebarinya Agama Islam di Kalimantan Selatan'. Dalam *Buletin Kayuh Baimbai: Meneropong Kembali Sejarah dan Kebudayaan Rakyat Banjar, No. 1, Tahun I Februari 1991*. Banjarmasin: Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Banjar Kalimantan Selatan.
- Wardhani, D.S.S. 1980. *Prasasti Hantang*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).
- Warsito, S. 1966. 'Benarkah Ken Arok Anak Desa?'. Dalam *Madjalah Bulanan Pusara, Djilid XXVII No. 3-4, Maret-April, 1966*. Hal. 17-32. Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa.
- Wojowasito, S. 1957. *Sedjarah Kebudayaan Indonesia II*. Jakarta-Yogyakarta: Penerbit Kalimosodo.
- Wouden, F.A.E. van. 1985. *Klen, Mitos dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustaka Grafiti Perss.
- Yogi, D. 1996. *Mangilala Dr̄wya Haji: Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Pemerintahan*. Skripsi belum diterbitkan. Depok: Fakultas Sastra Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Seksi Arkeologi-Universitas Indonesia (FIB UI).



# DINAMIKA KERAJAAN BUGIS PAGATAN DI *LANDSCHAP* TANAH BUMBU TAHUN 1842-1900

Mansyur

akunblogmansyur@gmail.com

## PENDAHULUAN

Keberadaan “kantong-kantong” suku Bugis di daerah Kutai dan Samarinda (Kalimantan Timur), kemudian daerah Pulau Laut dan Pagatan (Kalimantan bagian Tenggara) yang berkembang hingga Abad ke-19 dan abad ke-20, memunculkan banyak dugaan dan pendapat. Pakar bahasa, Roger F. Mills berpendapat nenek moyang orang Bugis di Sulawesi Selatan merupakan gelombang migrasi Austronesia yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu daerah Kutai dan Samarinda atau dari bagian tenggara pulau Kalimantan, yakni Pagatan atau Pulau Laut (wilayah Tanah Bumbu) (Mills, 1975). Wilayah tersebut mudah dijangkau dengan perahu dari pesisir barat Sulawesi Selatan (Makassar) hanya berjarak satu atau dua hari naik perahu layar dari Pulau Laut (Pelras, 2006). Ahli Bahasa, Adelaars berpendapat bahwa kelompok-kelompok bahasa Tamanik yang digunakan di daerah timur laut Kalimantan ternyata berhubungan erat dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan, khususnya Bahasa Bugis dan Toraja (Adelaars, 2004; Berg, 2004).

Suku Bugis di wilayah Kalimantan bagian tenggara dan timur yang bermukim sejak pertengahan abad ke-18 dan berkembang hingga abad ke-19 dan abad ke-20, berasal dari Sulawesi Selatan. Migrasi Suku Bugis ke Kalimantan dilatarbelakangi karena ‘*spirit massompe*’ atau merantau meninggalkan kampung halaman menuju daerah lain (Anderson, 2003; Ammarel, 2002; Linneton, 1973). Selain ‘*spirit massompe*’, diaspora Bugis juga didukung peristiwa abad sebelumnya yakni jatuhnya Makassar ke tangan VOC pada tahun 1667. Terutama adanya perjanjian Bongaya atau *Cappaya Bongaya* tanggal 18 November 1667 yang ditandatangani Sultan Hasanuddin dan Cornelis Speelman yang tidak memuaskan beberapa pihak, terutama sekutu

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Peneliti Sejarah Sekaligus Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat.

Kesultanan Gowa-Tallo seperti Kerajaan Bugis Wajo (Andaya, 1978; Linneton, 1973). Guna menghindari kondisi mengecewakan karena Perjanjian Bongaya serta pertikaian antar kerajaan di Sulawesi Selatan mendorong banyak kelompok bangsawan Bugis Makassar merantau, bermigrasi atau keluar Sulawesi Selatan (Sulistiyono, 2009).

Pada periode 1667-1900, gerakan migrasi ke luar daerah Sulawesi Selatan hanya terbatas pada orang-orang Bugis Makassar yang terlibat dalam perdagangan. Pedagang ini menjelajah Nusantara mencari daerah perdagangan sesuai dengan arah angin musim-musim tertentu, kemudian kembali ke Sulawesi hanya beberapa bulan setiap tahun untuk memperbaiki perahu mereka. Dalam proses migrasi ke luar Sulawesi Selatan, biasanya imigran Bugis dan Makassar dipimpin putra raja atau pangeran dan beberapa pengikutnya yang juga keturunan bangsawan (Anderson, 2003).

Jaringan diaspora Bugis pada Abad ke-19, dirintis La Madukkelleng pada tahun 1726. Seperti dituliskan dalam sumber lokal yakni naskah *Lontara Sukku'na Wajo* (LSW). Dalam LSW diceritakan La Maddukkelleng adalah seorang bangsawan kelahiran Wajo-Sulawesi Selatan tahun 1700 dan wafat di Wajo tahun 1765. La Maddukkelleng sering disebut Arung Singkang dan Arung Peneki berdasarkan gelar dari orang tuanya. La Maddukkelleng diperkirakan merantau tahun 1714 (Abidin, 1983). Dalam Naskah *Lontara Sukku'na Wajo* (LSW) dituliskan, setelah malang melintang menjadi bajak laut di wilayah Johor dan Selat Malaka pada tahun 1726, La Maddukkelleng kemudian berlayar menuju wilayah Pasir, Kalimantan Timur melalui Selat Makassar. Selama perjalanan kelompok, La Maddukkelleng bertindak sebagai pimpinan dan mengangkat To Assa sebagai panglimanya. Dalam rombongan La Maddukkelleng tersebut, ikut pula delapan orang bangsawan menengah, yaitu La Mohang Daeng Mangkona, La Pallawa Daeng Marowa, Puanna Dekke', La Siaraje, Daeng Manambung, La Manja Daeng Lebbi, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Manrappi Daeng Punggawa. Setelah pengembaraan La Maddukkelleng ke wilayah Pasir, banyak warga Wajo yang mengikuti jejaknya berpindah ke daerah ini. Apalagi pada tahun 1726-an, Tanah Wajo telah diduduki Kerajaan Bone, banyak warga Wajo yang akhirnya meninggalkan kampung kelahirannya berlayar menuju Pasir dan menetap di Sungai Muara Kendilo. Tempat

pemukiman baru tersebut lambat laun menjadi sesak akibat bertambahnya migrasi dari tanah Wajo. Jaringan diaspora Bugis menyebar ke Tanah Kutai yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona pada tahun 1730-an (Hurgronje, tanpa tahun; Knappert, tanpa tahun; Tromp, 1887).

Tidak semua pengikut La Maddukelleng mengikuti jejaknya tinggal di wilayah Kerajaan Pasir. Seperti diceritakan dalam naskah lokal di Pagatan, *Lontara Kapitan La Mattone* (LKLM). Salah seorang bangsawan menengah yakni Puanna Dekke, ternyata tidak mau bertempat tinggal di wilayah Pasir tetapi berlayar kembali ke wilayah perairan Sungai Kusan yang bernama Pamagatan pada tahun 1735. Inilah yang melatarbelakangi adanya Kerajaan Bugis di Pagatan.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi dan historiografi. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Adapun tempat pencarian sumber-sumber bagi penelitian ini antara lain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sumber lain berupa artikel yang diperoleh melalui penelusuran situs-situs internet dengan yang relevan dengan topik. Selain itu, digunakan pula sumber kepustakaan, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan seperti disertasi, tesis, dan laporan penelitian lainnya.

Tahap verifikasi atau pengujian atas kebenaran data kemudian dilakukan dengan cara kritik sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber atau teks merupakan kegiatan yang bertujuan menyelidiki dan menguji apakah sumber-sumber sejarah yang ditemukan bias dipercaya (kredibel) baik bentuk maupun isinya. Tahap ini merupakan kegiatan mencari fakta sejarah. Selanjutnya dilakukan interpretasi, yaitu kegiatan menetapkan makna dan saling menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Tahap yang terakhir yaitu historiografi atau rekonstruksi sejarah, yaitu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Puannad Dekke dan Pembukaan Pamagatan

Ketertarikannya kepada daerah Pamagatan mendorong Puanna Dekke menghadap ke ibukota Kesultanan Banjar (Martapura) yang saat itu diperintah oleh Panembahan Kaharuddin Halilullah. Panembahan setuju terhadap usulan orang Bugis membuka daerah pamagatan namun sebagai “prasyarat” kesanggupan Puanna Dekke untuk menanamkan “investasi” untuk biaya pembangunan pemukiman baru di atas lahan hutan belantara tersebut. Puanna Dekke dapat menjamin keamanan perairan di Muara Pagatan yang selama ini sering digunakan sebagai “markas” bajak laut. Apabila kedua hal itu dapat diwujudkan maka Sultan mempersilahkan daerah tersebut untuk ditempati sebagai perkampungan orang Bugis yang kemudian hari dapat diwariskan kepada anak cucu Puanna Dekke.

Puanna Dekke menyanggupinya dan selanjutnya daerah tersebut diberinama Kampoeng Pegattang (asal kata dari tempat pemagatan atau pemotongan rotan), pada perkembangannya berubah menjadi Pagatan. Kampoeng Pagattang berkembang menjadi salah satu bandar kecil yang strategis karena berbatasan Laut Jawa dan dilalui Sungai Kusan. Hal yang mendukung cepatnya perkembangan Kampoeng Pagattang karena sebelum dibuka oleh Puanna Dekke tahun 1735, sebenarnya sudah ada beberapa orang Bugis dan Banjar yang tinggal di Pagatan sejak tahun 1729 sehingga kampung tersebut sudah lumayan ramai. Orang-orang Bugis memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, mengolah rotan maupun berdagang (Anderson, 2003).

Terdapat beberapa versi berbeda mengenai kurun waktu kapan didirikannya kerajaan Pagatan. Versi pertama, menurut Eisenberger, yang menjelaskan bahwa pada tahun 1750 Pagatan dibangun oleh orang Bugis (Eisenberger, 1936). Kemudian versi yang kedua, menurut C. Nagtegaal, hanya menyebutkan bahwa Pagatan dibangun pada pertengahan abad ke-18 oleh seorang pedagang Bugis dari Wadjo (*Zuid West Celebes*) bernama Puanna Dekke atas izin Sultan Banjarmasin (Nagtegaal, 1939). Sementara itu pendapat ketiga terdapat dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, tertulis pedagang Bugis dari Wajo Sulawesi Selatan tiba di Pagatan pada tahun 1735 dipimpin Puanna Dekke.

Dari ketiga pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran menurut penulis adalah tahun 1735 sesuai versi *Lontara Kapiten La Mattone*. Apabila dibandingkan tahun pelayaran La Maddukelleng ke Pasir tahun 1726 (menurut versi LSW), rentang waktunya tidak terlalu jauh. Dari Kampoeng Pagattang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya identitas '*to-Ugi*' yang menjadi ciri khas orang Bugis Pagatan. Identitas ini terwujud dalam pengaturan pemerintahan internal di Kampoeng Pagattang (Muller, 1857). Walaupun Puanna Dekke menjadi pionir yang membuka dan mengembangkan kampung Bugis tersebut, ternyata Puanna Dekke tidak mau menjadi raja. Kemungkinan hal ini disebabkan karena Puanna Dekke hanyalah keturunan bangsawan menengah dari Wajo. Selanjutnya Puanna Dekke mengundang saudaranya Pua Janggo dan La Pagala dari Kalimantan bagian barat untuk membicarakan pemimpin Bugis yang bisa mengatur kampung ini. Hasil perundingan tiga bersaudara menyimpulkan untuk mempersiapkan Hasan Panggewa (La Pangewa) sebagai calon raja Pagatan pertama, Hasan Panggewa sendiri ketika itu masih berumur belia termasuk keturunan salah seorang Raja Kampiri di Wajo, Datu Lompulle.

Dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, juga dituliskan bahwa saudara Puanna Dekke dan Pua Janggo berangkat menuju Tanah Bugis menjemput cucunya bernama La Pangewa, turunan anak Raja di Tanah Bugis (Daerah Kampiri, Wajo) untuk dibawa ke Pagatan. Setelah dikhitan dan dikawinkan, La Pangewa dinobatkan menjadi Raja Pagatan pertama. Karena masih belia, pemerintahan sementara dipercayakan kepada pamannya Raja Balo sambil mendidik dan membimbing La Pangewa agar mampu menjadi pemimpin dan mengatur pemerintahan setelah dewasa nanti. Mengenai La Pangewa menurut K.G Anderson, penunjukannya menjadi raja Pagatan dimaksudkan untuk membina hubungan dan ikatan kekeluargaan dengan daerah asal di Sulawesi Selatan. Pada masa kepemimpinannya, pemukim orang-orang Wajo membuka wilayah yang berdekatan dengan Kampoeng Pegattang yang bernama Kampoeng Baroe. Sementara orang Banjar yang sebelumnya berada di Pagatan banyak yang pindah ke wilayah hulu di wilayah Kusan (Anderson, 2003).

Dalam dinamika politiknya, Kerajaan Pagatan cukup disegani di wilayah geografis Kalimantan bagian tenggara karena kekuatan armada lautnya. Seperti

diceritakan dalam naskah *Lontara Kapitan La Mattone*, Kerajaan Pagatan menunjukkan perannya ketika Pangeran Amir atau Pangeran Muhammad Aminullah Ratu Anum Bin Sultan Kuning atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Anom pada tahun 1785 memblokade dan mengganggu arus lalu lintas Muara Banjarmasin, menghalang-halangi dan menahan perahu-perahu pedagang yang masuk ke Banjarmasin. Berita itu didengar oleh Puanna Dekke, kemudian ia segera memerintahkan cucunya La Pangewa menemui Sultan di Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin, La Pangewa diberi tugas menggempur Pangeran Amir hingga Pangeran Amir beserta pengikutnya mundur ke Kuala Biyajo (wilayah Kuala Kapuas). Atas keberhasilan La Pangewa memukul mundur Pangeran Amir, ia diberi gelar *Kapitan Laut Pulo* (Pulau Laut) sekaligus pengakuan sebagai raja Bugis Pagatan pertama oleh Panembahan (Sultan Banjar).

Dengan kepercayaan yang telah diberikan Sultan Banjar kepada Puanna Dekke dan La Pangewa, Kerajaan Pagatan secara politis berada di bawah kedaulatan Kesultanan Banjar (Nagtegaal, 1939). Kedudukan Kerajaan Pagatan hanya memiliki hak otonomi pengaturan pemerintahan ke dalam, sebagaimana juga kerajaan-kerajaan kecil lainnya yakni Kusan, Batulicin dan Cantung, Sampanahan, Bangkalaan, Manunggal, Cengal, Sebamban serta Pulau Laut. Kesultanan Banjar merupakan pelindung kerajaan kecil lainnya yang menjadi vazalnya.

Setelah pengangkatannya menjadi *Kapitan Laut Pulo* dan Raja Pagatan pertama, La Pangewa memainkan peran penting dalam menjaga wilayah Tanah Bumbu dan perairan Kalimantan bagian tenggara dari perompak. Meski begitu, ternyata Sultan Banjar (Sultan Sulaiman pengganti Panembahan Kaharuddin Haliullah) masih memiliki kecurigaan terhadap La Pangewa. Apalagi saat La Pangewa meminta bantuan persenjataan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memerangi bajak laut di wilayah perairan Kesultanan Banjar tahun 1805. Sultan Sulaiman mencurigai kalau senjata tersebut nantinya akan dipakai untuk memerangi negeri-negeri vazal Kesultanan Banjar. Seperti Surat Sultan Sulaiman kepada Willem Bloom tahun 1805 (Klinkert, 1913) sebagai berikut.

“Surat dari Paduka Sultan Banjar Kepada Tuan Blom. Bahwa dengan ikhlas dan kesucian hati yang tiada terhingga, Sultan Banjar mengirimkan

salam kepada Tuan Blom dan mendoakan semoga panjang umur. Kemudian daripada itu kami ingin menga-barkan bahwa kami mendapat kabar dari *Kapitan Laut Pulo* tentang permintaannya untuk memerangi ilanun (bajak laut). Karena itu kompeni jangan begitu percaya dengan perkataannya, karena siapa tahu dia (*Kapitan Laut Pulo*) berdusta dan barangkali memiliki niat "jahat" (kurang baik) kepada negeri-negeri (vazal) Banjar seperti Kotawaringin. Karena itu masalah *Kapitan Laut Pulo* kami ingatkan kepada kompeni. Tertulis pada hari Jumat, tanggal 28 Bulan Ramadhan tahun 1220 Hijriyah (20 Desember 1805 Masehi)."

Menurut Anderson, raja pertama Pagatan La Pangewa (*Kapitan Laut Pulo*) diperkirakan memerintah mulai tahun 1761 sampai 1838. La Pangewa menikah dengan seorang wanita bernama I Wale' Petta Coa, tetapi tidak diketahui apakah istrinya berasal dari wilayah Pagatan atau Sulawesi Selatan. Dar perkawinan ini, La Pangewa memiliki tiga anak yakni La Palebbi', La Paliweng dan Besse' Pegatan. Ketika La Pangewa meninggal tahun 1838, ia digantikan oleh putranya La Palebbi'. Sementara putranya yang lain La Paliweng, kemudian merantau ke Singapura bersama istrinya, I Romba Petta Amba'. Dengan asumsi bahwa La Paliweng adalah anak yang kedua, tentunya ia harus sudah menikah pada usia yang sangat muda. Karena La Palebbi' masih terlalu muda untuk menjalankan tugas-tugasnya, sementara Pagatan dikuasakan kepada bibinya, Petta Mabbowongnge. Pemerintahannya hanya berlangsung lima tahun dan kemudian La Palebbi' meninggal dunia. Karena kosongnya pemerintahan, akhirnya La Paliweng dipanggil kembali ke Pagatan dan diangkat menjadi raja Pagatan kedua bergelar Arung Abdul Rahim tahun 1838 (Anderson, 2003; Noor, 1936).

Pemukiman Bugis pertama di Kampong Pagattang yang dibangun pada tahun 1735, kemungkinan besar sama dengan kampung kuno orang Bugis umumnya, yang terdiri dari sejumlah keluarga antara 10 sampai 200 rumah. Rumah-rumah tersebut biasanya berderet, menghadap selatan atau barat. Jika ada sungai, maka diusahakan agar rumah-rumah membelakangi sungai. Pusat dari kampung lama merupakan suatu tempat keramat (*possitama*) dengan pohon beringin besar dan kadang-kadang dengan satu rumah pemujaan (*saukang*). Selain tempat keramat, pemukiman atau kampung Bugis umumnya memiliki langgar atau masjid sebagai tempat beribadah (Prabowo, 2002). Sebagai perbandingan dan gambaran visual rumah rumah Bugis terdapat dalam lukisan Heinrich von Gaffron peneliti Antropologi dan Bahasa pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Borneo bagian tenggara dan timur tahun 1845. Lukisan tersebut berjudul "*Het Vorstelijk Paleis van Pagattan (Boeginezen), op de voorgrond een afbeelding van een hanengevecht*" (Istana Raja Pagatan abad 19 dengan latar depan istana, penduduk yang sedang menyabung ayam). Lukisan ini dikoleksi oleh Royal Institute of Linguistics and Antropology di Negeri Belanda.



**Gambar 1. Lukisan Istana Kerajaan Pagatan Tahun 1845**  
**Karya H. von Gaffron**  
(Sumber: koleksi KITLV image)



Lukisan istana kerajaan Pagatan di atas menggambarkan identitas 'to-Ugi' yang terwujud dalam bentuk istana kerajaan yang berbentuk rumah panggung, rumah khas raja-raja Bugis di Sulawesi Selatan. Pada rumah Raja atau Arung Bugis Pagatan, rumah utama yang disebut Soraja Lopu yang menjadi tempat tinggal Arung atau raja. Kemudian beberapa rumah yang ukurannya lebih kecil adalah tempat tinggal keluarga kerajaan. Model rumah seperti ini umumnya terdapat pada daerah yang menjadi Kerajaan Bugis seperti Wajo dan Bone. Dalam lukisan tersebut juga terlihat bahwa istana Kerajaan Pagatan terdapat di daerah dataran tinggi dengan latar belakang pohon kelapa yang menjadi salah satu komoditas perkebunan di Pagatan.

Orang Bugis mengenal sistem tingkatan sosial yang sangat berkait dengan arsitektur rumah. Fenomena ini pun terlihat dalam arsitektur rumah di wilayah Pagatan tahun 1800-an. Menurut Andi Nuralang, terdapat sisa bangunan rumah di wilayah Tanah Bumbu yang dalam Bahasa Bugis disebut *saorjlopu* (*Saorajalopu*) atau *sls* (*Salassa*). *Saoraja* atau *salassa* hanya ditempati oleh Arung (raja) yang memimpin pemerintahan. *Saoraja* dapat pula ditempati oleh Bangsawan dan/atau keturunan raja yang terdekat (golongan Anakarung). Ciri-ciri rumah untuk golongan raja ini, memiliki tiang dengan alas bertingkat di bagian bawah dan dengan atap di atasnya (*sapana*) dengan bubungan bersusun tiga atau lebih. Kemudian golongan *to maradeka* (orang merdeka), memiliki rumah dengan model *sao piti* (*sao-piti*), bentuknya lebih kecil tanpa *sapana*, dan memiliki bubungan bersusun dua. Perbedaannya dengan rumah-rumah di wilayah Wajo, rumah Bugis di daerah ini pada umumnya mengenal rumah kalangan *to-maradeka* dengan sebutan bola. Selain itu di Wajo terdapat juga rumah *sls brieG* (*salassa baringeng*) yang lantainya rata, ditempati bangsawan anak cera ciceng (Nuralang, 2006). Lukisan Heinrich von Gaffron juga menggambarkan latar depan istana Kerajaan Pagatan yaitu penyabung ayam, kemungkinan besar adalah keluarga kerajaan Pagatan. Dalam budaya Bugis keberadaan ayam jantan dan sabung ayam adalah unsur identitas *to-Ugi* yakni pertanda kejantanan seorang laki laki Bugis. Budaya sabung ayam ini sudah berlangsung turun-temurun beberapa kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan seperti Bone, Soppeng dan Wajo (Tim Penulis, 1979/1980).

Selain Puanna Dekke, tokoh Bugis lain yang turut berperan dalam jaringan diaspora dan membuka wilayah Cantung dan Batulicin adalah Arung To Rawe. Catatan tentang Arung To Rawe bersumber dari naskah lokal yakni Kitab Raja-Raja Pasir (KRRP). Sayangnya kitab ini tidak diketahui penulisnya dan tahun penulisannya. Kitab tersebut menceritakan tentang pemerintahan Raja Pasir, Aji Pati bin Panembahan Adam bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah tahun 1768 Masehi atau 1213 Hijriyah, kemudian peranan Arung To Rawe membuka wilayah Batulicin, serta perkawinan Arung To Rawe dengan putri Sultan Banjar, Tamjidillah I, yaitu Ratu Intan tahun 1775 (Assegaf, 1982).

Dalam naskah tersebut juga dituliskan perjanjian antara Sultan Tamjidillah I yang didampingi oleh para pembesar Kesultanan Banjar dengan Arung To Rawe yang juga didampingi oleh para pembesar dan cerdik-pandai kerajaan, yaitu wadah *memagat paikat* (Bahasa Banjar, berarti memotong rotan) di dalam wilayah kesultanan Banjar yang terletak di seberang Pulau Laut arah barat sampai arah barat daya. Kemudian, karena wadah *memagat paikat* itu di dalam wilayah kesultanan Banjar, maka ketentuan hukum yang berlaku di Kesultanan Banjar, berlaku pula di wadah *memagat paikat* (Bahasa Banjar, tempat memotong rotan) tersebut. Selanjutnya, semua belanja (biaya) dalam usaha *memagat paikat* itu, di tanggung semuanya oleh Arung To Rawe.

Pihak Arung To Rawe berkewajiban menyerahkan uang setiap tahun dua puluh persen (20%) dari nilai harga hasil *pagatannya* menurut harga pasaran Banjarmasin. Terakhir, pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Kesultanan Banjar, bebas memasuki dan memeriksa keadaan dan jumlah *paikat* (rotan) yang telah *dipagat* (dipotong) oleh rakyat Arung To Rawe. Dalam naskah juga diceritakan kunjungan Sultan Tamjidillah I disertai oleh Arung To Rawe untuk meninjau lokasi lain yang menjadi pemukiman Bugis *Pemagat* (pemotong rotan) yang bernama Batu Licin (sekarang menjadi Batulicin), yang juga terletak di pingiran suatu sungai Batulicin. Sultan Tamjidillah I kemudian lanjut meninjau ke tempat lain yang juga menjadi wadah (tempat atau lokasi) pemukiman orang-orang Bugis. Pada wilayah tersebut telah berdiri ratusan buah rumah bertipe Bugis asli, yang bernama daerah Sabamban (Beckman, 1853).

Paparan dalam naskah mengindikasikan bahwa pemukiman di Sabamban sebenarnya telah dibuka oleh orang Bugis pada tahun 1772, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah ini. Daerah Sabamban ini termasuk daerah-daerah pesisir yang diserahkan oleh Sultan Adam pada tahun 1826 kepada Hindia Belanda (van der Ven, 1873). Dalam naskah tertulis tahun 1190 Hijriyah atau 1775 Masehi, lokasi areal hutan rotan yang telah sekian lama digarap oleh Andi Pasere bergelar Arung To Rawe diresmikan menjadi kerajaan sendiri dibawah daulat Kesultanan Banjar. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Sultan Tamjidillah I dengan satu upacara khusus yang diadakan di ibukota Kesultanan Banjar, yaitu Martapura. Sekaligus menetapkan rajanya (Ratu) yang pertama, puteri beliau sendiri (Permaisuri Arung To Rawe) yang diberi gelar Ratu Intan I.

## **2. Penetrasi Belanda (1842-1900): Awal Dinamika dalam Kerajaan**

Pemerintahan Kerajaan Pagatan sebagai *homebase* orang-orang Bugis yang berdiaspora dari Sulawesi Selatan, berlangsung dari tahun 1735-1912. Pada masa pemerintahan yang berlangsung sekitar dua setengah abad ini lumayan berperan dalam menjaga “kemamanan dan kesinambungan” pemerintahan *to-Ugi* khususnya di wilayah Pagatan, Tanah Bumbu. Pemerintahan kerajaan Bugis ini terbagi dalam beberapa masa dan periode. Masa pembentukan kerajaan oleh Puanna Dekke dan pengangkatan La Pangewa (*Kapitan Laut Pulo*) sebagai raja pertama Kerajaan Pagatan, kira-kira berlangsung dari tahun 1761-1838. Periode ini disebut dengan masa perintisan Kerajaan Bugis Pagatan dan “cikal bakal” terbentuknya identitas *to-Ugi* di *landschap* Tanah Bumbu (Schwaner, 1854; Gallois, 1856). Kemudian masa perkembangan Kerajaan Pagatan dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode pemerintahan raja Pagatan kedua, Arung Pallewange tahun 1838-1855. Kemudian periode integrasi Kerajaan Pagatan-Kusan tahun 1861-1908.

Selanjutnya periode kekuasaan Hindia Belanda tahun 1908-1942. Periode ini adalah masa pemerintahan raja kedua, Arung Abdul Rahim bin Hasan Pengewa yang berlangsung dari tahun 1838-1855. Arung Abdul Rahim dinobatkan menjadi raja Pagatan kedua pada tanggal 19 Juni 1838 kemudian bergelar Arung Pallewange. Ia berkuasa selama 26 tahun hingga kemudian wafat tanggal 28 April 1855. Dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, tertulis bahwa

Arung Abdul Rahim yang menurunkan para Arung di kerajaan Pagatan (Baal, 1977).

### Bagan 1. Silsilah Raja-Raja Pagatan Tahun 1761-1908



Sebagai "vazal" Kesultanan Banjar, maka kondisi politik di wilayah Kerajaan Pagatan tidak dapat terlepas dari kondisi politik di Kesultanan Banjar. Pada tahun 1817 ditandatangani perjanjian antara Banjarmasin dengan pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Ateratieen ampliate op het contract met den Sultan Van Bandjarmasin Van 1 Januarij 1817*, misalnya dalam perkara dua dikatakan:

"Perkara kelima dari kontrak yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi atau tidak dipakai lagi tetapi diganti dengan salinan dibawah ini, Paduka sri Sultan salinkan kepada Raja Belanda yang masyur (terkenal) di sekitar

Pulau Tatas dan Kween sampai ke seberang kiri Antasan Kecil dan tanah Lawai dan Jelai, dan Sintang, dan Tabanio dan Pagatan dan Pulau Laut dan Kotawaringin dan Pasir dan Kutai dan Berau dan semua daerah rantauan sebagaimana adanya (ANRI, 1965)."

Melalui perjanjian itu, secara tidak langsung sudah menyerahkan wilayah Kesultanan Banjar dalam penguasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Penetrasi kolonial Hindia Belanda mulai masuk ke pemerintahan Kerajaan Pagatan pada tanggal 19 Juni 1838 ketika Arung La Paliweng menandatangani perjanjian dengan Belanda (Anderson, 2003). Menurut Nagtegaal, pada 22 Maret 1842, pemerintah Belanda menandatangani *Acte van Verbond* dengan Arung Abdul Rahim, yang isinya bahwa kerajaan Pagatan diserahkan kepada Arung Abdul Rahim sebagai *Erfelijk Leen* atau pinjaman turun-temurun dan Baginda mendapat gelar Aroeng Palewan Abdoel Rachim bin Hassan (ANRI, 1973).

Ada beberapa catatan mengenai aktivitas pelayaran dan perdagangan orang Bugis di masa Arung Abdul Rahim Pallewange. Seperti terdapat dalam laporan Van der Ven tahun 1846. Van der Ven menyebutkan tentang berbagai komoditas produk Kesultanan Banjar atau pemerintahan Karesidenan Kalimantan bagian Tenggara yang diekspor seperti sarang burung, kayu gaharu, kapas, kelapa, minyak, tembakau, gula aren, telur, pisang, sirih, lilin, cadik perahu, perahu, buah-buahan, sarung tenun, katun, tanduk rusa, tembikar, kerajinan rotan, tikar, sirap, kayu ulin, berbagai jenis kayu, bambu, ikan, sagu, indigo, kerbau, kambing, ayam dan itik. Jenis komoditas impornya adalah garam, gambir, asam dan bawang, tembikar, porselin, kerajinan dari bahan logam (besi, tembaga dan timah), peralatan tenun, kerajinan kertas, gadung, katun dan sebagainya (Subiyakto, 2003; van Derven, 1845). Dari semua komoditas ini, hasil alam rotan dan lilin adalah komoditas utama yang dihasilkan di daerah Pagatan, Tanah Bumbu (Veth, 1869).

Termuat dalam laporan tersebut juga, pada tahun 1846 terdapat dua kapal bermuatan rotan dan lilin berlayar dari Pagatan ke Singapura. Salah satu kapal adalah milik Sultan Pagatan. Tidak disebutkan secara jelas siapa Sultan Pagatan yang dimaksud. Cuma melihat dari tahun dibuatnya laporan tersebut tahun 1864, raja yang memerintah Pagatan adalah Arung Abdul Rahim Pallewange. Selanjutnya mengenai ekspor rotan dari daerah ini disebutkan hanya mencapai 6000 helai ditahun 1846 tersebut. Sultan mendapat masukan

dari pajak ekspor rotan sebesar f.2,50 per 100 helai. Dilaporkan pula bahwa dari Batulicin (Batoelitjin dalam ejaan arsip kolonial) ada tiga kali pelayaran ke Jawa juga dengan muatan rotan. Kemudian, dilaporkan mengenai daerah Kutai yang menghasilkan rata-rata 2000 *pikul* lilin dan satu *koyan* sarang burung putih per tahun. Van der Ven juga mengungkapkan nelayan ikan laut seperti dari daerah Pagatan dan Batulicin tahun 1846, mengangkut dan menjual hasil tangkapannya dalam bentuk ikan kering ke Banjarmasin. Perahu nelayan laut (pantai) memerlukan modal sekitar f.350 dengan perincian anggaran perahu f.100, jala f.100, garam dan konsumsi f.50. Hasil laut lainnya yang biasanya diperdagangkan ke luar daerah adalah tripang.

Dalam laporan juga dituliskan, Sultan Abdurrahim (Arung Abdul Rahim Pallewange) dari Pagatan suatu ketika dalam rombongan besar dengan sekitar 45 perahu besar dan kecil menyeberang ke Pulau Laut pada awal tahun 1846. Tujuannya untuk mendapatkan barang perdagangan di pulau yang baru berpenduduk sekitar 60 keluarga itu. Akan tetapi, sultan dan rombongannya hanya berhasil mendapatkan sedikit rotan dan damar untuk dibawa pulang ke Pagatan. Selain itu, Van der Ven juga mencatat Pagatan merupakan salah satu kesultanan kecil di Borneo Tenggara yang sebagian wilayahnya berupa pantai. Daerah ini hanya menghasilkan gula aren dan beras yang hanya cukup dikonsumsi sendiri. Berbeda dari daerah tetangganya, Pelaihari (Tanah Laut), tidak ditemui banyak ternak di situ, harga seekor kerbau pun pada saat itu sekitar f.14. Kemudian Rotan yang terdapat dan diperdagangkan ke luar umumnya berasal dari daerah Kusan. Akan tetapi, seringkali terjadi rotan telah terjual terlebih dahulu di daerah Batulicin dan Sebamban sebelum sampai Pagatan. Daerah ini mempunyai hubungan perdagangan dengan Jawa dan Singapura. Perahu dagang milik sultan dan saudagar di sana sedikitnya tiga kali dalam setahun berdagang ke Jawa.

Dari data-data tentang pelayaran tersebut menunjukkan bahwa pelayaran dan perdagangan di Kerajaan Pagatan sudah berkembang. Walau sifatnya masih perdagangan kecil-kecilan dan menggunakan kapal layar tradisional, tetapi area pelayaran dan perdagangannya sudah bersifat inter-insuler. Pelayaran pedagang Pagatan yang dipimpin oleh sultan sendiri maupun orang kepercayaannya sudah menghubungkan antara daerah Pagatan, Jawa hingga Singapura. Komoditas utamanya adalah hasil hutan seperti rotan dan lilin. Kemudian hasil laut seperti ikan kering dan teripang.

### 3. Periode Integrasi Kerajaan Pagatan-Kusan (1855-1908)

Pada periode ini Kerajaan Pagatan diperintah oleh Arung Pagatan ketiga, yakni Arung Abdul Karim Bin Abdul Rahim pada tahun 1855-1871. Arung Abdul Karim dinobatkan menjadi raja Pagatan ketiga pada tahun 1855 dengan gelar Arung La Mattunru. Menurut Nagtegaal, dimasa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah kerajaan Pagatan, merger dengan kerajaan Kusan tahun 1861 sehingga menjadi kerajaan Pagatan-Kusan. Sewaktu Arung Abdul Karim memerintah, baginda dianugerahi sebuah bintang *Ridderkruis v/d Militaire Willemsorde 4e Klas* dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 22 November 1861, Arung Abdul Karim menandatangani *Politiek Contract* dengan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh *Gouverneur General* (GG) pada tanggal 7 Agustus 1862 (Noor, 1936). Pada masa pemerintahan Arung Abdul Karim (1855-1871) tidak terdapat sumber-sumber berupa lukisan khusus tentang daerah dan orang-orang Bugis, sebagai dasar untuk menjelaskan kondisi Pagatan di masa pemerintahannya.

Kiprah Arung Abdul Karim dibidang pelayaran dan perdagangan yaitu dengan mengadakan pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara. Seperti catatan laporan Van Der Stok tahun 1863, dalam tulisannya, *Het Eiland Saleier*, melaporkan bahwa salah satu pemasok impor (*invoer*) di Pulau Selayar adalah dari Pagatan sejumlah komoditas dengan total biayanya f.405. Sayangnya van Der Stok tidak merinci barang barang apa saja yang berasal dari Pagatan tersebut. Hanya saja dalam daftar barang impor di Pulau Selayar *Karesidenan Zuid Celebes*, terdapat dua komoditas yang dihasilkan di wilayah Pagatan yakni rotan dan gambir. Adapun jumlah perahu dari Pagatan terdapat dua buah dengan biaya f.9,5 per satuan komoditasnya (Stok, 1866). Selain itu dalam bidang lainnya, bukti momumental pada masa pemerintahan Arung Abdul Karim ini adalah penulisan naskah *Lontara Kapitan La Mattone* yang ditulis tanggal 21 Agustus 1868. Penulisnya, La Mattone adalah Menteri Kerajaan Pagatan dan Kusan pada masa Arung Abdul Karim (Nuralang, 2006).

Arung Abdul Karim La Mattunru wafat tahun 1871, dan digantikan putranya Arung Abdul Djabbar La Makkaraw, Raja Pagatan keempat yang memerintah pada tahun 1871-1875. Arung Abdul Djabbar bin Abdul Karim dinobatkan tahun 1871 dan bergelar Arung La Makkaraw. Tidak terdapat

catatan tentang pemerintahan Arung Abdul Djabbar karena ia tidak lama berkuasa, hanya sekitar empat tahun kemudian wafat pada tahun 1875. Arung Abdul Djabbar La Makkaraw tidak mempunyai keturunan, maka digantikan oleh keponakannya, Arung Ratu Daeng Mangkau (putri dari Arung Pallewange), yang dinobatkan 12 November 1875.

Pemerintahan Ratu Daeng Mangkau sebagai Raja Pagatan kelima berlangsung dari tahun 1875-1883. Pada masa pemerintahannya, Ratu Daeng Mangkau didampingi oleh sang suami yakni Pangeran Muda Aribillah. Dari perkawinan ini lahir keturunan raja Pagatan berikutnya, Andi Tangkung dan Andi Sallo (Arung Abdul Rahim). Pada masa pemerintahan Ratu Daeng Mangkau, pemerintah Hindia Belanda kembali mengadakan perjanjian. Satu diantaranya, penandatanganan kontrak politik (*Politiek Contract*) dengan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 13 November 1875 (Noor, 1936).

Pada arsip ANRI, "Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archipel Pagatan en Koesan", bagian pertama menjelaskan tentang penegasan kembali dan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pengangkatan Ratu Daeng Mangkai sebagai Raja Pagatan menggantikan Arung Abdul Djabbar. Bagian kedua, pernyataan tentang daerah Pagatan dan Kusan yang menjadi wilayah kekuasaan Ratu Daeng Mangkau sesuai dengan perjanjian sebelumnya (perjanjian dengan Arung Abdul Karim tahun 1838). Sementara bagian ketiga menerangkan tentang pengangkatan raja pengganti Ratu Daeng Mangkau yang harus dengan sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa perdagangan antar pulau diperbolehkan asal membayar pas tahunan dan tidak mengganggu lalu lintas pelayaran dan perdagangan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pihak Kerajaan Pagatan tidak boleh memberi konsesi dalam bidang pertambangan dan pertanian. Pemerintah Hindia Belanda akan mengenakan pajak, *belastings* dan pungutan lainnya yang berlaku di seluruh wilayah Pagatan dan Kusan.

Ratu Daeng Mangkau menurut anggapan pemerintah kolonial Belanda adalah seorang putri yang arif, bijaksana dalam memerintah. Adil dalam menjatuhkan vonis dan berani berhadapan dengan wakil-wakil pemerintah yang menyoalkan masalah-masalah berkenaan kondisi politik. Sewaktu



suaminya Sultan Muda Aribillah ditangkap karena dituduh bersekongkol dengan “berandal-berandal” Tanah Bumbu dan *diinternir* ke Batavia, maka Ratu Daeng Mangkau menyiapkan perempuan-perempuan sebagai anak perahu dan bersama mereka menyeberangi Selat Laut ke Kotabaru. Dari Kotabaru lalu ke Banjarmasin untuk mengunjungi Residen. Dari Banjarmasin, baginda menyamar sebagai perempuan biasa dan turut berangkat bersama suaminya ke Betawi. Akan tetapi penyamarannya diketahui, sehingga dibebaskan dari kesalahannya dan kembali ke Pagatan (Noor, 1936).

Ratu Daeng Mangkau wafat pada tahun 1883 padahal anaknya Abdul Rahim belum dewasa, maka pemangku kerajaan dipercayakan kepada kakaknya Andi Tangkung (Kusmartono & Nuralang, 2000). Andi Tangkung dinobatkan menjadi Raja Pagatan keenam periode tahun 1883-1893. Andi Tangkung memangku jabatan kerajaan Pagatan dengan gelar Petta Ratu, selama sepuluh tahun. Pada masa pemerintahannya Andi Tangkung mengatur Kerajaan Pagatan bersama Daeng Mahmud atau Pangeran Mangkubumi. Andi Tangkung kemudian digantikan oleh Arung Abdul Rahim, yang dinobatkan menjadi Raja Pagatan ketujuh dengan gelar kehormatan Andi Sallo. Pemerintahan Arung Abdul Rahim atau Andi Sallo berlangsung tahun 1893 sampai tahun 1908 (Noor, 1936).

Pada masa pemerintahannya, Arung Abdul Rahim menandatangani *Pegatan en Koesan Suppletoir Contract* tanggal 7 Juni 1893 tentang eksplorasi bahan tambang di wilayah Kerajaan Pagatan dan Kusan. Dalam kontrak tersebut, dituliskan bahwa pihak kerajaan Pagatan Kusan (Arung Abdul Rahim) setuju memberikan lisensi bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan penelitian dan memberikan konsesi pertambangan di wilayah Pagatan dan Kusan. Persetujuan ini mulai diberlakukan tanggal 23 Oktober 1897. Peraturan dalam kegiatan penambangan yang didirikan tersebut seluruhnya diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan penjualan bahan tambang. Kontrak tambahan ini disetujui dan disahkan pada tanggal 5 Februari 1898. Dalam kontrak tersebut, pasal 1 dijelaskan bahwa manajemen pelabuhan untuk pengangkutan hasil tambang batubara dan penunjukkan polisi pelabuhan serta pangkalan laut semuanya diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian penguasa pelabuhan

tersebut adalah para raja yang ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda. Lihat tabel berikut.

**Tabel 1. Raja-Raja yang Menandatangani Kontrak Pertambangan Tahun 1899**

No	Nama Penandatanganan Kontrak	Nama Daerah	Tanggal Penandatanganan Kontrak	Tanggal Terbitnya SK
1	Mohamad Alimoedin	Boeloengan	25 Juli 1899	27 November 1900
2	Mohamad Siranoedin	Goenoeng Taboer	28 Juli 1899	idem
3	Mohamad Califatoellah Bajanoedin	Sambalioeng	28 Juli 1899	idem
4	Pangeran Ratoe Anoem Koesoema Joeda	Kota Waringin	22 Agustus 1899	idem
5	Pangeran Mangkoe	Pasir	22 September 1899	idem
6	Aroeng Abdoelrachim	Pagatan en Koesan	25 September 1899	idem

Sumber: ANRI, Arsip "Pagatan en Koesan Suppletoir Contract", dalam Overeenkomsten met Inlandsche vorsten in den Oost- Indischen Archipel (166.7), bundel Borneo Zuid Oosterafdeling (BZO), No. 122.

Dari kontrak tersebut, dituliskan bahwa setelah 27 Agustus 1898 terjadi kesepakatan dengan Kutai dimana telah dibentuk manajemen pelabuhan dan polisi pelabuhan di pangkalan laut daerah tersebut. Disusul pembentukan manajemen pelabuhan di daerah daerah Bulungan, Gunung Tabur, Sambaliung, Kota Waringin, Pasir serta Pagatan dan Kusan. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 27 November 1900.

Pada masa akhir kekuasaan Arung Abdul Rahim telah terjadi kemelut dalam kerajaan Pagatan-Kusan. Peristiwa ini diawali perseteruan antara dua saudara, yakni Arung Abdul Rahim dan Andi Tangkung. Andi Tangkung

menyiapkan putranya bernama Andi Iwang sebagai pengganti Arung Abdul Rahim atau Andi Sallo untuk menjadi pemangku kerajaan Pagatan-Kusan. Sementara Arung Abdul Rahim ternyata telah menyiapkan putranya sendiri bernama Andi Kacong untuk menggantikan dirinya sebagai pemangku kerajaan Pagatan-Kusan. Mencermati konflik internal ini akhirnya setahun sebelum wafatnya Arung Abdul Rahim (20 April 1907), ia mengeluarkan suatu pernyataan (*verklaring*) yakni *Verklaring Betreffende de Overdracht van het Landschap Pagatan en Koesan aan het Gouvernemen* bahwa kerajaan Pagatan-Kusan diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dalam *velklaring* tersebut, Arung Abdul Rahim atau Andi Sallo sebagai Raja Pagatan-Kusan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Hindia Belanda melalui Residen di Banjarmasin menyatakan pengunduran diri dari raja Pagatan-Kusan. Kemudian akan memberikan sepenuhnya bagian konsesi pertambangan miliknya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan kompensasi yang ditentukan bersama. Segala peraturan dan kebijakan di *landschap* Pagatan dan Kusan akan diatur penuh oleh pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan ini ditandatangani di Pagatan tanggal 20 April 1907 (1326 Rabiul Awal), diratifikasi 11 Mei 1912. Sementara itu dari nota penjelasan pernyataan Arung Abdul Rahim tersebut, pengaturan daerah Pagatan yang merupakan wilayah dalam *onderAfdeling* Tanah Bumbu, akan digabungkan dalam *Afdeling Zuid Oost Kust van Borneo* berdasarkan *Staatsblad* tahun 1912, No. 312. Dalam *velklaring* tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengapa Arung Abdul Rahim mengundurkan diri dan menyerahkan Kerajaan Pagatan-Kusan ke Pemerintah Hindia Belanda. Kemungkinan karena konflik bersifat internal sehingga tidak dibahas dalam *velklaring*. Arung Abdul Rahim wafat pada tahun 1908.



**Gambar 2. Radja/Arung Abdul Rahim Andi Sallo**

Sumber: Foto dengan bahan circa, ukuran asli 9,5 x 6,5 cm, identitas yang mengambil gambar (fotografer) tidak diketahui, koleksi Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV), Netherlands.

Selama empat tahun dari 1908-1912, pelaksanaan pemerintahan kerajaan Pagatan-Kusan dibawah suatu *kerapatan (zelfbestuusraad)*. Dalam *kerapatan* tersebut Pemerintah Hindia Belanda menunjuk wakilnya yakni Pangeran Kapitan dan Daeng Soewidi.

#### **4. Periode Pemerintahan Hindia Belanda (1908-1912)**

Berdasarkan *velklaring* tahun 1908, sejak 1 Juli 1912 Kerajaan Pagatan-Kusan secara resmi dilebur dalam pemerintahan langsung Hindia Belanda atau menjadi wilayah *Rechtreeks Bestuurgebied*. Penghapusan sistem pemerintahan Kerajaan di Pagatan dengan terbitnya *Staatblads* 1912 No. 312 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelum penghapusan Kerajaan Pagatan, kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Tanah Bumbu seperti Cantung, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Sebamban dan Pulau Laut telah dihapuskan terlebih dahulu pada tahun 1905 dengan terbitnya *Staatblads* 1903 No. 179. Dengan demikian, sejak tahun 1912 semua kerajaan kecil yang berada di

wilayah Tanah Bumbu langsung dikuasai Pemerintahan Hindia Belanda (Ideham, 2003).

Berdasarkan *Staatsblad* 1903 daerah Kalimantan merupakan satu *gouvernement* yang terdiri dari dua karesidenan yaitu Karesidenan *WesterAfdeeling Van Borneo* dan Residensi *Zuider-en OosterAfdeeling Van Borneo*. Karesidenan *WesterrAfdeeling van Borneo* terdiri dari empat *Afdeeling* yaitu Pontianak, Singkawang, Sintang dan Ketapang. Sedang Karesidenan *Zuider en OosterrAfdeeling van Borneo* dibagi atas *Afdeeling* Banjarmasin yang membawahi *onderAfdeeling* Pelaihari, Marabahan, Martapura, Tanah Bumbu serta Pulau Laut. *Afdeeling* lainnya, yaitu Hulu Sungai, Kapuas Barito serta Samarinda, Bulungan dan Berau. Tahun 1912 wilayah Karesidenan *Zuider en OosterAfdeeling van Borneo* dimekarkan menjadi lima *Afdeeling*. Satu diantaranya ialah *Afdeeling* Pesisir Borneo Tenggara (*Zuidoost-kust van Borneo*). Wilayah *Afdeeling* Pesisir Borneo Tenggara dibagi atas *onderafdeeling* Pasir, Pulau Laut dan Tanah Bumbu Selatan. Pada tahun 1912 tersebut, kerajaan Pagatan-Kusan, Batulicin, Sebamban masuk ke dalam *onderafdeeling* Tanah Bumbu Selatan yang beribukota di Pagatan. Dengan demikian, sejak tahun 1912 Pagatan berkedudukan seorang kontrolir.

## **SIMPULAN**

Diaspora suku Bugis ke daerah Kalimantan bagian timur (Kutai dan Samarinda) dan Kalimantan bagian tenggara (daerah Pulau Laut dan Pagatan) yang dirintis oleh La Madukelleng tahun 1726 merupakan cikal bakal keberadaan suku Bugis di Kalimantan. Adapun pemukiman suku Bugis di tanah Kalimantan bagian tenggara dibangun oleh Puanna Dekke, bangsawan Bugis yang tidak ikut serta mendampingi La Madukelleng ke pelayaran menuju wilayah Kerajaan Pasir dan memutuskan untuk menetap di Pamagatan (sekarang dinamai Pagatan). Inilah yang melatarbelakangi munculnya Kerajaan Bugis Pagatan. Puanna Dekke bersama saudaranya menunjuk La Pangewa yakni seorang turunan raja di Tanah Bugis untuk menjadi pemimpin atau Raja pertama Pagatan.

Dalam dinamika politiknya, Kerajaan Pagatan cukup disegani di wilayah Kalimantan bagian tenggara karena kekuatan armada lautnya. Terlihat ketika La

Pangewa beserta armadanya berhasil memukul mundur Pangeran Amir (seorang bangsawan Kesultanan Banjar) beserta pengikutnya agar tidak memblokir arus lalu lintas perdagangan yang hendak masuk ke Banjarmasin. Melalui prestasi inilah La Pangewa diberi gelar Kapitan Laut Pulo dan diakui sebagai raja pertama Pagatan oleh Panembahan (Sultan Banjar). Kerajaan Pagatan merupakan vazal dari Kesultanan Banjar sehingga hanya memiliki hak otonomi pengaturan pemerintahan ke dalam, sebagaimana juga kerajaan-kerajaan kecil lainnya yakni Kusan, Batulicin dan Cantung, Sampanahan, Bangkalaan, Manunggal, Cengal, Sebamban serta Pulau Laut. Perlindungan tetap diberikan oleh Kesultanan Banjar sebagai pemimpin vazal. La Pangewa diperkirakan memerintah mulai tahun 1761 sampai tahun 1838. Ia digantikan oleh La Palebbi' yang berkuasa hanya selama lima tahun, akhirnya yang dinobatkan sebagai raja Pagatan kedua ialah La Paliweng, bergelar Arung Abdul Rahim.

Kerajaan Pagatan mengalami berbagai dinamika namun tetap bertahan selama hampir dua setengah abad. Puncak kejayaan kerajaan ini ialah pada masa pemerintahan Arung Pagatan yang bergelar Arung Abdul Karim. Ia berhasil meluaskan wilayah Kerajaan Pagatan dengan mengakuisisi Kerajaan Kusan menjadi Kerajaan Pagatan-Kusan tahun 1861. Arung Abdul Karim juga menegaskan kiprahnya dibidang pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara. Pada masa ini, Kerajaan Pagatan-Kusan berhasil menjadi salah satu pemasok impor sejumlah komoditas utamanya rotan dan gambir dengan total biaya f.405 di Pulau Selayar. Selain Arung Abdul Karim, ada juga raja Pagatan-Kusan yang bahkan dianggap pemerintah Hindia Belanda sebagai seorang yang arif dan bijaksana dalam memerintah, yakni Ratu Daeng Mangkau.

Kerajaan Pagatan-Kusan mulai mengalami kemunduran memasuki periode kekuasaan Hindia Belanda tahun 1908-1942, pertikaian terjadi antar dua saudara yakni Arung Abdul Rahim dan Andi Tangkung yang sama-sama menghendaki putranya memimpin kerajaan. Pada akhirnya Kerajaan Pagatan-Kusan diambil dan dikuasai oleh pemerintah colonial Hindia Belanda. Periode pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Kerajaan Pagatan-Kusan ditandai dengan pembukaan kegiatan pertambangan yang seluruhnya diatur oleh Hindia Belanda.

## DAFTAR BACAAN

- Abu Hamid, Pasompe. 2004. *Pengembaraan Orang Bugis*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Andi Zainal Abidin. "The Emergence Of Early Kingdoms In South Sulawesi, A Preliminary Remark on Governmental Contracts from the Thirteenth to the Fifteenth Century", dalam *Southeast Asian Studies*, Volume 20, Nomor 4, March 1983.
- ANRI, "Ateratieen ampliate op het contract met den Sultan Van Bandjarmasin Van 1 Januarij 1817" no. xx, Arsip Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintahan VOC, Bataafshe Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860 (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1965).
- ANRI, "Boeloengan, Goenoeng Taboer, Sambalioeng, Kota Waringin, Pasir, Pagatan en Koesan, Nota van Toelichting", dalam *Overeenkomsten niet inlandsche vorsten in den Oost-liidischen Archipel* (169.12).
- ANRI, "Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten General Zitting 1898-1899. (166.no.32)"
- ANRI, "Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archipel Pegatan en Koesan", dalam *Bijlagen 101. 1-2J, Tweede Kamer, blz.I, bundel Borneo Zuid Oosterafdeling (BZO), No. 122.*
- ANRI, "Pagatan en Koesan, Nota van Toelichtin", bundel Borneo Zuid Oosterafdeling (BZO), No. 122.
- ANRI, "Verklaring Betreffende de Overdracht van het *Landschap* Pagatan en Koesan aan het Gouver-Nemen", bundel Borneo Zuid Ooster-afdeling (BZO), No. 122.
- ANRI, Arsip "Pagatan en Koesan Suppletoir Contract", bundel Borneo Zuid Oosterafdeling (BZO), No. 122.
- ANRI, *Ikhtisar Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973).
- AS Assegaff. 1982. *Sejarah Kerajaan Sadurangas Atau Kesultanan Pasir*. Tanah Grogot: Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir.

- Aziz Salam & Osozawa Katsuya, "Technological Adaptation in the Transformation of Traditional Boats in the Spermonde Archipelago, South Sulawesi", *Southeast Asian Studies*, Volume 46, Nomor 2, September 2008.
- C. Nagtegaal, *De voormalige Zelfbesture Noe En Gouvernements Landschappen In Zuid-Oost Borneo* (Utrecht: N.V.A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1939).
- C. Snouck Hurgronje, "Nog iets Over De Salasila Van Koetei", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van ederlandsch-Indië*, Deel 37, (Dipublikasikan KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies).
- Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), hlm.45-46.
- Deskripsi lukisan berjudul "Het Vorstelijk Paleis van Pagattan (Boeginezen) op de voorgrond een afbeelding van een hanengevecht" (Lukisan Istana Kerajaan Pagattan (Bugis), dengan latar depan orang yang sedang menyabung ayam), pelukis: Heinrich von Gaffron, media lukisan: circa tahun 1845, Teknik lukis pensil (potlood). Ukuran Lukisan 19,5 x 25,5 cm. Koleksi: Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden. Lukisan dkoleksi KITLV, dikunjungi 17 Maret 2012.
- Eisenberger. 1936. *Kroniek Zuider en Oosterafdeling van Borneo*. Banjarmasin: Liem Hwat Sing.
- G.M. Bleckmann. "Iets over het Noodzakelijke en Voorkelige Eener Negerlandshe Vestiging op de Oostkust van Borneo", dalam Jacob swart. 1853. *Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën*. Amsterdam: G. Hulst van Keulen.
- Gene Ammarel, "Bugis Migration and Modes to Adaptation in Local Situation", *Ethnology*, Volume 41, Nomor 1, 2002.
- H.C. Klinkert. "Surat dari Seri Paduka Sultan Banjar Kepada Tuan Blom", dalam Bloemlezing uit de Maleische Geschriften. 1913. *Ten Behoeve van de Gouvernement Inlandsche Scholen en van hen, die het Maleisch met Latijnsch Karakter Behoevenen, Derde Druk*. Leiden: E.J. Brill.



- Ideham, M. Suriansyah., et.al. (ed). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- J. Noorduyn. 1953. "*Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang*" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Leiden: KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
- J.G.A. Gallois. 1856. "*Korte Aanteekeningen Gehouden Gedurende eene Reis langs de Oostkust van Borneo verrigt op last van het Nederlansch Indisch Gouvernement*", *Bijdra-gen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsh Indie, Vierde deel*. Amsterdam: Frederik Muller, Batavia, van haren, Noman en Kolf.
- Jacqueline Linneton, "Passompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers", *Archipel*, Volume 10, Tahun 1973.
- Jan van Baal. 1977. *Besturen Overzee: Herinneringen van Oud-Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlandsch-Indie*. Amsterdam: T.Weaver.
- K. Adelaar. 20014 "*Where does Malay come from? Twenty years of Discussions About Homeland, Migrations And Classifications*", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Leiden: KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian & Caribbean Studies.
- Kathryn Gray Anderson. 2003 "*The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora*", *Disertasi*. Hawaii: University of Hawaii.
- Knappert, S. C. tt. "*Beschrijving van de Onder-afdeling Koetel*", *Bijdragen tot de Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*. Leiden: KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
- L. Andaya. 1978. "*Treaty Conceptions and Misconceptions; A Case Study from South Sulawesi*", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 134. Leiden: KITLV.
- Leonard Y. Andaya, "The Bugis Makassar Diasporas", *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Volume 68, tanpa tahun.
- NV Van Der Stok. 1866. "*Het Eiland Saleier*", *Tijds-crift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde, Uitgeven Door Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsteh en Watenschappen, Deel XV*. Batavia: s'Hage & M. Nijhoff.

- Pieter Johannes Veth. 1869. *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie*. Amsterdam: Van Kampen.
- R. van den Berg. 2004. "Some notes on the origin of Malay di-", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Leiden: KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
- Raziq Hasan Hendro Prabowo, "Perubahan Bentuk dan Fungsi Arsitektur Tradisional Bugis di Kawasan Pesisir Kamal Muara, Jakarta Utara (Form and Function Change of the Buginese Traditional Architecture At Kamal Muara Coastal Area, North Jakarta)", *Makalah International Symposium Building Research and the Sustainability of the Built Environment in the Tropics*, 14-16 Oktober 2002.
- Roger F Mills, "The Reconstrution of Proto South Sulawesi", *Archipel*, Volume 10, Tahun 1975.
- Singgih Tri Sulistiyono. 2009. "Konsep Batas Wilayah Negara Di Nusantara: Kajian Historis", *Artikel Hasil Penelitian*. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Solomon Muller. 1857. "Reis in Het Zuidelijk Gedeel-te van Borneo, Gedaan in Het Jaar 1836", *Reizen in Onderzoekingen In Den Indischen Archipel, Eerste Deel*. Amsterdam: Frederik Muller.
- Subiyakto, Bambang. "Penyelundupan dan perdagangan Gelap di Wilayah Perairan Kalimantan Selatan Pada Abad XIX (Bahan Ajar Muatan Lokal)", *Vidya Karya* Tahun XXI, Nomor 1, April 2003.
- SW Tromp. 1887. "Eenige Mededeelingen omtrent de Boegineezen van Koetei", *BKI*, 36.
- Tim Penulis. 197/1980. *Permainan rakyat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Indonesia.
- Van der Ven. tt. "Aanteekeningen om thent het rijk Bandjermasin", *Tijdschrift voor Indische taal land en volkenkunde, Deel 9*. Batavia: Lange & Co.
- Van der Ven. tt. "Aanteekeningen om thent het rijk Bandjermasin", *Tijdschrift voor Indische taal land en volkenkunde, Deel 9*. Batavia: Lange & Co.

Vida Vervaya Rusianti Kusmartono & Andi Nuralang. 2000. "Survei Eksploratif Pesisir Pantai Timur Kalimantan 19-30 September 2000", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi.

Vida Vervaya Rusianti Kusmartono & Andi Nuralang. 2006. "Kehidupan Sosial Ekonomi dan Perdagangan di Daerah Pesisir Tenggara Kalimantan Pada abad ke-19 Masehi", *Berita Penelitian Arkeologi (BPA)*, Nomor 8. Banjarbaru: Balai Arkeologi.



**BAB III**  
**KAJIAN SEJARAH LOKAL LAINNYA**

# **RATU ZALEHA: SIMBOL PEJUANG PEREMPUAN BANJAR DALAM MENGHADAPI *KUMPENI* BELANDA TAHUN 1900-1906**

**Helmi Akmal**

Helmiakmal47@ulm.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Perang Banjar merupakan satu cetusan di dalam rangkaian perjuangan bangsa Indonesia menolak penjajahan dari muka bumi Ibu Pertiwi. Perang ini merupakan salah satu mata rantai sejarah perang kemerdekaan utamanya pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah telah terjadi sejak bangsa asing mulai melakukan politik penjajahan di Indonesia dengan berbagai dalih demi mengambil keuntungan (Ideham dkk, 2013:167).

Perang banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Perang ini juga disebut Perang Banjar-Barito karena daerah-daerah tersebut menjadi basis perlawanan rakyat Banjar dalam menghadapi *kumpeni* Belanda. Penyebab meletusnya perang banjar adalah karena ketidakpuasan rakyat maupun kaum aristokrat banjar yang anti Belanda terhadap kebijakan Sultan yang memerintah saat itu (Sultan Tamdjit Ollah), karena mengizinkan Belanda turut campur tangan dalam pelaksanaan pemerintahannya, yang menimbulkan keresahan dan ketegangan dikalangan masyarakat, hal inilah yang ikut melahirkan gerakan-gerakan anti Belanda dalam masyarakat banjar yang kemudian menjadi motor meletusnya perang banjar.

Pada perkembangannya, gerakan-gerakan masyarakat penentang Pemerintah Hindia-Belanda di Banjarmasin terus bertambah besar di setiap daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tujuan dari gerakan-gerakan tersebut adalah untuk berperang *jihad fisabilillah* mengusir penjajah bangsa asing dari tanah mereka. Salah satunya ialah Ratu Zaleha, seorang pejuang perempuan yang ikut memerangi penjajah di wilayah Kesultanan

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin. Ratu Zaleha adalah puteri dari Sultan Muhammad Seman. Seperti diketahui bahwa Sultan Muhammad Seman atau ayahnya Ratu Zaleha juga gigih berjuang melawan Belanda melanjutkan perjuangan Pangeran Antasari.

Ratu Zaleha lahir pada tahun 1880 di Muara Lawang atau Muara Laung, Gunung Bondang di Udik Sungai Lawune. Semasa balita Ratu Zaleha sering dibawa lari ke hutan atau pegunungan, saat itu banyak terjadi pertempuran antara pejuang Banjar dengan pasukan *Kumpeni* Belanda, jika pasukan Belanda mulai datang menyerang, maka Ratu Zaleha langsung dibawa oleh ibunya dan diselamatkan ke hutan sekitar maupun pegunungan yang dianggap aman dari kejaran pasukan *kumpeni* Belanda. Meskipun anak dari aristokrat (bangsawan) Banjar, kehidupan Ratu Zaleha tidak aman dan tenteram sebagaimana layaknya kehidupan seorang putri Sultan. Hidup dikeluarga yang sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah membuat Ratu Zaleha merasakan pahit getirnya kehidupan pada masa itu (Noor dalam Nazimah, 2015:3). Kondisi inilah yang membentuk karakter beliau yang berwatak keras dan pantang menyerah dalam perjuangan melawan Belanda.

Semasa remaja, Ratu Zaleha dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Melalui ibunya, Ratu Zaleha mendapatkan pendidikan agama, keterampilan memasak, dan tata kesopanan sebagai seorang perempuan terhadap orang tua maupun terhadap suaminya kelak. Dari ayahnya yaitu Sultan Muhammad Seman, beliau mendapat pengetahuan mengenai seni ilmu bela diri sebagai bekal untuk menjaga diri. Berkat bekal kedua orang tuanya, Ratu Zaleha tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan tangguh, namun lembut dan sopan layak seorang putri.

## **MEMULAI PERJUANGAN MENGUSIR PENJAJAH**

Ratu Zaleha dibesarkan ditengah-tengah perjuangan keluarganya melawan *kumpeni* Belanda. Hidup pada zaman penjajahan membuatnya terus memikirkan nasib rakyat yang banyak mengalami penindasan. Ratu Zaleha ikut memperjuangkan hak rakyat. Bersama dengan ayahnya, Sultan Muhammad Seman dan suaminya Gusti Muhammad Arsyad yang menikahinya pada usia 20 tahun mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Ratu Zaleha dan Gusti Muhammad Arsyad saat itu menjadi panglima perang para pejuang

Banjar. Mereka merupakan dua perpaduan kekuatan yang unik, selain sebagai saudara sepupu, mereka juga sebagai sepasang suami-isteri. Daerah-daerah yang mereka pimpin antara lain Bamban, Kalang Barat, Daratan Tinggi Baras Kuning, Sungai Manawing, dan daerah-daerah di sekitar Sungai Barito. Tanpa kenal takut, mereka berdua bekerjasama melawan penjajah (Nazimah, 2015).

Pada saat itu pihak Belanda berusaha menekan rasa kebangsaan dan persatuan dikalangan petinggi Kesultanan Banjar maupun masyarakat, Belanda sangat lihai mengadu domba dan memecah belah kekuatan elit dan rakyat. Akibatnya masyarakat Banjar dan masyarakat Dayak terbelah. Sebagian ada yang berpihak kepada *kumpeni* Belanda sehingga diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Sebagian lagi merupakan para pejuang yang tetap gigih dalam membangkitkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan dan persatuan diantara mereka.

Ratu Zaleha sebagai pemimpin para pejuang perempuan memimpin beberapa pasukan wanita dari Banjar maupun etnis Dayak. Beliau berhasil menghimpun kekuatan dari para wanita etnis Dayak sehingga terjelma ikatan *gemeinschaft of mind and gemeinschaft of place*, yaitu ikatan karena kedekatan jiwa dan kesamaan ideologi dan kedekatan tempat tinggal (Noor dalam Nazimah, 2015:4). Ratu Zaleha dapat mengkoordinir orang-orang Dayak di daerah pedalaman Sungai Barito, mereka bersama-sama membentuk barisan melawan *kumpeni* Belanda. Salah seorang wanita Dayak kepercayaan Ratu Zaleha ialah Bulan Jihat, ia merupakan seorang perempuan suku Dayak Kiyah yang telah menyatakan diri memeluk Islam (Hindun, 2001:5). Strategi Ratu Zaleha adalah mengecoh dan menahan kiriman barang makanan Belanda ke pos-pos pasukannya. Saat Belanda mulai mengejar pasukan Ratu Zaleha, beliau melakukan *long march* untuk menghindarinya sehingga pasukan *kumpeni* Belanda kewalahan menangkap beliau.

Ketika sang suami Gusti Muhammad Arsyad menyerah kepada Belanda akibat pengepungan yang menyebabkan ia tidak dapat melarikan diri, menjadi pertanda mulai memadamnya perlawanan Ratu Zaleha. Kerjasama unik yang terjalin antara beliau dengan sang suami hilang seketika. Gusti Muhammad Arsyad ditangkap dan diasingkan ke *Buitenzorg* (sekarang Kota Bogor) pada tahun 1904. Penangkapan ini membuat Ratu Zaleha sangat sedih karena tidak

ada lagi partner dalam melawan *kumpune* Belanda. Meski begitu, beliau tidak mengendorkan semangat untuk terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Ratu Zaleha tetap melakukan perlawanan bersama ayahnya, ia menggempur basis-basis kependudukan *kumpeni* Belanda di Banjarmasin.

Perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Banjar mulai mencapai titik akhir, menyusul jatuhnya benteng Manawing yang merupakan basis pertahanan terakhir pejuang. Pada saat terjadi pertempuran di benteng tersebut, ayah Ratu Zaleha, Sultan Muhammad Seman gugur. Sebelum wafat, sang ayah Sultan Muhammad Seman sempat memberi cincin kesultanan kepada Ratu Zaleha, sehingga secara tidak langsung menjadikan beliau pewaris tahta dari Kesultanan Banjar. Setelah benteng Manawing jatuh, Ratu Zaleha bersama para pejuang yang lain bersembunyi ke Lahei untuk menghindari pengejaran pasukan Belanda. Kemudian melanjutkan pelarian ke Mia di tepi Sungai Teweh yang dianggap aman dari pengejaran serdadu *kumpeni* Belanda.

Kondisi alam yang sulit untuk dilalui tidak membuat pasukan Belanda menyerah untuk terus mengejar Ratu Zaleha dan pasukannya. Dengan bantuan para penghianat, pihak Belanda berhasil menuju perkampungan Mia. Terjadilah pertempuran antara serdadu Belanda dengan Ratu Zaleha dan pasukannya. Dengan pengetahuan tentang ilmu perang yang dipelajarinya dari ayah dan suku Dayak, pertempuran dapat dimenangkan oleh Ratu Zaleha meskipun bersusah payah, dikedua belah pihak tetap jatuh korban.

## **MENGAKHIRI PERJUANGAN YANG MULIA**

Pada suatu medan pertempuran yang terletak di lembah Barito, Ratu Zaleha dan pasukannya berhasil dikepung oleh serdadu Belanda. Agar beliau dan pasukannya tidak dapat melarikan diri, pasukan Belanda membakar hutan sekitar daerah itu. Di bawah desingan peluru dan kepungan api yang membara, Ratu Zaleha tetap bertahan dan melakukan perlawanan. Keadaan sudah sangat kritis, pihak *kumpeni* Belanda meminta agar beliau menyerah dengan iming akan diberi imbalan harta. Meski begitu dengan tegas Ratu Zaleha menolak dan terus melakukan perlawanan bersama sisa pasukan yang masih ada. Di tengah kecamuknya pertempuran, beliau tampil dari dalam sebuah rumah dengan cara



melompat dari jendela, berjalan ditumpukan mayat yang bergelimpangan. Serdadu Belanda terus menggempur beliau dan pasukannya dengan desingan peluru, Rambut beliau yang cukup panjang dan disanggul rapi putus terkena peluru. Sedang lengannya yang kiri<sup>1</sup> tertembus timah panas lainnya sehingga badannya berlumuran darah. Untuk sementara Ratu Zaleha dapat meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda dengan membawa seorang putera dari suaminya Gusti Muhammad Arsyad dengan isteri yang lain.

Ratu Zaleha berhasil menyelamatkan diri dari pengejaran pasukan Belanda dan bersembunyi di sebuah rumah penduduk, Muara Teweh. Tuan rumah memberi tawaran kepada beliau untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian yang kotor akibat pertempuran dengan pasukan Belanda. Setelah selesai mandi, tanpa sempat beristirahat, ternyata pasukan Belanda sudah berada di depan rumah. Karena beliau sudah mulai tua, fisiknya tidak mengizinkan lagi untuk terus berjuang dan bergerilya di hutan-hutan, serta dukungan dari penduduk terhadap perjuangannya juga sudah berkurang. Akhirnya Ratu Zaleha tidak dapat mengelak lagi, ia ditangkap bersama ibunya Nyai Salamah pada tahun 1906 dan diasingkan ke *Buitenzorg*, tempat dimana suaminya Gusti Muhammad Arsyad juga diasingkan.

Ratu Zaleha mendapat uang jaminan sebesar f125 perbulan sebagai tambahan untuk memelihara 7 orang anggota keluarganya terhitung sejak 1 Mei 1906. Sedangkan suami beliau Gusti Muhammad Arsyad mendapat f300. Tunjangan ini berdasarkan surat Sekretaris *Goebnememen* 25 Juli 1906 No. 1198 yang ditujukan kepada Ekslensi Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, dan Asisten Residen Bogor.

## **PENGAKHIRAN**

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, cita-cita luhur para pejuang untuk membebaskan tanah dan rakyat dari belenggu penjajahan. Dalam meraih hal tersebut, banyak pengorbanan yang dilakukan, satu diantaranya ialah bertempur langsung melawan penjajah. Sebagai seorang aristokrat,

---

<sup>1</sup> Sumber sejarah lainnya memaparkan bahwa yang terkena peluru pasukan Belanda ialah lengan kanan Ratu Zaleha. Kebenaran ini masih ditangguhkan, meski demikian yang pasti adalah lengan beliau terkena timah panas

pemimpin pejuang perempuan, serta istri yang tangguh, Ratu Zaleha ikut berjuang menggempur *kumpeni* Belanda agar terusir dari bumi Banjar.

Tak kenal menyerah, beliau memimpin perempuan Banjar dan Dayak membantu para pejuang laki-laki. Sifat kemandirian, religius, lembut, sopan, serta memiliki jiwa kepemimpinan merupakan sifat yang patut dicontoh. Ini menjadi penanda “hebatnya” seorang perempuan kelahiran Banjar. Ratu Zaleha menjelma dari seorang putri Sultan menjadi simbol pejuang perempuan yang namanya akan terkenang dalam sejarah. Sampai akhir hayatnya, beliau tetap teguh berjuang membela keadilan.

## **DAFTAR BACAAN**

- Barjie, Ahmad. 2013. *Tokoh Banjar dalam Sejarah: Antara Legenda dan Kisah Nyata*. Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Almuaraq.
- Hindun, Gusti. 2001. “Ratu Zaleha Penerus Perjuangan Pangeran Antasari Mengusir Penjajah di Kalimantan Selatan”, *Prosiding Seminar Sehari Mengenai Profil Ratu Zaleha*. Banjarmasin: Panitia Pelaksana.
- Ideham, M. Suriansyah dkk. 2013. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Nazimah, Syarifah. 2015. “Ratu Zaleha: Perjuangan Terakhir Masyarakat Banjar dalam Menantang Pemerintahan *Kumpeni* Belanda”, *Skripsi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Noor, Yusliani. 2015. “Sebuah Tinjauan Historis tentang Sosok Perempuan Pejuang Banjar”, dalam *Skripsi Syarifah Nazimah*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Saleh, M. Idwar. “Sejarah Lokal Kerajaan Banjarmasin dan Kebudayaan Sungainya”, *Buletin Kayuh Baimbai*, Nomor 1, Tahun 1, Februari 1991.
- Sjamsuddin, Helius. 2014. *Pegustian dan Tumenggung (Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tahun 1859-1906)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

# **MEREKA NASIONALIS, PATRIOTIS, SEKALIGUS PEMBERONTAK (Menyoroti Persoalan Para Pemimpin Laskar Darul Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia)**

**Anhar Gonggong**  
pspsejarah@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Bangsa kita dahulu adalah bangsa yang dijajah oleh bermacam-macam bangsa lain, termasuk Belanda dari awal abad ke-17 dan baru berakhir sekitar pertengahan abad ke-20. Tetapi pada abad ke-19 walau tidak lama, bangsa kita juga diperintah oleh bangsa Inggris, kemudian kembali lagi di bawah jajahan Kerajaan Belanda. Perlu dicatat bahwa awal kedatangan bangsa Belanda dengan VOC-nya adalah tujuan ekonomi, VOC itu adalah korporasi dagang. Dari korporasi dagang itu karena bangkrut kemudian digantikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda menjajah Indonesia sampai dengan 1945, sejak 17 Agustus; dilanjutkan dengan periode transisi 1945-1949, ketika Kerajaan Belanda memaksakan perang karena Kerajaan penjajah ini tidak bersedia mengakui (proklamasi) Kemerdekaan yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Penolakan pengakuan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda diwujudkannya dengan memaksakan perang kepada bangsa Indonesia. Perang itu disebut Perang mempertahankan kemerdekaan; sering juga disebut dengan revolusi kemerdekaan.

Pada periode perang mempertahankan kemerdekaan tampil tokoh-tokoh tertentu dengan posisi mereka masing-masing. Kartosuwiryo adalah salah seorang pejuang yang telah tampil sejak Pergerakan Nasional (PSII dan kemudian Masyumi) dan kemudian juga menjadi pemimpin di dalam mempertahankan kemerdekaan dalam periode 1945-1949. Sedang Daud Beureueh adalah seorang ulama pejuang dari daerah Aceh. Selanjutnya, Abdul

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Guru Besar Sejarah (Sejarawan) Universitas Indonesia.

Qahhar Mudzakkar adalah seorang pejuang dari Sulawesi Selatan dan Ibnu Hajar adalah seorang pejuang dari Kalimantan Selatan.

Keempat tokoh ini mempunyai perannya masing-masing di dalam periode mempertahankan kemerdekaan Republik, 1945-1949. Tetapi sesuai dengan situasi tuntutan dalam perang itu, maka ke empat tokoh ini, pemimpin-pemimpin militer dengan pangkatnya masing-masing. Qahar Mudzakkar berpangkat Letnan Kolonel, Ibnu Hajar berpangkat Letnan satu, dan Daud Beureueh berpangkat Mayor Jenderal Tituler. Tetapi setelah perang kemerdekaan selesai, maka terjadilah pelbagai peristiwa yang membawa mereka ke panggung, melibatkan mereka dengan perannya masing-masing.

Begitu penegakkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa negara Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) maka diharapkan kita akan mengalami kehidupan bersama sebagai bangsa merdeka, dengan tatanan yang baru. Tentang hal ini telah dinyatakan oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia (Muhammad Hatta) pada sidang penutupan KMB tanggal 2 November 1949.

“Pada saat yang bersejarah ini rakyat Indonesia akan merasa lega dalam hatinya. Hari ini dengan resmi dimaklumkan lenyapnya kekuasaan kolonial dari Indonesia, dan lahirnya susunan hukum baru yang berdasarkan Pancasila. Empat tahun lamanya Republik Indonesia memperjuangkan dasar ini sebagai pimpinan hidup bagi bangsa Indonesia, dan pada hari ini diresmikan tercapainya tujuan itu. Republik Indonesia Serikat akan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial”. Dengan ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia ingin hidup sebagai bangsa yang membela kemanusiaan, demokrasi, dan persaudaraan” (Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, h. 317).

Betapa “indah” gambaran kehendak yang dinyatakan oleh Hatta di atas. Tetapi situasi yang berkembang tidaklah seindah seperti isi pidato tersebut. Ternyata para pemimpin dan bangsa, rakyat Indonesia masih harus bergumul dengan serangkaian permasalahan yang dilahirkan oleh pelbagai peristiwa karena adanya perbedaan pandangan di dalam menghadapi situasi yang

berkembang setelah kesepakatan KMB dan seterusnya, bahkan sampai sekarang.

### **KERUMITAN PERSOALAN YANG BERKEMBANG**

Kesepakatan dari KMB ternyata justru melahirkan silang pendapat di antara para pemimpin dan rakyat Indonesia. Pangkalnya, karena ketentuan bahwa bentuk negara republik kita sesuai dengan "kesepakatan" KMB ialah federalistik, negara serikat Republik Indonesia Serikat (RIS). Tidak mudah menyelesaikan persoalan itu, karena ternyata ada dua pandangan dengan masing-masing pendukung yang berpegang akan kebenaran pendapatnya. Golongan yang setuju dengan kesepakatan KMB, bentuk negara RIS, mempunyai pendukung yang tidak sedikit. Di lain pihak, golongan yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tentu saja memiliki pula pendukung yang tidak sedikit pula.

Setelah konflik tentang bentuk negara berlangsung kurang lebih delapan bulan, maka akhirnya dicapai jalan penyelesaian, antara lain karena adanya Mosi Integrasi Muhammad Natsir di Parlemen; dan mosi ini didukung oleh partai lain, seperti Partai Katolik pimpinan Kasimo. Akhirnya pertentangan tentang bentuk negara diselesaikan dengan Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1950. Dengan demikian, perayaan Proklamasi 17 Agustus 1950 sudah dirayakan sebagai bentuk Kesatuan, NKRI.

Sebelum tahun 1950, ada persoalan yang cukup rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan, yaitu persoalan anggota TNI, persoalan militer. Sebagaimana diketahui, pembentukan TNI Republik Indonesia merupakan hal yang unik, khas dan berbeda dengan negara lain. Di dalam membela dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, tampil tokoh-tokoh tertentu di daerah-daerah dan membentuk "organisasi" (mungkin lebih tepat disebut "kelompok") ketentaraan dengan berusaha mendapatkan senjata-senjata, antara lain dari pasukan-pasukan Jepang yang memang tidak lagi memiliki kekuasaan administratif sejak kealahannya pada 15 Agustus 1945. Dengan adanya situasi yang demikian, maka organisasi militer di republik telah mengalami perubahan nama dan struktur dari BKR, TKR menjadi TRI untuk kemudian sampai pada nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 1947.

Tentang situasi organisasi ketentaraan negara republik kala itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta pada pidatonya pada tanggal 15 September 1947, menyatakan:

“Segala perubahan nama itu memberi gambaran tentang kemajuan organisasi dan perubahan karakter alat pertahanan Republik Indonesia. Tentara kita bukanlah tentara yang didirikan dengan susunan yang rapi dari atas, dengan opsir dan prajurit yang dipilih baik-baik, tetapi adalah tentara yang lahir dalam revolusi nasional. Tentara yang spontan timbul dari bawah, didorong oleh semangat patriot untuk membela negara yang baru merdeka” (Ibid, hal. 132).

Oleh karena adanya situasi pembentukan TNI seperti itu, maka di dalam tubuh organisasi TNI terdapat tiga unsur (kelompok) keanggotaan, yaitu bekas KNIL yang jumlahnya tidak besar, bekas PETA dan Heiho di beberapa daerah, dan kelompok lasykar yang dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kelompok lasykar ini ada yang dibentuk dengan latar belakang ideologi ideologi Islamis, ada juga berlatar nasionalis dan Marxis-Komunis. Untuk menyeimbangkan keadaan administrasi organisasi TNI, Wakil Presiden menghendaki dilakukannya perombakan untuk mengurangi keanggotaan organisasi TNI dengan jalan rasionalisasi. Tentu saja ide ini disepakati oleh para komandan dan pimpinan di dalam markas tantara. Namun tetap melahirkan keresahan di lingkungan organisasi kelaskaran. Demikianlah kerumitan yang harus dihadapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia.

## **PEMBERONTAKAN PASCA KEMERDEKAAN**

Sampai dengan tahun 1965, ada empat tokoh utama, yang dalam masa mempertahankan kemerdekaan telah tampil sebagai pemimpin di dalam menghadapi Belanda sampai Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Keempat tokoh pemimpin itu ialah Kartosuwiryo, Muhammad Daud Beureueh, Abdul Qahhar Muzakkar, dan Ibnu Hadjar. Karena sikapnya terhadap pemerintah negara Republik Indonesia, dari 1949 sampai tahun 1965, mereka disebut sebagai Pemberontak. Mereka berempat dianggap menentang kepada pemerintah negara yang dianggap sah secara konstitusional. Dalam

pengertian ini mereka yang dianggap pemberontak itu "hanya" menentang pemerintah negara, bukan hendak membubarkan negara atau membentuk negara baru. Bahkan dapat dikatakan –sesuai dengan posisi dan kapasitasnya masing-masing– mereka adalah pejuang mempertahankan bertegaknya NKRI di dalam periode kritis akibat keangkuhan kolonialis Belanda (1945-1949).

Tentu saja terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan yang menyebabkan pemerintah (pada waktu itu) menyebutnya sebagai pemberontak. Dalam penglihatan saya, salah satu faktor utama sehingga keempatnya melakukan gerakan perlawanan yang dianggap "menyimpang" dalam tindakan pemberontakan. Sebagai pejuang yang ikut "bertarung" mempertahankan kemerdekaan, tetapi kemudian keempatnya merasa "dicampakkan". Dengan demikian saya menduga sangat kuat bahwa keempat pejuang ini melakukan pemberontakan adalah karena faktor psikologi, faktor "kecewa dan frustrasi". Hal ini terjadi karena situasi yang dihadapinya baik secara individu maupun kelompok melahirkan hambatan terhadap tujuan yang hendak dicapainya. Faktor kecewa-frustrasi karena hambatan untuk mencapai tujuannya itu, melahirkan teori yang disebut deprivasi relatif. Teori ini bertolak dari perbandingan seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lainnya, kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli untuk digunakan di dalam pelbagai penelitian yang mereka lakukan, khususnya dalam masalah pemberontakan, baik yang bersifat politik maupun millenaristik (seperti yang dilakukan oleh Ted Robert Gurr, *Handbook of Political Conflict Theory and Research* (New York, The Press, 1980).

Deprivasi berkaitan dengan keadaan psikologi seseorang, yaitu perasaan. Di dalam situasi perasaan yang mungkin serba resah, si pelaku memberikan ukuran-ukuran tertentu di dalam membandingkan dirinya atau kelompoknya dengan orang atau kelompok lainnya. Dengan demikian deprivasi bukan sesuatu hal yang obyektif, tetapi perbedaan antara apa yang diharapkan. Dengan demikian, kita harus memandang harapan itu sebagai standar-standar, bukan sebagai ramalan-ramalan mengenai yang akan terwujud di hari esok.

Demikianlah pandangan saya tentang salah satu faktor yang menyebabkan keempat tokoh kita ini melakukan pemberontakan. Hal yang

perlu pula dicatat ialah mereka berempati menjadikan agama Islam sebagai ideologi, sebagai landasan untuk menegak-jalankan gerakan mereka. Persoalannya, mengapa agama Islam yang menjadi landasan ideologi gerakan mereka. Dari latar belakang pribadi mereka, terlihat adanya perbedaan-perbedaan tertentu di antara mereka. Walaupun beliau yang mendeklarasikan, memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki organisasi ketentaraan Tentara Islam Indonesia atau Darul Islam (DI/TII). Namun banyak peneliti beranggapan bahwa pengetahuan Islamnya bersifat "abangan". Karena itu, Tempo memberikan informasi bahwa:

"Menyimak profil Kartosuwiryo itu, tak aneh bila ahli politik Islam, Bachtiar Effendi, menilai dia sesungguhnya tak memiliki landasan ideologi yang kuat untuk mendirikan Negara Islam. Bachtiar dan beberapa ahli politik Islam lain-lebih merujuk pada kekecewaan Kartosuwiryo terhadap Perjanjian Renville yang dianggapnya merugikan kepentingan Islam, untuk memberontak dari "pemerintahan kafir" Soekarno" (Lihat "Seri Buku Tempo" Kartosoewirjo Mimpi Negara Islam, KPG-Tempo, Jakarta, 2011, h. 5).

Terlepas dari pandangan sebagai peneliti menganggap dangkalnya pengetahuan keislamannya Kartosuwiryo. Anggap saja beliau sudah mempunyai pemikiran tentang Negara Islam, sejak tahun 1940. Antara lain dikatakannya bahwa:

"Negara Karunia Allah itu adalah "Negara Islam Indonesia" atau dengan kata lain "ad-daulatul Islamiyah atau "darul Islam atau dengan singkatan yang sering dipakai orang "DI", selanjutnya hanya dipakai satu istilah resmi NEGARA ISLAM INDONESIA". (Lihat, Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Partriot Hingga Pemberontak, Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 127).

Itulah latar dari pemimpin utama, dan Proklamator Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Selanjutnya tentang Muhammad Daud Beureueh, beliau adalah seorang ulama pemimpin Aceh yang kharismatik.



“Karena adanya kharismanya itu, Beureueh dipercaya memimpin tentara Indonesia dalam melawan Belanda. Beureueh juga menjadi orang yang bisa menyatakan lasykar-lasykar perang di Aceh ketika mereka hendak digabungkan menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Itulah sebabnya, meski ia tak mengenal sekolah, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler” (“Seri Buku Tempo” Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan Yang Berontak”, KPG-Tempo, Jakarta, 2011, h. 8).

Daud Beureueh setelah “berhenti” melakukan perlawanan, maka ia bukan pemimpin pemberontak, tapi pengaruhnya tak menyusut banyak. Tempo memberikan informasi bahwa:

“Awal Mei 1978, ia bahkan diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah Orde Baru untuk mencegah kharismanya menggelorakan perlawanan rakyat Aceh. Di Jakarta, meski dipinjami kendaraan pribadi dan biaya hidupnya ditanggung pemerintah, Beureueh menderita. Kesehatannya merosot tajam. “Tak ada penyakit yang serius diidap Teungku Daud kecuali penyakit rindu kampung halaman, kata EL-Ibrahimi. Ia tutup usia di tanah Aceh pada 1987”. (Ibid, h. 9).

Sekarang tentang Abdul Qahhar Mudzakkar, pemimpin pemberontak dari Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari Kerajaan Luwu dari lingkungan warga “Towarani” setrata “pemberani”. Beliau karena persoalan adat, kemudian ke Solo Surakarta –dan memang ia bersekolah di Muallimin Muhammadiyah– dan dari sanalah nanti tampil sebagai aktivis pemimpin ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ia membangun pasukannya yang berasal dari Sulawesi dan termasuk dari Kalimantan; menjadi Komandan Pasukan “Seberang” dengan pangkat Letnan Kolonel. Karena berbagai kendala untuk menjadikan pasukannya masuk ke dalam lingkungan organisasi TNI untuk tingkat brigade atau resimen Hasanuddin, maka kemudian menciptakan organisasi pemberontakan dengan nama –sebagaimana juga dengan Daud Beureueh– Gerakan DI/TII yang bertujuan untuk mendirikan NII.

## **PENUTUP: MEMAKNAI PENGALAMAN HISTORIS**

Apa yang akan kita diskusikan melalui penyampaian dalam makalah ini, merupakan salah satu dari episode (perjalanan) sejarah bangsa Indonesia. Dibalik peristiwa itu, tentu terdapat makna yang dapat kita jadikan sebagai bahan berguna untuk hari depan kita untuk kekuatan gerak pembangunan dan persatuan kita dihari kini. Salah satu makna yang mungkin dapat diambil ialah konflik yang terjadi dengan pelbagai latar akan lebih menyadarkan kita untuk terus-menerus membangun pemahaman kita terhadap arti dan posisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pemahaman yang terus menerus ini, terutama harus dilakukan oleh generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap mahasiswa-mahasiswa tentu di bawah bimbingan para pengajar mampu memahami secara jelas dan jernih tentang peristiwa sejarah yang telah dilewati selama ini. Membangun pemahaman diri sebagai bangsa yang Pancasila, merupakan salah satu faktor terpenting untuk mempertahankan tegaknya NKRI.

## **DAFTAR BACAAN**

- Gonggong, Anhar. 2001. *Amandemen, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme Solusi untuk Masa Depan*. Jakarta: Media Pressindo.
- Gonggong, Anhar. 2002. *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan Antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Gonggong, Anhar. 2011. *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo.
- Hatta, Muhammad. 1981. *Kumpulan Pidato*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Tim Tempo. 2011. *Kartosoewijo: Mimpi Negara Islam*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tim Tempo. 2011. *Seri Buku TEMPO: Daud Beureueh (Pejuang Kemerdekaan yang Berontak)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

# HASSAN BASRY DAN IBNU HADJAR SERTA MITOS HARTA KARUN IBNU HADJAR

**Yusliani Noor**

yusli@ulm.ac.id

## PENDAHULUAN

Mengkaji tentang Ibnu Hadjar, tidak bisa dilepaskan dari tokoh Hassan Basry. Hassan Basry adalah seorang pejuang kemerdekaan (Oostindie, 2016: 98). Ibnu Hadjar adalah kepala pasukan pengawal Panglima ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, Hassan Basry. Ibnu Hadjar juga seorang pejuang kemerdekaan. Istilah yang dipakai para pejuang revolusi fisik Kalimantan Selatan pada saat itu "dimana ada Hassan Basry di situ ada Ibnu Hadjar". Ibnu Hadjar adalah pelindung dan penyelamat Hassan Basry dalam menghadapi berbagai serbuan pasukan NICA di medan gerilya Kalimantan Selatan.

Setelah pengakuan kemerdekaan. Kedua tokoh ini berpisah jalan. Hassan Basry diangkat sebagai Panglima Kowanda, sebelum disekolahkan ke Mesir. Sementara Ibnu Hadjar tidak diterima di tentara karena tidak bisa menulis dan membaca huruf latin. Ia hanya pandai menulis dan membaca aksara Arab Melayu. Ia dikirim ke Jawa untuk disekolahkan dengan beberapa pejuang lainnya. Namun sekolahnya sudah tutup. Ia merasa dibohongi belaka. Ia kembali ke Kalimantan Selatan melalui Kalimantan Timur. Ia banyak menerima keluhan kawan-kawan seperjuangannya yang merasa perlakuan tidak adil dari pemerintah Republik Indonesia saat itu. Ia pun terpanggil membela kawan-kawan seperjuangan dan rakyat Banjar-Dayak Bukit yang tertindas.

Dua tokoh pejuang republik telah bersimpang jalan. Tragedi sejarah menjadi fakta, bagaimana jalan hidup mereka mengalami benturan. Hassan Basry menjadi tokoh yang berada pada posisi membela kepentingan NKRI (pemerintah pusat), sementara Ibnu Hadjar menginginkan NKRI (pemerintah

---

\* Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kesejarahan, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

\*\* Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

pusat) adil terhadap rakyat yang memperjuangkan tegaknya kemerdekaan bangsa Indonesia di Kalimantan Selatan.

## **HASSAN BASRY**

Hassan Basry seorang pemuda dari Kandangan. Belajar di Pesantren Gontor Jawa Timur. Hassan Basry meninggalkan Surabaya pada pertengahan Oktober 1945. Ia membara-perintah dari Tentara Republik setempat untuk membentuk organisasi gerilya di Kalimantan. Ia tiba tanggal 30 Oktober di Kalimantan Selatan. Ketika ia tiba, Belanda melakukan 'pasifikasi', dengan menangkapi para pemuda. Para pemuda melarikan diri ke pegunungan. Begitu juga dengan Hassan Basry. Ia membentuk Lasykar Syaifullah bulan November 1945. Ia hendak ke Jawa, namun blokade laut oleh Belanda, mengharuskannya kembali ke Kandangan. Kawan-kawannya dalam Lasykar Syaifullah ditangkapi Belanda di Kandangan. Akhir 1946, orang-orang Kalimantan di Jawa, sekitar 1500 orang kembali ke Kalimantan.

Berbagai kelompok-kelompok pemuda di Kalimantan Selatan bergabung dalam organisasi kelayakaran, seperti; Banteng Borneo, Germeri, Gerpindom, Lasykar Hizbullah, MN 1001, dan lain-lain. Pada tanggal 18 November 1946, dibentuk Gerakan Rahasia ALRI Divisi IV. Pada hari itu juga dibentuk ALRI Divisi IV cabang Kalimantan. Hassan Basry ditunjuk sebagai pemimpin gerakan. Tahun 1947, semua organisasi kelayakaran dilebur ke dalam ALRI Divisi IV-A PK, yang dipimpin Hassan Basry.

Pemerintahan Militer Kalimantan Selatan Republik, diumumkan pada tanggal 17 Mei 1949, lebih seminggu setelah perjanjian Roem Royen, sebagai bentuk protes terhadap pengakuan Belanda terhadap Kalimantan. Selaku Gubernur Tentara, Hassan Basry mengukuhkan, berintegrasinya Kalimantan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Akhir 1948, ALRI Divisi IV (A) melakukan pemogokan. Bahkan pasca proklamasi 17 Mei 1949, ALRI Divisi IV (A) berhasil merongrong kewibawaan daerah otonom Banjar yang didalangi Belanda. ALRI Divisi IV (A) benar-benar pengejawantahan pemerintahan militer yang berpihak kepada rakyat. Karena mendapat simpati rakyat, ALRI Divisi IV (A), bahkan mendapatkan penghasilan pajak atas penjualan lateks, pasar, dan pajak pendapatan. Bahkan pegawai dan

pejabat terkemuka Daerah Otonom Banjar berhasil diculik. Sejak 30 Agustus 1949, pemogokan dilakukan seluruh pekerja, baik pada kantor swasta maupun pemerintah. Baru pertengahan Oktober pemogokan dihentikan. Pemerintahan otonom Belanda, lumpuh. Bulan September 1949, tanggal 3 dan 4, rakyat yang berpihak pada ALRI Divisi IV (A) mengungsi sekitar radius 3 Km dari pusat kota, yang jumlahnya mencapai 30.000 orang. Ketika rakyat telah menarik diri dari perkotaan, maka kota-kota di Marta-pura, Rantau, Kandangan, Barabai dan Amuntai diserang para gerilyawan ALRI Divisi IV (A) (Dijk, 1983: 213-215).

Belanda meminta pemerintah RI menengahi aksi ALRI Divisi IV (A). Kemudian me-ngajak perhentian permusuhan. Point-point penghentian tembak-menembak itu adalah sebagai berikut:

1. Serdadu KNIL dan KL Melucuti Senjata Gerilya.
2. Kapten Verdijk, Komandan Tentara NICA di Kandangan, berani memerintahkan agar MPK ALRI berkumpul di suatu tempat di Hulu Sungai.
3. NICA mendatangkan serdadu dari Jawa untuk melakukan keganasan<sup>2</sup> terhadap rakyat.
4. Mendatangkan bantuan militer dalam bentuk pesawat terbang dan kapal laut.
5. Mendatangkan Kapal Manukwari yang penuh dengan senjata untuk mengurung selu-ruh anggota ALRI dan memusnahkan mereka.

Akibat senjata dilucuti, memungkinkan pasukan NICA dengan mudah menembaki pasukan gerilya ALRI Divisi IV (A). Menurut keterangan Alidin, Ketua Markas Sektor 01/2 17 Rantau, banyak sekali pejuang yang gugur, bahkan hampir-hampir Sungai Tapin penuh dengan mayat dan darah. Penulis belum sempat mengkonfirmasi hal ini dengan tokoh lainnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh saksi mata di daerah lainnya, apakah keterangan Alidin mengenai pembantaian pejuang oleh NICA, juga terjadi di Kandangan, Barabai, Amuntai dan daerah lain di Kalimantan Selatan.

Pada akhir perjuangan, Hassan Basry ikut bergabung dengan Divisi Lambung Mangkurat di bawah TRI-AD. Ia menjabat Panglima Komando

Wilayah. Letkol Sukanda Bratamanggala melantik Hassan Basry sebagai Panglima Divisi Lambung Mangkurat pada 10 November 1949 (Yusliani Noor, 1989: 175. Lihat pula Yustian, 1972: 25). Karir dan biografi Hassan Basry pasca purna tugas dari TNI AD memang belum banyak diteliti, yang jelas, pangkatnya terakhir adalah Brigadir Jenderal. Ia memilih ikut Partai Persatuan Pembangunan, sehingga sangat berlawanan dengan trend politik ABRI yang berafiliasi dengan GOLKAR saat itu. Agaknya langkah politik Hassan Basry banyak terseok, dan mengalami fase "sunyi" dalam kesendirian, tanpa kawan seperjuangan yang mengelilinginya. Entah apa yang menyebabkan haluan politiknya saat itu mau bergabung dengan PPP, dan mengapa kawan-kawan seperjuangannya juga tidak banyak mendekatinya.

### **IBNU HADJAR**

Nama aslinya, Haderi. Lahir di Kandangan, April 1920. Konon, wataknya keras dan suka berkelahi sejak kanak-kanak, serta benar-benar jadi jagoan dalam setiap percek-cokan. Haderi menggunakan nama Ibnu Hadjar ketika berjuang untuk kemerdekaan melawan Belanda. Ia menjadi perwira dalam ALRI Divisi IV (A) dengan pangkat Letnan II. Memimpin satuan-satuan gerilya sekitar Kandangan (Dijk, 1983:229). Ia merupakan seorang Tuan Guru di kampungnya. Ia mengajarkan membaca Alqur'an, dan Kitab Parukunan. Sebagian orang-orang di kampungnya ikut menjadi pejuang, demi menegakkan kemerdekaan RI dari penjajahan NICA (1945-1949) karena melihat sosoknya sebagai Tuan Guru. Mereka sangat menghormati Ibnu Hadjar.

Dengan keberaniannya, Ibnu Hadjar mulai menanjak sejak dibentuknya Pasukan Jibaku (berani mati) ALRI Divisi IV (A). Waktu itu, dalam tahun 1948 wilayah teritorial Daerah Hulu Sungai Selatan di bawah pimpinan Ma'rufi sebagai Komandan Pasukan Jibaku dan Ibnu Hadjar sebagai Wakilnya. Kemudian Ma'rufi dipindahkan ke bagian urusan teritorial maka Ibnu Hadjar sebagai Komandan Pasukan Jibaku dan Samideri Dumam sebagai Wakilnya, dan dibantu oleh Andi Tajang sebagai Pembantu Khusus (Basry, tt, th).

Pada 15 Januari 1949, rapat Markas Pimpinan Komando ALRI Divisi IV (A) di Ilung memutuskan membentuk teritorial markas daerah dan resimen.

Resimen Daerah Selatan dengan Komandannya Mu'alim, Wakilnya Ibnu Hadjar (Gafuri, 1984: 94-95).

Dalam pertemuan Ambarawa (Telaga Langsat-Kandangan), yang membahas pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara, hadir diantaranya, H. Aberanie Sulaiman, Budhigawis, P. Arya, Gusti Aman, Hasnan Basuki dan Romansi. Perundingan di kota Ambarawa ini dikawal ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar. Dalam setiap peristiwa penting dalam kancah perang gerilya Ibnu Hadjar selalu setia mengawal Hassan Basry. Rapat ini pada tanggal 15 Mei 1949 berhasil merumuskan struktur pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan (Gafuri, 1984: 98). Ketika terbentuk pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A), dibentuklah Personalia Staf Departemen Pertahanan dan Keamanan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, maka Resimen dan Pasukan II wilayah tengah ditunjuk Ibnu Hadjar alias Haderi (Gafuri, 1984:80). Ia juga ditunjuk sebagai Pasukan Pengawal (Tim Penyusun, 1990: 224).

Ibnu Hadjar sangat memahami kedudukan dan posisi dirinya yang lebih banyak mengawal Hassan Basry. Tujuannya, agar keselamatan Hassan Basry selalu terjamin, mengingat kedudukan Hassan Basry sangat penting bagi semangat perjuangan menegakan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Hassan Basry adalah inspirator dan operator gerakan revolusi fisik di Kalimantan Selatan.

Revolusi fisik di Kalimantan Selatan di akhiri dengan peleburan ALRI Divisi IV (A) ke dalam Divisi Lambung Mangkurat. Pada tanggal 1 November 1949, ALRI Divisi IV (A), diganti menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Dari Angkatan Laut menjadi Angkatan Darat. Hassan Basry sebagai panglima Divisi itu. Selama masa konsolidasi 2 September 1949 – 10 November 1949, masih dihadapi berbagai kesulitan, antara lain:

1. Pemanggilan para pejuang gerilya dari gunung dan hutan yang belum mengetahui adanya perhentian permusuhan dari pihak Belanda, sehingga belum bersedia turun ke kota.
2. Sebagian para pejuang yang telah mengabdikan kepada kemerdekaan mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan bekas

musuhnya, sehingga enggan meneruskan atau mengikuti pelantikan menjadi tentara.

3. Merasa bahwa perjuangan menegakkan kemerdekaan telah selesai, sudah menang, sehingga ingin kembali ke masyarakat biasa dengan tidak mengingatkan diri sebagai tentara.
4. Walaupun Divisi Lambung Mangkurat telah disahkan, namun masih ada kesatuan yang belum mengetahui adanya perdamaian gencatan senjata, dan belum sempat dihubungi (Kotabaru dan Pulau Laut) untuk itu diadakan satu tim penjemputan pejuang dari hutan atau gunung.
5. Merasa kurang mampu karena fisik sakit, keperluan pribadi (orang tua, anak isteri, penghidupan dan lain-lain) serta merasa kurang berpendidikan (Kodam X/Lam, 1982: 215).

Persoalan penggabungan ALRI Divisi IV (A) ke dalam Divisi Lambung Mangkurat menyisakan masalah. Ibnu Hadjar yang tidak pandai membaca huruf latin, terpaksa harus diturunkan pangkatnya bersama dengan ratusan orang lainnya. Mereka harus disekolah-kan ke Jawa. Ternyata sekolah yang dijanjikan itu hanya isapan jempol belaka. Ketika mereka tiba di Jawa, sekolah itu sudah tutup. Mereka kemudian pulang ke Kalimantan. Pemerintah pusat saat itu tidak memperhatikan nasib para pejuang gerilya ini. Termasuk diantaranya, Ibnu Hadjar sendiri.

Ada 4 faktor yang menyebabkan Ibnu Hadjar membangun kekuatan untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat. Pertama; cara menangani demobilisasi bekas pejuang gerilya di Kalimantan. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Mereka dianggap remeh. Seakan perjuangan mereka sangat tidak berarti, dan lain-lain. Kedua, perlakuan Pemerintah dan Tentara Republik terhadap rakyat pedesaan di daerah ini. Awalnya, kira-kira 16.000 gerilyawan masuk tentara, setelah ujian kesehatan dan pendidikan, Maret 1950 tersisa 6000. Sebab keluarnya, karena tunjangan hanya Rp.3,- sehari. Gerilyawan yang dilepas diberi pesangon Rp.50,-, sebagian demobilisasi, dan sebagian tidak diakui sebagai veteran. Banyak pasukan yang desersi, termasuk di Martapura, Rantau, Kandangan dan Banjarmasin (Dijk, 1983:229).



Ketiga, ternyata sebagian besar petinggi militer yang datang ke Kalimantan Selatan adalah bekas Tentara KNIL (Koninklijke Nederlands-Indisch Leger). Sebagian besar pasukan KNIL dari Jawa dalam masa revolusi fisik adalah musuh gerilyawan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Saat dalam test kesehatan jasmani dan test baca tulis, justru musuh mereka dahulu yang menjadi penentu kelulusan test. Bahkan sebagian besar bekas KNIL itu menjadi komandan mereka. Keempat, pasukan pejuang yang terkena demobilisasi di Kalimantan berbeda perlakuannya dengan pasukan pejuang yang terkena demobilisasi di Jawa. Maksudnya, yang di Kalimantan tidak diperlakukan secara adil sebagaimana pasukan pejuang di Jawa.

Menurut M. Idwar Saleh (1988) secara sistematis ALRI DIVISI IV dan admi-nistrasinya dihancurkan oleh tokoh-tokoh kota Banjarmasin, pemimpin-pemimpin politik serta penganut ekonomi liberal, bahkan beberapa pejuang daerah de facto memprotes pengakuan ALRI DIVISI IV oleh RI, karena bertentangan dengan perintah pada saat pembubaran ALRI Divisi IV Jawa dan dihapuskannya Gubernur Kalimantan. Sebagai langkah pertama penghancuran ini, ALRI Divisi IV diubah menjadi Divisi Lambung Mang-kurat.

Menurut M. Idwar Saleh (1988), penghancuran lanjutan atas ALRI Divisi IV (A) sebagai berikut: pengalih-tugasan pimpinan, penangkapan langsung/dakwaan tertentu, pemindahan tugas ke luar daerah Kalimantan Selatan, baik dengan dalih sekolah/mengikuti kursus lanjutan, memimpin kesatuan lain, maupun menumpas pemberontakan di daerah lain, intimidasi agar yang bersangkutan meninggalkan kekuatan secara sukarela atau terpaksa, pen-CTN-an (mengubah jadi anggota Corp Tjadangan Nasional), pengadudombaan antara sesama warga ALRI Divisi IV (A), dan penghilangan arsip dan dokumen perjuangan oleh pihak tertentu. Istilah Dijk (1983: 222) Jakarta melaksanakan kekuasaan.

Ibnu Hadjar mengambil jalannya sendiri. Ia memilih memperjuangkan keadilan bagi kawan-kawan seperjuangan yang tertindas. Ia membentuk gerakan KRlyT (Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas). Ia tak mengira harus berhadapan dengan Hassan Basry yang dibelanya ketika bersama-sama dalam ALRI Divisi IV (A). Ia bersimpang jalan dengan Hasan Basry.

Untuk mengatasi kekacauan dari gerakan Ibnu Hadjar ini, ditunjuklah Hassan Basry, sebagai Komandan. Pada 20 September 1950 Hassan Basry disertai tugas sebagai Pimpinan Komando Penyelesaian Wilayah Hulu Sungai. Bulan berikutnya diberi Bantuan Militer dan satuan-satuan Tentara Republik. Karena jalan buntu, maka Hassan Basry melakukan tindakan militer terhadap gerilyawan, anak buah Ibnu Hadjar. Hassan Basry mengumumkan penyelesaian jalan damai dihentikan, maka Tentara dan Polisi mulai melakukan pembersihan terhadap gerilyawan yang menuntut keadilan.

Ironis memang. Pedih memang. Sang Komandan harus berhadapan dengan anak buahnya sendiri. Juga, harus menumpas anak buahnya sendiri, yang "sarantang-saruntung" dengannya saat perjuangan melawan NICA-Belanda. Para gerilyawan meminta keadilan, sementara Hassan Basry terjebak dalam tugas. Hassan Basry mengatasi situasi perlawanan dan tuntutan keadilan dari kelompok Ibnu Hadjar dengan cara kekerasan dianggap gagal, sehingga 11 November 1950, Komando ini dibubarkan. Hassan Basry menyerahkan pasukan Republik kepada Brigade F, yang diambil alih oleh Mayor Sitompul.

Hassan Basry dianggap masih memiliki kharisma yang tinggi di kalangan para gerilyawan. Kementerian Pertahanan memberikan beasiswa kepadanya, dengan tujuan memisahkannya dengan kelompok pejuang di Kalimantan Selatan. Hassan Basry bertolak ke Mesir dari Jakarta, Februari 1951. Ia berada di Mesir sampai tahun 1955. Keberangkatan Hassan Basry ini menimbulkan semakin ketidakpercayaan kelompok gerilyawan kepada penguasa militer. Mereka menganggap, penguasa militer menggerogoti penguasa bekas ALRI Divisi IV (A), dengan menceraiberaikan anggotanya. Persoalan ini, diperkuat dengan kenyataan penempatan bekas pejuang berada di bagian bawah. Menurut Dijk, akibat dari kebijakan tersebut, menimbulkan "gerakan Anti-Jawa" (Dijk, 1983:233). Gerakan ini sempat memiliki hubungan yang samar dengan Tentara Lawong pimpinan Christian Simbar di kawasan Buntok. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni mempertahankan kepentingan lokal terhadap orang-orang luar yang bermusuhan (Klinken, 2011:178).

Ibnu Hadjar membulatkan pikirannya untuk masuk Negara Islam pada akhir tahun 1954, setelah Kartosuwiryo menawarkan kepadanya sebuah kursi

menteri negara. Ibnu Hadjar diangkat sebagai Panglima TII untuk Kalimantan (Dijk, 1983: 248). Ia menama-kan dirinya sebagai "Ulil Amri" dari Kerajaan Islam. Markas besarnya diberi nama Istana Islam Merdeka atau Istana Agama Islam Agung (Dijk, 1983: 248). Ibnu Hadjar semakin mengokohkan dirinya sebagai 'Penguasa' dalam naungan panji-panji Kerajaan Islam. Kharismanya semakin mengakar di kalangan gerilyawan dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan. Ia menjadi tokoh legendaris.

Catatan pentingnya; Ibnu Hadjar dengan gerakannya tidak pernah kalah dan tidak pernah menyerah karena kalah. Tahun 1955, sekali lagi, setelah datang dari Mesir, Hassan Basry melakukan gerakan dari mulut ke mulut, bahwa bila Ibnu Hajar dan kawan-kawan menyerah, ia akan diperlakukan dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Ia dibujuk untuk menyerah. Ia dijanjikan diberi pengampunan. Ia berharap dapat ikut memimpin pasukan, dengan anak buahnya 14.000 orang untuk mengabdikan kepada Republik, yakni ikut serta mengganyang Malaysia. Ia dijanjikan naik Haji ke Mekkah. Janji tinggal janji. Setelah dibujuk dan ia keluar dari Istana-nya di dalam hutan rimba, bukan pengampunan yang didapatkannya. Bukan pula keadilan yang diperolehnya. Ia telah dibohongi dan dikhianati untuk kesekian kalinya.

Awal September 1963 Ibnu Hadjar ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diadili ke Pengadilan Militer. Pengadilan militer menghukumnya sebagai deserter. Berpakaian lengkap, Ibnu Hadjar menghadapi persidangan dengan gagah sebagai Letnan II (lihat Dijk, 1983: 205-254).

Haderi yang lugu, namun pemberani, tak pernah menyerah dalam setiap pertempuran. Ia harus menghadapi tipuan petinggi, yang berjanji menaikkan statusnya sebagai haji. Ketika ia keluar dari pedalaman. Ia disambut bagai pahlawan. Lebih dari 20 ekor kerbau dipotong. Ia dikagumi anak buahnya yang rasa keadilannya diayomi oleh sang letnan. Kedatangannya dari dalam hutan disambut dengan meriah. Bagaikan seorang Raja. Namun, tragisnya. Ia dikhianati oleh "Tangan Tak Nampak". Tapi, Ibnu Hadjar pasti tahu siapa dalang di balik semua ini.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh. Ibnu Hadjar dihukum dalam kamar tahanan bawah tanah. Fisiknya lemah karena tidak pernah mendapatkan siraman cahaya matahari. Wajahnya pucat dan layu. Saat akhir

hayatnya hanya seorang kerabat dekatnya yang membopong tubuhnya yang lunglai. Ia menikmati “sunyi” dan kesepian sampai akhir hayatnya. Hingga kuburnya pun tidak ada yang tahu pasti. Namun, namanya melegenda dalam 2 persepsi; sang pahlawan dan sang pemberontak. Tapi pemberontakannya demi membela keadilan, demi anak buahnya. Ia setia kepada anak buahnya. Ia selalu ingin setia kepada Republik. Organisasinya sendiri bernama Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas. Sebagai pejuang Republik, Ibnu Hadjar tetap menunjukkan rasa ke-Indonesia-annya. Perjuangannya melawan ketidakadilan.

### **HARTA KARUN IBNU HADJAR**

Mengapa Ibnu Hadjar bertahan lama dalam perlawanan kepada ketidakadilan pemerintah, yakni sejak tahun 1950-1963. Kabarnya, ia memiliki kerajaan sendiri di sebuah gunung, yang sulit dijangkau. Ia menjadi raja bagi Suku Bukit yang melindunginya. Ia juga merasa bagian dari Suku Bukit, karena itu ia pun melindungi Suku Bukit. Kesaktian Ibnu Hadjar lebih hebat lagi, ketika ia mendapat ilmu dari tetua-tetua Suku Bukit. Ia tidak bisa ditangkap, kecuali ia sendiri yang keluar dan menyerahkan dirinya. Berbagai kesaksian polisi yang ditugaskan menangkap Ibnu Hadjar membenarkan kisah ini. Misalnya, Polisi Umar yang ditugaskan di Barabai, menyaksikan kehebatan ilmu gaibnya Ibnu Hadjar yang selalu menghilang saat hendak ditangkap. Menurutnya, Ibnu Hadjar juga kebal peluru. Lebih dari itu, Umar merasa segan dengan Ibnu Hadjar yang begitu setia dengan Hassan Basry dan begitu ikhlas memperjuangkan nasib kawan-kawannya dalam menuntut keadilan bagi pejuang di Kalimantan Selatan.

Di kerajaannya, Ibnu Hadjar menyimpan berbagai benda pusaka dan harta karun, baik emas dan batuan permata. Menurut Dijk, Ibnu Hadjar telah mengumpulkan emas dan intan gosokan dan intan mentah dengan jumlah nilai Rp. 5.000.000,- untuk harga waktu itu (Dijk, 1983: 249-250). Harga intan mentah 1 karat tahun 1953 sebesar Rp. 6.000,- . Saat ini Oktober 2017, harga 1 karat intan putih sebesar Rp. 15.000.000,-. Kenaikan harga sekitar 10.000%. Maka nilai harta Ibnu Hadjar itu jika dikonversi pada nilai Rupiah berdasarkan harga intan sekarang, sekitar 50 Milyar Rupiah. Kalau ada intan yang ukuran karatnya diatas 30 karat, maka nilainya lebih berubah secara fantastis. Intan warna pink sebesar

36 karat yang telah dicutting, harganya mencapai 200 Milyar Rupiah. Berdasarkan patokan harga Hongkong Oktober 2017. Hingga sampai saat ini, tidak seorang pun mengetahui tempat harta karun Ibnu Hadjar. Harta-harta ini diperoleh dari anak buahnya yang setia, dan mereka mengumpulkan dari para pedagang, dan golongan hartawan serta bangsawan yang mereka lindungi keamanannya. Dalam versi Dijk, sebagian lagi, harta itu diperoleh dari hasil rampasan dan pajak (Dijk, 1983: 250). Dimanakah istana kerajaan Ibnu Hadjar itu? Dimana serta berapa banyak harta karunnya? Kepada siapa Ibnu Hadjar mempercayakan harta itu? Tidak ada yang tahu selain ia dan anak buahnya.

## **PENUTUP**

Ibnu Hadjar adalah pejuang kemerdekaan era revolusi fisik di Kalimantan Selatan 1945-1949. Ibnu Hadjar adalah pejuang keadilan bagi rekan-rekan seperjuangannya yang dilecehkan oleh utusan pusat (1950-1963). Ia tampil untuk mengingatkan Pemerintah Pusat tentang jati diri orang Banjar dan Dayak yang telah banyak berjuang membela tanah banyu Banjar dari upaya kolonialisme NICA-Belanda. Ibnu Hadjar hanya meminta penghargaan yang layak bagi rekan-rekan seperjuangannya. Usulan-usulannya selalu dimentah-kan oleh Pemerintah Pusat. Bukan kompromi yang didapat tapi malahan tekanan kuat dari Pusat. Mereka dianggap sebagai gerombolan pemberontak yang tidak patuh pada kemauan Pusat. Ia harus berhadapan dengan Panglimanya sendiri, yakni Hassan Basry. Namun Hassan Basry sendiri gagal dalam menumpas gerakan Ibnu Hadjar. Ibnu Hadjar tak pernah kalah. Ia hanya kalah karena janji ampunan dari pemerintah, dan janji dinaikkan Haji. Bagi Ibnu Hadjar yang semula sebagai Tuan Guru di kampungnya, diberi janji naik Haji merupakan impian utamanya. Impian kebanyakan orang Banjar. Namun, ia belum kesampaian naik Haji. Ia justru dihukum di penjara bawah tanah.

Ibnu Hadjar merupakan sosok yang tampil beda dengan orang Banjar kebanyakan. Ia berani beda dengan kekuasaan kalau penguasa tidak sejalan dengan tujuan cita-cita kemerdekaan. Ia rela mengorbankan tenaganya demi tegaknya keadilan bagi rakan-rekan seperjuangannya. Ia berani menyuarakan ketidak-adilan pemerintah. Meskipun pada akhirnya, suaranya lenyap di telan

kabut. Di mata rekan-rekannya yang setia kepadanya, ia tetap seorang Pahlawan. Ia tetap hidup dalam kenangan sejarah. Ia rela mati berkalang tanah, asalkan keadilan ditegakkan. Ia seorang pejuang Republik. Ia seorang Raja di kalangan rakyatnya. Ia Raja di hutan rimba gerilya. Ia adalah anak bangsa Indonesia. Ke-Indonesia-an yang berkeadilan dan berkesejahteraan merupakan tujuan segala perjuangannya.

## **DAFTAR BACAAN**

- Basry, Hassan. Tanpa Tahun. Kisah Gerilya Kalimantan Jilid II. Naskah ketik.
- Dijk, van. 1983. Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Grafiti Pers.
- Gafuri, Ahmad. 1984. Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949). Banjarmasin: Deppen RI
- Kodam X/Lambung Mangkurat. 1982. Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Menegakkan Kemerdekaan RI 1945-1949. Banjarmasin: Dokjarah Dam X/Lam.
- Noor, Yusliani. 1989. "Peranan Sektor 01/2 17 Markas Daerah Perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dalam Perjuangan Gerilya di Tapin Kalimantan Selatan (1945-1949)", Skripsi. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNLAM.
- Oostindie, Gert. 2016. Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 Kesaksian Perang Pada Sejarah yang Salah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV.
- Saleh, M. Idwar. 1988. "ALRI Divisi IV (A), Suatu Lukisan Tentang Pertumbuhan, Perkembangan dan Kemundurannya", Laporan Penelitian. Banjarmasin: FKIP UNLAM.
- Tim Penyusun. 1990. Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949). Banjarmasin: Pemprop Dati I Kalimantan Selatan.
- van Klinken, Gerry. 2011. "Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Propinsi Dayak di Kalimantan", dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (Ed.). Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV.
- Yustian, Dhany. 1972. "Sejarah Kodam X Lambung Mangkurat", Skripsi. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNLAM.

# PENYUNTING



**Haiiryadi** merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, Banjarmasin mulai tahun 1985 sampai sekarang. Lahir pada 11 Juni 1956 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyunting menempuh pendidikan Strata 1 di almamater yang sekarang menjadi tempat pengabdianya. Sedang jenjang Strata 2 ditempuh di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Sedari dulu ia sangat tertarik dengan unsur sejarah dan budaya, utamanya kajian tentang “Urang-Urang Bukit” yang berdiam di kaki pegunungan Meratus, membuatnya berinisiatif untuk membawa mahasiswa berkunjung dan bersama-sama mengkaji kehidupan masyarakat Meratus tersebut. Tujuannya untuk mengenalkan kepada anak didik kekayaan budaya daerahnya yang perlu dijaga dan dilestarikan melalui memori *maintifact*. Penyunting merasa bahwa kontribusi seperti inilah yang dapat menjaga keutuhan dan kemurnian budaya daerah agar tidak hilang seiring zaman.

Selain sebagai penggiat sejarah dan budaya, penyunting juga aktif dalam melakukan penelitian kesejarahan. Yang terbaru ialah (1) Dinamika Kepemimpinan Masyarakat Dayak di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 1980-2012; (2) Eksplorasi Buruh Tambang *Oranje Nassau* oleh Belanda di Karesidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1848-1884. Pengabdian yang baru saja dilaksanakan ialah Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Sejarah Berwawasan Nasionalisme Bagi Siswa SMA di Kota Banjarmasin. Email: [tanganyangindah@gmail.com](mailto:tanganyangindah@gmail.com); Telepon: 0811-500-563.



**Helmi Akmal** merupakan alumni S1 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM tahun 2018. Anak kedua dari pasangan Nurani (alm.) dan Maskunah yang lahir di Karatau, 28 Agustus 1995. Saat ini menempuh pendidikan jenjang S2 di Program Magister Pendidikan IPS, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Dahulu selama menjadi mahasiswa S1, penyunting aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan baik akademik atau non akademik, seperti Dewan Kerja Ranting Pramuka Kecamatan Batu Benawa Kab. HST (2010-2014), Himpunan Mahasiswa Sejarah (Himase) tahun 2016, serta berbagai kepanitiaan seminar baik nasional maupun internasional, kuliah umum dan kegiatan ilmiah lainnya.

Karya yang pernah dipublikasikan antara lain (1) Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan pada Siswa SMA, *Historia: Jurnal Progam Studi Pendidikan Sejarah UM Metro*, 2018; (2) Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone, Naskah *International Academic Discourse Education in Malaysia and Indonesia: Communalities and Differences in Teaching and Learning*, 2019; dan (3) Buku berjudul *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi: Konsep Dasar, Prinsip Aplikatif, dan Perancangannya*, 2019. Email: [helmiakmal47@ulm.ac.id](mailto:helmiakmal47@ulm.ac.id); Telepon: 0812-4006-1018.



Secara historis bangsa kita dan maritimnya tidak terpisah satu sama lain. Nenek moyang kita dikenal sebagai seorang “pelaut”, artinya hidup mereka selalu terhubung dengan laut. Begitulah yang kita kenang sampai hari ini, hanya kata tanpa tahu akan makna. Padahal semestinya memberi inspirasi bagi bangsa kita sekarang untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tak dapat dipungkiri, kejayaan maritim dahulu menggema dan membumi seantero jagat raya. Wilayah-wilayah di Nusantara (Indonesia) menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dunia, kala itu “selangit” harganya bahkan mengalahkan besaran harga emas. Benar adanya jika dikatakan dahulu Indonesia, sebut saja Nusantara, menjadi jalur transportasi laut perdagangan dunia. Melihat dari sisi geografis, letak Indonesia begitu strategis, diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada diantara benua Asia dan benua Australia. Cukup menegaskan jika negara kita memiliki potensi bersaing dengan mengunggulkan bidang kelautan.

Semangat kejayaan maritim nenek moyang seyogyanya dapat kita warisi dalam rangka membangun Indonesia, mulai dari wilayah terluar yakni pesisir laut. Semangat tersebut dapat dipupuk dengan belajar sejarah. Sejarah bukan sekadar masa lampau, lebih dari itu, sejarah memberikan kita pelajaran “makna” hidup untuk menjadi bagian kemajuan bangsa di masa depan. Keberadaan buku ini sangat mendukung bagi pembelajar untuk memahami kondisi maritim masa lampau, bagaimana masyarakat membangun sektor kelautan, menapaki setiap anak tangga menuju kejayaan. Melalui buku yang digagas oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, para penulis mengupas dengan lugas dan tegas sejarah maritim Indonesia, utamanya Kalimantan Selatan, sesuai bidang kajiannya masing-masing.

**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.**

Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Budaya maritim yang dirintis oleh Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi ‘pemantik’ semangat bahari masyarakat. Renungan, dimasa lampau pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Nusantara berkembang sangat pesat hingga berhasil menjadi salah satu tempat paling ramai di kawasan Asia. Para saudagar, pelancong, bahkan penjelajah Eropa datang ke Nusantara baik sekadar menjajakan dagangan maupun bermaksud membentuk koloni. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di daerah-daerah Nusantara, masa Hindu-Budha sampai Islam, menjadikan pesisir sebagai basis kekuatan. Mendirikan pusat militer yang bahkan pada masa revolusi fisik Indonesia (1945-1949) tetap digunakan sebagai ‘jalan’ memobilisasi pejuang ke daerah-daerah untuk menggempur penjajah. Ini tanda bahwa laut begitu penting. Meskipun demikian, bak uap air yang hilang ditelan udara. Memoar akan kejayaan maritim kita tak terdengar lagi. Segalanya telah dialihkan ke jalur darat dan udara. Keromantisan masa lalu akan jayanya maritim tidak dielukan, membuat generasi penerus kurang mengenal seluk-beluk kemaritiman. Padahal, walaupun waktu terus berubah, laut akan tetap menjadi laut yang menyimpan kekayaan alam melimpah, perlu dimanfaatkan juga dijaga, kita bangun kembali semangat maritim. Hadirnya buku ini diharapkan mampu menjadi ‘vitamin’ bagi masyarakat dalam mengenal kembali maritim utamanya kedaerahan di Indonesia.

**Drs. Hairiyadi, M.Hum.**

Ketua Tim Penyunting

